

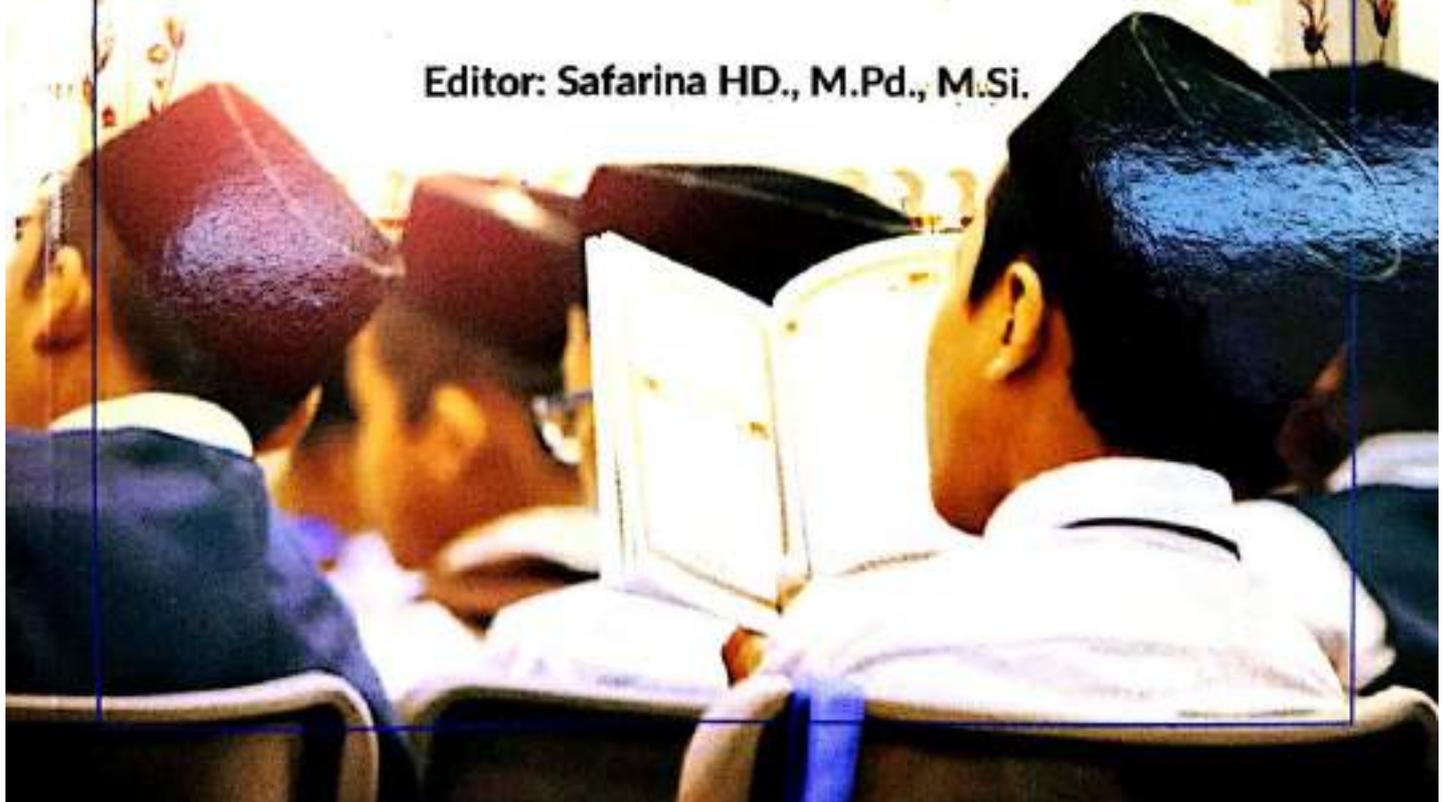


Prof. Dr. Abdullah Idi, M.Ed.

**Pendidikan**  
*Islam*  
**Multikultural**

**Konsep, Karakteristik & Landasan  
Kurikulum PAI Berbasis Multikultural**

**Editor: Safarina HD., M.Pd., M.Si.**



Penelitian

# Islam Multicultural

Journal of Islamic Studies  
Volume 10 No. 1 2023

Pendidikan

# Islam Multikultural

Konsep, Karakteristik & Landasan  
Keberagaman F&A Berbasis Multikultural

Pendidikan

# Islam Multikultural

Konsep, Karakteristik & Landasan  
Kurikulum PAI Berbasis Multikultural

Prof. Dr. Abdullah Idi, M.Ed.

Editor: Safarina HD., M.Pd., M.Si



RAJAWALI PERS  
Divisi Buku Perguruan Tinggi  
PT RajaGrafindo Persada  
DEPOK

*Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)*

Abdullah Idi

Pendidikan Islam Multikultural

Konsep, Karakteristik, dan Landasan Kurikulum PAI Berbasis Multikultural/Abdullah Idi

—Ed. 1—Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2021.

xii, 236 hlm. 23 cm

Bibliografi: hlm. 211

ISBN 978-623-231-888-5

Hak cipta 2021, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

**2021.3062 RAJ**

**Prof. Dr. Abdullah Idi, M.Ed.**

**PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURAL**

**Konsep, Karakteristik, dan Landasan Kurikulum PAI Berbasis Multikultural**

Cetakan ke-1, Juli 2021

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Editor : Safarina HD., M.Pd., M.Si.

Copy Editor : Shara Nurachma

Setter : Jaenudin

Desain Cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

**PT RAJAGRAFINDO PERSADA**

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Telepon : (021) 84311162

E-mail : [rajapers@rajagrafindo.co.id](mailto:rajapers@rajagrafindo.co.id) <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16956 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. Bandung-40243, J. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. Yogyakarta-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. Surabaya-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. Palembang-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. Pekanbaru-28294, Perum De' Dianjira Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. Medan-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. Makassar-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. Banjarmasin-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. Bali, Jl. Imam Bonjol Gg 100/VNo. 2, Denpasar Telp. (0361) 8507995. Bandar Lampung-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.



## ABSTRAK

Naskah buku ini, berawal dari laporan hasil penelitian (2019), yang dibiayai LP2M UIN Raden Fatah Palembang, yang merupakan penelitian untuk publikasi buku dasar/referensi. Judul penelitian atau penulisan buku ini adalah *Pendidikan Islam Multikultural: Konsep, Karakteristik, dan Landasan Kurikulum*. Kajian utama buku ini: Karakteristik Pendidikan Multikultural; Islam dan Konsep Pendidikan Multikultural; dan Landasan Kurikulum Pendidikan Islam Multikultural. Metode yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik *review literatures* terhadap sejumlah buku, artikel jurnal, koran, dokumen, hasil penelitian, dan sumber terkait lainnya.

Secara garis besar, isi buku ini: *Pertama* pendidikan multikultural sebagai suatu proses pendidikan tentang cara hidup menghormati, tulus, toleransi terhadap keragaman budaya yang hidup masyarakat plural-majemuk sehingga peserta didik nantinya memiliki kekenyalan dan kelenturan mental dalam menyikapi kemungkinan adanya potensi-potensi konflik sosial di masyarakat. *Kedua*, ajaran Islam sangat berhubungan erat dengan pengembangan pendidikan multikultural, seperti dapat dilihat dalam ayat Al-Qur'an dan Hadis tentang



multikultural. Dalam Al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 13, misalnya, Allah Swt. menjelaskan tentang manusia diciptakan dalam kondisi berbeda jenis kelamin dan berbeda suku bangsa. Ketiga, beberapa landasan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Agama Islam (PAI) berbasis multikultural, yakni landasan: Teologis (landasan kurikulum bersumber dari nilai-nilai *ilahiyah* bersumber dari Al-Qur'an dan *ash-Shunnah*). Filosofis-Yuridis (berupa pemikiran-pemikiran filosofis untuk memecahkan masalah pendidikan); Yuridis (undang-undang atau peraturan); Sosiologis (nilai sosial-budaya masyarakat bersumber pada hasil karya akal budi manusia); Psikologis (kontribusi psikologi terhadap studi kurikulum); Organisatoris (bertalian dengan *subject matters curriculum*). Keempat, bagi bangsa Indonesia yang pluralistik-multikultural, implementasi pendidikan Islam berbasis multikultural, ke depan, diharapkan memiliki kontribusi signifikan dalam mempersiapkan insan-insan berkualitas (*human resources*) yang memiliki sains-teknologi dan sains-agama yang diharapkan sekaligus dapat mewujudkan suatu 'iklim' moderasi beragama yang toleran terhadap perbedaan dalam memperkuat integrasi sosial dan integrasi bangsa ke depan.



## PENGANTAR PENULIS

*Alhamdulillah*, penulis haturkan kepada Allah Swt., akhirnya penulisan buku ini dapat dirampungkan. Naskah publikasi buku ini merupakan hasil penelitian Kluster Publikasi: *Penulisan Buku Daras/ Referensi Berbasis Riset*, berjudul: *Pendidikan Islam Multikultural: Konsep, Karakteristik, dan Kurikulum*. Kajian Pendidikan Islam Multikultural dalam buku ini, dalam memberi penekanan (*stressing*) kajiannya lebih melihat dari perspektif teologis, filosofis-yuridis, sosiologi agama, dan sosiologi pendidikan.

Perjalanan berbangsa suatu bangsa seperti Indonesia selalu dinamis, berliku, dan kompleks dalam mengelola suatu bangsa besar yang bercirikan pluralistik-multikulturalisme. Dalam buku ini, membahas tentang 'akar' multikulturalisme Indonesia di mana keberadaan bangsa Indonesia ditakdirkan sebagai negara-bangsa (*nation-state*) yang masyarakatnya plural atau multikultural (*plural-multicultural societies*). Dalam konteks ini, betapa pentingnya 'merawat' dan memperkuat masyarakat multikultural ini, terutama melalui pembangunan sektor pendidikan, termasuk pentingnya pengembangan Pendidikan Agama Islam berbasis multikultural. Kehadiran buku ini diharapkan dapat

memperkaya khazanah pemikiran dan tambahan referensi dalam kajian pendidikan Islam berbasis multikultural.

Penulisan buku ini, dapat diselesaikan tentunya berkat bantuan dan kontribusi banyak pihak, sehingga sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada mereka. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih kepada, antara lain Ibu Dr. Sjfriyeni, M.A., Ketua LP2M (2016-2020), dan Prof. Drs. Sirozi, M.A., Ph.D., Rektor UIN Raden Fatah Palembang (2016-2020) atas kesempatan melaksanakan penelitian untuk publikasi buku dasar ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Sdr. Mustakim, S.Kom. dan Ibu Safarina, M.Pd., M.Si. yang telah banyak memberi masukan dan *editing* naskah buku ini. Akhirnya, penulis sangat menyadari kemungkinan dalam penulisan buku ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, di mana semua itu menjadi tanggung jawab penulis. Kehadiran buku ini diharapkan dapat menambah literatur bacaan/referensi keterkaitan dengan pendidikan Islam berbasis multikultural dan moderasi beragama bagi beragam kalangan, seperti mahasiswa S-1, S-2, dan S-3, di lingkungan PTKIN/PTKIS, PTN/PTS, maupun pembaca umum.

TJ, 2 Mei 2021

Prof. Dr. Abdullah Idi, M.Ed.



## DAFTAR ISI

|                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>ABSTRAK</b>                                                                     | <b>v</b>   |
| <b>PENGANTAR PENULIS</b>                                                           | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR ISI</b>                                                                  | <b>ix</b>  |
| <b>DAFTAR FIGUR/TABEL</b>                                                          | <b>xi</b>  |
| <b>BAB 1 INTRODUKSI</b>                                                            | <b>1</b>   |
| A. Indonesia: <i>'Multicultural-Societies'</i>                                     | 2          |
| B. Metodologi Penulisan                                                            | 30         |
| <b>BAB 2 PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURAL:<br/>KONSEP, TUJUAN, DAN KARAKTERISTIK</b> | <b>33</b>  |
| A. Konsep dan Tujuan Pendidikan Islam                                              | 34         |
| B. Landasan Normatif                                                               | 40         |
| <b>BAB 3 PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURAL<br/>DAN INTEGRASI SOSIAL</b>               | <b>49</b>  |
| A. Relasi Agama dan Negara                                                         | 50         |
| B. Ajaran Islam dan Pendidikan Multikultural                                       | 60         |
| C. Karakter: Akhlak, Adab, Moral, dan Nilai                                        | 81         |

|                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| D. Moralitas Sosial dan Pendidikan Agama                                            | 87  |
| E. Multikulturalisme dan Peran 'Perekat' Agama                                      | 96  |
| <b>BAB 4 LANDASAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) BERBASIS MULTIKULTURAL</b> |     |
| A. Landasan Teologis                                                                | 105 |
| B. Landasan Filosofis-Yuridis                                                       | 106 |
| C. Landasan Sosiologis                                                              | 109 |
| D. Landasan Psikologis                                                              | 145 |
| E. Landasan Organisatoris                                                           | 162 |
| <b>BAB 5 PENUTUP</b>                                                                | 175 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                                               | 193 |
| <b>BIOGRAFI PENULIS</b>                                                             | 211 |
| <b>BIOGRAFI EDITOR</b>                                                              | 231 |
|                                                                                     | 235 |



---

## DAFTAR FIGUR/TABEL

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Figur 1 Model Keberagaman Etnis                                | 18  |
| Tabel 1 Karakteristik dan Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural | 46  |
| Tabel 2 <i>Overview of Educational Thought</i>                 | 120 |
| Tabel 3 Filosofi Kurikulum Berbasis Multikultural              | 123 |

## INTRODUKSI

Indonesia mengalami kemerdekaan dari kolonial Belanda sekurangnya selama 76 tahun (1945—2021). Kolonial Belanda sendiri menduduki dan menjajah Indonesia berkisar 350 tahun lamanya. Dalam perkembangannya, di usia kemerdekaan relatif muda tersebut, terdapat dinamika kehidupan berbangsa yang terkadang dapat menggoyahkan keutuhan berbangsa. Memang, para pendiri bangsa (*founding fathers*) telah merumuskan falsafah negara (Pancasila) dan Undang-Undang Dasar 1945 yang begitu 'cerdas' yang tergambar dalam tiap sila dan ayat-ayat di dalamnya. Dalam perjalanan berbangsa tentunya selalu dinamis dan terkadang berliku dalam mengelola suatu bangsa besar yang bercirikan majemuk atau multikulturalisme. Pada bagian ini, akan membahas tentang 'akar' multikulturalisme Indonesia yang keberadaan bangsa Indonesia ditakdirkan sebagai negara-bangsa (*nation-state*) yang masyarakatnya plural atau multikultural (*plural-multicultural societies*). Selanjutnya, akan diungkapkan, ke depan, betapa pentingnya 'merawat' dan memperkuat masyarakat multikultural yang dinamis melalui pengembangan pendidikan, terutama pendidikan multikultural.

## A. Indonesia: 'Multicultural-Societies'

John L. Esposito<sup>1</sup> menulis bahwa dari Mesir dan Sudan sampai Malaysia dan Indonesia, kebanyakan negara Muslim merupakan masyarakat multiagama. Diaspora Muslim di seluruh dunia hidup sebagai komunitas minoritas keagamaan. Karena itu, Muslim sekarang ini, sama halnya Yahudi dan Kristen dan umat beragama lainnya, menghadapi dunia yang menjadikan pluralisme agama suatu kebutuhan, masalah keimanan, dan kewarganegaraan.

Serupa halnya, suatu kehendak Yang Maha Kuasa, *sunnatullah*, Indonesia ditakdirkan sebagai bangsa multikultural-pluralistik. J.S. Furnivall mengatakan bahwa bangsa majemuk merupakan suatu tipe masyarakat daerah tropis di mana mereka berkuasa dan mereka yang dikuasai memiliki perbedaan ras. Orang Belanda, sebagai kelompok minoritas semakin bertambah pada akhir abad ke-19, sekaligus merupakan penguasa yang memerintah mayoritas orang pribumi, sebagai warga negara 'kelas tiga' di negeri sendiri. Orang Timur Asing memiliki kedudukan 'kelas dua', antara kelompok Eropa dan Pribumi. Dalam kehidupan politik, indikasi jelas dari masyarakat Indonesia yang pluralistik, yakni tidak adanya kehendak bersama (*common-will*), di mana masyarakat Indonesia, secara totalitas terdiri dari elemen-elemen terpisah satu sama lain dikarenakan perbedaan ras. Masing-masing merupakan kumpulan individu dari suatu totalitas organis, dan sebagai individu kehidupan sosial mereka tidaklah utuh. Orang Belanda datang ke Indonesia untuk bekerja, tetapi mereka tidak tinggal menetap di Indonesia. Kehidupan mereka hanya berada di sekitar pekerjaan itu, dan mereka melihat permasalahan sosial, politik, ekonomi terjadi di Indonesia tidak sebagai warga negara, tetapi sebagai kapitalis atau majikan dari buruh-buruh mereka. Sama halnya dengan orang Timur Asing, seperti halnya orang Cina sebagaimana orang Belanda, mereka datang ke Indonesia untuk kepentingan ekonomi. Seperti orang Belanda dan orang Cina, kehidupan orang Pribumi (*inlander*) tidak utuh pula, yakni sebagai 'pelayan' di negeri sendiri.<sup>2</sup> J.S. Nasikun, mengatakan,

<sup>1</sup>John L. Esposito, *Masa Depan Muslim: Antara Tantangan Kemajemukan dan Benturan dengan Barat*, Pengantar: Karel Armstrong, (Bandung: Mizan, 2010), hlm. 273.

<sup>2</sup>J.S. Furnivall, 'Plural Societies', in *Sociology of Southeast Asia: Readings on Social Change and Development*, Edited by Hans-Dieter Eves, (New York: Oxford University, 1980), pages 86-103.

orang Belanda, Cina, dan Pribumi, melalui agama, budaya, bahasa, pola pikir, dan gaya hidup masing-masing, sebagai tanda tidak memiliki kehendak bersama (*common-will*).<sup>3</sup>

Sebagai bangsa majemuk atau pluralistik, Indonesia, di satu sisi, merupakan 'berkah' dan 'kekayaan' yang patut disyukuri. Di sisi lain, pluralistik justru dapat berdampak sebaliknya, di mana menempatkan bangsa ini rentan terhadap ancaman disintegrasi sosial<sup>4</sup> dan disintegrasi bangsa, seperti diungkapkan Henk Schulte Nordholt dan Hannemn Samuel berikut.

*After decades of authoritarian centralist government, attempts to introduce political and economic change seem doomed, in the face of bureaucratic sabotage, corrupt power politics, short-term opportunism, and the absence of a widely shared vision religions of archipelago, regional resistance, the an ability to corruption, pessimists are inclined to classify Indonesia in the category of 'messy stages'. In short, they predicts further disintegration, which may eventually lead to the breaking up of the nation-state.*<sup>5</sup>

Parsudi Suparlan mengungkapkan bahwa masa depan Indonesia masih 'rentan' terhadap potensi konflik.<sup>6</sup> Potensi disintegrasi sosial pada berbagai bentuk 'sumber-sumber sosial' (*social resources*) yang menggunakan etnisitas untuk memperkuat kekuasaan (*power*). Saling memengaruhi satu sama lain akan memengaruhi etnisitas sebagai cara untuk mengumpulkan kekuatan berdasarkan kelompok dan solidaritas, kemudian menggunakan etnisitas dalam konflik untuk mencapai kekuasaan tertentu. Pada kekuasaan struktur sosial lokal, seperti politik dan etnisitas sebagai potensi yang dapat merusak struktur sosial dan level komunitas.<sup>7</sup>

<sup>3</sup>J.S. Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo, 1995), hlm. 287.

<sup>4</sup>Abdullah Idi & Toto Suharto, *Revitalisasi Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 113.

<sup>5</sup>Henk Schulte Nordholt dan Hannemn Samuel (Eds.), *Introduction Indonesia After Soeharto: Rethinking Analytical Categories*, in *Indonesia in Transition: Rethinking Civil Society, Region, and Crisis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), pages 1-2.

<sup>6</sup>Parsudi Suparlan, *Etnisitas dan Potensinya Terhadap Disintegrasi Sosial di Indonesia*, dalam *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini*, Indonesia-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS) dan The Center for Languages and Cultures, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2003, hlm. 70.

<sup>7</sup>Abdullah Idi, *Harmoni Sosial: Interaksi Sosial 'Natural-Asimilatif' antara Etnis Muslim Cina dan Melayu-Bangka*, *Thaqafiyat: Jurnal Kajian Budaya Islam*, Volume 13, No. 2, Desember 2012, hlm. 279.

Frans Magnis Suseno<sup>8</sup> mengatakan bahwa sekurangnya ada empat faktor pendukung konflik sosial di Indonesia. *Pertama*, konflik kultural, bertalian dengan konflik primordialisme berdasarkan agama, ras, etnik, dan daerah. *Kedua*, bertalian dengan akumulasi perasaan iri dan dengki. Orang dengan mudah diprovokasi orang lain dan mereka cenderung menjadi berperilaku eksklusif berdasarkan agama dan kelompok (etnis). *Ketiga*, perilaku seorang dipengaruhi budaya kekerasan di tengah masyarakat. *Keempat*, sistem politik Orde Baru yang memosisikan kekuatan militer yang cenderung memecahkan masalah dengan pendekatan tidak demokratis.

Dadang Kahmad<sup>9</sup> mengungkapkan konflik sosial di Indonesia lebih banyak disebabkan komunikasi, struktur, dan variabel pribadi. Komunikasi yang buruk berpotensi terjadinya konflik. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kesulitan memahami kebijakan-kebijakan pemerintah, kerap menjadi pemicu kesalahpahaman yang menciptakan konflik. Faktor lainnya yang berpotensi memicu konflik sistem nilai adalah perbedaan sistem nilai dalam masyarakat berhubungan dengan perbedaan tabiat, karakter, dan tindakan sosial masyarakat. Perbedaan nilai yang dianut, katakanlah agama, sering menimbulkan *prejudice* atau prasangka sosial. Pada akhirnya bisa terjadi konflik antarkomunitas penganut sistem nilai tersebut.

Lebih jauh, Muhammad Rendi<sup>10</sup> mengungkapkan *core of conflict* bertalian dengan *social deprivation* (penderitaan sosial) atau marginalisasi sosial yang tidak dapat ditoleransi dalam perebutan sumber-sumber daya (*resources*) maupun kekuasaan (*power*). Dalam kasus Poso misalnya, para elite yang memiliki kepentingan dalam memperebutkan kekuasaan cenderung menarik *ethno-religious* agar konflik dapat berlangsung lama. Kelompok-kelompok dominan dalam memperebutkan kekuasaan menggunakan agama sebagai kendaraan politik untuk mencapai tujuan.

<sup>8</sup>Frans Magnis Suseno, 'Faktor-faktor Mendasari Terjadinya Konflik Antara Kelompok Etnis dan Agama di Indonesia: Pencegahan dan Pemecahan', dalam *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini*, Indonesia-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS) dan The Center for Languages and Cultures, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2003, hlm. 121-122.

<sup>9</sup>Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama: Potret Agama dalam Dinamika Konflik, Pluralisme, dan Modernitas*, (Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 169-170.

<sup>10</sup>Muhammad Rendi, 'Konflik SARA di Kabupaten Poso Tahun 1998-2001', Hasil Penelitian Skripsi, Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Hasanudin, 2014, hlm. 70.

Para elite berupaya mengejar kekuasaan dengan menampilkan konflik umat beragama, di mana sebenarnya akar permasalahan berupa konflik politik. Para elite juga tampak cerdas membungkus pesan politik yang bermakna simbol-simbol keagamaan dalam mencapai tujuan kekuasaan. Tujuan ini pada umumnya bersifat politik yang meliputi antara lain, tuntutan pemerintah itu sendiri, otonomi, akses ke sumber daya dan kekuasaan, penghargaan atas identitas dan kebudayaan kelompok, dan hak-hak minoritas. Hal ini sejalan dengan perkataan *instrumentalis*, seperti dikatakan Jhon T. Ishiyama dan Marijke Breuning<sup>11</sup> bahwa memahami etnisitas dan keagamaan sebagai alat yang digunakan individu atau kelompok untuk memersatukan, mengorganisasikan, dan memobilisasikan populasi untuk mencapai tujuan yang lebih besar.

Timo Kivimaki<sup>12</sup> mengatakan, hampir semua daerah yang bergejolak isu separatism (misalnya Aceh, Papua, Riau, Maluku), memiliki sumber daya alam (*natural resources*) yang melimpah. Dari indikator provinsi ini tampak bahwa jumlah per kapita investasi asing merupakan satu dari korelasi dengan konflik atau potensi konflik sosial. Tuntutan kemerdekaan provinsi-provinsi tersebut berarti orang daerah merasakan tidak perlu lagi berbagi untuk penghasilan daerah (*revenues*) dari sumber-sumber dan investasi asing dengan pemerintah Indonesia. Jelas, hal ini merupakan ancaman disintegrasi sosial yang memberi legitimasi terhadap motivasi perjuangan separatisme.

Konflik dan kerusuhan di Papua (2019) misalnya sebagai 'potensi' adanya ancaman disintegrasi bangsa (*nation-disintegration*), sebagai contoh, seakan memperlihatkan bahwa persoalan '*plural-societies*' belum adanya solusi yang akurat. Sejak Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi, konflik Papua misalnya seakan terus terjadi dan berulang. Kalau beberapa kasus konflik lainnya pada masa lalu dapat diselesaikan seperti

---

<sup>11</sup>Jhon T. Ishiyama & Marijke Breuning, *Ilmu Politik dalam Paradigma Abad ke-21*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 233. Lihat pula: (Abdullah Idi, *Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara: Kasus Indonesia, Myanmar, Filipina, Thailand, dan Malaysia*, Editors: Toto Suharto, Safarina Hd., dan Mustakim, Yogyakarta: LkiS, hlm. 82-83).

<sup>12</sup>Timo Kimaki, *Violent Internal Conflicts in Asia Pasific: Histories, Political Economies, and Policies*, Editors: Dewi Fortuna Anwar, Helene Bouvie, Gland Smith, Roger Tol, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia (YOI)-LIPI-LASEMA-CNRS-KITLV, 2005), hlm. 107-108. Lihat kembali kutipan: (Abdullah Idi, 'Harmoni Sosial: Interaksi Sosial 'Natural-Asimilatif' antara Etnis Muslim Cina dan Melayu-Bangka...', *Op.Cit.*, hlm. 377).

kasus konflik Maluku dan Aceh (pernah minta Merdeka) serta Timor-Timur (minta referendum dan sudah merdeka), beda halnya dengan konflik Papua yang seakan belum ada suatu pendekatan dan solusi yang akurat. Terbukti, setiap rezim (Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi) kasus Papua seakan terus terjadi. Oleh karena itu, perlu menganalisis faktor apa saja sebagai 'akar' konflik di Papua dan perlunya pendekatan dialog sebagai upaya merangkul kembali orang Papua sebagai bagian dari warga negara bangsa (*nation state*) Indonesia.<sup>13</sup>

Diagnosis persoalan konflik Papua memiliki beragam perspektif. Dari perspektif ilmu sosial dalam kebijakan pembangunan di Papua, setidaknya perlu memperhatikan faktor internal dan eksternal. Faktor internal, dapat dikatakan bahwa sebagai evaluasi terhadap kebijakan yang telah dilakukan pemerintah terutama kebijakan dalam konteks sosio-historis pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Dari studi yang pernah dilakukan LIPI (2011), menunjukkan bahwa setidaknya terdapat beberapa 'akar' konflik Papua dalam konteks bagian dari NKRI. *Pertama*, persoalan sosio-historis dan status politik integrasi Papua ke Indonesia, orang Papua pada umumnya berpandangan bahwa proses integrasi ke Indonesia belumlah benar. *Kedua*, bertalian dengan operasi militer bertalian dengan konflik itu yang dipandang tidak terselesaikan. Operasi militer pada Orde Lama (1965) dan disinyalir terjadi hingga kini, orang Papua pada umumnya berpandangan sebagai kekerasan negara dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Karena adanya persepsi terhadap operasi militer yang demikian, telah menyebabkan tersosialisasi secara massif di kalangan masyarakat Papua, di manapun berada, di Papua, di Jawa, dan bahkan di luar negeri. Terlebih, dengan adanya media sosial, menunjukkan semakin lebih mudah tersosialisasi pandangan tersebut, seperti kasus Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya. Tentu kasus Surabaya secara gradual akan semakin memperkuat solidaritas antarmereka sebagai bangsa Papua dan juga memunculkan simpatik 'pihak luar' yang sangat mungkin memang memiliki beragam kepentingan (*vested interest*). *Ketiga*, pada sebagian besar anak muda Papua tampak terlihat radikal sebetulnya bisa juga adanya persepsi negatif terhadap masa lalu terhadap kekerasan militer dan persoalan HAM di Papua yang dipandang belum ada solusi

<sup>13</sup>Abdullah Idi, 'Dialog Papua: Mencegah Konflik Berkepanjangan', *Opini*, Sriwijaya Post, 18 September 2019.

substantif sebagai mana mestinya di mana militer memberi rasa aman terhadap masyarakat Papua.<sup>14</sup>

*Keempat*, akumulasi dari ketiga persoalan di atas sebagai penyebab utama atas 'akar' konflik di Papua, telah memunculkan stigma di tengah masyarakat Papua, bahwa mereka merupakan masyarakat 'kelas dua' yang termarginalkan. Hal ini juga dapat diperkuat pula dengan kebijakan migrasi dan pembangunan di mana mereka merasa kurang dilibatkan atau terabaikan. Akibatnya sentimen negatif terhadap migran pendatang tidak dapat dihindari, seperti terlihat amuk massa yang tidak jarang menysar kepada etnis tertentu yang non-Papua beserta aset-asetnya. Hal ini bisa berpotensi munculnya masalah baru, berupa potensi konflik horizontal.

Dari beberapa 'akar' konflik yang bersifat internal di atas, agaknya mendorong negara untuk 'hadir' dalam upaya resolusi konflik di Papua dengan merujuk kepada faktor-faktor utama (*core of conflicts*) sebagai 'akar' konflik di Papua. Resolusi konflik di Papua tentunya memerlukan telaah mendalam terhadap 'akar' konflik tersebut sebagai konsideran kebijakan-kebijakan yang menyentuh kepada kebutuhan sosial (*social needs*) masyarakat Papua. Cara pemerintah menyelesaikan kasus GAM-Aceh dan RMS-Maluku tentu patut diapresiasi dan dijadikan sebagai perbandingan dalam menuju resolusi.

Selain itu, faktor eksternal tidak kalah pentingnya menjadi analisis sebagai suatu 'akar' konflik di Papua yang berkepanjangan. Hal ini dapat dilihat bagaimana besarnya pengaruh bangsa asing terhadap Papua. Pada 1965, di era Orde lama, misalnya intervensi bangsa Belanda terhadap Papua (Irian Jaya) yang seakan dengan terus berperan dalam konflik menciptakan dan menjaga konflik di Papua. Bendera Bintang Kejora disinyalir merupakan ciptaan bangsa Belanda di mana setiap ada konflik selalu dikibarkan sebagai simbol perjuangan tuntutan kemerdekaan. Sama halnya dengan perjuangan separatisme Republik Maluku Selatan (RMS) pada masa lalu, di mana peran negeri Belanda juga begitu tampak setiap ada kerusuhan atau konflik di daerah tersebut. Setidaknya setiap ada konflik sosial di daerah (Papua) tersebut, bendera Bintang Kejora pun selalu dikibarkan, meskipun barang kali bukanlah sebagai representatif aspirasi mayoritas orang Papua.<sup>15</sup>

<sup>14</sup>Abdullah Idi, 'Dialog Papua: Mencegah Konflik Berkepanjangan....', *ibid*.

<sup>15</sup>Abdullah Idi, 'Dialog Papua: Mencegah Konflik ....', *ibid*.

Selain itu semua, besarnya peran bangsa asing di Papua pada masa Orde Baru hingga reformasi, dapat juga dilihat dari sejauh mana peran bangsa asing dalam mengelola dan ikut andil menikmati hasil sumber daya alam Papua. Kehadiran PT Freeport di Papua misalnya telah menjadikan Papua terkenal di dunia karena menghasilkan hasil tambang, terutama emas, yang menggiurkan dan diperebutkan bangsa asing, terutama investor Amerika. Berbagai kebijakan bertalian kepemilikan saham pun terus dinegosiasikan oleh pemerintah Indonesia sehingga diharapkan memiliki *mutual-benefit* yang adil dan berimbang. Akan tetapi, faktanya kini orang Papua dikatakan masih tertinggal dalam bidang kesejahteraan ekonomi padahal pemerintah telah melakukan Otonomi Khusus bagi Papua dan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk menyejahterakan masyarakat Papua. Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua diberikan oleh Negara Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 No. 135 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4151) yang telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 57 dan TLN No. 4843). UU 21/2001 yang terdiri dari 79 pasal ini mengatur kewenangan-kewenangan Provinsi Papua dalam menjalankan Otonomi Khusus. Selain hal-hal yang diatur secara khusus dalam UU ini, Provinsi Papua masih tetap menggunakan UU tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku secara umum bagi seluruh daerah di Indonesia.<sup>16</sup>

Kalau begitu, suatu hal yang menjadi pertanyaan dan sekaligus perdebatan, sejauh mana bangsa Papua telah memperoleh manfaat dan kesejahteraan dari kehadiran beragam investor asing di Papua, termasuk dalam bidang perkebunan. Begitu juga halnya, sejak ditetapkan Papua sebagai daerah Otonomi Khusus, sejauh mana terjadi perubahan sosial yang positif bagi masyarakat Papua. Padahal dalam bidang politik, hampir semua kepala daerah (bupati dan gubernur) merupakan orang asli Papua. Kalau berbagai kebijakan pemerintah Republik Indonesia dan kehadiran para investor asing sudah membawa kemajuan kesejahteraan bagi masyarakat Papua dalam berbagai bidang kehidupan, tidak seharusnya ada permintaan referendum untuk kemerdekaan. Pemerintah juga sudah mengklaim sudah membangun berbagai infrastruktur di Papua tetapi sejauh mana sebetulnya (infrastruktur jalan) tersebut bermanfaat bagi

---

<sup>16</sup>Abdullah Idi, 'Dialog Papua....', *ibid*.

masyarakat lokal, atau, apakah infrastruktur hanya akan memudahkan akses bagi investor asing tetapi sebaliknya bagi masyarakat lokal, hanya menimbulkan kecemburuan dan potensi segregasi.

Tentunya sangat urgen menemukan beragam 'akar' masalah yang harus dicari secara detail dan spesifik sebagai upaya menuju resolusi konflik yang sesungguhnya dan permanen. Secara struktural, jika posisi mayoritas masyarakat Papua sebagai penduduk asli (*indigenous*) tersubordinasi (*subordinate*) oleh kalangan pendatang (migran dan investor) dalam berbagai bidang kehidupan, konflik sosial akan mudah terjadi dan dapat berkepanjangan. Sebaliknya, jika secara gradual dan pasti, posisi struktural masyarakat Papua berproses menjadi superordinasi (*superordinate*), konflik sosial diharapkan akan tereduksi secara gradual tapi pasti. Faktanya, pembangunan bidang fisik yang dilakukan pemerintah agaknya tidak terlalu berkorelasi positif terhadap meredanya tensi konflik sosial di Papua, bahkan masih sering meminta adanya tuntutan referendum atau kemerdekaan. Di sinilah esensi perlunya dialog antara para tokoh asal Papua yang beragam latar belakang (tokoh adat, suku, agama, politisi, akademisi, pejabat, pengusaha) baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan Pemerintah Republik Indonesia. Hal ini bertujuan sebagai ikhtiar mencari 'titik temu' dan solusi terhadap beragam persoalan di Papua menuju solusi permanen. Merawat dan mencegah konflik Papua yang berkepanjangan hanya dapat diselesaikan melalui dialog antara orang Papua dan Pemerintah RI itu sendiri.<sup>17</sup>

Berkaitan dengan konflik antarkelompok agama, Dadang Kahmad<sup>18</sup> mengungkapkan setidaknya ada tiga faktor penyebabnya. *Pertama*, perbedaan doktrin dan sikap mental. Perbedaan iman (doktrin agama) menimbulkan benturan di antara pengikut agama yang berbeda. Misalnya, dalam kasus pembakaran rumah ibadah (gereja atau masjid) di berbagai daerah. Hanya memasuki masjid pakai sepatu, bisa menyulut huru-hara besar, atau benturan antarumat beragama dikarenakan penyembelihan babi atau anjing di daerah Islam. Sedangkan konflik intern antarpenganut agama tertentu, kerap disebabkan perbedaan penafsiran terhadap teks-teks kitab suci. Sikap mental keagamaan

<sup>17</sup>Abdullah Idi, 'Dialog Papua: Mencegah Konflik Berkepanjangan....', *ibid*.

<sup>18</sup>Dadang Kahmad, 'Sosiologi Agama....', *Op.Cit.*, hlm. 170-171.

yang negatif, seperti kesombongan, prasangka, dan intoleransi dapat mengakibatkan konflik antargolongan umat beragama. Kedua, perbedaan suku dan ras pemeluk agama. Kasus Sampit dan Ambon pada masa lalu merupakan contoh untuk kategori ini. Perbedaan etnis, Madura yang Islam dan Dayak yang Kristen merupakan konflik yang disebabkan oleh perbedaan etnis yang dipicu perbedaan agama. Di Indonesia, stereotipe suku bangsa identik dengan agama yang dianutnya. Sunda identik dengan Islam, Batak dengan Kristen, Bali dengan Hindu. Ketiga, perbedaan tingkat kebudayaan pemeluk agama menjadi penyebab munculnya konflik antaragama. Masyarakat yang telah mengalami modernisasi memiliki visi tersendiri bertalian dengan hubungan antarpemeluk agama. Beda halnya dengan masyarakat yang masih tradisional, yang selalu curiga pada hal baru atau terhadap sesuatu yang asing. Penolakan orang Islam pada ilmu dan teknologi banyak didasarkan pada identifikasi bahwa ilmu pengetahuan Barat itu pemeluk agama Kristen sehingga muncul apriori kekhawatiran bahwa ilmu akan membawa nilai-nilai kristenisasi.

Bahkan, dikatakan John L. Esposito bahwa di seluruh dunia, prakarsa dalam dialog antaragama dan antarperadaban, domestik maupun internasional, menghasilkan gagasan dan tindakan baru. Organisasi Kristen dan Muslim di negara-negara dengan dewan gereja yang sudah lama mapan (Mesir, Lebanon, Pakistan, Malaysia, dan Indonesia) semakin banyak memanfaatkan dialog dan program pertukaran untuk meningkatkan sikap saling memahami dan menghormati; perguruan tinggi-perguruan tinggi di Mesir, Qatar, Lebanon dan Indonesia telah memiliki program yang baru dilembagakan atau diperluas dalam bidang perbandingan agama. Di negara-negara Teluk, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan Kuwait kini menjadi rumah bagi gereja-gereja Kristen. Qatar dan Arab Saudi bergabung dengan negara seperti Yordan menjadi tuan rumah dialog-dialog antaragama dengan Kristen dan Yahudi.<sup>19</sup>

Di Indonesia pula, dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo, terus menggalakkan program moderasi beragama yang sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Perpres No. 18/2020. Agenda moderasi beragama juga masuk melalui PTKIN secara kelembagaan melalui Surat Edaran Direktur

---

<sup>19</sup>Jhon L. Esposito, 'Masa Depan Muslim....', *Op. Cit.*, hlm. 273.

Jenderal Pendidikan Islam (Nomor-B-3663.1/Dj.I/BA.02/10/2019 tertanggal 29 Oktober 2019 tentang Rumah Moderasi Beragama), yang meminta kepada semua Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) untuk mendirikan dan menyelenggarakan Rumah Moderasi Beragama sebagai ruang penyemaian, edukasi, pendampingan, dan penguatan gerakan moderasi beragama di lingkungan kampus.<sup>20</sup>

Kemenag telah menjabarkan moderasi beragama dalam Rencana Strategis (Renstra) pembangunan di bidang keagamaan lima tahun mendatang. Menteri Agama, ketika itu, Fachrul Razi, menegaskan sebagai institusi yang diberi amanah untuk menjadi *leading sector*, Kementerian Agama terus memperkuat implementasi moderasi beragama. Fachrul Razi mengatakan pula moderasi beragama harus menjadi bagian dari kurikulum dan bacaan di sekolah. Kemenag telah mereview 155 buku pelajaran, muatan tentang pemahaman keagamaan yang inklusif diperkuat. Dikatakan pula, program moderasi beragama juga mengintegrasikan moderasi beragama melalui bimbingan perkawinan, karena keluarga merupakan tempat transmisi nilai-nilai yang paling kuat. Materinya tidak hanya konsep pernikahan dalam Islam tapi juga membahas masalah kesehatan dan moderasi beragama. Selain itu, dikatakan pula bahwa di PTKIN sudah ada Rumah Moderasi Beragama yang juga melakukan pembinaan kepada civitas akademika serta masyarakat sekitarnya. Ke depan, Rumah Moderasi akan semakin diaktifkan. Program penceramah bersertifikat akan mulai dijalankan.<sup>21</sup>

Lebih jauh, Ditjen Pendidikan Islam telah menyiapkan sejumlah program untuk percepatan penguatan moderasi beragama di madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI). Dukungan konsep dan anggaran penguatan moderasi beragama ini sudah disiapkan pada tahun 2021 sehingga semua ini sudah bisa mulai serentak. Tim juga akan menyusun modul penguatan moderasi bagi guru, pedoman pengintegrasian moderasi beragama pada kurikulum, termasuk cara pengajarannya kepada peserta didik. Program berikutnya melakukan advokasi dan pendampingan ke sejumlah lembaga pendidikan yang

---

<sup>20</sup>Lihat: ('Potret Moderasi Beragama di Kalangan Mahasiswa Muslim: UIN Jakarta, UIN Bandung, dan UIN Yogyakarta', *conveyindonesia.com.cdn.ampproject.org.*, diakses: 29 April 2021).

<sup>21</sup>'Sebagai Leading Sector, Kemenag Perkuat Program Moderasi Beragama, *ntt.kemenag.go.id.* (Diakses: 29 April 2021).

dipandang ekstrem. Ini dimaksudkan agar para peserta didik di lembaga tersebut tidak terhalangi kesempatannya untuk studi lanjut. Pokja juga akan membangun sinergi antara perguruan tinggi, lembaga pendidikan jenjang dasar dan menengah untuk melakukan penguatan moderasi di tengah masyarakat. Sinergi juga akan dijalinan dengan BNPT, utamanya dalam pengembangan pesantren eks napiter.<sup>22</sup>

Sehubungan dengan itu, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta melalui program *Convey Indonesia* merilis hasil penelitian dan sekaligus kegiatan *capacity building* terkait potret moderasi beragama di kalangan mahasiswa Muslim di tiga PTKIN: UIN Jakarta, UIN Bandung, dan UIN Yogyakarta. Ketiga PTKIN ini sebagai *benchmark*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai empati eksternal dan internal yang merupakan turunan konseptual moderasi beragama dari aspek toleransi cenderung rentan di kalangan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan di tiga PTKIN: UIN Jakarta, UIN Bandung, dan UIN Yogyakarta. Maksudnya, hal ini menunjukkan bahwa empati seseorang terhadap penganut agama lain relatif rendah dan penolakan terhadap penganut aliran dalam Islam seperti Ahmadiyah dan Syiah relatif tinggi.<sup>23</sup>

Dalam konteks dalam negeri, Indonesia, adanya kecenderungan terwujudnya integrasi sosial (masyarakat pluralistik) bukan berarti terlepas dari perbedaan pendapat dan konflik. Suatu hal yang penting dari proses integrasi tersebut, adanya kesadaran dalam menjaga hubungan, sehingga eksistensi dan identitas masing-masing kelompok sosial yang terintegrasi tetap diakui.<sup>24</sup> Sunyoto Usman<sup>25</sup> mengungkapkan

<sup>22</sup>Dikutip dari: ([kemenag.go.id](http://kemenag.go.id)), diakses 29 April 2021).

<sup>23</sup>Berbasis pada hasil penelitian tersebut, telah dilakukan *capacity building* kepada 38 Rumah Moderasi Beragama di PTKIN dalam skala nasional dan *technical assistance* secara khusus ke tiga PTKIN di atas. PPIM UIN Jakarta menawarkan pendekatan preventif, promotif, dan kuratif-rehabilitatif yang dinamakan SAPA-SALAM-RANGKUL, sebagai implementasi praktis untuk meningkatkan moderasi beragama di PTKIN dan perguruan tinggi lainnya. Lihat kembali: ('Potret Moderasi Beragama di Kalangan Mahasiswa Muslim....', [conveyindonesia.com.cdn.ampproject.org](http://conveyindonesia.com.cdn.ampproject.org)., *op.cit.*, diakses: 29 April 2021).

<sup>24</sup>Freedrick Barth, *Kelompok Etnik dan Batasannya*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988), hlm. 9-41.

<sup>25</sup>Clifford Geertz mengungkapkan bahwa agama juga memiliki unsur integrasi. Geertz mencontohkan peranan agama orang Jawa (santri, priyayi, dan abangan) terhadap terjadinya integrasi masyarakat Jawa. Dikatakan Geertz, faktor yang

bahwa proses terwujudnya integrasi sosial dikelompokkan menjadi tiga dimensi. *Pertama*, masyarakat dapat terintegrasi berdasarkan kesepakatan kebanyakan anggotanya terhadap nilai-nilai sosial tertentu yang bersifat mendasar. *Kedua*, masyarakat dapat terintegrasi dikarenakan kebanyakan anggotanya terhimpun dalam berbagai unit sosial sekaligus (*cross-cutting affiliations*). *Ketiga*, masyarakat dapat terintegrasi atas saling ketergantungan di antara unit-unit sosial yang terhimpun di dalamnya dalam mencapai kebutuhan ekonomi.

Jika ditelusuri lebih jauh, sebelum kehadiran peradaban Melayu, Peradaban Sriwijaya turut membentuk masyarakat multikultural Indonesia. Bahkan, Kerajaan Sriwijaya<sup>26</sup> dapat dikatakan sebagai proses pembentukan pertama, 'the roots', terhadap iklim multikultural era berikutnya. Multikulturalisme pada masa Kerajaan Sriwijaya memiliki nilai-nilai integrasi sosial dalam keberagaman. Selain sebagai kerajaan maritim yang tangguh, Sriwijaya juga menjadi pusat perdagangan internasional, pusat penelitian keagamaan, dan pusat kontak berbagai bangsa. Kedatangan bangsa-bangsa asing (Tiongkok/Cina, Arab, Persia,

---

menyebabkan terintegrasinya masyarakat Jawa tersebut, yakni: *pertama*, adanya kesadaran akan adanya kesatuan kebudayaan. *Kedua*, adanya kenyataan bahwa pola-pola nilai tidak diinstitusionalisasi secara langsung, murni, dan tanpa gangguan, melainkan terintegrasi dalam sistem sosial yang berdiferensiasi sedemikian rupa, sehingga struktur sosial yang ada tidak menggambarkan organisasi kebudayaannya dengan cara sederhana. *Ketiga*, toleransi yang didasarkan atas 'relativisme', 'kontekstual', dan 'pertumbuhan mekanisme sosial' bagi bentuk sosial nonsinkretis yang majemuk. Toleransi terhadap keanekaragaman agama (santri, priyayi, dan abangan) dan ideologi yang dimilikinya merupakan karakter kebudayaan Jawa yang mendasar. Lihat: Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Penerjemah: Aswab Mahasin, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1983), hlm. 475-510; dan Lihat juga kutipan: Abdullah Idi (*Contributor*), 'Kerajaan Sriwijaya, Nilai-Nilai Integrasi dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Otonomi Daerah', Penyunting: Zulkifli & Abdul Karim Nasution, (Sumatra Selatan: Universitas Sriwijaya Press, 2001), hlm. 14.

<sup>26</sup>Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan *notabene* beragama Buddha memiliki ikatan emosional dengan Tiongkok karena orang Cina yang datang ke Sriwijaya kebanyakan beragama Buddha. Adanya kerajaan yang mulanya berkomunitas agama-agama Buddha tersebut telah mendorong I Tsing untuk memperdalam pengetahuan mengenai agama Buddha melalui kegiatan penelitian yang dilakukannya sebelum melanjutkan studi yang lebih tinggi, yakni ke Perguruan Tinggi Nalanda, India. Dalam perkembangannya, komunitas Cina Muslim pun telah terdapat di Kerajaan Sriwijaya yang juga dikembangkan oleh komunitas Cina Muslim Tiongkok atau *Mainland China*. Abdullah Idi, 'Kerajaan Sriwijaya, Nilai-Nilai Integrasi, dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Otonomi Daerah....', *Op.Cit.*, hlm. 14.

India) ke Sriwijaya (kerajaan Buddha) dimotivasi oleh kepentingan perdagangan, yang berakibat terjadinya interaksi sosial-bisnis yang saling ketergantungan (*mutual-simbiosis*), yang pada perkembangannya berproses menjadi masyarakat Sriwijaya yang asimilatif, multikultural, dan terintegrasi secara 'natural'.<sup>27</sup> Hal ini sejalan dengan Husni Rahim<sup>28</sup> yang mengatakan bahwa ketika Islam masuk ke Palembang pada abad ke-7 M, Palembang masih merupakan pusat Kerajaan Sriwijaya dan tampak masih berdiri kokoh. Ketika itulah, datang pedagang-pedagang Islam dan bermukim di Pelabuhan Palembang, bahkan mereka memiliki kesempatan menjalankan ajaran Islam.

Keberadaan Kerajaan Sriwijaya yang tangguh telah mendorong pula proses kontak sosial antarbangsa dalam skala internasional. Ketika itu, Kerajaan Sriwijaya telah memiliki teknologi kapal laut yang lebih maju dibandingkan yang dimiliki Tiongkok.<sup>29</sup> Bahkan, orang Cina (*Mainland Tiongkok*) yang merantau ke Nusantara mesti melintasi darat terlebih dahulu, sesuatu yang berbeda dengan Kerajaan Sriwijaya telah memiliki teknologi kapal laut yang maju.<sup>30</sup> Dalam hal ini, dapat diungkapkan bahwa pada masa Kerajaan Sriwijaya di Palembang, memperlihatkan suatu masyarakat multikultural dengan beragam etnis (Cina, Arab, Persia, dan India) dengan terdapat keyakinan (agama) yang berbeda pula. Artinya, bahwa *'the roots'*, 'akar' multikulturalisme di Nusantara diyakini telah dimulai pada masa Kerajaan Sriwijaya.

Selanjutnya, bertalian dengan Peradaban Melayu (*Malay Civilization*), lalu, siapa Orang Melayu? 'Melayu' merujuk kepada mereka yang bertutur bahasa Melayu dan mengamalkan adat-istiadat orang Melayu. Perkataan Melayu mungkin berasal dari pada nama sebuah anak Sungai Melayu di hulu Sungai Batang Hari, Sumatra. Di sana letaknya Kerajaan Melayu sekitar 1500 tahun lalu, sebelum atau pada masa Kerajaan Sriwijaya. Dari segi etimologi, perkataan 'Melayu' dikatakan berasal dari kata Sansekerta: 'Malaya' yang berarti 'bukit' atau

<sup>27</sup>Abdullah Idi, 'Kerajaan Sriwijaya, Nilai-Nilai Integrasi, dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Otonomi Daerah....', *Ibid.*, hlm. 14-15.

<sup>28</sup>Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*. Pengantar: Taufik Abdullah, Epilog: Karel A. Steenbrink, (Jakarta: Logos, 1998), hlm. 49-50.

<sup>29</sup>*Majalah Stannia*, 1998, hlm. 26-27 dan lihat pula: (Abdullah Idi, 'Nilai-Nilai Integrasi, dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Otonomi Daerah....', *Op.Cit.*, hlm. 16).

<sup>30</sup>Abdullah Idi, 'Nilai-Nilai Integrasi, dan Implikasinya ....', *Ibid.*, hlm. 16.

'tanah tinggi'. Ada pula sumber sejarah yang mengatakan bahwa kata 'Melayu' berasal dari Sungai Melayu di Jambi.<sup>31</sup>

Khairul A. Mastur, Putai Jin, dan Martin Cooper mengatakan bahwa 'orang Melayu' atau (*Malays*) adalah mereka yang merupakan penduduk asli (*indigenous*) di wilayah Malaya, suatu wilayah di Semenanjung Malaya. Orang Melayu juga bertempat tinggal Brunei, Singapura, dan Indonesia, Thailand Selatan, Kamboja, ataupun di luar Asia Tenggara.<sup>32</sup> Istilah 'Melayu', seperti dikeluarkan UNESCO (1972), merupakan suku bangsa Melayu di Semenanjung Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina, dan Madagaskar. Sedangkan menurut Pelembagaan Malaysia, istilah 'Melayu' hanya merujuk kepada seseorang yang berketurunan Melayu yang menganut agama Islam. Dengan kata lain, bukan semua orang berketurunan dari pada nenek moyang Melayu adalah orang Melayu. Istilah 'Melayu' untuk merujuk kepada nama bangsa atau bahasa adalah suatu perkembangan yang agak baru dari segi sejarah, yaitu setelah adanya Kesultanan Melayu Malaka. Hingga abad ke-17, istilah 'Melayu' yang merujuk kepada bangsa digunakan secara luas; sebelumnya, istilah 'Melayu' hanya merujuk kepada keturunan raja Melayu dari Sumatra.<sup>33</sup>

Persoalan utama bertalian dengan identitas bangsa Indonesia ke depan, antara lain, bertalian dengan bagaimana mengelola keberagaman

---

<sup>31</sup>Harun Amirurrasyid, *Kajian Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu*, (Singapura: Pustaka Melayu, 1966), hlm. 4-5, dalam kutipan: Abdullah Idi, 'Orang Melayu: Istilah, Jati Diri dan Globalisasi', *Dinamika Sosiologis Indonesia, Agama dan Pendidikan dalam Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: LKIS Press, 2015), hlm. 15-16.

<sup>32</sup>Khairul A. Mastur, Putai Jin, dan Martin Cooper, 'Malay Culture and Personality', *Journal of American Sciences*, Volume 44 No. 1 September 2000, page 96. Lihat pula: (Abdullah Idi, *Bangka, Sejarah Sosial Cina Melayu*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Press, 2011), hlm. 1-2.

<sup>33</sup>Istilah 'Melayu' digunakan pertama kali sekitar tahun 100-150 M dalam karya Ptolemy, *Geographike Sintaxis*, dengan istilah 'maleu-kolon'. G.E. Gerini menganggap istilah itu berasal dari kata Sankrit, yakni '*malayakom*' atau '*malaikurram*', yang merujuk kepada Tanjung Kuantan di Semenanjung Malaysia; dan Roland Bradell berpendapat tempat itu merupakan Tanjung Penyabung. Istilah Malaya '*dvipa*' muncul dalam kitab Purana, sebuah kitab Hindu Purba, yang ditulis sebelum zaman Gautama Buddha sehingga 500 Masehi. '*Dvipa*' bermaksud 'tanah yang dikelilingi air' dan kecenderungannya '*Malayu Dvipa*' adalah Pulau Sumatra. Istilah '*Mo-lo-yu*' juga dicatat dalam buku catatan perjalanan pengembara Cina pada sekitar 644-645 Masehi semasa zaman Dinasti Tang. Para peneliti sependapat bahwa perkataan '*Mo-lo-yu*' yang dimaksudkan merupakan kerajaan yang terletak di Jambi dan Sriwijaya yang terletak di Palembang. Lihat: (Madiana dan Hasnah dalam kutipan Abdullah Idi, '*Dinamika Sosiologis Indonesia....*', *Op.Cit.*, hlm. 16).

atau kebhinnekaan. Identitas bangsa terkait dengan identitas etnisitas sebagai satu bangunan fondasi bangsa. Identitas bangsa terwujud dari 'ramuan' kebhinnekaan etnis atau identitas etnis dari beragam suku bangsa. Etnisitas dan identitas bangsa merupakan satu kesatuan dari 'ramuan' yang diimajinasikan sebagai identitas bangsa Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar RI dinyatakan dengan tegas tentang realitas multikultural bangsa Indonesia yang digambarkan dalam lambang negara *Bhinneka Tunggal Ika*. Kebhinnekaan bangsa diakui dan dijadikan sebagai dasar perjuangan nasional pada awal abad ke-20. Hal ini terlihat dalam Manifesto Politik 1925 yang dirumuskan para mahasiswa Indonesia yang sedang menuntut ilmu di negara-negara Eropa. Mereka mengatakan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia hanya dapat dicapai melalui persatuan dari beragam suku bangsa. Manifesto Politik telah muncul lebih awal dari Sumpah Pemuda 1928, yang mengikrarkan kesatuan bangsa yang terdiri dari beragam suku bangsa dan bertekad sebagai suatu bangsa besar yang memiliki: *Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu tanah Air: Tanah Air Indonesia*—yang telah menghimpun beragam suku bangsa agar dapat melepaskan diri dari ikatan kolonialisme Belanda.<sup>34</sup>

Dalam konteks ini, etnisitas merupakan suatu hal penting dalam menjaga keutuhan suatu kelompok masyarakat atau suatu bangsa. Meskipun demikian, patut dipahami bahwa dalam proses pemanfaatan dan pengembangan etnisitas dapat berdampak positif dan negatif. Sebagai suatu unsur pengikat (*bounding*) suatu masyarakat, etnisitas merupakan wadah yang positif dalam pengejawantahan nilai-nilai disepakati di dalam kelangsungan hidup bermasyarakat. Etnisitas dapat berdampak negatif bila menampilkan etnisitas yang 'kaku' dan hanya melihat ke dalam tanpa melihat keterikatan terhadap kelompok manusia lainnya yang memiliki kebudayaan berbeda—etnisitas yang berlebihan ini dapat menyebabkan tumbuhnya nilai-nilai negatif, seperti persaingan tidak sehat, *prejudice*, kebencian, dan intoleransi.

Adanya rasa keterikatan terhadap beragam etnis, *tribalisme*, terkadang merupakan suatu mekanisme defensif dari seorang atau kelompok tertindas ataupun yang dibatasi kemerdekaannya. Demokrasi idealnya merupakan wadah bagi perkembangan *tribalisme*. Perkembangan

---

<sup>34</sup>H.A.R. Tilaar, 'Meng-Indonesia, Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia....', *Op-Cit.*, hlm. xxii-xxiii.

demokrasi yang kebablasan dapat menimbulkan *tribalisme* negatif yang bisa saja menganggap kelompok sendiri paling benar dan yang lain tidak benar. Nilai-nilai 'ke-aku-an' dibedakan dari nilai-nilai mereka yang berbeda, dapat menimbulkan ketegangan sosial, konflik sosial, dan bisa menimbulkan terjadinya perang antarkelompok etnis.

H.A.R. Tilaar<sup>35</sup> mengungkapkan bahwa di era globalisasi etnisitas dapat terwujud sebagai 'identitas' atau 'jati diri' suatu bangsa—etnisitas dan identitas kelompok diumpamakan sebagai 'dua wajah' dari satu mata uang. Identitas suatu bangsa di era globalisasi ini berhadapan beragam tantangan dari luar. Apabila seorang atau masyarakat tidak memiliki suatu keterikatan terhadap etnisnya dan dengan jati dirinya sebagai masyarakat dan sebagai bangsa, pribadi atau bangsa tersebut akan kehilangan pegangan dalam berhadapan dengan beragam dampak globalisasi, karena globalisasi tidak mengenal kelompok atau bangsa. Globalisasi ditentukan oleh kekuatan yang mengendarainya, seperti kekuatan ekonomi, kekuatan budaya dominan, kekuatan nilai-nilai dari ideologi yang populer di dunia ini. Untuk dapat bertahan dari dampak globalisasi yang terkadang cenderung *inhuman* tersebut, individu atau suatu bangsa perlu memiliki identitasnya sendiri. Identitas individu atau identitas bangsa atau masyarakat merupakan produk dari proses pembinaan, terutama produk dari pendidikan. Pendidikan dalam era globalisasi menekankan pada tumbuhnya individu yang terikat oleh norma-norma etnisnya yang berkembang sesuai dengan perubahan zaman, dan pribadi yang memiliki identitas sebagai kelompok bangsa tertentu. Proses pendidikan dipandang sebagai pedagogik transformatif atau pedagogik pembebasan. Suatu pedagogik yang berupaya mengembangkan kemampuan pribadi dalam memilih secara personal berbagai pengaruh dalam era globalisasi. Dasar dari pemilihan pribadi yang terdidik dapat berupa nilai-nilai filosofis suatu bangsa, misalnya nilai-nilai Pancasila.

Dalam konteks sosio-historis berbangsa, dari kebijakan etnisitas (*ethnic policies*) yang dilakukan pemerintahan kolonial (Belanda, Jepang, Portugis) terhadap bangsa koloninya di Indonesia menunjukkan sarat dengan diskriminatif atas ras dan politik adu domba (*divide et impera*) sebagai tujuan kekuasaan ekonomi politik. Sebaliknya, pada masa

---

<sup>35</sup>H.A.R. Tilaar, 'Meng-Indonesia, Etnisitas dan Identitas ....', *Ibid.*, hlm. xxiv.

kemerdekaan (Orde Lama, Orde Baru, Reformasi), menunjukkan beragam pula kebijakan keberagaman etnisitas yang sudah dilakukan tetapi justru konflik sosial bernuansa etnis dan agama cenderung mengalami peningkatan. Agaknya kebijakan keberagaman etnisitas pada masa kemerdekaan belum mengembangkan kehidupan keberagaman etnis seperti diharapkan. Karenanya, ke depan, bangsa ini memerlukan suatu 'model' tentang pengelolaan keragaman etnis yang memperhatikan konteks objek Indonesia dengan perlunya memperhatikan sejumlah dimensi krusial dari suatu masyarakat majemuk-pluralistik (*multicultural-plural societies*) Indonesia. Adapun dimensi-dimensi yang perlu dijadikan konsideran dalam 'model' merencanakan kebijakan keragaman etnisitas di Indonesia ke depan, seperti diungkapkan Abdullah Idi<sup>36</sup> antara lain, perlunya pengembangan dimensi: multikultural, diversitas, pluralitas, dan relativitas, seperti dapat dilihat pada figur 1.



Figur 1. Model Keberagaman Etnis

Istilah *multikulturalisme* berasal dari kata sifat *multi* dan *culture* (bahasa Inggris), di mana *multi* berarti banyak, ragam atau aneka, sedangkan *culture* berarti kebudayaan, kesopanan, dan pemeliharaan.<sup>37</sup> Dalam *Dictionary of Sociology*, David Jary & Julia Jary (1991) mendefinisikan multikulturalisme:

<sup>36</sup>Abdullah Idi, 'Kebijakan Etnisitas Kolonial Belanda, masa Kemerdekaan dan Implikasinya terhadap Pengelolaan Keberagaman Etnis dalam Memperkokoh Integrasi Bangsa', *Laporan Hasil Penelitian*, LP2M Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018, hlm. 241.

<sup>37</sup>Ahmad Rois, 'Pendidikan Islam Multikultural...', *Op. Cit.*, hlm. 272.

"...the acknowledgment and promotion of cultural pluralism as a feature of many societies. In opposition to the tendency in the modern societies to the cultural unification and universalisation, multiculturalism celebrates and seeks to protect cultural variety, for example, minority languages. At the same time it focuses on the open unequal relationship of minority to mainstream cultures. After decades of persecution, the prospects of indigenous or immigrant cultures are now helped somewhat by the support they receive from international public opinion and the international community, for example, the United Nations".<sup>38</sup>

Konsep *multikulturalisme* menekankan pentingnya memandang kehidupan bernegara dari bingkai referensi budaya yang berbeda, serta mengenali dan menghargai kekayaan ragam budaya di dalam bangsa. Indonesia merupakan salah satu negara multikultural. Dalam masyarakat multikultural, identitas terkadang menjadi pemicu terjadinya konflik dikarenakan adanya sentimen terhadap perbedaan identitas ras, etnis/suku, dan agama. Dikatakan Arifin bahwa terdapat beberapa sudut pandang yang menyikapi perbedaan identitas yang berhubungan dengan konflik dalam masyarakat. *Pertama*, pandangan *primordialis*, di mana melihat perbedaan-perbedaan yang bersifat ras, etnis, dan agama merupakan sumber utama terjadinya benturan kepentingan etnis dan agama. *Kedua*, pandangan *instrumentalis*, di mana ras, etnis, dan agama dianggap sebagai alat individu dan kelompok untuk mengejar tujuan lebih besar baik dalam bentuk materiel maupun nonmateriel. Konsep ini biasa digunakan politisi untuk mencari dukungan dari kelompok identitas. *Ketiga*, pandangan *konstruktivis*, di mana memandang kelompok tidak bersifat kaku seperti pandangan primordial. Etnisitas dalam pandangan konstruktivis dapat dikelola dalam membentuk pergaulan sosial dikarenakan etnisitas merupakan sumber kekayaan hakiki yang dimiliki manusia agar saling mengenal dan memperkaya budaya.<sup>39</sup>

Conrad P. Kottak mengatakan bahwa kultur (*culture*) memiliki beberapa karakter khusus, antara lain: a) kultur merupakan suatu yang general dan spesifik sekaligus; b) kultur merupakan suatu yang dipelajari;

<sup>38</sup>David Jary & Julia Jary, *The Harper Collins Dictionary of Sociology*, (New York: HarperCollins Publishers, Ltd., 1991), page 319.

<sup>39</sup>Arifin dalam kutipan: (T.M. Jamil dan Maimun, 'Pembangunan Karakter Kebangsaan pada Masyarakat Multikultural', *Prosiding Seminar Nasional*, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Tahun 2017 Vol.1, No. 1, 2017, hlm. 411-415.

c) kultur merupakan suatu simbol; d) kultur dapat membentuk dan melengkapi sesuatu yang alami; e) kultur merupakan sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama yang menjadi atribut bagi individu sebagai anggota dari kelompok masyarakat; f) kultur merupakan suatu model; dan g) kultur merupakan sesuatu yang bersifat adaptif.<sup>40</sup> Dari sejumlah karakter kultur tersebut, secara umum dapat dikemukakan bahwa kultur (*culture*) merupakan ciri-ciri dari tingkah laku manusia yang dipelajari, tidak diturunkan secara genetis dan bersifat khusus, sehingga kultur pada suatu masyarakat tertentu berbeda dengan kultur masyarakat lainnya.<sup>41</sup>

*Kultur*, dalam hal ini, dapat dipahami sebagai suatu cara dalam bertingkah laku dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, di mana tiap-tiap kelompok memiliki keunikan dan kelebihan tersendiri sehingga tidak bisa dikatakan bahwa satu kultur lebih baik dari kultur yang lain. *Multikulturalisme* merupakan paham mengenai keragaman budaya di mana di dalam keragaman tersebut mengedepankan toleransi, kebersamaan, perdamaian, dan sejenisnya. Paham-paham tersebut memiliki tujuan utama yakni sebagai upaya menciptakan sebuah kehidupan aman, tenteram, damai, dan sejahtera yang jauh dari konflik berkepanjangan.<sup>42</sup>

Budaya dan masyarakat ibarat 'dua mata uang logam' yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Budaya tanpa masyarakat itu tidak mungkin. Dalam komunikasi antarbudaya, seseorang memiliki budaya yang berbeda dengan orang lain harus bisa mendalami dan mempelajari dalam berkomunikasi dengan orang berbeda budaya. Bila komunikasi antarbudaya tanpa adanya saling pengertian antarbudaya berbeda bisa terjadi masalah. Dalam ilmu komunikasi antarbudaya, hal utama adalah sumber dan penerimanya berasal dari budaya berbeda. Perbedaan kultur dari orang-orang yang berkomunikasi juga bisa bertalian dengan kepercayaan, nilai, serta berlaku kultur di lingkungan mereka.<sup>43</sup>

Perbedaan budaya tidak menjadi kendala bagi satu sama lain dalam menjalin hubungan (*relationship*), yang terpenting adalah saling memahami (*understanding*), saling beradaptasi (*adaptation*), dan saling bertoleransi

<sup>40</sup>Conrad P. Kottak dalam kutipan Ahmad Rois, '*Pendidikan Islam Multikultural....*', *Op. Cit.*, hlm. 272.

<sup>41</sup>Ahmad Rois, '*Pendidikan Islam Multikultural....*', *Ibid.*, hlm. 272.

<sup>42</sup>Ahmad Rois, '*Pendidikan Islam....*', *Ibid.*, hlm. 272.

<sup>43</sup>Marhaeni Fajar, *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktik*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 312.

(tolerance). Kunci utama dalam pergaulan antarbudaya adalah tidak menilai orang lain berbeda budaya dengan menggunakan penilaian budaya sendiri. Biarkan semua berjalan dengan latar budaya masing-masing, justru perbedaan budaya merupakan ladang dalam belajar budaya orang lain dengan arief dan bijaksana (*wise*).<sup>44</sup> Dalam menjalani kehidupan masyarakat dalam keberagaman budaya seperti Indonesia diharapkan terciptanya suatu tatanan kehidupan yang 'unik' dan menarik dari setiap kelompok masyarakat berbeda. Dalam kenyataannya dalam kehidupan masyarakat beragam budaya tersebut yang seharusnya dapat memperkaya khazanah dan 'mozaik' kehidupan berbudaya, tetapi tidak sedikit justru memunculkan kesalahpahaman, ketegangan, konflik, antarsatu budaya dengan budaya lain.<sup>45</sup>

Sikap sosial yang diperlukan dalam membangun hubungan sosial yang harmonis dalam masyarakat yang majemuk-pluralistik dengan beragam budaya (*cultures*) adalah dengan sikap menerima, mengakui, dan menghargai keragaman. Hal ini diperlukan dalam kehidupan sosial suatu masyarakat yang majemuk, sebagai 'mozaik'. Dalam suatu 'mozaik' tercakup banyak kebudayaan dari masyarakat yang lebih kecil (*microcultures*) yang membentuk terciptanya masyarakat lebih besar (*macroculture*).<sup>46</sup>

Seperti diketahui, saat ini, tuntutan terhadap multikulturalisme seakan menguat dan banyak mengemuka dalam penyusunan kebijakan sosial, budaya, dan politik di dunia, terutama Eropa Barat dan Amerika. Kenyataan ini memang bukanlah suatu hal mengejutkan, dikarenakan meningkatnya kontak dan interaksi global, terutama migrasi besar-besaran, telah membuat berbagai macam praktik kebudayaan yang berlainan hidup saling berdampingan satu sama lain. Penerimaan umum akan perintah 'kasihlah sesamamu' boleh jadi berlaku manakala terdapat kesamaan hidup di suatu lingkungan masyarakat, tetapi kini, anjuran mengasihi sesama demikian menuntut orang untuk menghargai gaya hidup yang beragam di kalangan tetangga dekatnya. Watak global yang disebabkan multikulturalisme.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup>Danang Anugerah dan Winny Kresnowiati, *Komunikasi Antarbudaya: Konsep dan Aplikasinya*, (Jakarta: Jala Permata, 2007), hlm. 3.

<sup>45</sup>Aminullah *et. al.*, 'Model Komunikasi Antarbudaya Etnik Madura dan Etnik Melayu', *Jurnal Komunikasi ASPIKOM*, Volume 2 Nomor 4, Januari 2015, hlm. 272-281.

<sup>46</sup>Donna dan Lawrence dalam kutipan: (Ahmad Rois, 'Pendidikan Islam....', *Op. Cit.*), hlm. 275.

<sup>47</sup>Amartya Sen, 'Kekerasan dan Identitas....', *Op. Cit.*, hlm. 192.

Sejalan dengan itu, Amartya Sen mengungkapkan ada pendekatan yang secara mendasar berbeda dalam memandang multikulturalisme. *Pertama*, memandang bahwa mengencangkan multikulturalisme itu sudah dengan sendirinya merupakan nilai yang mesti dibela. *Kedua*, berfokus kepada kebebasan dalam menalar dan mengambil keputusan. Keragaman budaya dirayakan dengan syarat bahwa orang memiliki kebebasan luas untuk memilih praktik kebudayaan tertentu. Isu ini memerlukan pengamatan yang lebih mendalam terutama dalam konteks mengkaji praktik multikulturalisme saat ini, terutama di Eropa dan Amerika.

Salah satu isu pokoknya seperti apa manusia mesti dipahami. Haruskah manusia dikategorikan menurut tradisi yang diwarisinya, terutama agama yang diwarisi dari komunitas tempat mereka kebetulan dilahirkan, dan menganggap identitas yang bukan hasil pilihan tersebut otomatis menjadi prioritas mengatasi afiliasi-afiliasi lainnya termasuk politik, profesi, kelas, gender, bahasa, sastra, keterlibatan sosial, dan banyak lagi pertalian lainnya? Ataukah manusia harus dipahami sebagai orang yang banyak afiliasi dan keterikatan yang prioritasnya harus mereka tentukan sendiri (dan mengemban tanggung jawab atas pilihan yang diambil dengan pertimbangan nalar tersebut)? Ataukah dengan melihat seberapa jauhkah kemampuan mereka mengambil pilihan rasional didukung secara positif lewat kesempatan sosial untuk mengenyam pendidikan serta partisipasinya dalam masyarakat sipil dan proses ekonomi politik yang berlangsung di negara bersangkutan? Mustahil mengelak dari pertanyaan-pertanyaan mendasar ini bila multikulturalisme hendak dikaji secara berimbang.<sup>48</sup>

Dalam kenyataannya, dalam perjalanan bangsa sejak Proklamasi 1945 hingga memasuki era Reformasi (1999-sekarang), pada hakikatnya ingin membangun suatu masyarakat dan bangsa Indonesia yang demokratis. Sejalan dengan cita-cita tersebut, misalnya telah dikeluarkannya UU RI No. 32 /2004 tentang Pemerintahan Daerah. Adanya konsep desentralisasi dalam membina masyarakat dan bangsa Indonesia. Kemudian, muncul kembali (*rebirth*) pengakuan terhadap kebhinnekaan masyarakat dan bangsa Indonesia. Kebhinnekaan sebagai kenyataan sosial budaya bangsa Indonesia merupakan modal pertama untuk melangkah ke masyarakat lebih menyejahterakan. Di dalam proses demokratisasi

<sup>48</sup>Amartya Sen, 'Kekerasan dan Identitas....', *Ibid.*, hlm. 193-194.

selama ini terdapat adanya gejala-gejala negatif-- seperti ekses-ekses yang mementingkan kelompok dan suku sendiri (sukuisme), kecenderungan untuk menggunakan nilai-nilai kelompok dan memaksakannya untuk semua masyarakat dan bangsa Indonesia, terjadinya gesekan-gesekan sosial baik secara horizontal maupun vertikal-- memang sepintas lalu disebabkan karena timbulnya rasa mementingkan suku sendiri secara berlebihan dan sebagai pengingkaran kesepakatan di dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, yakni pengakuan terhadap kebhinnekaan masyarakat dan bangsa Indonesia. Pengakuan itu dirumuskan dalam Pancasila sebagai dasar ideologi negara yang merangkum kebhinnekaan masyarakat dan bangsa yang beragam—yang merupakan 'kesepakatan bersama' dalam membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang sejahtera. Jika 'kesepakatan bersama' tersebut diabaikan, masyarakat Indonesia yang dicita-citakan (*imagined community*) seperti dikemukakan Benedict Anderson akan sirna.<sup>49</sup> Pengabaian 'kesepakatan bersama' dapat dimaknai sebagai lunturnya 'modal sosial' (*social capital*) yang mempersatukan keberagaman masyarakat dan bangsa Indonesia, di mana dalam keberagaman tersebut terdapat kekuatan dari masyarakat dan bangsa Indonesia.

Dalam suatu masyarakat multikultural, kebudayaan memberikan modal kultural, mengondisikan pengembangan modal manusia, memfungsikan modal ekonomi dan modal kekayaan alam serta modal sosial bagi pengembangan masyarakat pemiliknya. Pendidikan, misalnya, sebagai proses pembudayaan merupakan tempat persemaian dari modal kultural, modal manusia, modal ekonomi, modal kekayaan alam, dan modal sosial. Etnisitas merupakan modal penting dari suatu modal budaya suatu masyarakat. Lingkungan etnis itulah yang memelihara dan mengembangkan modal budaya. Hancurnya rasa keterikatan terhadap etnis seseorang berarti hancurnya kebudayaan tadi.<sup>50</sup>

Pengakuan terhadap kebudayaan yang beragam pada suatu negara-bangsa (*nation state*) merupakan suatu cara hidup berbangsa yang modern--inilah yang dikenal dengan *multikulturalisme*. Etnisitas pada abad ke-21 tampak memiliki makna semakin berbobot, seperti dapat dilihat pada kasus Provinsi Quebec, dalam kaitannya dengan negara

<sup>49</sup>H.A.R. Tilaar, 'Meng-Indonesia, Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia....', *Op. Cit.*, hlm. xxiv.

<sup>50</sup>H.A.R. Tilaar, 'Meng-Indonesia, Etnisitas dan Identitas ....', *Ibid.*, hlm. xxiv.

Canada. Provinsi Quebec dengan penduduknya yang menyebut dirinya Quebecian, yang merupakan keturunan dari penduduk kolonial yang berbahasa dan berbudaya Prancis. Mereka merupakan sisa-sisa dari penduduk kolonial Prancis yang mula-mula merupakan mayoritas penduduk Canada. Dalam perjalanan sejarahnya imigran dari Eropa dan penduduk Inggris yang loyal terhadap kerajaan Inggris ketika Revolusi Amerika, semakin lama semakin banyak dan merupakan mayoritas. Quebecian semakin tersisih namun tetap mempertahankan bahasa Prancis di provinsi tersebut. Mereka menuntut pengakuan dari negara Canada akan bahasa dan asal-usulnya yang memiliki kebudayaan Prancis. Ini merupakan salah satu hak manusia berupa hak untuk berbudaya (*the right to the culture*).<sup>51</sup> Sejalan dengan perkembangan kehidupan demokrasi, setiap manusia atau kelompok masyarakat memiliki hak untuk hidup dan memelihara kebudayaannya sendiri.

Patut diketahui bahwa paham multikultural berhubungan erat dengan etnisitas, tetapi, berbeda dengan konsep etnisitas pada masa lalu yang memiliki tendensi melihat ke dalam (*inward looking*), multikulturalisme modern di dalam dunia yang terbuka dalam era globalisasi bersifat terbuka dan melihat keluar (*outward looking*). Multikulturalisme yang *outward looking* berarti seseorang memiliki kesadaran serta kebanggaan memiliki dan mengembangkan budaya komunitasnya sendiri namun dia akan hidup berdampingan secara damai dan saling bekerja sama serta saling menghormati tetangganya yang memiliki budaya berbeda. *Multikulturalisme* dalam perkembangan etnisitas yang perlu dikembangkan tentunya bukan lahir dengan sendirinya. Kesadaran seseorang terhadap budayanya serta kebanggaan memilikinya dalam ikatan dengan komunitasnya merupakan hasil dari perkembangan pribadi seorang, yang dikenal sebagai pendidikan multikultural. Etnisitas, identitas budaya, kepemilikan dan kebanggaan terhadap budaya sendiri dalam rangka kehidupan bersama dalam suatu *political-nation-state* –merupakan bentuk kehidupan negara modern dewasa ini. Kesadaran tersebut hanya dapat dicapai melalui proses pendidikan atau proses komunikasi antara individu sebagai anggota keluarga dan masyarakat etnisnya dalam lingkup kehidupan bersama sebagai suatu *nation*.<sup>52</sup>

<sup>51</sup>H.A.R. Tilaar, 'Meng-Indonesia, Etnisitas dan Identitas ....', *Ibid.*, hlm.15.

<sup>52</sup>H.A.R. Tilaar, 'Meng-Indonesia, Etnisitas....', *Ibid.*, hlm.15.

Tidak selalu etnisitas bertalian dengan konflik dalam masyarakat, baik konflik horizontal maupun konflik vertikal. Ternyata etnis mengandung nilai-nilai positif di dalam kehidupan modern abad ke-21 asalkan saja potensi tersebut dapat diarahkan secara tepat dan benar. Keteruraian etnisitas pada masyarakat modern apalagi pada negara sedang berkembang, seperti Indonesia, bertalian erat dengan kepemimpinan, baik kepemimpinan formal maupun informal. Pada masyarakat sedang berkembang umumnya masih bersifat paternalistik di mana peranan pemimpin tampak dominan. Etnisitas dapat dijadikan alat atau 'kendaraan' bagi pemimpin yang ingin mengumpulkan kekuasaan untuk dirinya sendiri, tetapi juga, untuk pemimpin yang memiliki misi untuk menyejahterakan masyarakat sebagai pengikutnya. Dalam hal ini, dua kekuasaan besar yang sangat menentukan dalam pemanfaatan konsep etnisitas dalam kehidupan. Agama dan budaya merupakan dua kekuatan yang dapat dijadikan pengikat bahkan pemicu konflik di dalam permasalahan etnisitas. Dalam hal ini, peranan pemerintah, elite-elite politik, pemimpin masyarakat (*elites*) baik formal maupun informal sangat menentukan dalam menimbulkan sentimen positif maupun yang destruktif dari etnisitas dalam pembangunan masyarakat.

Persoalan sesungguhnya adalah berhubungan dengan perlunya membangun dan memajukan orang di daerah-daerah yang beranekaragam etnis dan budaya. Hal ini sangat tergantung dari konteks situasi dan kondisi masing-masing kelompok masyarakat, baik berdasarkan kelompok etnis, agama, ataupun kelompok ekonomi. Upaya ini juga tergantung pada jenis program pembangunan yang akan dilaksanakan. Program pembangunan, apa pun bentuk dan dari manapun asalnya, haruslah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan keanekaragaman masyarakat lokal.

Pada sebuah negara bangsa yang majemuk, demokrasi merupakan sebuah sistem nilai dan sistem politik yang telah teruji dan diakui sebagai yang paling realistis dan rasional untuk mewujudkan tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang adil, legalitas, dan manusiawi. Pada tahun 1863, negarawan Amerika Abraham Lincoln merumuskan suatu definisi demokrasi yang sangat populer yakni '*pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat*' (*government of the people, for the people, and by the people*).<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Ali Maksum, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM, Civil Society dan Multikulturalisme*, (Malang: PuSAPoM, 2007), hlm. 12.

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang pelaksanaannya mengutamakan asas musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama (seluruh rakyat). Dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 dan sila ke-4 Pancasila dirumuskan bahwa 'Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan'. Dengan demikian demokrasi Pancasila merupakan demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif diperlukan untuk menyatukan berbagai kepentingan yang timbul dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik-multikulturalistik. Jadi, setiap kebijakan publik hendaknya lahir dari musyawarah bukan dipaksakan. Deliberasi juga diperlukan untuk mencapai resolusi atas terjadinya konflik kepentingan. Maka diperlukan suatu proses yang 'fair' demi memperoleh dukungan mayoritas atas sebuah kebijakan publik demi suatu ketertiban sosial dan stabilitas nasional.

Sistem apa pun yang diterapkan negara-negara Islam, barangkali, suatu hal yang terpenting seharusnya dilakukan bagaimana menerapkan nilai-nilai falsafah/ideologi yang dianut dengan mengacu kebutuhan hakiki masyarakatnya, terlebih bagi masyarakat pluralistik-multikulturalisme pentingnya mengaktualisasikan prinsip-prinsip yang mengandung nilai-nilai demokrasi yang bersifat universal, seperti *freedom, equality, tolerance*, dan lain sebagainya. Suatu pemerintahan berkuasa dalam suatu negara berdaulat yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, dalam istilah Robert W. Heffner, *democratic civility*, akan mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya. Sebaliknya, suatu pemerintahan berkuasa dalam suatu negara berdaulat yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan atau demokrasi, akan memungkinkan percepatan terhadap potensi dan rentan terjadinya konflik sosial dan menguatnya resistensi, dan bahkan tidak ada jaminan terhadap keutuhan, integrasi sosial, dan integrasi bangsa.

Di satu sisi, pluralitas merupakan suatu 'kekayaan', di sisi lain, pluralitas juga memiliki potensi terhadap konflik sosial. Adapun, suatu sikap yang dikatakan mencerminkan pluralitas, antara lain: hidup dalam perbedaan atau toleransi; sikap saling menghargai; di manapun menempatkan manusia dalam kesetaraan dan tidak ada superioritas; sikap saling percaya; interdependen, suatu sikap saling membutuhkan dan saling melengkapi. Hal ini menuntut agar orang saling bekerja sama dan bertanggung jawab satu sama lainnya. Keadaan seperti ini hanya

dapat terjadi dalam tatanan sosial yang sehat di mana manusia saling memelihara hubungan sosial yang kokoh.<sup>54</sup>

Kehadiran dan pengembangan pendidikan multikultural diharapkan dapat merespons fenomena konflik etnis, sosial budaya, yang kerap muncul di tengah-tengah masyarakat yang berwajah multikultural. Konflik yang muncul suatu saat yang menjadi skala besar jika tidak mendapat perhatian khusus bagi para pelaku (*stakeholders*) terkait. Saat ini sudah selayaknya pendidikan memberikan penyadaran (*consciousness*) kepada masyarakat bahwa konflik bukan sesuatu yang baik dibudayakan. Pendidikan idealnya menjadi pemberi solusi terhadap beragam masalah terkait dengan perbedaan budaya, agama, etnis, dan lainnya. Agama salah satu elemen yang cukup potensial agar terjadinya konflik. Agama selalu diasosiasikan dengan ajaran yang penuh dengan nilai kedamaian dan keselamatan serta sakral. Agama juga menjadi pemicu munculnya konflik. Sepanjang sejarah, agama mempunyai implikasi terhadap munculnya *violence* dan *war*. Agama juga dapat dan menjadi pemicu terjadinya kekerasan.<sup>55</sup>

Fenomena kemajemukan ini bagaikan pisau 'bermata dua', di satu sisi, memberi dampak positif, yakni memberi khazanah budaya yang beragam, di sisi lain, dapat berdampak negatif, konflik sosial. Dalam menghadapi pluralisme budaya tersebut, diperlukan paradigma baru yang lebih toleran, berupa perlunya paradigma pendidikan multikultural. Hal ini penting dalam mempersiapkan generasi muda masa depan yang memiliki sikap apresiasif terhadap keberagaman dan perbedaan. Maraknya konflik sosial bernuansa etnis, agama, ras, dan adat menunjukkan pendidikan nasional boleh dikatakan telah 'gagal' dalam menciptakan kesadaran multikulturalisme.

Secara epistemologis multikulturalisme memiliki arti *multi* yang berarti banyak dan *kultur* yang berarti budaya serta *isme* yang berarti paham. Secara hakiki, dalam kata itu terkandung pengakuan

---

<sup>54</sup>Ali Maksum, *Pluralitas dan Multikulturalisme: Paradigma Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2011), hlm. 118. Lihat Pula: (Abdullah Idi, *Konflik Etno Religius di Asia Tenggara: Kasus Indonesia, Myanmar, Filipina, Thailand, dan Malaysia*, (Yogyakarta: LKiS, Cetakan ke-1, 2018, hlm. 3).

<sup>55</sup>Judy Carter dan Gordon S. Smith, *Religious Peacebuilding: From Potential to Action*, within Harold Coward and Gordon S. Smith (Eds), *Religion and Peace Building*, (Albany: State University on New York Press, 2004), page 279.

akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik. Jika dibahas lebih lanjut pendidikan multikulturalisme merupakan pendidikan yang memberikan pengetahuan secara praktis tentang berbagai budaya suatu bangsa yang dijadikan pedoman dalam melakukan komunikasi dengan sesama manusia lain dalam konteks apa pun. Di sini pendidik hanya berperan sebagai mediator, bukan sebagai fasilitator. Dalam praktiknya anak didik diajarkan untuk saling menghargai budaya orang lain.

Dalam kaitannya dengan prinsip Islam, demokrasi dan multikultural terjadi perbedaan pendapat yang tajam di kalangan pakar, yang setidaknya terdapat 3 pandangan: *Pertama*, kelompok *Apologetik*, yaitu kelompok yang menegaskan bahwa prinsip-prinsip multikultural dan demokrasi sudah *inheren* dengan ajaran Islam. *Kedua*, kelompok *Rejeksionis*, yaitu kelompok yang menolak prinsip-prinsip multikultural dan demokrasi karena dianggap berasal dari Barat bukan dari ajaran Islam, sehingga dengan penerapan multikulturalisme dikhawatirkan akan merusak aqidah dan pemahaman Islam yang diyakini. *Ketiga*, kelompok *Rekonstruksionis*, yaitu kelompok yang membaca secara kritis dan mendialogkan prinsip-prinsip Islam dengan prinsip-prinsip multikultural dan demokrasi sebagai upaya menemukan dan membangun paradigma baru pemahaman tentang multikultural yang jauh lebih progresif.<sup>56</sup>

James A. Banks dalam Abdullah Idi mengungkapkan bahwa pendidikan multikultural merupakan cara memandang realitas dan cara berpikir yang bukan hanya berisi tentang beragam kelompok etnis, ras, dan budaya. Banks mengungkapkan ada lima dimensi konsepsi pendidikan multikultural. *Pertama*, integrasi konten, merupakan pemaduan konten menangani sejauh mana guru menggunakan contoh dan konten dari beragam budaya dan kelompok untuk menggambarkan konsep, prinsip, generalisasi, serta teori utama dalam bidang mata pelajaran atau disiplin mereka. *Kedua*, proses penyusunan pengetahuan, di mana sesuatu yang berhubungan dengan sejauh mana guru membantu siswa paham, menyelidiki, dan menentukan bagaimana asumsi budaya yang tersirat, kerangka acuan, perspektif, dan prasangka di dalam

<sup>56</sup>Sudhartono Abdul Hakim, *Islam dan Multikulturalisme*, (Yogyakarta: Pharama Press, 2015), hlm. 31.

disiplin memengaruhi cara pengetahuan yang disusun di dalamnya. *Ketiga*, mengurangi prasangka, di mana dimensi ini memfokuskan pada karakteristik dari sikap rasial siswa dan bagaimana sikap tersebut dapat diubah dengan metode dan bahan pengajaran. *Keempat*, pedagogi kesetaraan, di mana ketika guru mengubah pengajaran mereka ke cara yang memfasilitasi prestasi akademis dari siswa dari beragam kelompok ras, budaya, dan kelas sosial. Termasuk dalam pedagogi ini adalah penggunaan beragam gaya mengajar yang konsisten dengan banyaknya gaya belajar dalam beragam kelompok budaya dan ras. *Kelima*, budaya sekolah atau struktur sekolah yang memberdayakan, di mana praktik pengelompokan dan penamaan partisipasi olah raga, prestasi yang tidak proporsional. Interaksi staf, siswa, antaretnis, dan ras merupakan beberapa dari komponen budaya sekolah yang harus diteliti untuk menciptakan budaya sekolah yang memberdayakan siswa dari beragam kelompok, ras, etnis, dan budaya.<sup>57</sup>

Untuk itu, pendidikan multikultural dapat dimanfaatkan dalam upaya membina anak didik atau siswa agar tidak tercerabut dari akar budayanya. Pertemuan antarbudaya di era globalisasi dapat menjadi ancaman bagi kalangan anak didik. Mereka perlu diberi penyadaran akan pengetahuan beragam sehingga mereka memiliki kompetensi yang luas akan pengetahuan global, terutama dalam segi kebudayaan.

Penulisan buku ini, lebih difokuskan pada beberapa kajian pokok: konsep pendidikan multikultural; pendidikan multikultural dalam perspektif ajaran Islam; dan landasan/asas kurikulum pendidikan Islam berbasis multikultural.

Penulisan buku berbasis penelitian ini dipandang penting dilakukan, dengan beberapa alasan (*reasons*) pokok: *Pertama*, secara akademik-saintifik, penelitian tentang pendidikan multikultural ini diharapkan dapat menghasilkan informasi ilmiah sebagai khazanah ilmu pengetahuan sosiologis-keagamaan dan pendidikan agama. *Kedua*, secara praktis, hasil penulisan buku ini merupakan kontribusi ilmiah dalam pengelolaan etnisitas, yakni sebagai '*in-put*' yang berarti dalam upaya mereduksi beragam potensi dan konflik sosial-etnisitas (terutama etnis dan agama) yang pernah terjadi di negeri ini. *Ketiga*, hasil penulisan *e-book* ini diharapkan dapat memberi

---

<sup>57</sup>Abdullah Idi, *Bahan Kuliah Sosiologi Pendidikan*, Program Doktor (S-3), Pascasarjana IAIN Bengkulu, 2019.

pemikiran akademik lebih lanjut dalam mendorong berkembangnya studi-studi ilmu sosial, sejarah, politik, ekonomi, dan keagamaan di kampus Perguruan Tinggi Ke-Islaman (PTKIN) se-Indonesia, sebagai kontribusi terhadap berbagai perscalan sosial dan keberagaman yang diharapkan dapat memperkokoh kohesi sosial, integrasi sosial, dan integrasi bangsa menuju terwujudnya *civil society* dalam masyarakat Indonesia modern.

## B. Metodologi Penulisan

Metode penulisan buku berbasis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data (*technique of collecting data*) dilakukan melalui teknik atau metode kajian pustaka (*review of literatures*), dengan menelusuri dan meneliti berbagai sumber dari buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, dokumentasi, dan dokumen lainnya yang terkait dengan permasalahan penelitian ini. Teknik analisis data, di mana data yang sudah diklarifikasi dibantu dengan teori-teori kemudian direkonstruksi dengan pendekatan kualitatif ke dalam sebuah deskripsi yang kemudian dianalisis hingga memungkinkan untuk pengambilan kesimpulan. William Wiersma, mengatakan bahwa aktivitas pertama dalam proses penelitian ini adalah melakukan penelitian literatur (*review of literatures*), dengan mencari data atau informasi berdasarkan pertanyaan penelitian. Setelah pertanyaan diidentifikasi, setidaknya secara tentatif, informasi yang diperlukan tentang pertanyaan agar supaya dapat diletakkan secara tepat dan penelitian dapat berproses dengan efektif. Dengan sejumlah informasi yang diperoleh dari banyak sumber, riset literatur tidak dilakukan dengan cara 'remeh' atau 'enteng'.<sup>58</sup>

Miles dan Huberman<sup>59</sup> mengatakan bahwa secara umum, proses analisis data kualitatif meliputi empat hal penting: *Pertama*, pengumpulan data (*data collecting*), yakni kegiatan awal dengan mengumpulkan data yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan pertanyaan dalam penelitian. *Kedua*, reduksi data (*data reduction*), yakni proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan pengubahan data kasar yang

<sup>58</sup>William Wiersma, *Research Methods in Education*, Fifth Edition, (USA: A Division of Simon & Schuster, Inc., 1991), pages 49-40.

<sup>59</sup>Miles & Huberman dalam Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*, Pengantar: William L. Neuman, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 11-12.

muncul dari catatan tertulis yang dihasilkan ketika berada di lapangan. Proses ini berlangsung terus-menerus. Banyak informasi diperoleh penulis, tetapi tidak semua informasi tersebut berguna atau memiliki kontribusi dalam mengungkap masalah penelitian. Untuk itulah reduksi data diperlukan kapan saja sedikit demi sedikit, karena bila proses ini dilakukan pada akhir penelitian/penulisan buku ini, akan semakin banyak informasi yang mesti diseleksi. *Kedua*, penyajian data (*display data*), yakni kegiatan menyajikan data hasil penelitian, sehingga memungkinkan peneliti mengambil kesimpulan sementara dan dapat merencanakan tindakan berikutnya bila ternyata masih terdapat data yang belum lengkap dan perlu klarifikasi, atau belum diperoleh sama sekali. *Ketiga*, verifikasi, penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*), yakni kegiatan merumuskan kesimpulan berdasarkan kegiatan atau aktivitas terdahulu.

*Time schedule* atau periode penelitian ini memerlukan waktu selama 6 (enam) bulan, yakni Juni-November 2019. Selanjutnya, sejak 2020 hingga 2021, naskah hasil penelitian ini dilakukan revisi-revisi dan penambahan bacaan sumber-sumber terkait lainnya sehingga dipandang layak untuk dipublikasi buku referensi. *Product* yang diharapkan dari penulisan buku ini: *pertama*, hasil penulisan buku ini sebagai *input* bagi *stakeholders* dalam pengambilan kebijakan bertalian dengan beragam permasalahan sosial (*social problems*) bertalian dengan keberagaman (etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan) menuju bangsa demokratis, *civil society*. Seperti diketahui, dalam perkembangan akhir-akhir ini, dalam masyarakat pluralistik (*plural society*) Indonesia, kasus-kasus konflik sosial dan primordialisme, sering juga dikatakan radikalisme, bertalian dengan etnisitas (etnis dan agama) dengan beragam faktor penyebabnya dirasakan begitu memprihatinkan yang dapat mengancam integrasi sosial dan integrasi bangsa. *Kedua*, hasil penulisan buku berbasis riset ini dipublikasi sehingga dapat dibaca berbagai kalangan, baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum.

## PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURAL: KONSEP, TUJUAN, DAN KARAKTERISTIK

Pada bagian ini dibahas tentang konsep, tujuan pendidikan Islam, landasan normatif, dan karakteristik pendidikan Islam berbasis multikultural. Eksistensi kehadiran pendidikan multikultural diharapkan dapat merespons adanya potensi fenomena konflik etnis, sosial budaya, yang kerap muncul di tengah-tengah masyarakat yang berwajah multikultural. Konflik yang muncul suatu saat yang menjadi skala besar jika tidak mendapat perhatian khusus bagi para pelaku (*stakeholders*) terkait. Saat ini sudah selayaknya pendidikan memberikan penyadaran (*consciousness*) kepada masyarakat bahwa konflik bukan sesuatu yang baik dibudayakan. Pendidikan idealnya menjadi pemberi solusi terhadap beragam masalah terkait dengan perbedaan budaya, agama, etnis, dan lainnya. Agama salah satu elemen yang cukup potensial agar terjadinya konflik. Agama selalu diasosiasikan dengan ajaran yang penuh dengan nilai kedamaian dan keselamatan serta sakral. Agama juga menjadi pemicu munculnya konflik. Sepanjang sejarah, agama mempunyai implikasi terhadap munculnya *violence* dan *war*. Agama karenanya juga dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Judy Carter dan Gordon S. Smith, *Religious Peacebuilding: From Potential to Action*, within Harold Coward and Gordon S. Smith (Eds), *Religion and Peace Building*, State University of New York Press, Albany, 2004, page 279.

Jangkauan tindak kekerasan atas nama agama dapat dilihat pada berbagai belahan dunia (seperti Israel vs Hamas-Paletina). Konflik yang berkepanjangan atas nama agama memang sulit diselesaikan. Bhikhu Parekh mengungkapkan hal itu dikarenakan agama yang dalam praktiknya bersifat *absolutist, self-righteous, arrogant, dogmatic and impatient of compromise*.<sup>2</sup>

Karena itu, adalah penting adanya suatu penyelarasan antara pendidikan di sekolah, keluarga, dan masyarakat yang akan terus berupaya melahirkan nilai-nilai ideal dalam menjalani kehidupan.<sup>3</sup> Hal itu relevan dengan konsep pendidikan Islam, yang menyelaraskan pendidikan dalam semua aspek, termasuk dalam memandang masyarakat multikultural. Jika terdapat munculnya beberapa kasus konflik dalam masyarakat, hal ini menunjukkan tentang perlunya pendidikan multikultural bagi para generasi penerus agar terciptanya suasana nyaman, damai, saling menghargai, sehingga pendidikan Islam berperan sebagai media transformasi sosial, budaya, dan multikulturalisme.<sup>4</sup> Islam sebagai agama *rahmatan lil' alamin* diharapkan mampu memberikan solusi terhadap kemungkinan adanya beragam perbedaan yang ada.

## A. Konsep dan Tujuan Pendidikan Islam

Dalam memahami definisi pendidikan Islam, berikut disampaikan beberapa pendapat para ahli tentang makna pendidikan Islam tersebut, menurut Hasan Langgulung mencakup beberapa pengertian, yaitu *at-Tarbiyah ad-Diniyyah* (pendidikan keagamaan), *Ta'lim ad-Din* (pengajaran agama), *at-Ta'lim ad-Din* (pengajaran keagamaan), *at-ta'lim al-islami* (pengajaran keislaman), *Tarbiyah al-Muslimin* (pendidikan orang-orang Muslim), *at-Tarbiyah fi al-Islam* (pendidikan dalam Islam), *at-Tarbiyah 'inda al-Muslimin* (pendidikan di kalangan orang-orang Islam), dan *at-Tarbiyah al-Islamiyyah* (pendidikan islami).<sup>5</sup>

<sup>2</sup>Bhikhu Parekh, *Politics, Religion & Free Speech in Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*, (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2002), hlm. 330.

<sup>3</sup>Abdullah Idi, *Sosiologi Pendidikan; Individu, Masyarakat dan Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 59.

<sup>4</sup>Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 5.

<sup>5</sup>Hasan Langgulung, "Pendidikan Islam, Demokrasi, dan Masa Depan Bangsa".

Sedangkan Zakiyah Daradjat mengatakan bahwa pendidikan Islam merupakan pendidikan menyeluruh yang mencakup kehidupan manusia seutuhnya, yang tidak hanya memperhatikan dimensi ibadah, akidah, akhlak, tetapi juga memiliki cakupan lebih luas dari ketiga dimensi tersebut. Zakiah Daradjat lebih lanjut mengatakan bahwa konsep pendidikan Islam: *Pertama*, pendidikan Islam menyangkut seluruh dimensi manusia sebagaimana ditentukan Islam. *Kedua*, pendidikan Islam menjangkau kehidupan dunia akhirat secara seimbang. *Ketiga*, pendidikan Islam memperhatikan semua gerak kegiatannya, serta mengembangkan adanya hubungan dengan orang lain. *Keempat*, pendidikan berlangsung sepanjang hayat, sejak kandungan hingga akhir hayat di dunia ini. *Kelima*, kurikulum pendidikan Islam diharapkan memperoleh hak di dunia dan hak di akhirat.<sup>6</sup>

Keberadaan pendidikan Islam meliputi semua dimensi manusia, artinya pendidikan yang dilakukan harus mampu mengembangkan seluruh potensi atau dimensi yang ada pada diri manusia, yaitu fisik, akal, akhlak, iman, kejiwaan, estetika, dan sosial kemasyarakatan. Semua dimensi itu merupakan dimensi dasar yang dimiliki manusia. Karena luasnya dimensi yang harus dibangun dan dikembangkan dalam Islam, pendidikan dalam Islam tidak terfokus pada pendidikan di sekolah secara formal saja, tetapi seluruh aktivitas dan lingkungan di mana orang Islam berada, sebagai tempat menimba ilmu, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ahmad Tafsir menungkapkan pendidikan Islam sebagai "bimbingan yang diberikan seseorang kepada orang lain agar dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Atau bimbingan terhadap seseorang agar menjadi seorang Muslim seoptimal mungkin".<sup>7</sup> Tampak bahwa definisi ini terlihat pengertian sempit, hanya menyangkut pendidikan seorang kepada seorang, yang diselenggarakan keluarga, masyarakat, dan sekolah, yang menyangkut pembinaan aspek jasmani, akal, dan hati peserta didik. Sehingga sekurang-kurangnya teori

---

*Jurnal Kajian Islam Ma'rifah*, Volume 3/Tahun 1997. Lihat pula dalam kutipan: (Muhaimin, et. Al-Qur'an, *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, cet. 4, 2008), hlm. 36.

<sup>6</sup>Zakiah Daradjat, *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*. (Jakarta: YPI Ruhama, 1996), hlm. 35.

<sup>7</sup>Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Rosdakarya, 2008), hlm. 32.

pendidikan Islam membahas tentang hal-hal tersebut. Apabila diuraikan sebagai berikut: *Pertama*, pendidikan dalam keluarga mencakup aspek jasmani, akal, dan hati. *Kedua*, pendidikan dalam masyarakat mencakup aspek jasmani, akal, dan hati. *Ketiga*, pendidikan di sekolah mencakup aspek jasmani, akal, dan hati.<sup>8</sup> Ketiga dimensi tersebut idealnya bisa selaras dan saling melengkapi.

Omar Mohammad al-Thoumy al-Syaibani, keselarasan itu harus menunjang sebagai berikut: *Pertama*, tujuan individual yang berkaitan dengan para individu. *Kedua*, tujuan sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat secara keseluruhan, tentang perubahan dan kemajuan yang diinginkan. *Ketiga*, tujuan profesional yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu. Dari ketiga unsur pencapaian pendidikan itu idealnya harus dilakukan secara terpadu atau integral sehingga tercapai tujuan proses pendidikan diharapkan.<sup>9</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam merupakan suatu proses edukatif yang dilakukan secara sadar, melalui pengarahan dan bimbingan yang terus-menerus, mencakup pengembangan seluruh potensi yang Allah Swt. karuniakan kepada manusia sebagai makhluk-Nya secara maksimal, untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dampak dari proses pendidikan Islam itu, akan melahirkan saling menyayangi, menghargai, dan saling membantu dalam menegakkan kebenaran dan kesabaran, sehingga tercapainya kemakmuran dan kebahagiaan.

Adapun tujuan pendidikan Islam menurut beberapa ahli lainnya, yaitu menurut Imam al-Ghozali yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah mendekatkan diri (*taqorrub*) kepada Allah serta mencapai kesempurnaan insani agar bahagia di dunia dan akhirat.<sup>10</sup> Ahmad D. Marimba mengatakan tujuan pendidikan Islam adalah terbentuknya kepribadian yang utama yaitu kepribadian Muslim.<sup>11</sup> Al-

<sup>8</sup>Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, hlm. 32-33.

<sup>9</sup>Omar Muhammad Al-Thoumy Al-Syaibani, *Falsafah Pendidikan*, terj. Hasan Langgulung, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 399.

<sup>10</sup>Fathiyayah Hasan Sulaiman, *Pendidikan Al-Ghozali*, Alih bahasa Andi Hakim, Cet II, (Jakarta: CV. Guna Aksara, 1990), hlm. 31.

<sup>11</sup>Kepribadian Muslim merupakan kepribadian yang seluruh aspek-aspeknya yakni baik tingkah laku luarnya, kegiatan-kegiatan jiwanya, maupun filsafat hidup dan kepercayaan menunjukkan pengabdian diri kepada Tuhan penyerahan diri kepada-Nya. Marimba menggolongkan kepribadian menjadi tiga aspek: *Pertama*,

Abrasyi menjelaskan, bahwa tujuan akhir dari pendidikan Islam adalah pembinaan akhlak, menyiapkan anak didik untuk hidup di dunia dan akhirat, menyiapkan anak didik untuk menguasai ilmu pengetahuan dan memberikan keterampilan anak didik untuk mampu bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>12</sup> M. Nasir Budiman dalam Kemas Badarudin (2007), bahwa hakikat pendidikan Islam adalah pendidikan meningkatkan kualitas pribadi dan masyarakat menuju kesempurnaan seutuhnya.<sup>13</sup>

Ahmad Tafsir mengatakan bahwa tujuan akhir pendidikan Islam berkaitan dengan ciri-ciri Muslim sempurna.<sup>14</sup> *Pertama*, jasmaninya sehat dan kuat, dengan ciri: sehat, kuat, dan berketerampilan. *Kedua*, akalinya cerdas serta pandai, dengan ciri: mampu menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat, mampu menyelesaikan masalah secara ilmiah dan filosofis, memiliki dan mengembangkan sains, dan memiliki dan mengembangkan filsafat. *Ketiga*, hatinya bertakwa kepada Allah, dengan ciri: sukarela menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dan hati yang mampu berhubungan dengan alam gaib. Tafsir menyimpulkan bahwa tujuan pendidikan Islam terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pendidikan Islam ialah menjadi Muslim sempurna, atau manusia yang bertakwa, atau manusia yang beriman, atau manusia yang beribadah kepada Allah Swt., sedangkan tujuan khususnya adalah manusia yang memiliki ciri-ciri di atas.<sup>15</sup>

---

aspek-aspek kejasmanian; meliputi tingkah laku luar yang mudah tampak dan dapat diketahui dari luar. Misalnya cara-cara berbuat, cara-cara berbicara, dan sebagainya. *Kedua*, aspek-aspek kejiwaan; meliputi aspek-aspek yang tidak segera dapat dilihat dan diketahui dari luar, misalnya: cara-cara berpikir, sikap, dan minat. *Ketiga*, aspek-aspek kerohanian yang luhur; meliputi aspek-aspek kejiwaan yang lebih abstrak yaitu filsafat hidup dan kepercayaan. Ini meliputi sistem nilai-nilai yang telah meresap di dalam kepribadian itu, yang telah menjadi bagian dan mendarah daging dalam kepribadian itu yang mengarahkan dan memberi corak seluruh kehidupan individu itu. Bagi orang-orang yang beragama, aspek inilah yang menuntutnya ke arah kebahagiaan, bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat. Aspek inilah yang memberi kualitas kepribadian keseluruhannya. Lihat: (Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1962), hlm. 46.

<sup>12</sup>Omar Muhammad Al-Thoumy Al-Syaibani, *Falsafah Pendidikan*, terj. Hasan Langgulung, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 15-18.

<sup>13</sup>Kemas Badaruddin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 39.

<sup>14</sup>Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, hlm. 50-51.

<sup>15</sup>Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, hlm. 50-51.

Jadi, tujuan akhir pendidikan Islam adalah pembentukan keimanan, penguatan ibadah, dan penyempurnaan akhlak yang sehat dan kuat jasmani, akal yang cerdas dan pandai, serta hati yang bertakwa dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Secara etimologis multikultural dibentuk dari kata multi (banyak), dan kultur (budaya). Dengan demikian multikulturalisme dapat diartikan sebagai sebuah paham yang mengakui adanya banyak kultur. Secara hakiki, dalam kata itu terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik.<sup>16</sup>

Selanjutnya, secara etimologi terdapat beberapa pendapat ahli tentang pendidikan multikultural, antara lain: Andersen dan Cusher berpendapat bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan mengenai keragaman budaya.<sup>17</sup> Sedangkan James A. Banks mendefinisikan pendidikan multikultural adalah ide, gerakan pembaruan pendidikan, dan proses pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengubah struktur lembaga pendidikan supaya siswa baik pria maupun wanita, siswa berkebutuhan khusus, dan siswa yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan kultur yang bermacam-macam itu akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademis di sekolah.<sup>18</sup>

Menurut Donna M. Gollnick dan Lawrence A. Blum menjelaskan bahwa pendidikan multikultural adalah suatu bentuk kesediaan untuk mengakui, menerima, dan menghargai keragaman, yang memiliki perhatian kuat terhadap pengembangan sikap-sikap sosial yang positif dan menolak sikap-sikap sosial yang cenderung rasial, stereotipe (mengejek objek tertentu) dan berprasangka buruk kepada orang atau kelompok lain yang berbeda suku, ras, bahasa, budaya, dan agama.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 75.

<sup>17</sup>Choirul Mahfud, 'Pendidikan Multikultural....', *Ibid.*, hlm. 175.

<sup>18</sup>Yaya Suryana dan H.A. Rusdiana, *Pendidikan Multikultural; Suatu Upaya Penguatan Jati Diri Bangsa (Konsep, Prinsip, dan Implementasi)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 196.

<sup>19</sup>Ahmad Rois, Pendidikan Islam Multikultural Telaah Pemikiran Muhammad Amin Abdullah, *Jurnal Epistem* Vol. 8, No. 2, Desember 2013, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT Kerinci Indrapura, hlm. 311.

Musa Asya'rie menjelaskan bahwa pendidikan multikultural adalah suatu proses pendidikan tentang cara hidup menghormati, tulus, toleransi terhadap keragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural sehingga peserta didik kelak memiliki kekenyalan dan kelenturan mental bangsa dalam menyikapi konflik sosial di masyarakat.<sup>20</sup> Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan multikultural adalah sebagai berikut.

*Pertama*, pendidikan multikultural merupakan sebuah proses pengembangan yang berusaha meningkatkan sesuatu yang sejak awal atau sebelumnya sudah ada. Oleh karena itu, pendidikan multikultural tidak mengenal batasan atau sekat-sekat sempit yang sering menjadi tembok tebal bagi interaksi sesama manusia.

*Kedua*, pendidikan multikultural mengembangkan seluruh potensi manusia, meliputi, potensi intelektual, sosial, moral, religius, ekonomi, potensi kesopanan, dan budaya. Sebagai langkah awalnya adalah ketaatan terhadap nilai-nilai luhur kemanusiaan, penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang, penghargaan terhadap orang-orang yang berbeda dalam hal tingkatan ekonomi, aspirasi politik, agama, atau tradisi budaya.

*Ketiga*, pendidikan yang menghargai pluralitas dan heterogenitas. Pluralitas dan heterogenitas adalah sebuah keniscayaan ketika berada pada masyarakat sekarang ini. Dalam hal ini, pluralitas bukan hanya dipahami keragaman etnis dan suku, akan tetapi juga dipahami sebagai keragaman pemikiran, keragaman paradigma, keragaman paham, keragaman ekonomi, politik, dan sebagainya. Sehingga tidak memberi kesempatan bagi masing-masing kelompok untuk mengklaim bahwa kelompoknyalah yang paling benar.

*Keempat*, pendidikan yang menghargai dan menjunjung tinggi keragaman budaya, etnis, suku, dan agama. Penghormatan dan penghargaan seperti ini merupakan sikap yang sangat urgen untuk disosialisasikan. Sebab dengan kemajuan teknologi telekomunikasi, informasi dan transportasi telah melampaui batas-batas negara, sehingga tidak mungkin sebuah negara terisolasi dari pergaulan dunia.

---

<sup>20</sup>Yaya Suryana dan H. A. Rusdiana, *Pendidikan Multikultural: Suatu Upaya Penguatan Jati Diri Bangsa Konsep, Prinsip, dan Implementasi*, hlm. 197.

*Kelima*, pendidikan multikultural merupakan suatu keniscayaan dan hal ini penting untuk dipikirkan, dilaksanakan, dan terus dievaluasi pelaksanaan bagi pengembangan pembelajaran siswa di sekolah. Hal ini tentu penting diperhatikan dan dilaksanakan oleh para pemangku kebijakan baik pengelola sekolah, para guru, dan pemerintah atau *stakeholders* terkait.

*Keenam*, pendidikan multikultural perlu dijadikan salah satu pendekatan penting dalam proses pembelajaran terutama dalam kurikulum yang dapat menunjang terwujudnya pemahaman, pelaksanaan, dan pemberian hak-hak peserta dalam mengembangkan diri dan mengaktualisasikan diri di lingkungan sekolah, masyarakat, dan berbangsa serta bernegara.

*Ketujuh*, pendidikan multikultural merupakan upaya kesediaan dan kesadaran untuk mengakui, menerima, dan menghargai keragaman baik dalam bentuk ide, gagasan, maupun dalam hal sikap dan perilaku yang memiliki perhatian kuat terhadap pengembangan sikap-sikap sosial yang positif dan menolak sikap-sikap sosial yang cenderung rasial, stereotipe (mengejek objek tertentu), dan berprasangka buruk kepada orang atau kelompok lain yang berbeda suku, ras, bahasa, budaya, dan agama. Misalnya menjauhi prasangka historis, diskriminasi, dan prasangka superioritas *in-Group Feeling* yang berlebihan.<sup>21</sup>

## B. Landasan Normatif

Dalam konteks ini, dapat dijelaskan bahwa landasan Islam multikultural (PIM) bertalian dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis tentang multikultural. Dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13, Allah menjelaskan tentang manusia diciptakan dalam kondisi berbeda jenis kelamin, berbeda suku bangsa, sebagaimana dalam firman Allah Swt.

Artinya: Hai manusia! Kami ciptakan kamu dari satu pasang laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu beberapa bangsa dan suku bangsa, supaya kamu saling mengenal bukan supaya saling membenci, bermusuhan. Sungguh, yang paling mulia di antara

<sup>21</sup>Sulalah, *Pendidikan Multikultural; Dialektika Nilai-Nilai Universalitas Kebangsaan* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Press, 2011), hlm. 27.

kamu dalam pandangan Allah ialah yang paling bertakwa. Allah Maha Tahu, Maha Mengetahui (QS Al-Hujurat/49:13).<sup>22</sup>

Ayat tersebut dimulai dengan kata “*Ya Ayyuha an-Nas*” (Hai Manusia), kata An-Nas berarti manusia sebagai makhluk sosial, sehingga kata manusia menunjukkan panggilan secara universal, yang diciptakan dalam kondisi multisuku, bangsa, budaya, adat istiadat, dan bahkan agama. Potongan ayat di atas juga sangat ‘modern’ sekali, diciptakan-Nya manusia berbeda suku bangsa untuk “saling mengenal”. Apa maksudnya? Keragaman itu merupakan sarana untuk kemajuan peradaban. Kalau seseorang hanya lahir di suku tertentu, tidak pernah mengenal budaya orang lain, tidak pernah bergaul dengan berbagai macam anak bangsa, dan hanya tahunya orang di sekitarnya, maka sikap dan tindak-tanduk yang tidak berkembang atau istilah yang sering digunakan “seperti katak dalam tempurung”.

Keragaman tidak dimaksudkan untuk saling meneror, memaksa, atau membunuh. Al-Qur'an mengenalkan konsep yang luar biasa: keragaman itu untuk saling mengenal satu sama lain. Dengan saling mengenal perbedaan, seseorang bisa belajar membangun peradaban. Dengan saling tahu perbedaan di antara manusia maka akan melahirkan sikap lebih toleran; seseorang mendapat kesempatan belajar satu sama lain. Kesalahpahaman sering terjadi karena manusia belum saling mengenal keragaman secara baik. Dalam suatu penelitian di Australia menyebutkan bahwa mereka yang anti terhadap Muslim ternyata mereka tidak pernah bergaul akrab dengan orang Islam. Artinya, mereka yang mengenal orang Islam di lingkungannya tinggal, di sekolah atau di tempat kerja akan cenderung lebih toleran terhadap perbedaan.<sup>23</sup>

Lebih lanjut Sayyid Quthb dalam tafsir *fi Zhilalil Qur'an* menjelaskan: “Hai manusia! Hai orang-orang yang berbeda ras dan warna kulitnya, yang berbeda-beda suku dan kabilahnya, sesungguhnya kalian berasal dari pokok yang satu. Maka, janganlah berikhtilaf, jangan lagi bercerai-berai, janganlah bermusuhan dan janganlah centang-perenang. Tujuannya bukan untuk saling menjegal dan bermusuhan,

<sup>22</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 517.

<sup>23</sup>Nadirsyah Hosen, (Rais Syuriah PCI Nahdlatul Ulama Australia - New Zealand dan Dosen Senior Monash Law School), “*Tafsir al-Hujurat Ayat 13: Tak Kenal Maka Tak Sayang*”. Lihat <http://www.nu.or.id/post/read/74936/tafsir-al-hujurat-ayat-13-tak-kenal-maka-tak-sayang>.

tetapi supaya harmonis dan saling mengenal. Perbedaan bahasa dan warna kulit, perbedaan watak dan akhlak, serta perbedaan bakat dan potensi merupakan keragaman yang tidak perlu menimbulkan pertentangan dan perselisihan. Namun justru untuk menimbulkan kerja sama supaya bangkit dalam memikul segala tugas dan memenuhi segala kebutuhan. Warna kulit, ras, bahasa, negara, dan lainnya tidak ada dalam pertimbangan Allah. Di sana hanya ada satu timbangan untuk menguji seluruh nilai dan mengetahui keutamaan manusia.<sup>24</sup>

Ayat lain menjelaskan tentang perbedaan bahasa dan warna kulit, sebagaimana dijelaskan dalam Surah Ar-Rum Ayat 22.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui".

Ayat di atas menjelaskan bahwa perbedaan merupakan keniscayaan, dan akan memberikan makna yang tinggi bagi mereka yang mengetahui atau berilmu. Menurut Muhammad Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya *Al-Misbah* menjelaskan: Al-Qur'an demikian menghargai bahasa dan keragamannya, bahkan mengakui penggunaan bahasa lisan yang beragam. Perlu ditandaskan bahwa dalam konteks pembicaraan tentang paham kebangsaan, Al-Qur'an sangat menghargai bahasa.<sup>25</sup>

Bahasa pikiran dan bahasa perasaan jauh lebih penting ketimbang bahasa lisan, sekalipun bukan berarti mengabaikan bahasa lisan, karena sekali lagi ditekankan bahwa bahasa lisan adalah jembatan perasaan. Atas dasar semua itu, terlihat bahwa bahasa saat dijadikan sebagai perekat dan kesatuan umat, dapat diakui oleh Al-Qur'an, bahkan inklusif dalam ajarannya. Bahasanya dan keragamannya merupakan salah satu bukti keesaan dan kebesaran Allah.<sup>26</sup> Demikian pula perbedaan bahasamu yang diucapkan dengan mulut yang terdiri atas unsur yang sama: bibir, gigi, dan lidah; dan perbedaan warna kulitmu meski kamu berasal dari sumber yang satu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-

<sup>24</sup>Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 421.

<sup>25</sup>Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan dan Keresasian Al-Qur'an Vol. I*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 341.

<sup>26</sup>Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan dan Keresasian Al-Qur'an*, hlm. 342.

benar terdapat tanda-tanda eksistensi dan keesaan-Nya bagi orang-orang yang mengetahui atau berilmu.

Ayat lain yang menunjukkan tentang sikap toleransi atau mengakui keberadaan agama lain, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Kafirun.

Artinya: Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah, untukmu agamamu, dan untukku agamaku".

Ayat ini secara tegas menjelaskan tentang adanya agama lain selain dianut oleh umat Islam, yang harus saling menghargai dan bertoleransi, tidak perlu dicampur aduk antara agama satu dengan lainnya, bahkan di akhir ayat umat Islam bersikap mengakui dan menghargai agama yang berbeda dengan kalimat "untukmu agamamu, dan untukku agamaku". Kalimat ini memberikan gambaran perbedaan agama merupakan keniscayaan, atau dengan kata lain, orang yang beragama Islam akan melaksanakan ajaran agama Islam secara baik, dan memberikan hak kepada agama lain untuk melaksanakan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinannya itu, serta tidak perlu saling mengganggu, mencela, dan saling zalimi satu sama lainnya. Hal ini juga dikuatkan dengan QS. Yunus ayat 40 dan Surah Al-kahfi ayat 29.

Artinya : Di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an, dan di antaranya ada (pula) orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.

Artinya: Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir. Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka".

Kedua ayat Al-Qur'an tersebut memberikan gambaran tentang pemberian hak bagi manusia untuk memiliki agama yang berbeda satu sama lainnya, yang tentu saja tujuan akhirnya hendaknya disikapi secara arif dan tetap berbuat baik kepada mereka yang berbeda agama,

sehingga masing-masing manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah Swt.

Dengan memperhatikan beragam definisi pendidikan multikultural, maka terdapat beberapa karakteristik dari pendidikan multikultural tersebut antara lain: pendidikan yang berprinsip pada demokrasi, kesetaraan, dan keadilan. Di antara orientasi hidup yang universal yaitu kemanusiaan, kebersamaan, dan kedamaian. Orientasi hidup yang universal ini merupakan titik orientasi bagi pendidikan multikultural. Dengan demikian, pendidikan multikultural menentang adanya praktik-praktik hidup yang menodai nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan kedamaian seperti kekerasan, permusuhan, konflik, dan individualistik.<sup>27</sup>

Dari penjelasan tersebut terdapat beberapa karakter seseorang atau masyarakat dalam pendidikan Islam multikultural, menurut Zakiyuddin Baidhaw<sup>28</sup> karakter tersebut yaitu sebagai berikut.

*Pertama*, belajar hidup dalam perbedaan. Belajar dari perbedaan yang ada dalam kehidupan masyarakat, seseorang atau masyarakat yang memiliki pendidikan multikultural diharapkan akan memiliki karakter berupa sikap toleran, empati, simpati, pendewasaan emosional, kesetaraan dalam partisipasi, kontrak sosial baru dan aturan main kehidupan bersama antar agama, budaya, bahasa, ras, dan etnis lainnya.

*Kedua*, membangun rasa dan sikap saling percaya. Rasa saling percaya merupakan salah satu modal sosial (*social capital*) terpenting dalam penguatan kultural masyarakat. Secara sederhana dapat diartikan sebagai seperangkat nilai-nilai atau norma-norma yang dimiliki bersama suatu kelompok masyarakat yang mendorong terjadinya kerja sama antara satu dengan yang lain. Karakter saling percaya tetap membutuhkan dan didasari dari belajar hidup berbeda atau berbeda merupakan suatu keniscayaan.

*Ketiga*, memelihara rasa dan sikap saling pengertian. Memahami bukan berarti serta merta menyetujui, saling memahami dan pengertian di sini adalah kesadaran bahwa nilai-nilai mereka dan kita dapat berbeda dan mungkin saling melengkapi serta memberikan kontribusi terhadap

---

<sup>27</sup>Ahmad Rois, Pendidikan Islam Multikultural Telaah Pemikiran Muhammad Amin Abdullah, *Jurnal Epistem*, Vol. 8, No. 2, Desember 2013, hlm. 311.

<sup>28</sup>Zakiyuddin Baidhaw, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 78-84.

relasi yang dinamis, yang selanjutnya melahirkan sikap toleransi dan terbuka.

*Keempat*, menjunjung sikap saling menghargai (*mutual respect*). Sikap ini mendudukan manusia dalam relasi kesetaraan, tidak ada superioritas, tidak ada kelas atas dan bawah. Menghormati dan menghargai sesama manusia adalah nilai universal yang dikandung semua agama di dunia utamanya, termasuk agama Islam.

*Kelima*, terbuka dalam berpikir. Kematangan berpikir merupakan salah satu tujuan penting dari proses pendidikan. Pendidikan seyogianya memberi pengetahuan baru tentang bagaimana berpikir dan bertindak. Hal ini selanjutnya akan menghasilkan kemauan untuk memulai pendalaman tentang makna diri, identitas, dunia kehidupan, agama, dan kebudayaan diri sendiri dan orang lain. Keterbukaan ini akan melahirkan sikap moderat dan adil kepada sesama, dan memiliki perspektif yang lebih luas dan bermakna.

*Keenam*, apresiasi dan interdependensi. Kehidupan yang layak dan manusiawi hanya mungkin tercipta dalam sebuah tatanan sosial yang *care*. Semua anggota masyarakat dapat menunjukkan apresiasi dan memelihara relasi dan keterikatan. Dengan demikian perlu membangun kepedulian tentang apresiasi dan interdependensi umat manusia dari berbagai tradisi agama-agama, budaya, norma, dan nilai-nilai sosial lainnya. Karakteristik ini merupakan buah dari sikap terbuka dalam berpikir, berperasaan, dan bersikap serta bertindak.

*Ketujuh*, karakter resolusi konflik dan rekonsiliasi nirkekerasan. Konflik dalam kehidupan ini akan selalu ada dalam masyarakat. Namun harus terus diselesaikan dengan sebuah solusi yang baik dengan mengangkat nilai-nilai persaudaran sesama manusia. Hal ini juga perlu mengembangkan sikap rekonsiliasi, yakni upaya membangun perdamaian melalui sarana saling memaafkan dan membuka diri terhadap perbedaan, bukan melupakan tetapi memberikan maaf kepada semua pihak yang berkonflik.

Dengan memperhatikan uraian-uraian tentang karakteristik pendidikan multikultural di atas jelaslah bahwa terdapat kesesuaian antara nilai-nilai multikultural dalam perspektif Barat dengan nilai-nilai multikultural dalam perspektif Islam. Meskipun demikian, sumber kebenaran dari nilai-nilai multikultural tersebut berbeda. Jika nilai-

nilai multikultural dalam perspektif Barat bersumber dari filsafat dan bertumpu pada hak-hak asasi manusia, maka nilai-nilai multikultural dalam perspektif Islam bersumber dari wahyu. Tabel 1 berikut merupakan perbandingan karakteristik dan nilai-nilai pendidikan multikultural antara perspektif Barat dan Islam.<sup>29</sup>

Tabel 1. Karakteristik dan Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural

| Karakteristik                                                    | Nilai-Nilai Multikultural Perspektif Barat         | Nilai-Nilai Multikultural Perspektif Islam                                              |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Berprinsip pada demokrasi, kesetaraan, dan keadilan              | Demokrasi, kesetaraan, dan keadilan                | <i>Al-Musyawahah, al-Musawah</i> dan <i>al-'Adl</i>                                     |
| Berorientasi pada kemanusiaan, kebersamaan, dan kedamaian        | Kemanusiaan, kebersamaan, dan kedamaian            | <i>Hablum min an-Nas, al-Ta'aruf, al-Ta'awun</i> dan <i>al-Salam</i>                    |
| Mengembangkan sikap mengakui, menerima, dan menghargai keragaman | Toleransi, empati, simpati, dan solidaritas sosial | <i>Al-ta'addudiyat, al-Tanawwu', al-Tasamuh, al-Rahmah, al-'Afw</i> dan <i>al-Ihsan</i> |

Tabel 1 di atas menjelaskan tentang terdapat kesamaan nilai secara universal antara nilai-nilai multikultural dalam perspektif Barat dan Islam, namun demikian tetap terdapat sumber dan pola penerapan dalam kehidupan masyarakat yang berbeda adat istiadat dan budaya. Sumber nilai multikultural Barat berasal dari filsafat dan bertumpu pada hak-hak asasi manusia, maka nilai-nilai multikultural dalam perspektif Islam bersumber dari wahyu Allah Swt.

Jika dikontekstualisasi dengan pendidikan Islam berwawasan multikultural nilai-nilai yang ada sangat komprehensif dan luas, misalnya nilai *al-Musyawahah* (musyawarah), *al-Musawah* (persamaan), dan *al-'Adl* (keadilan), *Hablum min an-Nas* (hubungan sesama manusia), *al-Ta'aruf* (saling mengenal), *al-Ta'awun* (saling tolong-menolong), dan *al-Salam* (perdamaian), dan *Al-Ta'addudiyat* (kemajemukan), *al-Tanawwu'* (keragaman), *al-Tasamuh* (toleransi), *al-Rahmah* (kasih sayang), *al-'Afw* (saling memaafkan), dan *al-Ihsan* (berbuat kebaikan dan keindahan).

<sup>29</sup>Ahmad Rois, Pendidikan Islam Multikultural Telaah Pemikiran Muhammad Amin Abdullah, *Jurnal Epistem*, Vol.8, No. 2, Desember 2013, hlm. 312.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dijelaskan tentang Pendidikan Agama Islam berwawasan multikultural dan global ini, perlu melakukan pengembangan dalam berbagai aspek, antara lain:

*Pertama*, saat ini PAI diharapkan mampu menghasilkan manusia yang bertakwa dan produktif, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dapat dilakukan jika PAI memiliki kejelasan cita-cita dan langkah-langkah operasional dalam melaksanakan cita-cita tersebut, penataan kembali sistem yang ada pada PAI, meningkatkan dan memperbaiki manajemen PAI, dan peningkatan mutu Sumber Daya Manusia.<sup>30</sup> Selain itu juga PAI harus mampu menghasilkan manusia yang terbuka dan bersedia menerima hal-hal baru hasil inovasi dan perubahan, berorientasi pada *al-musyawahah* (musyawarah), *al-musawah* (persamaan), dan *al-'adl* (keadilan) berlandaskan tauhid yang kuat, konsisten, menghargai waktu, dan menghargai pendapat orang lain.

*Kedua*, sejalan dengan tujuan PAI tersebut, kurikulum hendaknya terus dilakukan pengembangan, yang terus disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Terkait hal ini paling tidak terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam pendidikan Islam; *pertama*, komponen akademik, dengan menekankan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bahasa dunia; *kedua*, kebutuhan masyarakat, baik lokal, nasional, dan internasional; *ketiga*, penguatan kekhasan PAI, ciri khas PAI tidak hanya sekadar pemberian pelajaran agama, tetapi lebih penting lagi adalah mewujudkan nilai-nilai keislaman dan totalitas dalam pendidikan Islam, yang terbuka, profesional, berperan aktif dalam kehidupan masyarakat.<sup>31</sup>

*Ketiga*, proses pembelajaran tidak hanya menggunakan metode ceramah dan bersifat satu arah, tetapi juga penting proses belajar inovatif dan kreatif, sehingga perlu diterapkan metode pengajaran yang lebih banyak melibatkan peserta didik dan pengalaman langsung, seperti *inter-active learning*, *quantum teaching*, dan lain sebagainya. Dengan kata lain pemaduan antara metode belajar mandiri dan kelompok, agar peserta didik memiliki jiwa sosial selain jiwa individual. Terkait dengan pendidikan Islam multikultural proses pembelajaran harus membangkitkan semangat pro aktif dan produktif.

<sup>30</sup>H.A.R., Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 150.

<sup>31</sup>Imron Mashadi, *Reformasi Pendidikan Agama Islam di Era Multikultural*, (Jakarta: Balai Litbang Agama, 2009), hlm. 55.

*Keempat*, tenaga pendidik dituntut profesional dan terus mengembangkan diri serta terus memiliki komitmen untuk terus belajar tanpa henti, dan terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia secara mendalam serta harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Tenaga pendidik harus memiliki kompetensi pribadi, kompetensi sosial, dan kompetensi intelektual.

*Kelima*, manajemen PAI sedapat mungkin dapat disesuaikan dengan perkembangan manajemen modern, profesional, dan dapat merencanakan, melaksanakan, mengontrol, dan mengevaluasi secara terus-menerus, yang tentu saja dilengkapi dengan sarana prasarana yang mendukung terwujudnya pola pendidikan agama Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Jadi, Pendidikan Islam Multikultural merupakan upaya kesediaan dan kesadaran untuk mengakui, menerima, dan menghargai keragaman baik dalam bentuk ide, gagasan, maupun dalam hal sikap dan perilaku yang memiliki perhatian kuat terhadap pengembangan sikap-sikap sosial yang positif dan menghindari sikap-sikap sosial yang cenderung rasial, stereotipe (mengejek objek tertentu), dan berprasangka buruk kepada orang atau kelompok lain yang berbeda suku, ras, bahasa, budaya, dan agama. Jadi, pendidikan Islam multikultural pada hakikatnya adalah pendidikan yang menempatkan multikulturalisme sebagai salah satu visi pendidikan dengan karakter utama yang bersifat inklusif, egaliter, dan humanis, namun tetap kokoh pada nilai-nilai spiritual dan ketuhanan yang berdasarkan Al-Qur'an dan *as-Sunnah*.

## PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURAL DAN INTEGRASI SOSIAL

Pada bagian ini akan dibahas tentang hubungan ajaran agama-agama dengan kemanusiaan (keumatan). Ajaran agama pada umumnya memiliki fungsi 'integratif' dan 'konflik' dalam kehidupan manusia sebagai pengikut agama berbeda. Selanjutnya, akan diulas pula tentang konsep pendidikan dan konsep pendidikan Islam berbasis multikultural. Selain itu, bahasan berikutnya akan mengungkapkan tentang konsep pendidikan Islam multikultural dalam perspektif sosiologis. Pada akhirnya, kesemua bahasan dalam bagian ini akan mengungkapkan urgensi 'sumber' ajaran agama dalam kehidupan manusia yang memberi pengetahuan teoretik dalam berbangsa dengan menghargai sesama dalam perbedaan yang ada. Agama berfungsi sebagai 'sumber' memanusiakan manusia apabila ajaran-ajarannya dipelajari melalui proses pendidikan yang benar dan berkualitas, yang mengedepankan multikulturalisme atau pluralisme dalam realitas sosial-masyarakat suatu bangsa.

## A. Relasi Agama dan Negara

Agama sebagai salah satu sumber nilai merupakan hal yang krusial bagi masyarakat majemuk atau multikultural seperti Indonesia. Agama memiliki arti, peranan, dan kontribusi bernilai dan bersejarah bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Hampir setiap bahasa kita terilhami dan dilatarbelakangi nilai-nilai dan gagasan yang berakar pada agama. Agama pula yang memberikan etos spiritual yang berpengaruh besar bagi kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia.<sup>1</sup>

Dalam konteks hubungan agama dengan negara, M. Natsir mengatakan bahwa 'Orang Islam itu memiliki satu ideologi sebagaimana halnya orang Kristen memiliki falsafah hidup dan ideologi, dan ideologi lainnya memiliki falsafah hidup dan ideologinya berbeda pula'.<sup>2</sup> Bagi seorang ideologi Muslim, dapat merujuk dalam ayat Al-Qur'an yang artinya: '*Tidaklah Aku jadikan jin dan manusia itu, melainkan untuk mengabdikan kepada Ku.*'<sup>3</sup> Agama akan menjadi 'candu' dan 'bisu', dikatakan Max Weber, apabila tidak dihadirkan oleh umat-Nya untuk menyapa kemanusiaan. Kehadiran agama dengan misi profetik harus dihadirkan sebagai bagian dari tanggung jawab di muka bumi yang penuh dengan tumpukan persoalan, seperti kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, kekerasan, keterbelakangan, dan lain sebagainya.<sup>4</sup> Agama, dalam hal ini, akan berfungsi bagi kemanusiaan apabila didukung ilmu pengetahuan sebagai bekal kehidupan yang diperoleh melalui proses pendidikan.

Sebagai 'subjek' pendidikan, manusia berperan aktif dalam proses dan pelaksanaannya, bertanggung jawab sebagai perencana, pengelola, pengevaluasi, dan pengawas proses berlangsungnya pendidikan. Manusia sebagai 'objek' dalam dunia pendidikan berupa sasaran yang ditunjukkan bagi pendidikan. Memahami hakikat manusia dan pendidikan dapat dipandang dua sisi. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, baik pendidikan yang berlangsung secara alami (informal) oleh orang tua maupun masyarakat (nonformal) serta

<sup>1</sup>Dadang Kahmad, '*Sosiologi Agama...*', *Loc. Cit.*, hlm. 146.

<sup>2</sup>M. Natsir, *Capita Selecta*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1955), hlm. 436.

<sup>3</sup>QS. Azzariyat: 56 dalam kutipan: (M.Natsir, *Capita Selecta*, Cetakan ke-1, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1955, hlm. 436).

<sup>4</sup>Zuly Qodir, *Gerakan Sosial Islam: Manifesto Kaum Beriman*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 75.

pendidikan tersistem (formal) sebagai pengembangan berbagai potensi anak didik, baik potensi intelektual, ketuhanan, rasa, karya, maupun karsa.<sup>5</sup>

Manusia juga merupakan makhluk kultural, karena memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi dalam proses evolusi sehingga memiliki kedudukan yang khusus dalam ekosistem alam sekitarnya. Perbedaan yang utama bahwa manusia dikaruniai kecerdasan dan akal, dengan akal inilah manusia dapat berusaha membantu tubuhnya menghadapi berbagai keadaan, berbagai tempat, dan cara hidup sehingga lebih luas dalam menyesuaikan diri dengan alam sekitarnya, membuat alat-alat yang dapat digunakan untuk melengkapi dirinya dalam keadaan tertentu, dengan akal dan kecerdasan otaknya manusia dapat membantu tubuhnya dan mempermudah hidupnya.<sup>6</sup> Agama menjadi 'racun' yang akan membunuh kemanusiaan bila tidak ada upaya untuk mendialogkan esensi agama dengan kehidupan aktual.<sup>7</sup>

Agama kian hari seakan terus menarik diperbincangkan, seperti munculnya istilah islamopobia, slogan-slogan anti-Kristen, anti-Yahudi, dan lain sebagainya. Jika hal demikian muncul, akan terjadi gesekan antarumat beragama dan juga bisa menjadi ancaman terhadap kerukunan dan kedamaian umat beragama dan warga manusia baik dalam konteks lokal, nasional, maupun global. Dalam konteks ini, umat beragama dipandang dapat meresahkan, mengusik ketenangan, dan mencoreng nilai-nilai kemanusiaan. Agama dapat pula dipandang sebagai pemicu kekerasan, konflik, dan bahkan perang. Mungkin juga stigma tersebut bisa murni karena agama atau pemahaman terhadap teks agama yang menyimpang. Idealnya, agama diposisikan sebagai pembela manusia melalui *moral idea* atau *fundamental values*-nya mengajak manusia agar bisa hidup rukun di bawah payung persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwah islamiyah*).<sup>8</sup>

Memang tidak selalu kekerasan yang terjadi di dunia ini karena faktor keagamaan, tetapi mesti diakui banyak kekerasan terjadi karena

---

<sup>5</sup>Yaya Suryana dan Rusdiana, *Pendidikan Multikultural*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 44.

<sup>6</sup>Yaya Suryana dan Rusdiana, '*Pendidikan Multikultural....*', *Ibid.*, hlm. 44.

<sup>7</sup>Muhamad Harjuna, 'Dialog Lintas Agama dalam Perspektif Hans Kung', *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, Vol. II, No. 1, Juni 2019, hlm. 56 (<http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/li>, diakses: 5 Oktober 2019).

<sup>8</sup>Muhamad Harjuna, 'Dialog Lintas Agama dalam Perspektif Hans Kung', *Living Islam: Journal of Islamic Discourses....*', *Ibid.* hlm. 57.

faktor keagamaan. Misalnya, adanya teror atas nama Islam, pengeboman yang dilakukan orang Kristen dan Katolik, pembunuhan dilakukan pengikut Hindu dan Buddha, dan lain sebagainya. Fenomena kekerasan yang mengatasnamakan agama dapat terjadi pada semua agama. Agama, dalam hal ini, selain sebagai 'sumber makna' bagi etos suatu masyarakat, juga berpotensi sebagai 'sumber konflik'. 'Sumber makna' bagi umat beragama yang dimaksudkan yakni menanamkan pada diri manusia sebagai 'vitalitas moral' yang lahir dari komitmen yang total pada apa yang diyakini sebagai hakikat realitas fundamental. Selain itu, agama bisa menjadi sumber 'inspirator' bagi munculnya sebuah tindakan kekerasan mengatasnamakan Tuhan, di mana agama melalui teks-teks keagamaan, secara implisit atau eksplicit mengajarkan, keunggulan doktrin, nilai-nilai eksklusivisme, fanatisme, dan *truth claim*.<sup>9</sup> Agama, dalam hal ini, menjadi dalih untuk tindak kekerasan, saling memusuhi, perang, dan lain sebagainya. Agama hanya sebatas identitas diri, belum dijadikan sebagai sesuatu yang dapat memberikan kontribusi terhadap perubahan, kesejahteraan, dan kedamaian bagi umat manusia.<sup>10</sup>

Keberadaan agama sebagai sumber kekerasan atau konflik, sering kali yang menjadi perhatian pada 'sumber' ajaran agama itu sendiri. Faktor mendorong orang terlibat dalam kekerasan atau katakanlah terorisme, dapat dikarenakan adanya: individu yang termarginalkan, kelompok yang memfasilitasi, dan ideologi yang membenarkan. Apabila ketiga elemen tersebut bertemu dapat menyebabkan rentan melahirkan paham dan perilaku yang ekstrem.<sup>11</sup> Dalam ajaran Islam, terdapat banyak teks-teks suci yang seolah-olah melegitimasi kekerasan. Legitimasi serupa terdapat pula dalam ajaran agama lain tentunya, seperti ajaran agama Kristen. Bila dalam agama Islam, *Jihad* (yang ditafsirkan secara literal) diletakkan sebagai legitimasi 'kekerasan', dalam agama Kristen digunakan istilah 'Perang Suci' (*The Holy War*). Perang Suci dalam agama Kristen merupakan perang yang memiliki tujuan suci atau perintah

<sup>9</sup>Wim Beuken & Karl-Josef Kuschel, *et. al.*, *Agama sebagai Sumber Kekerasan*. Penerjemah: Imam Baehaqie, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. v. Lihat pula: (Sumanto Al-Qurthuby, *Jihad Melawan Ekstremisme Agama, Membangkitkan Islam Progresif*, Semarang: Borobudur Indonesia Publishing, 2009, hlm. 26).

<sup>10</sup>Muhamad Harjuna, 'Dialog Lintas Agama dalam Perspektif Hans Kung', *Living Islam: Journal of Islamic Discourses....*, *Op. Cit.* hlm. 57.

<sup>11</sup>Agus Purnomo, *Ideologi Kekerasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 22.

Tuhan dan dengan pertolongan Tuhan untuk melawan orang yang dipandang 'kafir' dan mesti dilakukan tanpa ampun. Fenomena Perang Suci sebagai legitimasi terjadinya 'kekerasan' agama dalam Kristen banyak terjadi. Misalnya Perang Salib, Perang Yahwei (penaklukan Palestina Barat), penyerangan militer Roma terhadap kaum Donatis yang dianggap melawan ortodoksi Kristen Ortodoks di Ukraina. Konflik antara Hindu dan Buddha di Srilangka dan konflik tiga arah antara Katolik, Kristen Ortodoks, dan Muslim di Yugoslavia. Semuanya mengatasnamakan perang suci yang bernuansa melegalkan kekerasan.<sup>12</sup>

Azyumardi Azra, dalam suatu 'Acara Dialog Kebangsaan' di Jakarta (6/10/2019) mengungkapkan bahwa ancaman radikalisme terhadap Pancasila itu nyata adanya. Menurut Azra, saat ini Pancasila menghadapi ancaman laten, yakni radikalisme, di mana Pancasila itu kalau tidak hati-hati berhadapan dengan ideologi lain itu bisa kalah. Karena itu ancamannya riil atau nyata. Pancasila memang telah berhasil menjadi pemersatu bangsa Indonesia, namun ke depan Pancasila mesti diperkuat. Bangsa Indonesia tidak bisa selamanya menganggap Pancasila itu sakti. Pancasila itu sakti atau tidak tergantung dinamika internal berbangsa. Karenanya perlu adanya rejuvenasi, revitalisasi, dan resosialisasi Pancasila. Pancasila kurang berarti apabila terjadi ketidakadilan terus-menerus, karenanya Pancasila perlu didekati dengan kehidupan sehari-hari. Tidak hanya perlu membumikan nilai-nilai Pancasila untuk rakyat tetapi juga untuk para elite politik, karena ada kecenderungan elite politik semakin oligarki dan semakin menodai nilai-nilai keempat.<sup>13</sup>

Pandangan mengenai hakikat manusia dapat dibedakan menjadi dua aliran utama: *idealism-spiritualisme* dan *materialism*. Dalam pandangan *Idealism-Spiritualisme*, hakikat manusia dilihat dari kemampuan besar dari ide, seperti dikemukakan oleh Friedrich Hegel. Hakikat kehidupan manusia ditentukan oleh peraturan antara ide-ide yang saling berlawanan. Dari satu ide atau *thesa* bertentangan dengan ide yang lain atau *anti-thesa* dan melahirkan ide pada tingkat yang lebih tinggi atau *sintesa* yang berakhir pada ide absolut. Manusia sempurna merupakan perwujudan dari ide yang absolut itu. Ide absolut itu dapat berupa negara, berupa maha pencipta, dapat pula berupa *insan kamil*. Tetapi,

<sup>12</sup>Agus Purnomo, '*Ideologi Kekerasan*', *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>13</sup>Azyumardi Azra, 'Ancaman Radikalisme terhadap Pancasila itu Riil', *Muslimoderat.net.*, diakses: 7 Oktober 2019.

manusia memiliki keterbatasan dan tidak akan pernah memperoleh ide yang absolut itu.<sup>14</sup>

Dalam pandangan *Materialisme* melihat manusia sebagai bagian dari alam mikro, yakni bagian dari alam materi yang melihat hal yang realistis yang dapat diraba dan dapat dibentuk dengan kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu kekuatan yang membentuk manusia adalah kekuatan-kekuatan ekonomi yang tersembunyi berupa kelas-kelas dalam masyarakat. Oleh sebab itu, berbagai ungkapan manusia yang disebut kebudayaan atau agama merupakan produk dari kelas-kelas dalam masyarakat. Tugas pendidikan adalah menyadari akan adanya kesenjangan dalam masyarakat yang dikarenakan adanya kekuatan-kekuatan tersebut, untuk mengubah atau merombak kelas-kelas artifisial (*artificial*) yang dikonstruksikan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi dalam masyarakat untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas.<sup>15</sup>

Beragam pandangan manusia tersebut telah dijadikan titik tolak dari berbagai pemikiran pendidikan dan kebijakan pendidikan. Pandangan tentang manusia inilah yang mengakibatkan adanya perbedaan-perbedaan dalam kebijakan dan praksis pendidikan, karena berhubungan dengan hakikat manusia. Hal ini pula yang dapat menimbulkan dan menghasilkan sistem pendidikan dan kebijakan pendidikan yang berbeda. Untuk itu, ada beberapa pandangan keterkaitan dengan hakikat manusia:

*Pertama*, manusia merupakan satu-satunya makhluk yang dapat mewujudkan kemanusiaannya yang berbeda dengan makhluk (binatang) lainnya. Hal ini dikarenakan manusia memerlukan pendidikan. Tanpa pendidikan manusia tidak mungkin menjadi manusia atau mewujudkan kemanusiaannya, sehingga manusia dinamakan *animal educandum*.<sup>16</sup> *Kedua*, manusia sebagai *animal educabili*, di mana manusia memiliki potensi untuk dididik atau dikembangkan. Manusia diciptakan dalam berbagai kesempurnaannya tetapi juga dilahirkan dalam berbagai

<sup>14</sup>H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*. Cetakan ke-4, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 22.

<sup>15</sup>H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, 'Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan...', *Ibid.*, hlm. 22-23.

<sup>16</sup>M.J. Langeveld dalam: (H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, 'Kebijakan Pendidikan...', *Ibid.*, hlm. 23-24).

kelemahannya. Untuk itu, manusia memerlukan pendidikan dalam mengembangkan beragam potensi kemanusiaannya. *Ketiga*, manusia sebagai makhluk sosial. Hanya manusia yang mengenai nilai-nilai etika yang baik dan buruk dan tidak terdapat dalam dunia binatang. Pengenalan nilai-nilai yang baik dan buruk atau penghayatan etika hanya dapat diperoleh hanya karena manusia dikaruniai dengan kemampuan akal budi. Proses pendidikan merupakan suatu proses interaksi interpersonal atau interaksi sosial-edukatif. *Keempat*, proses pendidikan terjadi dalam masyarakat yang berbudaya.<sup>17</sup> *Kelima*, apabila hakikat manusia sebagai makhluk yang dapat dididik, maka manusia memiliki kemampuan untuk menjadi pendidik. Proses pendidikan bukan merupakan proses satu arah saja tapi dua arah antara pendidik dan peserta didik. Jadi, hakikat manusia dapat berupa *animal educandum*, *animal educabili*, dan *animal educator*.<sup>18</sup>

Berdasarkan pandangan tentang hakikat manusia yang berbeda, memunculkan rumusan tentang tujuan pendidikan melalui kebijakan-kebijakan pendidikan. *Pertama*, pendidikan sebagai transmisi kebudayaan. Proses pendidikan dinilai sebagai proses mentransmisikan nilai-nilai budaya yang telah terakumulasi dari satu generasi ke generasi lainnya. Kemajuan sains dan teknologi telah menjadikan dunia ini sebagai kampung besar (*big village*) yang tidak memungkinkan suatu masyarakat untuk tidak berubah. Bahkan, masyarakat berubah sangat cepat yang berakibat bisa kehilangan pegangan dan identitas dalam kehidupan dunia yang 'kosong', yang dikatakan Ritzer dapat memunculkan 'kehampaan'.<sup>19</sup> Suatu yang diperlukan dalam kebijakan pendidikan, antara lain, pentingnya mengembangkan kepribadian di tengah ancaman globalisasi. *Kedua*, pendidikan sebagai pengembangan kepribadian. Melalui pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kepribadian dalam pengertian etis yang akhirnya dapat memberi kontribusi berharga pula bagi masyarakat. *Ketiga*, pendidikan sebagai pengembangan akhlak mulia dan religius. Dalam masyarakat yang telah maju dan berdiferensiasi, pengembangan kepribadian manusia

---

<sup>17</sup>H.A.R. Tilaar, 'Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia', dalam kutipan: (H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, 'Kebijakan Pendidikan....', *Ibid.*, hlm. 25).

<sup>18</sup>H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, 'Kebijakan Pendidikan....', *Ibid.*, hlm. 26.

<sup>19</sup>George Ritzer dalam: (H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, 'Kebijakan Pendidikan....', *Ibid.*, hlm. 27).

bukan hanya terjadi di dalam beragam jenis lembaga pendidikan formal, informal, dan nonformal (dalam berbagai lembaga dalam masyarakat, seperti lembaga agama). *Keempat*, pendidikan sebagai pengembangan warga negara yang bertanggung jawab. Seperti diketahui, hakikat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, di mana sebagai anggota masyarakat dikenal sebagai warga negara. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk membela negaranya, menjaga citra bangsa, dan identitas bangsa, dan memberi yang terbaik bagi bangsa. *Kelima*, pendidikan mempersiapkan pekerja yang terampil dan produktif. Pendidikan untuk penyiapan pekerja diartikan dapat mengembangkan potensi untuk dapat bekerja pada bidangnya sehingga dapat menjadi *the agent of change*. *Keenam*, pendidikan sebagai pengembangan kepribadian yang utuh dan paripurna. Penghormatan pada keberagaman berdasarkan bakat berbeda. Pendidikan diharapkan dapat memberi fasilitas yang seluasnya bagi peserta didik sebagai upaya proses pengembangan pribadi yang utuh dan paripurna tersebut. *Ketujuh*, pendidikan sebagai proses pembentukan manusia baru. Dalam hal ini, pendidikan merupakan suatu proses 'konservatif', dan 'progresif', sebagai formasi mental, karakter dan moral; sebagai rekapitulasi dan retrospeksi pengembangan tahapan-tahapan evolusi kehidupan manusia (*stages of animal life and human history*); dan rekonstruksi dan reorganisasi pengalaman untuk meningkatkan kemampuan pengalaman kehidupan selanjutnya.<sup>20</sup>

Seperti diketahui, manusia lahir dan tumbuh dengan keistimewaan dan keunikan tersendiri. Manusia memiliki perbedaan fisik, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain, manusia juga memiliki perbedaan psikis seperti karakter, kepribadian, ide, pemikiran, keinginan, dan lain-lain. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasad dan rohani, fisik dan psikis, raga dan jiwa. Seseorang dikatakan sebagai manusia individu ketika unsur-unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Bila unsur-unsur itu sudah tidak menyatu lagi, seseorang tidak dinamakan sebagai individu. Individu merupakan perpaduan faktor *genotip* (bawaan sejak lahir atau keturunan) dan *fenotip* (lingkungan fisik dan sosial). Karakteristik khas dari seseorang dinamakan kepribadian. Nusiid Sumaatmaja mengungkapkan kepribadian merupakan keseluruhan perilaku individu yang sebagai hasil interaksi antara potensi-potensi

<sup>20</sup>John Dewey, *Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education*, (New York: MacMillan, 1964), pages 69-77.

fisik dan psikis yang dibawa sejak lahir dengan lingkungan, yang terlihat pada tindakan dan perbuatan serta reaksi mental psikologisnya ketika mendapat rangsangan dari lingkungan.<sup>21</sup>

Sebagai sebuah interaksi dari kualitas-kualitas *nafs, qalb, aql*, dan *bashirah*, kepribadian juga merupakan interaksi antara jiwa, hati, akal, dan hati nurani. Kepribadian, di samping bermodalkan kapasitas fitrah bawaan secara genetik dari orang tua, kepribadian juga terbentuk melalui proses panjang internalisasi pengalaman hidup yang dijalani. Berdasarkan kecenderungan tersebut, tentunya kualitas kepribadian setiap orang tentu bisa berbeda. Kualitas kepribadian tidak mesti statis, terkadang kuat, utuh, dan prima, tetapi pada saat yang lain juga dapat terdistorsi dari pengaruh eksternal.<sup>22</sup>

Kualitas kepribadian manusia dapat dilihat dari beberapa pendekatan. Antara lain: *pertama*, pendekatan Qur'ani dan Nabawi, di mana jiwa manusia dipahami dengan merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis yang berkisar tentang sifat-sifat universal manusia. *Kedua*, pendekatan Falsafi yang membahas masalah jiwa dari pandangan para filsuf Yunani Kuno dan Ibn Sina. *Ketiga*, pendekatan Sufistik yang membahas masalah jiwa manusia didasarkan dari pengalaman spiritual para ahli tasawuf. Semua perbedaan ini, Allah tunjukkan penciptaannya untuk saling mengenal antara satu individu dengan individu lain. Dari proses sosial tersebut manusia melakukan regenerasi dan berevolusi yang akhirnya melahirkan individu-individu yang beragam dan unik. Allah Swt., dalam hal ini, menciptakan manusia tidak dengan tujuan sia-sia. Dalam surah al-Qiyamah ayat 36-39 dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan tugas dan tanggung jawab yang telah ditentukan karena manusia berasal dari proses penciptaan yang sempurna dan Allah Swt. menjadikannya laki-laki dan perempuan. Manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Sebagai individu, manusia dituntut untuk dapat mengenal serta memahami tanggung jawab bagi dirinya sendiri, masyarakat, dan Sang Pencipta. Sebagai makhluk individu manusia berperan dalam mewujudkan: a) menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya; b) berupaya memenuhi hak-hak dasarnya; c) merealisasikan segenap

<sup>21</sup>Yaya Suryana dan Rusdiana, 'Pendidikan Multikultural....', *Op. Cit.*, hlm. 54.

<sup>22</sup>Said Aqil Husin dan Quraish Shihab, *Ikhtiar Membangun Masyarakat Madani*. (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 136.

potensi diri; dan d) memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidupnya.<sup>23</sup>

Sebagai makhluk sosial, salah satu kodrat manusia berupa keinginan untuk selalu bersosialisasi dan berhubungan dengan orang lain. Dalam kehidupannya, manusia selalu hidup sebagai warga suatu kesatuan hidup, warga masyarakat, dan warga negara. Secara kodrati manusia, merupakan makhluk monodualistis yakni selain manusia sebagai makhluk individu juga berperan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia dituntut untuk mampu bekerja sama dengan orang lain sehingga tercipta sebuah kehidupan yang damai. Manusia sebagai makhluk sosial merupakan makhluk berkelompok dan tidak dapat hidup menyendiri. Makhluk sosial manusia juga merupakan makhluk yang memiliki kecenderungan menyukai dan membutuhkan kehadiran sesamanya sebagai dasar berupa kebutuhan sosial (*social needs*).<sup>24</sup> Soerjono soekanto mengatakan bahwa tidak semua himpunan manusia dapat dikatakan sebagai kelompok sosial. Himpunan manusia dapat dikatakan kelompok sosial apabila: *pertama*, kesadaran setiap anggota bahwa merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan; *kedua*, ada interaksi dan timbal balik antara anggota kelompok satu dan anggota lainnya; *ketiga*, ada sesuatu dimiliki bersama, misalnya tujuan, cita-cita, ideologi, dan kepentingan; *keempat*, berstruktur, berkaidah, dan memiliki pola perilaku; dan *kelima*, bersistem dan berproses.<sup>25</sup>

Suatu kelompok sosial cenderung tidak menjadi kelompok yang statis, tetapi selalu berkembang dan mengalami perubahan baik dalam aktivitasnya maupun bentuknya. Hidup dalam hubungan antaraksi dan interdependensi mengandung konsekuensi sosial, baik yang positif maupun negatif, keadaan ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai sekaligus watak manusia, bahkan pertentangan yang diakibatkan oleh interaksi antarindividu. Tiap-tiap pribadi perlu mengorbankan hak-hak pribadi demi kepentingan bersama. Selain segi fisik, manusia juga memiliki perasaan emosional yang ingin diungkapkan pada orang lain dan mendapatkan tanggapan emosional dari orang lain. Manusia memerlukan pengertian, kasih sayang, harga diri, pengakuan, dan berbagai rasa emosional lainnya. Tanggapan emosional itu hanya dapat

<sup>23</sup>Yaya suryana dan Rusdiana, 'Pendidikan Multikultural....', *Op. Cit.*, hlm. 55.

<sup>24</sup>Yaya suryana dan Rusdiana...., *Ibid.*, hlm. 56.

<sup>25</sup>Yaya suryana dan Rusdiana...., *Ibid.*, hlm. 56.

diperoleh apabila manusia berinteraksi dengan orang lain dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Interaksi sosial merupakan hubungan antarmanusia yang menghasilkan suatu proses saling memengaruhi yang menghasilkan hubungan tetap dan selanjutnya memungkinkan pembentukan struktur sosial.<sup>26</sup>

Agar relasi antarmanusia dalam suatu masyarakat berlangsung seperti yang diharapkan, diciptakanlah norma-norma sosial yang memiliki kekuatan mengikat perbedaan. Norma sosial yang dibangun dan dihasilkan itu akan berguna untuk menjadi 'koridor' bagi dinamika sosial manusia dalam berinteraksi. Norma sosial itu merupakan aturan bagi para anggota masyarakat dalam berinteraksi. Norma sosial dibagi dalam empat tingkatan: *pertama*, cara/perbuatan (*usage*), mengatur cara makan, berbicara, tidur, dan yang berkaitan dengan perilaku; *kedua*, kebiasaan (*folkways*) yang jika dilanggar mengandung sanksi; *ketiga*, tata kelakuan (*mores*); *keempat*, adat-istiadat (*customs*). Interaksi atau relasi antarmanusia hanya akan terlaksana seperti yang diharapkan apabila norma-norma sosialnya dijaga dan difungsikan sebagaimana mestinya dan disesuaikan dengan tuntutan zaman, sedangkan dinamika sosial terjadi karena adanya pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama yang menyebabkan perubahan dan perkembangan masyarakat.

Dinamika sosial berisi proses internalisasi, sosialisasi, dan enkulturasi, di mana ketiga istilah itu merupakan proses belajar dalam masyarakat, yang mana masyarakat sebagai wahana pendidikan mengenai hubungan antarmanusia bagi setiap anggotanya. *Internalisasi* yaitu proses belajar yang panjang dimulai sejak dilahirkan hingga meninggal yang berkaitan dengan kepribadian yang khas, unik, dan berbeda dengan orang lain. *Sosialisasi* yaitu proses belajar tentang pola-pola berperilaku dalam hidup bermasyarakat dengan bermacam proses sosialnya. *Enkulturasi* yaitu proses belajar yang dimulai dari kelompok primer seseorang yaitu keluarga yang kemudian mewariskan kebudayaannya kepada generasi berikutnya, karena keluarga merupakan inti masyarakat. Masyarakat juga berfungsi sebagai salah satu wahana pendidikan kebudayaan, dengan demikian masyarakat berkewajiban untuk mendidik generasi berikutnya agar menjadi manusia yang

---

<sup>26</sup>Yaya suryana dan Rusdiana....', *Ibid.*, hlm. 57.

dapat menghargai manusia lainnya. Kemampuan manusia terbatas dari apa yang didapat dalam masyarakat karena berbeda kepentingan dan prioritas yang digunakan dalam hidupnya meskipun terjadi di lingkungan yang sama. Pendukung kebudayaan bukanlah manusia secara individu, melainkan masyarakat umumnya.<sup>27</sup>

Dinamika sosial dapat didefinisikan sebagai konsep yang menggambarkan proses kelompok yang selalu bergerak, berkembang, dan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang selalu berubah. Dinamika sosial memiliki tujuan antara lain: *pertama*, membangkitkan kepekaan diri seorang anggota kelompok terhadap anggota kelompok lain sehingga dapat menimbulkan rasa saling menghargai; *kedua*, menimbulkan rasa solidaritas anggota sehingga dapat saling menghormati dan saling menghargai pendapat orang lain; *ketiga*, menciptakan komunikasi yang terbuka terhadap sesama anggota kelompok; dan *keempat*, menimbulkan adanya iktikad yang baik di antara sesama anggota kelompok.<sup>28</sup>

## B. Ajaran Islam dan Pendidikan Multikultural

Pendidikan berasal dari kata 'didik' yang artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntutan, dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran.<sup>29</sup> Dalam bahasa Inggris, *education* (pendidikan) berasal dari kata *educate* (mendidik, mengasuh) artinya memberi peningkatan (*to elicit, to give rise to*) dan mengembangkan (*to develop*). Dalam pengertian yang sempit *education* atau pendidikan berarti perbuatan atau proses perbuatan untuk memperoleh pengetahuan. Dalam bahasa Arab, pendidikan disebut *tarbiyah* yang berarti proses persiapan dan pengasuhan manusia pada fase-fase awal kehidupannya, yakni pada tahap perkembangan masa bayi dan kanak-kanak. Dalam Al-Asari disebutkan bahwa kata *rabba, tarabbaba dan tarabbabal walada* memiliki arti yang sama, yakni memelihara atau mengasuh anak. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan pada umumnya berarti daya upaya untuk memajukan

<sup>27</sup>Yaya suryana dan Rusdiana, 'Pendidikan Multikultural....', *Ibid.*, hlm. 57.

<sup>28</sup>Yaya suryana dan Rusdiana, 'Pendidikan....', *Ibid.*, hlm. 57.

<sup>29</sup>Abd Azis Albone, *Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Multikulturalisme*, (Jakarta: Saadah Cipta Mandiri, 2009), hlm. 32.

budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intelekt), dan jasmani anak-anak, agar selaras dengan alam dan masyarakatnya. Pendidikan dapat juga diartikan sebagai suatu proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam upaya mendewasakan peserta didik melalui upaya pengajaran, latihan, proses perbuatan, dan cara-cara mendidik. Pada Bab I Pasal 1 Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dikatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negaranya.<sup>30</sup>

Pendidikan merupakan sarana yang sangat penting, untuk mewujudkan generasi manusia yang dapat memberikan kontribusi konkret bagi kemajuan suatu bangsa. Kemajuan suatu bangsa sesungguhnya dapat dilihat dari seberapa besar mereka menaruh perhatian kepada peningkatan taraf pendidikan bagi warganya. *Education for all* adalah jargon utama di manapun, yang hasilnya dapat dipetik di masa depan. Investasi pendidikan pada hakikatnya adalah membentuk keunggulan sumber daya manusia (*human capital*) yang tidak dapat dilakukan secara instan. Dibutuhkan kesabaran dan ketekunan sehingga hasil yang dicapai betul-betul maksimal. Pendidikan dalam makna yang luas tidak sebatas pada proses transformasi ilmu pengetahuan yang bersifat kognitif, namun juga transformasi nilai atau etik kepada peserta didik. Untuk itulah, pendidikan sebagai sebuah proses di sekolah sesungguhnya sarat dengan muatan nilai yang ditentukan para pendidiknya.<sup>31</sup>

Pendidikan sebagai sebuah proses pengembangan sumber daya manusia (*human resources*) agar memiliki kemampuan sosial dan perkembangan individu yang optimal, memberikan relasi yang kuat antara individu dengan masyarakat dan lingkungan budaya sekitarnya. Lebih dari itu pendidikan merupakan proses "*memanusiakan manusia*" sehingga manusia diharapkan mampu memahami dirinya, orang lain, alam dan lingkungan budayanya, maka pendidikan tidak boleh

---

<sup>30</sup>Abd Azis Albone, '*Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Multikulturalisme....*', *Ibid.*, hlm. 33.

<sup>31</sup>Abd Azis Albone, '*Pendidikan Agama Islam....*', *Ibid.*, hlm. 33.

dilepaskan dari budaya yang melingkupinya sebagai konsekuensi dari tujuan pendidikan, yaitu mengasah rasa, karsa, dan karya. Pengertian pendidikan secara umum telah tergambar pada uraian di atas, lebih spesifik lagi para ilmuwan Muslim mendefinisikan terminologi pendidikan dalam perspektif Islam. Azyumardi Azra mengatakan bahwa pendidikan Islam adalah suatu proses penyampaian generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya diakhirat. Arifin mengatakan bahwa pendidikan Islam adalah suatu proses pendidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah (anak didik) dengan pedoman pada ajaran Islam.<sup>32</sup> Pendidikan Islam juga merupakan salah satu usaha dari orang dewasa (Muslim) yang bertakwa, yang secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan dan perkembangan fitrah (potensi dasar) anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Abu Ahmadi merumuskan pengertian pendidikan Islam sebagai sebuah usaha terencana yang dilakukan secara sistematis dalam membantu anak didik agar mereka hidup layak. Bahagia dan sejahtera sesuai dengan ajaran Islam.<sup>33</sup>

Dalam hal ini, pendidikan Islam merupakan rangkaian proses sistematis, terencana, dan komprehensif dalam upaya mentransfer nilai-nilai kepada anak didik, mengembangkan potensi yang ada pada diri anak didik, sehingga mereka mampu melaksanakan tugasnya di muka bumi dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis. Dengan definisi tersebut, implikasi yang diharapkan di antaranya yaitu: a) pendidikan dilakukan oleh pendidik kompeten di bidangnya, tanpa terkelupasnya nilai-nilai agama pada dirinya; b) pendidikan dilakukan berdasarkan tatanan normatif; c) pendidikan dilakukan sesuai dengan potensi anak didik; d) pendidikan tidak hanya sekadar berorientasi pada kehidupan kekinian, akan tetap juga berorientasi pada kehidupan yang akan datang; e) pendidikan harus bertanggung jawab penuh pada perkembangan anak didik, baik kepada masyarakat maupun kepada Allah Swt.; f) pendidikan harus merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan sunnatullah; dan g) proses pendidikan harus melibatkan semua saluran, baik formal maupun nonformal dalam upaya

<sup>32</sup>Abd Azis Albone..., *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>33</sup>Abd Azis Albone..., *Ibid.*, hlm. 34.

mengembangkan pribadi anak didik, sehingga mampu menangkal perbuatan amoral. Selain itu, pendidikan Islam diartikan sebagai proses bimbingan dari pendidik terhadap perkembangan jasmani, rohani, dan akal peserta didik ke arah terbentuknya pribadi Muslim yang baik, karena pendidikan Islam merupakan alat yang dapat difungsikan untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia pada titik optimal kemampuannya untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.<sup>34</sup>

Zakiah Drajat<sup>35</sup> mengungkapkan bahwa pendidikan Islam merupakan pendidikan yang lebih banyak diarahkan pada perbaikan sikap mental yang terwujud dalam amal perbuatan, baik bagi keperluan diri sendiri maupun orang lain, yang bersifat teoretis dan praktis. Ilmu pendidikan Islam bercorak historis adalah ilmu Islam yang memfokuskan kajiannya pada data-data empiris yang dapat dilacak dalam sejarah, baik berupa karya tulis, peninggalan berupa lembaga pendidikan, maupun pendidikan dengan berbagai aspeknya. Berdasarkan berbagai pengertian pendidikan Islam, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah proses bimbingan dari pendidik yang mengarahkan anak didiknya pada perbaikan sikap mental yang akan terwujud dalam amal perbuatan dan terbentuknya pribadi Muslim yang baik.

Pendidikan merupakan salah satu syarat utama dalam upaya meneruskan dan mengekalkan nilai-nilai kebudayaan masyarakat. Dalam hal ini, pendidikan merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan bagi masyarakat. Agar pendidikan dapat melaksanakan fungsinya sebagai *agent of culture* dan bermanfaat bagi manusia itu sendiri, diperlukan acuan pokok yang mendasarinya. Dasar pendidikan Islam selanjutnya adalah nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Al-Qur'an dan *as-Sunnah* atas prinsip mendatangkan kemanfaatan dan menjauhkan kemudharatan bagi manusia. Dengan dasar ini, maka pendidikan Islam dapat diletakkan di dalam kerangka logis, selain menjadi sarana transmisi pewaris kekayaan sosial budaya yang positif bagi kehidupan manusia. Warisan pemikiran Islam juga merupakan dasar penting dalam pendidikan Islam.

---

<sup>34</sup>Abd Azis Albone..., *Ibid.*, hlm. 35.

<sup>35</sup>Yaya suryana dan Rusdiana, '*Pendidikan Multikultural....*', *Op. Cit.*, hlm. 320.

Dalam hal ini hasil pemikiran para ulama, filosof, cendekiawan Muslim, khususnya dalam pendidikan, menjadi rujukan penting pengembangan pendidikan Islam. Terlepas dari hasil refleksi itu apakah berupa langkah ideal atau kontekstual dari ajaran-ajaran Islam, yang jelas warisan pemikiran Islam ini mencerminkan dinamika dalam menghadapi tantangan kehidupan yang terus berubah dan berkembang. Dasar-dasar pendidikan Islam demikian kemudian memengaruhi sistem pendidikan Islam selanjutnya yang memiliki karakteristik tersendiri: *pertama*, karakteristik yang menekankan pada pencarian ilmu pengetahuan, penguasaan, dan pengembangan atas dasar ibadah kepada Allah Swt. Setiap penganut agama Islam diwajibkan mencari ilmu pengetahuan untuk dipahami secara mendalam yang pada taraf selanjutnya dikembangkan dalam kerangka ibadah guna kemaslahatan umat manusia. Sebagai suatu ibadah, dalam pencarian, penguasaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam sangat menekankan nilai-nilai akhlak. Di dalam konteks ini maka kejujuran, sikap tawadhu, menghormati sumber pengetahuan, dan sebagainya merupakan prinsip-prinsip penting yang perlu menjadi pegangan setiap pencari ilmu. *Kedua*, karakteristik yang menekankan pada pengakuan akan potensi dan kemampuan seseorang untuk berkembang dalam kepribadian. Setiap pencari ilmu dipandang, sebagai makhluk Tuhan yang perlu dihormati dan disantuni, agar potensi-potensi yang ada dapat teraktualisasi dengan optimal. *Ketiga*, karakteristik yang menekankan pada pengalaman ilmu pengetahuan atas dasar tanggung jawab kepada Allah Swt. dan masyarakat manusia. Di sini suatu pengetahuan tidak hanya untuk diketahui dan dikembangkan, melainkan dipraktikkan pula dalam kehidupan sehari-hari.

Permasalahan pendidikan merupakan permasalahan yang bertalian dengan hidup dan kehidupan manusia yang senantiasa telah terproses dan berkembang dalam kehidupannya. Di antara persoalan pendidikan yang mendasar adalah mengenai tujuan pendidikan. Tanpa adanya perumusan tujuan pendidikan yang baik, perbuatan mendidik menjadi tidak jelas, tanpa arah, dan bahkan tersesat. Rumusan tujuan pendidikan Islam adalah merealisasikan manusia Muslim yang beriman, bertakwa, dan berilmu pengetahuan yang mampu mengabdikan dirinya kepada sang Khalik dengan sikap dan kepribadian bulat menyerahkan diri

kepada-Nya dalam segala dimensi kehidupan dalam upaya mencari keridaan-Nya.<sup>36</sup>

Tampak bahwa pendidikan Islam merupakan usaha sadar, berupa kegiatan membimbing, pengajaran, dan/atau latihan yang dilakukan seorang pendidik (guru) secara terencana dan sadar. Hal ini bertujuan agar peserta didik (siswa) mampu menumbuhkembangkan akidahnya melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang ajaran agama Islam sehingga menjadi Muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Swt. yang pada akhirnya mewujudkan manusia yang taat beragama dan berakhlak mulia.

James A. Bank mengungkapkan pendidikan multikultural merupakan suatu rangkaian kepercayaan (*set of beliefs*) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis. Keragaman tersebut dapat berupa gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok, ataupun negara. Bank mendefinisikan pendidikan multikultural adalah ide, gerakan pembaruan pendidikan, dan proses pendidikan yang tujuan utamanya untuk mengubah struktur lembaga pendidikan agar siswa laki-laki dan perempuan, siswa berkebutuhan khusus, dan siswa yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan kultur yang bermacam-macam memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademis di sekolah. Multikultural dapat didefinisikan pula sebagai pendidikan untuk atau tentang keragaman kebudayaan dalam merespons perubahan demokrasi dan kultur lingkungan masyarakat tertentu atau dunia secara keseluruhan. Dede Rosyada mengungkapkan bahwa pendidikan multikultural biasa diartikan sebagai pendidikan keragaman budaya dalam masyarakat dan terkadang juga diartikan sebagai pendidikan dalam membina sikap siswa agar menghargai keragaman budaya masyarakat.<sup>37</sup>

Pendidikan multikultural merupakan pendidikan yang memperhatikan secara sungguh-sungguh latar belakang peserta didik baik dari aspek keragaman etnis, ras, agama (aliran kepercayaan), dan

---

<sup>36</sup>Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 41.

<sup>37</sup>Yaya suryana dan Rusdiana, *Pendidikan Multikultural...., Op. Cit.*, hlm. 196.

budaya. Di samping itu pendidikan multikultural dalam konteks ini dapat diartikan sebagai sebuah proses pendidikan yang memberikan peluang sama pada seluruh anak bangsa tanpa membedakan perlakuan karena perbedaan etnik, budaya, dan agama dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan, identitas nasional, dan citra bangsa di mata dunia internasional. Selain itu, pendidikan multikultural dapat pula dimaknai sebagai sebuah proses pengembangan seluruh potensi manusia serta menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai keosekuensi keragaman budaya, etnis, dan aliran agama. Tampak bahwa pendidikan multikultural menghendaki penghormatan dan penghargaan manusia setinggi-tingginya terhadap harkat dan martabat manusia dari manapun latar belakang budayanya. Dengan demikian, pendidikan multikultural juga dapat dijadikan solusi akan bahaya konflik horizontal.

Sementara itu, *multikulturalisme* secara sederhana dapat diartikan sebagai pengakuan atas pluralisme budaya. Pluralisme budaya bukanlah sesuatu yang *given* tetapi merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam suatu komunitas. Banks mengartikan pendidikan multikultural sebagai konsep, ide, atau falsafah sebagai suatu rangkaian kepercayaan (*set of believe*) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keberagaman budaya dan etnis dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan-kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara. Pendidikan multikultural merupakan sebuah pendekatan pada pengajaran dan pembelajaran yang didasarkan atas nilai dan kepercayaan demokratis dan melihat keragaman sosial dan interdependensi dunia sebagai bagian dari pluralitas budaya. Dalam hal ini, pendidikan multikultural pada proses pengajaran untuk menerima keragaman budaya, ras, gender, dan kelas sosial ekonomi yang bereda. Multikultural dan pendidikan merupakan rangkaian kata yang berisikan esensi dan konsekuensi yang tidak dapat dipisahkan. Dalam multikulturalisme terdapat materi kajian yang menjadi dasar pijakan pelaksanaan pendidikan yang keduanya sama-sama penting. Dalam pendidikan terdapat fondasi dan akal-akal kultur yang disarikan dari nilai-nilai kultur masyarakat.

H.A. Tilaar mengatakan terdapat tiga prinsip pendidikan multikultural. *Pertama*, pendidikan multikultural yang didasarkan pada pedagogik kesetaraan manusia. *Kedua*, pendidikan multikultural ditujukan kepada terwujudnya manusia Indonesia yang cerdas dan

mengembangkan pribadi yang menguasai ilmu pengetahuan dengan sebaik-baiknya. *Ketiga*, prinsip globalisasi tidak perlu ditakuti apabila bangsa ini mengetahui arah serta nilai-nilai baik dan buruk yang dibawanya. *Ketiga* prinsip multikultural yang telah dikemukakan di atas sudah dapat menggambarkan bahwa untuk menciptakan manusia yang terbuka terhadap segala jenis perkembangan zaman dan keragaman berbagai aspek dalam kehidupan modern.

Pertautan antara pendidikan dan multikulturalisme merupakan solusi atas realitas budaya yang beragam sebagai sebuah proses pengembangan seluruh potensi yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan agama. Pluralisme budaya menempatkan pendidikan multikultural menjadi sangat urgen. Keberagaman budaya di Indonesia merupakan kenyataan historis dan sosial yang tidak dapat disangkal oleh siapa pun. Keunikan budaya yang beragam tersebut memberikan implikasi pola pikir, tingkah laku, dan karakter pribadi masing-masing sebagai sebuah tradisi yang hidup dalam masyarakat dan daerah. Tradisi yang terbentuk akan berlainan pada setiap suku. Pengumpulan antarbudaya memberikan peluang konflik manakala tidak terjadi saling memahami dan menghormati satu sama lain. Proses untuk meminimalisir konflik inilah yang memerlukan upaya pendidikan yang berwawasan multikultural dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang heterogen agar saling memahami dan menghormati serta membentuk karakter yang terbuka dalam perbedaan.

Dengan definisi pendidikan multikultural semacam ini, menjadi sebuah keniscayaan akan penerapan pendekatan ini. Paradigma pendidikan multikultural harus disosialisasikan dan diterapkan di sekolah/madrasah sebagai sebuah pendekatan pendidikan yang memiliki wawasan yang toleran dan terbuka dalam proses pengajaran dan pembelajaran kepada siswa yang memiliki latar belakang budaya, suku, dan etnis berbeda. Terminologi lain yang sering dipakai dalam wacana model pendidikan yang toleran terhadap berbagai perbedaan adalah pluralisme.

Bertalian dengan tipologi masyarakat multikultural dapat dikemukakan: *Pertama*, multikulturalisme Isolasionis yaitu masyarakat dengan berbagai kelompok kultur menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lain. *Kedua*,

multikulturalisme akomodatif yaitu masyarakat plural yang memiliki kultur dominan, yang membuat penyesuaian dan akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. *Ketiga*, multikulturalisme otonomis yaitu masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultur utama berusaha mewujudkan kesetaraan dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif dapat diterima. *Keempat*, multikulturalisme kritis (interaktif) yaitu masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultur tidak terlalu fokus atau perhatian dengan kehidupan kultur otonom, tetapi lebih menuntut penciptaan kultur kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka. *Kelima*, multikultural kosmopolitan yang berusaha menghapuskan batas-batas kultur sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat pada budaya tertentu, dan sebaliknya secara bebas terlibat dalam eksperimen-eksperimen interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultur masing-masing.

Dalam ajaran Islam, sebetulnya pendidikan multikultural bukanlah hal yang baru. Esensi multikultural menghendaki pengakuan dan penghormatan terhadap orang lain yang berbeda ras, suku, bahasa, adat-istiadat, dan agama. Secara dogmatis, esensi multikultural dapat dilihat dari beberapa aspek berikut.

*Pertama*, manusia memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah, yang membedakannya kualitas ketakwaannya (Qs. Al-hujurat 49: 13). Kualitas ketakwaan seseorang itu bersifat abstrak dan hanya diketahui oleh Allah secara pasti. Jika demikian halnya, tidak ada hak bagi seseorang untuk memvonis sesamanya sebagai orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Tidak ada pula hak seseorang untuk menentukan bahwa dirinya lebih baik dari orang lain. Adanya paradigma semacam ini akan berimplikasi kepada sikap menghormati dan menolong sesama manusia.

*Kedua*, umat Islam diperintahkan untuk senantiasa berbuat baik dan menegakkan keadilan meskipun kepada non-Muslim (QS. Mumtahanah 60: 8). Tidak ada alasan bagi umat Islam untuk berlaku zalim, subjektif atau bersikap sewenang-wenang terhadap non-Muslim, meskipun secara akidah berbeda.

*Ketiga*, ajaran Islam mengajarkan bahwa orang yang berhubungan baik secara vertikal (hubungan kepada Allah) dan horizontal (hubungan

sesama manusia) akan terhindar dari kehinaan (Qs. Ali Imran 3:112). Al Maraghi menegaskan bahwa hubungan dengan sesama manusia menuntut kebersamaan dalam kehidupan. Mereka membutuhkan kita dan kita membutuhkan mereka dalam beberapa hal. Dan memang Nabi Muhammad Saw. sendiri memperlakukan mereka dengan baik dalam muamalah.

*Keempat*, ajaran Islam memberikan perhatian yang amat besar terhadap permasalahan sosial. Jika dilihat setiap ibadah *mahdhah* yang disyariatkan, pada hakikatnya mengandung pesan sosial. Gerakan sujud dalam salat, misalnya, mengajarkan kepada mushalli untuk tidak sombong dan berlaku sewenang-wenang terhadap orang lain. Bahkan banyak ayat dalam Al-Qur'an menggandengkan perintah salat dengan perintah zakat yang lebih menekankan pentingnya hubungan horizontal (*hablumminannaas*).

*Kelima*, Pendidikan Islam multikultural sudah dimulai sejak kedatangan Islam, sudah dimulai dengan diutusnya Nabi Muhammad Saw., yang membawa keberkahan bagi kehidupan manusia. Secara fitrah, memang setiap manusia memiliki perbedaan dan tidak sama sebagai hakikat manusia.

*Keenam*, ajaran Islam dan pendidikan multikultural atau Pendidikan Islam Multikultural karenanya sudah terlaksana dengan adanya Piagam Madinah sebagai salah satu landasan pentingnya dalam membahas pendidikan Islam multikultural. Adapun aturan yang sangat kuat yang tiada keraguan di dalamnya adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis Nabi. Al-Qur'an menjelaskan dalam beberapa Surah tentang pentingnya multikultural yaitu Surah Huud ayat 118, Al-Maidah ayat 48, Al-Hujuraat ayat 13, An-Nisa ayat 28 dan 36, Ali Imran ayat 112, dan masih banyak yang lain.

*Ketujuh*, keragaman kehidupan dalam berbagai aspeknya baik warna kulit, suku bangsa, bahasa, budaya, agama, dan sebagainya adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah yang ditunjukkan melalui makhluk-Nya.<sup>38</sup> Dengan demikian keberagaman merupakan kata lain dari multikulturalisme yang bersifat alamiah. Keberagaman juga menegaskan kondisi manusia yang terbatas. Pengakuan akan keragaman

---

<sup>38</sup>Imam Tholkah dkk, *Rujukan Guru PAI Islam Rahmalil'alam*, (Jakarta: Kemenag RI, 2011), hlm. 123.

merupakan bentuk pengakuan pada keterbatasan manusia, sebaliknya menafikan keragaman merupakan sikap yang mengingkari *sunnatullah*.

Tampak bahwa latar belakang pendidikan multikultural diawali dengan hakikat keberadaan manusia itu sendiri dengan karakter dan kepribadian yang berbeda yang dimiliki oleh setiap individu yang kemudian dibimbing dengan pendidikan yang berdasarkan pada sumber-sumber ajaran Islam maka pendidikan Islam berbasis multikultural tidak terlalu sulit diterapkan dan memang sudah diberi contoh semenjak dari zaman Rasulullah Saw. Keragaman kehidupan dalam berbagai aspeknya baik warna kulit, suku bangsa, bahasa, budaya, agama, dan sebagainya adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah yang ditunjukkan melalui makhluk-Nya. Dengan demikian keberagaman merupakan kata lain dari multikulturalisme yang bersifat alamiah. Keberagaman juga menegaskan kondisi manusia yang terbatas. Pengakuan akan keragaman merupakan bentuk pengakuan pada keterbatasan manusia, sebaliknya menafikan keragaman merupakan sikap yang mengingkari *sunnatullah*.

Kehidupan manusia bertalian dengan dimensi keagamaan yang merupakan bagian dari sifat manusia. Manusia, selain memiliki sifat jasmaniah (*al-fitrah al-jismiyah*), juga memiliki sifat ruhani-spiritual (*al-fithrahal-ruhiyah*). Dalam konteks filsafat manusia hakikatnya merupakan makhluk psiko-fisik yang memiliki jiwa dan tubuh. Kombinasi kedua unsur atau dimensi tersebut mewujudkan menjadi manusia. Sifat-sifat jasmani manusia (*al-fitrah al-jismiyah*), memperlihatkan bahwa tubuh manusia tersusun atas alam materi yang memiliki sifat-sifat fisika, berupa air, api, tanah, dan angin. Sementara itu, jiwa atau ruhiyah (*al-fithrahal-ruhiyah*) merupakan sifat-sifat jiwa manusia yang merupakan inti dari hakikat manusia.<sup>39</sup> Agama, dalam hal ini, merupakan faktor integral bagi manusia, baik bagi seorang penganut agama yang taat atau sebaliknya terhadap ajaran agamanya.

Hubungan ajaran Islam dan multikulturalisme tercantum dalam Al-Qur'an, antara lain dalam Surah al-Anbiyaa: 107.<sup>40</sup> Dalam ayat ini, di antaranya bertalian dengan nilai-nilai kemanusiaan, persamaan hak, keadilan, demokrasi, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan

<sup>39</sup>Asril Dt. Paduka Sindo, 'Konsep Islam tentang Fitrah Manusia dan Implikasinya dalam Pendidikan', *Didaktika Islamika: Jurnal Keislaman, Kependidikan dan Kebahasaan*, Vol. 1 No. 3 Agustus 2000, hlm. 13-15.

<sup>40</sup>Q.S. Al-Anbiyaa Ayat 107.

dalam perbedaan yang sederajat, kebudayaan suku bangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya dan hak asasi manusia (HAM). Dalam ayat ini juga ditemukan tentang pendukung pendidikan Islam multikultural yang terdapat dalam kurikulum, guru, dan strategi pembelajaran sehingga dapat menciptakan kehidupan yang damai dan toleran. Untuk itu, pendidikan agama harus diorientasikan pada nilai-nilai toleransi, nilai moralitas, nilai perdamaian, nilai humanisme, dan nilai kearifan. Konsep pendidikan Islam multikultural diorientasikan pada isu-isu dan persoalan yang sedang terjadi atau aktual pada suatu bangsa atau umat manusia di dunia yang digagas dengan motivasi besar untuk memberikan sebuah model pendidikan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan masyarakat global.<sup>41</sup>

Aspek-aspek atau ruang lingkup pendidikan (Islam) multikultural, mengutip pendapat Hilda Taba, meliputi: konteks, proses, dan konten, pengembangan kurikulum multikultural, dan pembelajaran dalam perspektif multikultural. Banks memberikan gambaran ada enam faktor yang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan pendidikan multikultural: 1) *gender*; 2) *race atau ethnic*; 3) *social class*; 4) *religion*; 5) *exceptionality*, dan 6) *other variables*. Di antara enam faktor tersebut, agama merupakan topik yang paling menarik dalam pelaksanaan pendidikan multikultural. Agama merupakan aspek yang menjadi prioritas utama sebagai landasan kebijakan dalam terciptanya pendidikan multikultural, dikarenakan agama mengakui adanya pluralitas agama.<sup>42</sup>

Pembatasan ruang lingkup pendidikan multikultural pada akhirnya bukanlah permasalahan penting. Hal ini pula yang menyebabkan agama dimasukkan dalam tatanan ruang lingkup pendidikan multikultural yang semestinya tidak perlu diperdebatkan. Dengan memasukkan agama dalam proses pendidikan multikultural dari beragam bidang maka agama dapat berperan optimal. Agama, dalam hal ini, tidak hanya menanamkan nilai-nilai kesalehan spiritual semata tetapi juga agama lebih berperan dalam aktualisasi kesalehan sosial, yang terutama dalam upaya menata kembali adanya proses dehumanisasi. Untuk itu, tidak perlu adanya perdebatan antara agama dan multikulturalisme. Agama

---

<sup>41</sup>Abdullah Idi, *Materi Kuliah Studi Interdisipliner Pendidikan Agama Islam Multikultural*, Program Doktor (S-3) Pascasarjana IAIN Bengkulu, 2018.

<sup>42</sup>Sulalah, *Pendidikan Multikultural Didaktika Nilai-Nilai Universitas Kebangsaan...*, *Ibid.*, hlm. 138.

bergantung kepada keputusan manusia yang menghayatinya. Di sini, terlihat adanya peran subjektif-kognitif manusia, sehingga sering kali agama dipandang sebagai bagian dari sistem budaya. Kendatipun agama dan budaya memiliki landasan berbeda tetapi antara keduanya satu sama lain tidak dapat dipisahkan, di mana pemahaman seperti ini tentunya belum sampai pada kesepakatan akhir.<sup>43</sup>

Fakta sosial menunjukkan bahwa terdapat banyak konflik bernuansa agama, maka pendidikan agama perlu beradaptasi atau revisi seperlunya, dari konsep indoktrinasi menjadi relevansi. Artinya, pendidikan agama perlu dikembangkan bukan hanya indoktrinasi berupa ajaran surga-neraka, baik-buruk, halal-haram, mukmin-kafir semata, tetapi juga diperlukan relevansi dengan realitas kehidupan sehari-hari sehingga dapat dihayati dan diamalkan. Pendidikan agama perlu mengajarkan pengetahuan konseptual menjadi pengetahuan fungsional-konseptual. Pengetahuan membantu orang untuk merespons, menilai, dan memutuskan sikap dalam kehidupan. Pengajaran agama sebagai satu bagian dari pendidikan agama sebaiknya bertitik tolak dari dan dihubungkan dengan situasi aktual setiap harinya. Seorang perlu berpikir tentang bertindak bagi pribadi dan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, bermasyarakat, toleransi, hidup dalam pluralitas, dan lainnya.

Secara filosofis, seperti diungkapkan Gwendolyn C. Baker, pendidikan berbasis multikultural setidaknya memiliki beberapa asumsi<sup>44</sup> antara lain: *Pertama*, tidak lagi terbatas pada pandangan bahwa pendidikan multikultural sama dengan program-program sekolah formal. Pendidikan multikultural harus berpijak pada pandangan yang lebih luas mengenai pendidikan sebagai transmisi kebudayaan. Pandangan ini membebaskan pendidik (guru) dari anggapan selama ini bahwa tanggung jawab utama dalam mengembangkan kompetensi peserta didik (siswa) semata-mata berada di tangan mereka. Pendidikan multikultural justru meniscayakan semakin banyak pihak yang bertanggung jawab terhadap pengembangan kompetensi peserta didik, karena program sekolah akan selalu berhubungan dengan hal-hal di luar sekolah. *Kedua*, menghindari pandangan yang menyamakan kebudayaan

<sup>43</sup>Sulalah, 'Pendidikan Multikultural Didaktika....', *Ibid.*, hlm. 49.

<sup>44</sup>Gwendolyn C. Baker, *Planning and Organizing for Multicultural Instruction*, Addison-Wesley Publishing Company, California, 1994, pages 25-26.

dengan kelompok etnik. Tidak diperlukan lagi kebudayaan semata-mata dengan kelompok-kelompok etnik sebagaimana yang terjadi selama ini. Dalam kaitannya dengan pendidikan multikultural, pendekatan ini diharapkan dapat mengilhami para penyusun program pendidikan multikultural untuk menghindari kecenderungan memandang peserta didik secara stereotipe berdasarkan identitas etnik mereka dan akan meningkatkan eksplorasi pemahaman yang lebih besar mengenai kesamaan dan perbedaan di kalangan peserta didik dari berbagai kelompok etnik.

*Ketiga*, pengembangan kompetensi dalam suatu 'kebudayaan baru' biasanya membutuhkan interaksi inisiatif dengan orang-orang yang sudah memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing, bahkan dapat dilihat dengan jelas bahwa upaya-upaya untuk mendukung sekolah-sekolah yang terpisah secara etnik adalah antitesis terhadap tujuan pendidikan multikultural. Mempertahankan dan memperluas solidaritas kelompok adalah menghambat sosialisasi ke dalam kebudayaan baru. Pendidikan bagi pluralisme budaya dan pendidikan multikultural tidak dapat disamakan secara logis.

*Keempat*, kemungkinan bahwa pendidikan, baik di dalam maupun di luar sekolah, meningkatkan kesadaran tentang kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kesadaran seperti ini kemudian akan menjauhkan peserta didik dari konsep dwi budaya atau dikotomi antara pribumi dan nonpribumi. Dikotomi seperti ini bersifat membatasi individu untuk sepenuhnya mengeskpresikan diversitas kebudayaan. Pendekatan ini meningkatkan kesadaran akan multikulturalisme sebagai pengalaman normal manusia yang mengandung makna bahwa pendidikan multikultural berpotensi untuk menghindari dikotomi dan mengembangkan apresiasi yang lebih baik melalui kompetensi kebudayaan yang ada pada diri peserta didik.

Bertalian dengan Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai bidang studi atau berbasis multikultural, Zakiyuddin Baidhaw<sup>45</sup> mendefinisikan sebagai gerakan pembaruan dan inovasi pendidikan agama dalam menanamkan kesadaran akan pentingnya hidup bersama

---

<sup>45</sup>Zakiyuddin Baidhaw, 'Membangun Harmony dan Perdamaian Melalui Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural', *Lokakarya Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Pengembangan Kurikulum*, Australian Indonesia Partnership dan Kemenag RI, 10-13 April 2008, hlm. 75.

dalam keragaman dan perbedaan agama-agama, dengan spirit kesetaraan dan kesederajatan, saling percaya, saling memahami dan menghargai persamaan, perbedaan dan keunikan agama-agama, terjalin dalam suatu relasi dan independensi dalam situasi saling mendengar dan menerima perbedaan perspektif agama-agama dalam satu dan lain masalah dengan pikiran terbuka, untuk menemukan jalan terbaik mengatasi konflik antaragama dan menciptakan perdamaian melalui sarana pengampunan dan tindakan nirkekerasan.

Bertalian dengan PAI berbasis multikultural, Baidhawyy<sup>46</sup> mengungkapkan bahwa setidaknya terdapat beberapa asumsi paradigmatis PAI berbasis multikultural, di mana mendidik peserta didik untuk: *pertama*, belajar hidup dalam perbedaan. Nilai-nilai budaya, tradisi, dan kepercayaan senantiasa mengiringi pemeliharaan dan pengasuhan seorang anak. Ketika anak mulai masuk sekolah nilai-nilai yang terbentuk dari dalam pengasuhan dalam keluarga ini terus dibawa (anak). Maka setiap anak memiliki latar belakang dan nilai-nilai yang berbeda pula. Hal ini merupakan realitas yang mesti dipertimbangkan dalam PAI berbasis multikultural. Perbedaan nilai-nilai ini meniscayakan PAI tidak hanya berpijak pada paradigma *learning to know*, *learning to do*, *learning to be*, tetapi juga *learning to live together*. Paradigma yang disebut terakhir ini dalam konteks PAI akan menjadikan PAI sebagai proses: (1) pengembangan sikap toleran, empati, dan simpati yang menjadi syarat utama suksesnya koeksistensi dalam keragaman agama; (2) klarifikasi nilai-nilai kehidupan bersama menurut perspektif agama-agama; (3) pendewasaan emosional; (4) kesetaraan dalam partisipasi; (5) kontrak sosial baru dan aturan main kehidupan bersama antaragama.

*Kedua*, membangun saling percaya. Penguatan kultural masyarakat memerlukan modal sosial yang dibangun dari rasa saling percaya. Modal sosial merupakan seperangkat nilai atau norma informal yang dimiliki bersama suatu masyarakat yang mendorong terjadinya kerja sama satu sama lain. Norma yang dapat menjadi modal sosial adalah norma yang menonjolkan kebaikan-kebaikan. Norma inilah yang akan membangun rasa saling percaya antara satu anggota masyarakat dengan anggota yang lain. PAI multikultural perlu menanamkan *mutual trust*

---

<sup>46</sup>Zakiyuddin Baidhawyy, 'Membangun Harmoni dan Perdamaian....', *Ibid.*, hlm. 75-78.

seperti saling pengertian antaragama, budaya, dan etnik. Modal sosial diyakini sebagai salah satu komponen utama dalam menggerakkan kebersamaan, keharmonisan, mobilitas ide, saling kepercayaan, dan saling menguntungkan untuk mencapai kemajuan bersama.

*Ketiga*, memelihara saling pengertian. PAI berbasis multikultural juga harus mendorong peserta didik dengan berbagai etnik dan latar belakang untuk dapat memelihara rasa saling pengertian baik dengan teman sejawat maupun dengan anggota masyarakat lain yang berbeda latar belakang. Saling pengertian berarti kesadaran bahwa nilai-nilai mereka dan kita terdapat perbedaan mungkin saling melengkapi serta berkontribusi terhadap hubungan yang harmonis. Selain saling memahami, PAI multikultural juga mendorong peserta didik siap menerima perbedaan di antara berbagai keragaman paham agama dan budaya masyarakat yang berbeda.

*Keempat*, menjunjung sikap saling menghargai (*mutual respect*). PAI berbasis multikultural perlu mengarahkan peserta didik agar memiliki sikap saling menghargai terhadap sesama dengan latar belakang berbeda. Sikap ini muncul jika seorang memandang orang lain secara setara. Pada kenyataannya ajaran agama yang terkandung dalam PAI memang mengajarkan Muslim untuk menghormati dan menghargai sesama manusia. Inilah ajaran universal yang semestinya ditonjolkan. PAI multikultural diharapkan mampu menumbuhkembangkan kesadaran pada peserta didik bahwa kedamaian dan harmoni dalam kehidupan masyarakat hanya akan tumbuh bila sikap saling menghormati dan menghargai sungguh dapat diamalkan dalam kehidupan, bukan sikap saling merendahkan. Sikap saling menghargai akan melahirkan sikap saling berbagi di antara semua individu maupun kelompok sosial.

*Kelima*, terbuka dalam berpikir (*open-minded*). Sikap keterbukaan dalam berpikir pada peserta didik salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam pendidikan pada umumnya. Sama halnya dalam PAI berbasis multikultural yang mendorong peserta didik membuka diri terhadap kenyataan hidup yang beragam, terutama dalam hal pemahaman agama. Peserta didik dipersiapkan terhadap model pemahaman agama yang berbeda dari apa yang telah diajarkan sebelumnya. Dengan sikap terbuka tersebut, peserta didik diharapkan dapat memahami makna eksistensi dirinya, identitasnya di tengah keragaman budaya dan agama yang ada.

Keenam, resolusi konflik dan rekonsiliasi nirkekerasan. Konflik dengan penyebab yang beragam (karena agama, etnis, ekonomi, sosial, dan budaya) merupakan fakta kehidupan yang sulit dibantah keberadaannya. PAI multikultural memberi kontribusi bagi upaya mengantisipasi munculnya suatu konflik dengan cara menginternalisasikan kekuatan spiritual yang menjadi sarana integrasi dan kohesi sosial (*social cohesion*) dan menawarkan bentuk-bentuk resolusi konflik. Resolusi selanjutnya dilakukan dengan rekonsiliasi yang merupakan upaya perdamaian melalui pengampunan atau pemaafan. PAI perlu mengarahkan peserta didik agar menjadi manusia yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, meskipun dipahami bahwa pendekatan hukum juga dapat dilakukan. Tetapi, memberi maaf akan lebih baik dan mulia.

Seperti diketahui bahwa para filosof Barat, memberikan definisi yang beragam tentang pendidikan. Dikatakan bahwa pendidikan merupakan pembentukan individual melalui pembentukan jiwa, dengan membangkitkan kecenderungan yang banyak jenis. Secara terminologi, pendidikan dapat diartikan sebagai pembinaan, pengarahan, pencerdasan, pelatihan, dan pembentukan yang ditujukan kepada semua peserta didik secara formal maupun nonformal dalam rangka menuju pendewasaan yang optimal.<sup>47</sup> Dengan kata lain, pendidikan dapat didefinisikan sebagai semua aktivitas atau upaya sadar dan terencana yang dirancang untuk membimbing seseorang dalam mengembangkan pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup.

Secara etimologis, pendidikan berasal dari kata 'didik' yang berarti bina. Memiliki awalan 'pen-' dan akhiran '-an' yang maknanya sifat dari perbuatan membina atau melatih. Dapat diartikan bahwa pendidikan merupakan pembinaan, pelatihan, pengajaran, dan semua hal yang merupakan bagian dari usaha manusia untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilannya. Secara bahasa, beberapa tokoh pendidikan Islam sepakat bahwa kata 'pendidikan' berasal dari bahasa Arab yaitu 'tarbiyah'. Kata 'tarbiyah' adalah derivasi dari kata 'rabba' (kata kerja) dan kata 'tarbiyah' sebagai kata bendanya yang bermakna 'Tuhan'. Karena 'Tuhan' juga bersifat mendidik, mengasuh, dan memelihara.<sup>48</sup> Secara etimologis, *multikulturalisme* dibentuk dari kata 'multi' (banyak), 'kultur'

<sup>47</sup>Ali Abdul Halim Mahmud, *Akhlak Mulia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 22.

<sup>48</sup>Hasan Basri, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 53.

(budaya), dan 'isme' (aliran/paham). Dalam hal ini, multikulturalisme merupakan sebuah paham yang mengakui adanya banyak kultur dan budaya. Secara hakiki, dalam kata itu terkandung sebuah pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik. Akar multikulturalisme adalah kebudayaan. Jadi, multikulturalisme dapat dikatakan sebagai suatu paham yang meyakini dan membenarkan adanya relativisme kultur yang disebabkan adanya perbedaan ruang dan waktu, pola pikir (paradigma), mata pencaharian, ekonomi, latar belakang pendidikan, agama, keragaman budaya, suku, dan golongan.<sup>49</sup>

Dari aspek kebahasaan, istilah 'multikultural' memiliki dua pengertian, yakni 'multi' berarti 'plural' dan 'kultural', berarti 'kultur' atau 'budaya'.<sup>50</sup> Istilah 'budaya' berasal dari ilmu antropologi, dalam hal ini, Clifford Geertz mendefinisikan makna 'kultur' sebagai sebuah cara yang dipakai semua anggota dalam sebuah kelompok masyarakat untuk memahami siapa diri mereka dan untuk memberi arti pada kehidupan mereka.<sup>51</sup> Andre Purwasito berpendapat bahwa 'kultur' merupakan suatu hasil penciptaan, perasaan, dan prakarsa manusia berupa suatu karya yang bersifat fisik maupun nonfisik.<sup>52</sup> Amin Abdullah<sup>53</sup> tampak lebih menyamakan istilah 'kultur' dengan istilah 'tradisi'. Dalam menganalisis suatu kultur tertentu mesti ada ketegasan terlebih dahulu, misalnya kultur wilayah mana atau kultur bagaimana yang dimaksudkan. Ada dua kategori tradisi yang dimaksudkan, yakni *great tradition* (tradisi besar), yaitu wilayah alam pikiran, konsep, ide, teori, keyakinan, dan gagasan. Hal ini melibatkan proses dialektika yang intensif dengan *little tradition* (tradisi kecil). Bila multikultural merupakan keniscayaan yang mesti ada pada diri hamba Tuhan, karenanya untuk menyalurkan multikulturalisme diperlukan suatu perantara yang dapat mentransfer kepada semua manusia, dengan cara dilakukan yang memiliki strategi

<sup>49</sup>Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Press, 2006), hlm. 75.

<sup>50</sup>Choirul Mahfud, 'Pendidikan Multikultural...', *Ibid.*, hlm. 75.

<sup>51</sup>M. Ainul Yakin, *Pendidikan Multikultural Cross-Cultural Understanding*, (Yogyakarta: Nuansa Aksara Press, 2005), hlm. 27-28.

<sup>52</sup>Andrik Purwasito, *Komunikasi Multikultural*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003), hlm. 95.

<sup>53</sup>M. Amin Abdullah, *Pendidikan Agama Era Multikultural Multireligius*, (Jakarta: PSAP, 2005), hlm. 1-2.

dan tujuan yang jelas. Disadari, multikulturalisme dapat terealisasi dengan baik bila perantara yang digunakan tepat.

Pendidikan (*education*) merupakan suatu wahana yang paling penting dalam membangun dan mengembangkan kesadaran multikulturalisme. Pendidikan diharapkan mampu berfungsi sebagai mediasi dalam upaya terciptanya fundamen multikultural yang bebas dari kooptasi negara. Untuk itu, diperlukan adanya perubahan paradigma dalam pendidikan yang dimulai dari penyeragaman menuju identitas tunggal, adanya pengakuan dan penghargaan keragaman identitas dalam kerangka penciptaan harmonisasi kehidupan. Dalam hal ini, pendidikan dipandang sebagai upaya pendewasaan manusia dari tindak anarkisme dan transendensi diri manusia atas nilai-nilai multikultural dalam kehidupan berbangsa, sehingga akan tercipta kehidupan sosiokultural yang lebih baik.<sup>54</sup>

Salah satu permasalahan berbangsa yang mendasar akhir-akhir ini adalah kecenderungan terjadinya degradasi atau pergeseran moralitas sosial yang melibatkan anak-anak usia sekolah, usia remaja, dan mahasiswa/pemuda. Tidak jarang mereka disinyalir terlibat dalam beragam bentuk perilaku sosial yang menyimpang (*social deviance*), seperti: tindakan kriminal, narkoba, minuman keras, *begal*, *free-sex*, rendahnya sopan-santun dan rasa hormat antarsesama, kebut-kebutan di jalan raya, melanggar rambu-rambu lalu lintas, *tawuran*, yang sekaligus bertanda buruknya moralitas sosial di kalangan generasi muda. Pendidikan karakter (akhlak) melalui optimalisasi peranan pendidikan agama diharapkan sebagai salah satu upaya reduksi dan preventif terhadap perilaku demoralisasi sosial yang sedang melanda generasi muda (pelajar, remaja, dan mahasiswa/pemuda) yang diharapkan dapat meneruskan estafet kepemimpinan masa depan.<sup>55</sup>

Pendidikan selalu diharapkan menjadi solusi strategi terhadap berbagai persoalan masa depan anak-anak, masa depan masyarakat, dan masa depan bangsa, sebagai ikhtiar memperbaiki harkat dan martabat kehidupan. Daniel U Levine & Robert J. Havighurst (1989) mengatakan:

<sup>54</sup>Ali Maksum, *Pluralisme dan Multikulturalisme*, (Malang: Aditya Media Publishing, 2011), hlm. 17.

<sup>55</sup>Bagian dari bahasan ini pernah dimuat dalam Abdullah Idi dan Jamali Sahrodi, 'Mobilitas Sosial dan Peranan Pendidikan Agama', *Jurnal Intizar*, 23 (1), 1-16, 2017.

*The school seeks to help young people from lower-status families rise on the social scale, and the extent to which society is meritocratic depends partly on how effective educational system is in this short. Thus, the social class of young adults is determined partly by what they make out of their schooling, and partly by their social class origins.<sup>56</sup>*

Memang ada perbedaan antara pembangunan fisik dan angka pertumbuhan ekonomi yang hasilnya kasat mata dan dapat dirasakan segera. Sebagai upaya pemenuhan hak dan pemberdayaan anak-anak merupakan bentuk dari kegiatan investasi sosial yang hasilnya akan kelihatan dalam waktu lama. Investasi sosial bagi anak-anak, sering kali terabaikan dalam kegiatan pembangunan, yang sekurangnya karena dua alasan. *Pertama*, parameter untuk mengukur pembangunan bidang sosial (pendidikan dan berbagai bentuk persoalan kerawanan anak-anak) relatif sulit dirumuskan dalam satuan angka yang konkret, sehingga cara yang paling mudah mengatasinya adalah dengan melupakannya.<sup>57</sup> *Kedua*, isu tentang anak hanya dinilai sebagai urusan domestik yang akan dapat terselesaikan dengan sendirinya setelah isu lebih makro seperti kemiskinan dan krisis ekonomi telah dapat teratasi. Pemerintah terkadang berpandangan bahwa anak putus sekolah atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi merupakan tanggung jawab pribadi orang tuanya. Sama halnya ketika anak terserang busung lapar atau meninggal dunia karena kurang gizi, dan beragam persoalan anak-anak, semua selalu dikembalikan kepada tanggung jawab orang tuanya.<sup>58</sup>

Syaiful Sagala<sup>59</sup> mengungkapkan bahwa suatu negara membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang andal, mampu mengatasi masalah dirinya sendiri, mampu mengatasi masalah dalam keluarga, dan mampu mengatasi masalah di masyarakat. Pada tingkat tertentu dibutuhkan SDM

<sup>56</sup>Daniel U. Levine and Robert J. Havighurst, *Society and Education*, Seventh Edition, (United States: Allyn and Bacon, 1989), page 229.

<sup>57</sup>Di era Otonomi Daerah misalnya, banyak elite daerah (misalnya gubernur, walikota, bupati) lebih bangga melaporkan laju pertumbuhan ekonomi dan besarnya nilai investasi PMA daripada memaparkan data tentang perkembangan kesehatan anak, rendahnya angka siswa putus sekolah atau melaporkan fakta tentang telah terpenuhinya hak dasar anak, seperti pemilikan akte kelahiran atau tiadanya anak yang menjadi korban *child abuse*. Lihat: (Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 9-10.

<sup>58</sup>Bagong Suyanto, 'Masalah Sosial Anak....', *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>59</sup>Syaiful Sagala, *Etika & Moralitas Pendidikan: Peluang dan Tantangan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 249.

yang mampu mengatasi masalah negara maupun masalah antarnegara. Jika SDM dalam suatu bangsa tidak mampu mengatasi dirinya sendiri, berarti manusianya dikategorikan orang miskin dan orang miskin menjadi beban negara, dan negara tersebut termasuk negara miskin. Agar negara tidak miskin, harus ada program pembangunan SDM yang terinci, jelas arahnya, jelas strateginya, dan jelas targetnya. Agar investasi *human capital* pada waktunya dapat menyediakan SDM yang andal dan mampu mengatasi permasalahan, sekaligus keluar dari status kemiskinan. Investasi *human capital* yang paling efektif dalam suatu bangsa atau negara adalah penguatan pada program pendidikan baik formal, informal, maupun nonformal yang diatur dalam organisasi pengelolaan masing-masing. Organisasi pengelolaan pendidikan formal tentu bermuara pada organisasi satuan pendidikan seperti sekolah sebagai organisasi yang langsung memberikan layanan belajar kepada anak didik.

Sejak lama rasanya bangsa ini terus mengalami keprihatinan kompleks. Masih banyaknya kasus korupsi bahkan menjadi salah satu negara yang korupsinya pada level tertinggi, KKN melanda di berbagai institusi, meningkatnya kriminal, kekerasan, *anarchism*, premanisme, narkoba di kalangan pelajar, merosotnya disiplin, tumbuhnya budaya materialisme dan hedonisme, merosotnya sopan santun, *tawuran* pelajar dan mahasiswa. Suatu hal yang paling memprihatinkan adalah keterlibatan para pelajar dan mahasiswa dalam berbagai tindakan *amoral*, kriminal, dan kekerasan.

Memang pada usia mereka termasuk sedang mengalami periode potensial bermasalah. Periode ini sering dikatakan sebagai *storm and drang period* ('topan dan badai'). Pada usia ini timbul gejala emosi dan tekanan jiwa, sehingga perilaku mereka terkadang tampak menyimpang. Dari situasi konflik dan problem ini remaja tergolong dalam sosok pribadi yang tengah mencari identitas dan membutuhkan tempat penyaluran kreativitas. Jika tempat penyaluran tersebut tidak ada atau kurang memadai, mereka akan mencari berbagai cara sebagai penyaluran. Aksi dan perilaku menyimpang anak-anak usia sekolah dan remaja dapat berupa kekerasan verbal (mencaci maki) maupun kekerasan fisik seperti memukul dan meninju. Murray (dalam Hall & Lindzey, Psikologi Kepribadian, 1993) didefinisikan sebagai suatu cara untuk melawan dengan sangat kuat, berkelahi, melukai, menyerang, membunuh, atau menghukum orang lain. Secara singkat

agresi adalah tindakan untuk melukai orang lain atau merusak hak milik orang lain.<sup>60</sup>

Apa yang diungkapkan di atas, merupakan segelintir dari sekian banyak perilaku menyimpang (*social deviance*) yang dilakukan kalangan pelajar, anak usia remaja, dan pemuda/mahasiswa pada akhir-akhir ini. Persoalannya, jika kondisi ini terus terjadi, patut diyakini bahwa proses pembangunan bangsa menuju masa depan yang diharapkan sulit diprediksi (*unpredictable*) dan bangsa ini juga sulit menjadi suatu negara maju. Hal itu semua memperlihatkan bahwa proses degradasi moralitas sosial ini semakin mengkhawatirkan dan memerlukan upaya antisipasi, salah satunya, dengan upaya membangun mengembangkan pendidikan karakter atau pendidikan akhlak.

### C. Karakter: Akhlak, Adab, Moral, dan Nilai

Pendidikan merupakan elemen terpenting dalam pembangunan SDM dalam proses pembangunan bangsa. Dengan pendidikan, anak-anak diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan sains-teknologi tetapi juga sains agama (membentuk anak-anak menjadi berakhlak, berbudi pekerti, berkepribadian, dan berkarakter). Pendidikan karakter, mulai ramai dibicarakan kembali pada dua dekade belakangan. Thomas Lickona dalam bukunya, *The Return of Character Education* (1993), yang menyadarkan dunia pendidikan di Amerika Serikat tentang pentingnya pendidikan karakter (bagi anak-anak) untuk mencapai cita-cita pendidikan. Lickona, mengatakan bahwa program pendidikan yang bertumpu pada pembentukan karakter ini berangkat dari keprihatinan atas kondisi moralitas sosial pada masyarakat Amerika. Pembentukan karakter ini didasarkan pada kebutuhan untuk menciptakan komunitas yang memiliki moral kemanusiaan, disiplin moral, demokratis, mengutamakan kerja sama dan penyelesaian masalah, dan mendorong agar nilai-nilai itu dipraktikkan di luar kelas.<sup>61</sup>

Selain itu, bertalian dengan pendidikan karakter (*character*), ada perbedaan akhlak, adab, moral, dan nilai. Imam al-Jurjani mengatakan

<sup>60</sup>Abdullah Idi & Safarina Hd., *Etika Pendidikan: Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat*, Cetakan ke-2, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 27-28.

<sup>61</sup>Lanny Octavia, et. al., *Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi Pesantren*, (Jakarta: Rene Book dan Rumah Kitab, 2014), hlm. 10.

bahwa *akhlak* merupakan bangunan jiwa yang berasal dari dua sumber. *Pertama*, sumber darinya perilaku spontan tanpa didahului pemikiran, berupa perilaku baik (akhlak baik) atau perilaku buruk atau akhlak tercela. Al-Jurjani memaknai akhlak sebagai keteguhan jiwa pada diri manusia, yang mendorong manusia berbuat baik dan buruk. Perilaku manusia, dalam hal ini, didorong dari dalam jiwanya. Akal pikiran dan hati nurani yang jernih mendorong perilaku baik, dan nafsu mendorong perilaku nista. Akhlak menjadi terpuji atau tercela tergantung pada tarik-ulur berbagai naluri dalam pergulatan batin manusia. Seorang berbudi luhur, merupakan orang yang mampu memenangkan budi pekerti luhur dan menekan dan mengalahkan nalurinya yang nista itu. *Kedua*, akhlak yang berasal dari usaha manusia (*muktasabah*).<sup>62</sup> Jika 'akhlak' dan kata-kata yang seakar dengannya (*al-khuluq*) terdapat dalam Al-Qur'an, kata 'adab' tidak terdapat dalam Al-Qur'an. *Adab* dalam peradaban Arab pertama kali digunakan dalam makna kesusastraan, yang bertalian dengan keindahan bahasa.<sup>63</sup>

Sedangkan nilai-nilai (*values*) setidaknya mempunyai empat tingkatan. *Pertama*, nilai-nilai akhir atau abstrak, seperti: demokrasi, keadilan, persamaan, kebebasan, kedamaian, dan kemajuan sosial, serta perwujudan diri dan penentuan diri. *Kedua*, nilai-nilai tingkat menengah, seperti: kualitas keberfungsian manusia/pribadi, keluarga yang baik, pertumbuhan, peningkatan kelompok, dan masyarakat yang

<sup>62</sup>Al-Syarif Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi dalam kutipan: (Lanny Octavia, 'Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi Pesantren....', *Op. Cit.*, hlm. 11).

<sup>63</sup>Makna *adab* berubah menjadi pengajaran melalui periwayatnya puisi, dongeng, hadis Nabi, dan kisah peradaban pada masa pra-Islam. *Adab* diartikan sebagai pembelajaran dan *mu'addib* sebagai pendidik, tidak hanya di bidang hadis dan agama, tetapi juga meliputi puisi, linguistik, pidato, dongeng, sastra pada umumnya. Kata *adab* mulai digunakan dalam makna akhlak pada masa dinasti Umayyah. Al-Gabiri mengatakan, Ibn al-Muqaffa' menggunakan kata *adab* dalam karya-karyanya mengandung tiga arti yang saling melengkapi dan saling terkait satu dengan lainnya yang mendukung satu hal yang dinamakan 'etika paripurna': (1) *adab* dalam arti akhlak, bertalian dengan sifat-sifat terpuji, tindakan atau perilaku-perilaku (*suluk*) yang terpuji dan mulia yang ditumbuhkembangkan oleh sang pelaku dalam aktivitasnya setelah berpikir; (2) Sesuatu yang berusaha mengusung sebuah 'akhlak paripurna', yakni teks-teks yang diriwayatkan atau teks-teks tertulis yang mewariskan pengetahuan akhlak mulia dan caruta berhias diri dengannya; (3) Seni atau ilmu yang menjelaskan tentang bagaimana memperindah bahasa dan tutur kata. *Adab* tidak ubahnya sebagai seni berbahasa dan bertutur kata. Lihat: (Lanny Octavia, *et. al.*, 'Pendidikan Karakter....', *Ibid.*, hlm. 13).

baik. *Ketiga*, nilai-nilai instrumental atau operasional yang mengacu kepada ciri-ciri perilaku dari lembaga sosial yang baik, pemerintah yang baik, dan orang profesional yang baik. Seperti dapat dipercaya, jujur, dan memiliki disiplin diri. *Keempat*, nilai-nilai dan norma-norma yang telah diinternalisasikan ke dalam diri individu, akan menjadi kerangka referensi individu tersebut sebagai prinsip etik. Prinsip-prinsip etik itu menjadi dasar orientasi dan petunjuk bagi manusia dalam mengatasi beragam permasalahan kehidupan bertalian hubungan sosial dengan orang lain. Prinsip etika itu membantu pula dalam mengatur dan memberikan makna dan kesatuan yang bulat terhadap kepribadian manusia: motivasi manusia dalam memilih suatu perilaku, tujuan-tujuan, gaya hidup, serta memungkinkan manusia memiliki landasan pembenaran dan pengambilan keputusan terhadap tindakan yang dilakukan manusia.<sup>64</sup>

Al-Mawardi mendefinisikan *adab* sebagai pengetahuan tentang sesuatu yang dapat mengeluarkan dari segenap kesalahan dan kekeliruan, baik dalam hal kesalahan ucapan, perkataan, perilaku, tindakan, dan moral. Al-Mawardi juga membagi *adab* menjadi *adab al-dunya* dan *adab al-din*. *Adab al-dunya* meliputi: (1) *etika sosial*, bertalian dengan ketertiban, dan pengaturan kenegaraan, kebangsaan, etika publik, politik, dan segenap persoalan yang bersifat kolektif di ranah sosial; (2) *etika individu* yang menempatkan masing-masing warga negara bertanggung jawab

<sup>64</sup>Nilai-nilai itu sendiri sekurangnya mempunyai empat tingkatan. *Pertama*, nilai-nilai akhir atau abstrak, seperti: demokrasi, keadilan, persamaan, kebebasan, kedamaian, dan kemajuan sosial, serta perwujudan diri dan penentuan diri. *Kedua*, nilai-nilai tingkat menengah, seperti: kualitas keberfungsian manusia/pribadi, keluarga yang baik, pertumbuhan, peningkatan kelompok, dan masyarakat yang baik. *Ketiga*, nilai-nilai instrumental atau operasional yang mengacu kepada ciri-ciri perilaku dari lembaga sosial yang baik, pemerintah yang baik, dan orang profesional yang baik. Seperti dapat dipercaya, jujur, dan memiliki disiplin diri. *Keempat*, nilai-nilai dan norma-norma yang telah diinternalisasikan ke dalam diri individu, akan menjadi kerangka referensi individu tersebut sebagai prinsip etik. Prinsip-prinsip etik itu menjadi dasar orientasi dan petunjuk bagi manusia dalam mengatasi beragam permasalahan kehidupan bertalian hubungan sosial dengan orang lain. Prinsip etik itu membantu pula dalam mengatur dan memberikan makna dan kesatuan yang bulat terhadap kepribadian manusia; motivasi manusia dalam memilih suatu perilaku, tujuan-tujuan, gaya hidup, serta memungkinkan manusia memiliki landasan pembenaran dan pengambilan keputusan terhadap tindakan yang dilakukan manusia. Lihat: (Muhammad Mufid, "Etika dan Filsafat....", *Ibid.*, hlm. 176-177).

dalam memperbaiki perilaku dan menampakkan kebaikan personal. Sedangkan *adab al-din*, merupakan etika dalam standar aturan syariat, seperti perintah dan larangan, hukum halal dan haram, ketaatan, dan kemaksiatan, dan lainnya.<sup>65</sup>

Dalam filsafat terdapat beberapa jenis teori tentang nilai (*value*). Teori tentang nilai disebut *axiology*, yang berasal dari kata *axia* yang berarti harga atau nilai (*worthy*) dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Filsuf yang banyak berbicara tentang nilai manusia adalah Max Weber (1874—1928) dan Nicolai Hartmann (1882—1950). Perilaku manusia dipengaruhi dan berdasar pada tata nilai yang dimiliki dan diyakininya. Orang akan berbuat ataupun tidak berbuat sesuai dengan nilai dianutnya. Dapat dikatakan bahwa nilai sebetulnya merupakan konsep abstrak dan hanya menjadi nyata dalam perbuatan. Tetapi, nilai bukanlah konsep yang tak tergapai melainkan ada manakala dia berfungsi dalam pikiran dan tindakan manusia.<sup>66</sup>

Dikatakan Haryatmoko bahwa konsep 'etika' sering digunakan sebagai persamaan dengan 'moral'. Dari kedua istilah ini, terkandung nuansa dua tradisi pemikiran filsafat moral berbeda. Aristoteles, dalam buku *Ethique a'Nicomaque*, menulis selain kata '*ethos*, yang bermakna 'kualitas suatu sifat' digunakan juga istilah '*ethos*, yang bermakna kebiasaan. Arti '*ethos* adalah suatu cara berpikir dan merasakan, cara bertindak dan bertingkah laku yang memberi ciri khas cara kepemilikan seorang terhadap kelompok. Istilah yang kedua ini relevan dengan terjemahan kata "moralis" (*mos, moris*= adat, kebiasaan) dalam bahasa Latin. Istilah *moralis* selanjutnya menjadi istilah teknis yang tidak lagi berarti kebiasaan, tetapi mengandung arti "moral" sebagaimana digunakan dalam definisi terkini.<sup>67</sup>

<sup>65</sup>Lanny Octavia, *et. al.*, 'Pendidikan Karakter....', *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>66</sup>Nilai itu bertalian dengan beragam macam hal, seperti warna, sejarah, afeksi, ekonomis, relasi, dan sebagainya yang di antara hal tersebut belum tentu nilainya sama. Bagi seseorang, sebuah buku kuno yang sudah jelek bisa bernilai tinggi baginya karena faktor historisnya, walaupun mungkin dari segi artistiknya nilainya rendah. Sekuntum bunga yang diberikan oleh kekasih nilainya sangat tinggi walaupun mungkin dari segi ekonomis nilainya rendah. Lihat: (C.B. Kusmaryanto, *Bioetika, Mendiskusikan pertanyaan dasar tentang hidup manusia yang menyangkut berbagai disiplin ilmu*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2016, hlm. 31-32).

<sup>67</sup>*Moral* dihubungkan dengan kewajiban khusus, dihubungkan dengan norma sebagai cara bertindak yang berupa tuntutan yang relatif atau mutlak. Jadi "moral" merupakan wacana normatif dan imperatif yang diungkapkan dalam konteks baik/

Muhammad Mufid<sup>68</sup> memandang etika lebih condong ke arah ilmu tentang baik atau buruk. Etika lebih dikenal dengan kode etik. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan/atau nilai yang berkenaan dengan baik-buruk. Ada dua kaidah dasar moral: *Pertama*, kaidah sikap baik, di mana seorang seharusnya bersikap baik terhadap apa saja. Bagaimana sikap baik itu harus dinyatakan dalam bentuk yang konkret, tergantung dari apa yang baik dalam situasi konkret itu. *Kedua*, kaidah keadilan, di mana sebagai prinsip kesamaan yang masih tetap mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Kesamaan beban yang terpakai harus dipikul bersama, yang tentunya disesuaikan dengan kadar anggota masing-masing.

Ada perbedaan antara *etika* dan *agama*. *Etika* mendukung keberadaan agama, di mana etika dapat membantu manusia dalam menggunakan akal pikiran dalam memecahkan masalah. Perbedaan antara etika dan ajaran agama, yakni etika mendasarkan diri pada argumentasi rasional. Agama menuntut seorang untuk mendasarkan diri pada wahyu Tuhan dan ajaran agama. Dalam agama terdapat etika, dan agama merupakan

---

buruk, benar/salah yang dipandang sebagai nilai mutlak atau transenden. Isinya berupa kewajiban-kewajiban. Konsep "moral" merujuk kepada semua aturan dan norma yang berlaku, yang diterima oleh masyarakat tertentu sebagai pegangan dalam bertindak, dan diungkapkan dalam konteks baik dan buruk, benar dan salah. Etika dilihat sebagai suatu refleksi filosofis tentang moral. *Etika* merupakan wacana normatif (tidak selalu harus berupa perintah yang mewajibkan, karena dapat pula kemungkinan bertindak) yang membicarakan tentang baik dan buruk. Etika lebih dilihat sebagai seni hidup yang mengarahkan ke kebahagiaan dan kebijaksanaan. Paul Ricoeur (1990) mengatakan istilah "moral" dan "etika" dihubungkan pada dua tradisi pemikiran filsafat yang berbeda. Istilah "moral" dihubungkan dengan tradisi pemikiran filosofis Immanuel Kant (sudut pandang deontologi). Moral merujuk ke kewajiban, norma, prinsip bertindak, imperatif ("kategoris" = aturan atau norma yang berasal dari akal budi yang merujuk ke dirinya sendiri sebagai keharusan). Etika dihubungkan dengan tradisi pemikiran Aristoteles yang bersifat "teleologis" (*telos* = finalitas atau tujuan). Paul Ricoeur mendefinisikan "etika" sebagai tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil. Biasanya etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik/buruk, benar/salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Moral merujuk pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Tekanan etika diletakkan pada dimensi reflektif dalam upaya mencari bagaimana bertindak (bukan hanya pada masalah kepatuhan pada norma). Lihat: (Haryatmoko, *Etika Publik, untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm. 2-3).

<sup>68</sup>Muhammad Mufid, *Etika dan Filsafat Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 180.

salah satu norma dalam etika. Keduanya bertalian satu sama lain, tetapi terpisahkan secara teoretis. Dalam konteks praktis, akan sulit mengesampingkan salah satu di antaranya. Seorang tidak bisa berbuat hanya atas dasar agama saja tanpa memperhatikan etika atau sebaliknya. Keberagaman pada prinsipnya memperhatikan etika yang berlaku, sebaliknya, seorang dikatakan memiliki etika, jika kemudian memperhatikan agama yang ada.<sup>69</sup>

Yusuf al-Qardhawi mengklasifikasikan akhlak menjadi tujuh kategori, sebagai tingkatan nilai-nilai moral (*moral values*) yang diharapkan dalam kehidupan Muslim: *akhlaq* berhubungan dengan diri sendiri (*self*); *akhlaq* berhubungan dengan keluarga (*family*); *akhlaq* berhubungan dengan masyarakat (*society*); *akhlaq* berhubungan dengan dunia hewani (*animal world*); *akhlaq* berhubungan dengan lingkungan fisik (*physical environment*); dan *akhlaq* berhubungan dengan Khalik (*Creator*). *Akhlaq* merupakan suatu dunia plural (*a plural world*) tetapi kadang kala digunakan dalam bentuk tunggal (*khuluk*) atau *singular form*, yang berarti karakter (*character*), *innate disposition*, atau '*a state of the soul which causes it to perform its action without thought or deliberation*'. Banyak ilmuwan Muslim, seperti al-Kindi, al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Miskawayh, Nizam al-Mulk, al-Ghazali, al-Raz, dan al-Tusi, telah mempelajari dan menulis tentang *akhlaq*. *Ilm-al-akhlaq* (*knowledge of moral values*) merupakan komponen mayor daripada *Islamic Studies* pada semua level pendidikan Islam, di samping komponen lainnya, seperti *Ilm al-Fiqh*.<sup>70</sup>

Karakter (*character*), dengan demikian, merupakan kumpulan dari berbagai aspek kepribadian yang melambangkan kepribadian seseorang. Karakter merupakan ciri-ciri tertentu yang sudah menyatu pada diri seorang yang ditampilkan dalam bentuk perilaku. Dikatakan Farid Anjar, dalam Ensiklopedi Inggris-Arab, bahwa *character education* sebagai pendidikan akhlak.<sup>71</sup> Sifat-sifat yang ada pada diri seorang itu, terdapat

<sup>69</sup>Muhammad Mufid, *Etika dan Filsafat Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 180.

<sup>70</sup>Yusuf al-Qardawi dalam kutipan J. Mark Halstead, 'Islamic Values: a distinctive framework for moral education', *Journal of Moral Education*, Vol. 36, No. 3, September 2007, hlm. 285.

<sup>71</sup>Lihat selanjutnya dalam kutipan Supiana: ('Pendidikan Karakter dalam Perspektif Ilmu Pendidikan Islam', *Mozaik Pemikiran Islam, Bunga Rampai Pemikiran Islam Indonesia*, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2011, hlm. 6).

sifat yang menonjol/dominan, yang kemudian menjadi karakteristik seorang atau sekelompok orang. Sifat-sifat yang dimiliki manusia sangat ditentukan pendidikan yang memengaruhinya. Pendidikan (Islam), dalam hal ini, dapat mengembangkan potensi baik dan dapat menekan potensi buruk manusia.

#### D. Moralitas Sosial dan Pendidikan Agama

Emile Durkheim, dalam *Education and Sociology* (1956) mengatakan bahwa pendidikan merupakan kelangngan kehidupan manusia itu sendiri, yang dapat hidup konsisten dalam mengatasi ancaman dan tantangan masa depan.<sup>72</sup> Dengan kemajuan pendidikan diharapkan dapat mereduksi beragam fenomena sosial, bertalian dengan moralitas sosial dalam masyarakat. Sejak awal, persoalan moralitas telah menjadi perhatian *founding fathers*, seperti pentingnya pendidikan agama, moral dan budi pekerti dalam sistem pendidikan nasional. Seperti diketahui bahwa konsep moralitas yang tumbuh dan hidup di tengah masyarakat yang pluralistik diperlukan adanya solusi setidaknya sebuah tawaran yang substansi darinya yang meliputi keragaman konsep moral. Moralitas merupakan suatu sikap hati seorang yang terlihat dalam perilaku lahiriah. Moralitas terjadi apabila seorang mengambil sikap yang baik dikarenakan dia sadar akan kejiwaan dan tanggung jawab, bukan untuk mencari keuntungan dan tanpa pamrih. Sedangkan *defisien/defek moral* merupakan suatu kondisi individu yang hidupnya *delinquent* (nakal, jahat), sering melakukan kejahatan, berperilaku asosial atau anti-sosial, dan tanpa penyimpangan organik pada fungsi inteletnya. Hanya saja inteletnya tidak berfungsi, sehingga terjadi kebekuan moral yang kronis.<sup>73</sup>

Prinsip moralitas sosial (*social morality*) setidaknya memiliki nilai-nilai moral yang berdasarkan pada tiga prinsip dasar: kemerdekaan (*liberty*), kesamaan (*equality*), dan saling menerima (*reciprocity*). Bila tiga prinsip itu dijadikan landasan seorang dalam berpikir dan bertindak diharapkan melahirkan perilaku moral yang tinggi menuju terbentuknya

<sup>72</sup>Khoirun Rosyadi, *Pendidikan Profetik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 124.

<sup>73</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 191.

kepribadian yang baik. Perilaku moral yang bernilai tinggi merupakan perilaku yang tidak merugikan, menyakiti, menyiksa, mengganggu, serta memperkosa hak-hak orang lain. Hal yang seharusnya dilakukan yakni perilaku yang merujuk ada penghormatan terhadap hak-hak orang lain dalam nuansa nilai-nilai kemanusiaan bersifat universal. Seorang yang bermoral senantiasa berpikir dan bertindak atas dasar pemikiran bagaimana keberadaan dirinya dapat mendatangkan lebih bermanfaat bagi kemaslahatan manusia lainnya.<sup>74</sup>

Pengaruh terhadap konsep moralitas sosial yang dikonstruksikan bangsa kolonial misalnya tidak selalu tepat seperti yang diharapkan ideologi bangsa sendiri. Ideologi kolonial yang bersifat materialistis-kapitalis beda tentunya dengan konsep ideologi bangsa yang

---

<sup>74</sup>Cara berpikir moral kognitif melalui pertimbangan moral yang harus menjunjung tinggi dan membela nilai-nilai kemanusiaan juga berlandas pada tiga prinsip tersebut. Pembentukan kepribadian anak di rumah melalui peningkatan pertimbangan moral anak yang dilakukan orang tua juga perlu berdasarkan atau berlandaskan pada tiga prinsip tersebut. Artinya, apa pun yang dipikirkan dan yang akan dilakukan orang tua di rumah dalam interaksi dan komunikasinya harus dapat dikembalikan pada nilai-nilai kemerdekaan, kesamaan, dan saling menerima. Orang tua (ayah dan ibu) adalah kunci utama yang harus terlebih dahulu benar-benar memahami dan mampu menerapkan nilai-nilai dari ketiga prinsip tersebut. Ini berarti bahwa semestinya orang tua dalam suatu rumah tangga harus benar-benar telah memiliki kepribadian yang baik dan mantap dalam nuansa moralitasnya. Memiliki kepribadian yang mantap dalam nuansa moralitas bagi orang tua dalam suatu rumah tangga, tampaknya bukan suatu hal yang mudah. Hal-hal terkandung dalam prinsip kemerdekaan, persamaan, dan saling menerima tidak mudah diterapkan dalam cara berpikir dan bertindak pada suatu keluarga. Tidak jarang seorang suami tidak dapat melakukan hal tersebut kepada istrinya atau sebaliknya, seorang istri tidak dapat melakukan hal tersebut kepada suaminya. Terlebih, orang tua kepada anak-anaknya. Kesulitan ini terjadi bisa dikarenakan secara fakta memiliki berbeda posisi, rasa tanggung jawab, fungsi dan tugasnya masing-masing berbeda. Selain itu, secara empiris, orang tua memiliki latar belakang kepribadian (cara berpikir moral) yang relatif berbeda pula—karena latar belakang lahir dan latar belakang orang tua yang berbeda. Jadi, penerapan prinsip moral yang menjadi landasan pokok cara berpikir moralitas tidak mudah untuk diterapkan dalam kehidupan rumah tangga. Orang tua diharapkan memiliki kemauan dan tekad kuat untuk mewujudkannya. Kegagalan dalam menerapkan ketiga prinsip moralitas tersebut menyebabkan gagalnya cara berpikir moral yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan anak-anak mereka. Tidak jarang cara berpikir moral orang tua yang berbeda dapat berdampak pada kegagalan pembentukan kepribadian anak-anak mereka yang diharapkan. Lihat: (Sjarkawi, *Pembentukan Kepribadian Anak: Peran Moral, Intelektual, Emosional, dan Sosial sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011, hlm. 78-80).

berdasarkan Pancasila. Pandangan materialisme-kapitalisme bahwa seorang dianggap baik dan bermoral bila sesuatu berguna dan bermanfaat secara material. Seorang dikatakan kurang bermoral dan nilai atau 'derajat'nya dalam masyarakat ketika seorang tidak mampu memberikan manfaat dan kegunaan secara material. Mungkin, bisa dikatakan bahwa seorang dianggap berhasil dan bermoral apabila memiliki prestasi tertentu, misalnya jabatan dan harta yang melebihi orang tuanya atau orang lain.

Adanya 'pergeseran' dalam pandangan moralitas sosial pada awalnya bisa pula dipengaruhi suatu ideologi kolonial atau dampak sains-teknologi yang berpengaruh terhadap perilaku manusia. Diceritakan Socrates, filosofis Yunani, pernah prihatin dan menangis atas penemuan kemajuan ilmu pengetahuan. Hal ini juga telah membuat prihatin dan ketakutan mendalam bagi penguasa Yunani ketika itu. Socrates mencoba memasukkan ajaran moral ke dalam sendi-sendi kekuatan dan politik. Kemampuan intuitif dan kognitif Socrates memberi argumen kepada rakyat Yunani sehingga mampu mematahkan 'puisi-puisi' penguasa tentang pentingnya moral dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>75</sup> Einstein juga pernah mengatakan bahwa 'dalam peperangan, ilmu menyebabkan manusia saling meracuni dan menjegal. Dalam perdamaian, ilmu membuat hidup dikejar waktu dan penuh tak menentu. Mengapa ilmu yang mudah menghemat kerja dan membuat hidup manusia lebih mudah, hanya membawa kebahagiaan yang sedikit sekali bagi 'kita' kepada 'kita'? Einstein dan Socrates mungkin benar, ilmu pengetahuan ternyata mendatangkan malapetaka bagi manusia. Ilmu pengetahuan politik, ekonomi, sosial, informasi-komunikasi, teknologi, dan militer mendatangkan kesejahteraan sekaligus menimbulkan malapetaka bagi manusia. Seperti diungkapkan seorang ahli sosiologi, Rene Descartes, bahwa 'ilmu tanpa moral adalah buta, moral tanpa ilmu adalah bodoh'.<sup>76</sup>

Pengembangan moralitas sosial dapat dilakukan melalui pengembangan pendidikan karakter atau pendidikan akhlak (dengan nilai-nilai agama). Pendidikan moral tidak hanya mengandalkan pengembangan intelektual-

<sup>75</sup>K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 45.

<sup>76</sup>F. Budi Hardiman, *Filsafat Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 34.

kognitif, tetapi juga perlu membangun emosional-spiritual yang berfungsi sebagai jembatan antara penilaian dan tindakan. Sisi emosional-spiritual meliputi kualitas nurani (merasakan kewajiban melakukan untuk menjadi benar), harga diri, empati, mencintai, pengendalian diri, dan kerendahan hati. Pendidikan moral berbasis agama (Islam) tentunya bersumber dari ajaran Islam (Al-Qur'an dan Hadis) yang membutuhkan pengamalan (*amaliyah*) dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bahasa agama, karakter yang baik yang berbasis nilai-nilai agama dengan 'mengetahui apa yang baik dan buruk' (*'amar ma'ruf nahi munkar*), menginginkan yang baik (*hummah*), dan melakukan yang baik (*amal shalih*).<sup>77</sup>

Pendidikan moralitas (*moral education*) dan pendidikan karakter (*character education*) secara substansial tidak banyak perbedaan. Pendidikan karakter mengacu pada tiga kualitas moral, yakni kompetensi (keterampilan, seperti mendengarkan, berkomunikasi, dan bekerja sama), kehendak atau keinginan yang memobilisasi penilaian kita dan energi, dan kebiasaan moral (suatu disposisi batin yang dapat diandalkan untuk merespons situasi secara moral baik). Pendidikan karakter, karenanya, lebih kompleks daripada mengajar matematika sekalipun, di mana pendidikan karakter meniscayakan pengembangan kepribadian dan keterampilan. Hal ini merujuk pada tiga unsur utama dalam pembentukan karakter: mengetahui kebaikan (*knowing the good*), mencintai kebaikan (*loving the good*), dan melakukan kebaikan (*doing the good*).<sup>78</sup> Dalam pendidikan karakter, kebaikan itu sering kali dirangkum dari sejumlah sifat-sifat baik. Jadi, pendidikan karakter merupakan upaya untuk membimbing perilaku manusia untuk menuju standar-standar baku tentang sifat-sifat baik. Upaya ini juga memberi jalan untuk menghargai persepsi dan nilai-nilai pribadi yang ditampilkan di sekolah. Fokus pendidikan karakter adalah pada tujuan-tujuan etika, dan praktiknya meliputi penguatan kecakapan-kecakapan penting meliputi perkembangan sosial atau moralitas sosial kalangan anak-anak, remaja, dan pemuda.

Dalam UU Dasar 1945 dikatakan: 'Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab'. Atas dasar itu, maka dalam batang tubuh UUD 1945 diatur hal yang berhubungan dengan ketuhanan, seperti tercantum dalam Pasal 29 ayat 1 dan 2:

<sup>77</sup>Lanny Octavia, et. al., 'Pendidikan Karakter Berbasis Pesantren....', *Loc. Cit.*, hlm. 17.

<sup>78</sup>Lanny Octavia, et. al., *Ibid.*, hlm. 18.

(1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu.<sup>79</sup> Sebagai konsekuensi pentingnya sikap hidup agamis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah membentuk Departemen Agama pada 3 Januari 1946. Tugas pokok Departemen Agama adalah mengurus permasalahan bertalian dengan kehidupan beragama bagi masyarakat Indonesia, salah satunya bertalian dengan masalah pendidikan agama.<sup>80</sup>

Dari sekian banyak permasalahan anak usia remaja dan pemuda, Zakiah Daradjat mengungkapkan bahwa permasalahan anak usia remaja dan pemuda dapat diklasifikasikan: (1) bertalian dengan masa depan di mana setiap remaja mendambakan masa depan yang lebih baik dengan penuh kepastian, tetapi kadang-kadang antara cita-cita (*ideal*) dan realitas (*actual*) tidak selalu sejalan, hal ini, akan lebih memudahkan mereka untuk berperilaku negatif; (2) bertalian dengan keluarga/orang tua, di mana adanya pertentangan antara anak-anak remaja dengan orang tua, yang bisa saja dipengaruhi faktor eksternal yang kurang edukatif; dan (3) bertalian dengan moral dan agama, di mana nilai-nilai moral yang tidak didasarkan dengan agama akan terus berubah sesuai dengan keadaan, waktu, dan tempat yang dapat berakibat kegoncangan bagi diri anak usia remaja dan pemuda karena merasa hidup tanpa pegangan. Nilai yang tetap hidup dan tidak berubah merupakan nilai agama yang absolut dan berlaku sepanjang zaman yang tidak terpengaruh oleh waktu, tempat, dan keadaan.<sup>81</sup>

Pengembangan pendidikan karakter (akhlak) dan kepribadian<sup>82</sup> usia anak-anak, remaja, dan pemuda dapat dilakukan dengan pentingnya

<sup>79</sup>Lihat: (UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2).

<sup>80</sup>Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam: Napaktilas Perubahan Konsep, Filsafat, dan Metodologi Pendidikan Islam dari Era Nabi Saw. sampai Ulama Nusantara*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), hlm. 386.

<sup>81</sup>Orang yang kuat keyakinan beragamanya adalah yang mampu mempertahankan nilai agama yang absolut dalam kehidupan sehari-harinya dan tidak terpengaruh oleh arus kemerosotan moral yang terjadi di masyarakat dan menjaga ketenangan jiwanya. Lihat: (Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 2005, hlm. 145-147).

<sup>82</sup>Kepribadian, secara garis besar, dapat diartikan sebagai *personality*, *mentality*, *individuality*, dan *identity*. *Personality* merupakan tampilan sikap lahir batin, sedangkan *mentality* berhubungan dengan sikap mental dan pola pikir. Sedangkan *individuality* bertalian dengan perbedaan individu, dan *identity* adalah ciri khas atau jati diri. Lihat: (Jalaluddin, *Psikologi Agama*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 201).

revitalisasi pendidikan agama, yang pada akhirnya sebagai upaya penguatan moralitas sosial. Untuk itu, setidaknya ada tiga 'iklim' pendidikan yang berpengaruh kuat terhadap proses perkembangan moralitas sosial mereka (anak-anak, remaja, dan pemuda): keluarga/orang tua, sekolah, dan masyarakat. Ketiganya tidak terpisah satu sama lain, bahkan saling bertautan dan membutuhkan dengan rangkaian tahapan-tahapan. Keluarga memiliki peran strategis dalam proses pendidikan anak, dan sama-sama bertanggung jawab dalam masalah pendidikan. Orang tua bertanggung jawab atas kehidupan keluarga dan pengarahan yang benar yakni dengan menanamkan ajaran agama dan akhlak al karimah.<sup>83</sup>

Keluarga memerlukan suatu teladan bagi anak-anaknya. Anak-anak cenderung meniru perilaku orang tuanya. Misalnya, jika anak melihat orang tuanya selalu berbuat baik terhadap ibu bapak mereka (nenek dan kakek), selalu mendoakan dan meminta ampunan Allah Swt. untuk mereka, selalu menanyakan berita dan keadaan mereka, menenangkan hati mereka, memenuhi kebutuhan mereka dan memperbanyak doa, menyambung tali silaturahmi dengan orang lain yang bersahabat dengan mereka, menziarahi kubur mereka (sudah wafat) bersadaqah, maka atas izin Allah Swt., anak itu akan meniru akhlak mulia ini. Pendidikan Islam memiliki peranan strategis dalam mencerdaskan pengetahuan dan membina akhlak anak didik.<sup>84</sup> Al-Ghazali dalam Hamid Reza Alavi<sup>85</sup> mengungkapkan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab terdepan dalam pendidikan anak. Anak dipandang sebagai suatu *tabula rasa* (kertas putih), di mana orang tua bertanggung jawab mengembangkannya, baik bertalian dengan perkembangan bahasa, tradisi kultur, dan keyakinan moral dan praktiknya. Orang tualah yang berperan dalam mengembangkan karakter yang baik dalam kehidupan anak-anaknya di kemudian hari.

Jalaluddin<sup>86</sup> mengungkapkan bahwa Islam menempatkan fungsi dan peranan orang tua begitu penting dalam pendidikan, terkhusus

<sup>83</sup>Abdullah Idi & Safarina Hd., 'Etika Pendidikan: Keluarga...', Op. Cit., hlm. 151.

<sup>84</sup>Syaikh Musthafa al-Adawy, *Fikih Pendidikan Anak*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Qisthi press, 2009), hlm. 23.

<sup>85</sup>Hamed Reza Alavi, 'Islamic Values: a distinctive framework for moral education', *Journal of Moral Education*, Vol. 36, No. 3, September 2007, hlm. 283-296.

<sup>86</sup>Jalaluddin, *Mempersiapkan Anak Sholeh*, Edisi Revisi, (Palembang: Penerbit Noerfikri, 2015), hlm. 178.

dalam pendidikan keluarga. Dalam keluarga, orang tua memiliki peran utama, di mana suatu peran yang paling menentukan keberhasilan dan kegagalan pendidikan anak-anak mereka, khususnya dalam hubungannya dengan pembentukan kepribadian. Dalam keluarga, orang tua terutama bapak (ayah) menempati posisi sebagai sosok teladan bagi putra-putri mereka, yakni sosok sebagai model dalam pembentukan kepribadian mereka.

Madrasah juga memiliki peranan strategis dalam mengembangkan moralitas sosial usia anak-anak dan remaja. Arief Subhan mengungkapkan bahwa madrasah merupakan khazanah lembaga pendidikan Islam yang diwariskan generasi Muslim terdahulu. Pada periode modern, madrasah digunakan sebagai bentuk lembaga pendidikan yang memiliki ciri-ciri modern. Pada abad ke-20, di mana sebagai periode kebangkitan madrasah di Indonesia, kaum Muslimin menggunakan madrasah sebagai simbol lembaga pendidikan Islam modern dengan ciri-ciri lembaga pendidikan klasikal, kurikulum terstruktur, ujian direncanakan periodik, kenaikan kelas, dan sertifikat tanda lulus.<sup>87</sup> Sistem pendidikan madrasah ini pada awalnya ditujukan dalam bentuk sistem klasikal di mana siswa dapat memperoleh pendidikan agama dan umum dengan berimbang. Dalam perkembangannya, peran dan kontribusi madrasah sangat signifikan, sejak berdirinya Departemen Agama RI pada tanggal 3 Januari 1946.<sup>88</sup>

Dalam perkembangannya, madrasah telah banyak mengalami perubahan secara kuantitatif dan bahkan kualitatif. Hingga 1990-an, masyarakat masih memiliki interes yang lebih tinggi terhadap sekolah umum yang dinilai memiliki *prestise* yang lebih baik daripada madrasah. Di samping kualitas lebih baik, dengan masuk sekolah umum agaknya dipandang lebih terbuka terhadap beragam jenis lapangan pekerjaan. Kini, *image* itu sudah mulai berubah karena sejumlah madrasah di kota-kota besar mulai menunjukkan kualitasnya yang lebih baik dan sejajar dengan sekolah umum. Salah satu kelebihan madrasah, kurikulumnya cenderung universal dan tidak mendikotomikan ilmu agama dan ilmu umum.<sup>89</sup>

<sup>87</sup>Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-21: Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas*, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 80.

<sup>88</sup>Maksun, *Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 123.

<sup>89</sup>Abdullah Idi, 'Etika Pendidikan....', *Op. Cit.*, hlm. 166.

Keberadaan Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah umum dan universitas memiliki peranan strategis pula terhadap pembentukan karakter (akhlak) dan kepribadian serta moralitas sosial anak-anak, remaja, dan generasi muda. Zakiah Daradjat<sup>90</sup> menulis bahwa persoalan anak-anak, remaja, dan pemuda sangat banyak seiring dengan perubahan sosial dan perkembangan zaman. Daradjat menganjurkan pentingnya upaya pembinaan anak usia remaja, pemuda, dan mahasiswa. Membina kehidupan beragama di sekolah dan universitas dengan sasaran kehidupan beragama pada mereka usia muda dalam pertumbuhannya, sekitar umur 18-24 tahun. Pemuda pada usia ini diklasifikasikan pada usia remaja dan dewasa muda yang bukan lagi anak-anak yang selalu dapat dinasihati, dididik, dan diajarkan dengan mudah. Untuk itu, Muhaimin mengungkapkan jika krisis akhlak atau moral merupakan pangkal dari krisis multidimensional, sedangkan pendidikan agama Islam banyak menggarap masalah akhlak, maka perlu ditelaah apa yang menjadi penyebab titik lemah dari pendidikan agama itu.<sup>91</sup> Seperti diungkapkan Mochtar Buchori (1992), Muhammad Maftuh Basyuni (2004), bahwa pendidikan agama mengalami kegagalan karena mengandalkan aspek kognitif yang mengabaikan aspek afektif dan psikomotorik, sehingga tidak mampu membentuk pribadi-pribadi bermoral. Padahal, dikatakan Harun Nasution (1995), intisari dari pendidikan agama adalah pendidikan moral.<sup>92</sup>

Selanjutnya, pesantren<sup>93</sup> memiliki peranan strategis dalam mengembangkan moralitas sosial anak usia sekolah, remaja, dan

<sup>90</sup>Mereka juga bukan orang dewasa yang dapat dilepaskan untuk bertanggung jawab sendiri atas pembinaan pribadinya tapi mereka adalah orang-orang sedang berjuang untuk memperoleh kedudukan sosial yang diinginkan, dan bertarung dengan beragam persoalan hidup untuk memastikan diri, serta mencari pegangan untuk menenteramkan batin dalam proses kehidupan yang kompleks. Lihat: (Zakiah Daradjat, 'Ilmu Jiwa Agama...', *Ibid.*, hlm. 147).

<sup>91</sup>Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 22-23.

<sup>92</sup>Muhaimin, 'Pengembangan Kurikulum...', *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>93</sup>Pesantren dilihat dari jenisnya tampak beragam, antara lain: (1) Pesantren Tradisional (*Salafiah*) dengan pola pengajarannya menggunakan sistem *halaqah*; (2) Pesantren Modern (*Khalafiah*), yang berusaha mengintegrasikan secara penuh sistem klasikal dan sekolah ke dalam pondok pesantren; dan (3) Pondok Pesantren Komprehensif, yang menggabungkan sistem pendidikan dan pengajaran antara tradisional dan modern. Lebih jauh dapat ditelusuri dalam pandangan: (Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta: INIS, 1994, hlm. 61; dan Zamaksyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Kasus tentang Kehidupan Kiai*, Jakarta: LP3ES, 1994, hlm. 44).

pemuda. Abdul Malik Fajar mengungkapkan bahwa pesantren tidak hanya mampu menjalankan fungsi tradisionalnya tetapi pesantren dalam mengembangkan pendidikan formalnya, menyebabkan keberadaan pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan dalam masyarakat sedikit mengalami perubahan. Masyarakat tidak lagi memandang pesantren sebagai lembaga pendidikan yang kurang menjanjikan masa depan dan kurang responsif terhadap tuntutan dan permintaan saat ini dan masa datang. Bagaimanapun juga dalam memilih pendidikan anak-anaknya, orang tua setidaknya mempertimbangkan tiga hal penting: nilai (agama), status sosial, dan cita-cita.<sup>94</sup> Hal ini, sejalan dengan pandangan Abdurrahman Mas'ud<sup>95</sup> bahwa hakikat dan watak pesantren baik sebagai lembaga pendidikan maupun sebagai sosio-kultural politik, merupakan refleksi pesantren sebagai sebuah budaya yang unik. Karakteristik budaya pesantren, antara lain: *modeling* (ajaran Islam/uswatun khazanah), *cultural resistance* (mempertahankan budaya), dan budaya keilmuan yang tinggi.

Persoalan pembinaan pendidikan karakter (akhlak) dan kepribadian pada anak usia sekolah, remaja, dan mahasiswa/pemuda merupakan investasi sosial yang paling krusial, terlebih dalam masyarakat multikultural. Dalam upaya membenahi merosotnya moralitas sosial. Maju-mundurnya bangsa sangat terletak pada moralitas sosial, oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia (*human resources*) paling diutamakan. Penanaman nilai-nilai pendidikan agama (Islam) memerlukan kontribusi optimal dari: keluarga atau orang tua, sekolah, madrasah, universitas, masyarakat (kegiatan keagamaan dan majelis taklim), dan pemerintah (melalui kebijakan strategis yang berpihak kepada segenap aspirasi masyarakat yang pluralistik).

Berbagai fenomena sosial pada dekade terakhir cenderung mengarah pada suatu kondisi degradasi atau 'pergeseran' moralitas sosial tanpa terkendali. Jika kondisi ini tanpa perhatian semua elemen berbangsa maka bisa saja berdampak pada proses disorientasi arah dan tujuan kehidupan berbangsa. Untuk itu, diperlukan upaya penguatan

---

<sup>94</sup>Abdul Malik Fajar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 9.

<sup>95</sup>Abdurrahman Mas'ud, *Sejarah dan Budaya Pesantren, dalam Dinamika Pesantren dan Madrasah*, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm. 26-34).

moralitas sosial dari berbagai elemen berbangsa dengan pengembangan pendidikan karakter atau pendidikan akhlak bagi generasi muda dalam beragam level umumnya (anak-anak, remaja, dan pemuda) serta perlunya revitalisasi dan optimalisasi peran institusi keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai 'tri pusat' pendidikan agama.

Kemajuan bangsa memperlihatkan adanya keseimbangan pembangunan fisik-material dan nonfisik-spiritual, sesuai dengan tujuan filosofis pembangunan nasional. Keduanya sama pentingnya, oleh karenanya, bila terjadi ketimpangan salah satunya akan berdampak pada disorientasi pembangunan nasional. Suatu bangsa tidak pernah akan mengalami kemajuan dan ber peradaban apabila anomali sosial yang melanda anak-anak, remaja, dan generasi muda. Semaju apa pun pembangunan fisik-material pada suatu bangsa akan sulit terwujud menjadi maju (*developed country*) tanpa didukung kualitas moralitas sosial (*social morality*) yang optimal pula. Sebagai upaya penguatan moralitas sosial berbangsa ke depan, diperlukan perhatian saksama dan komitmen terhadap pentingnya keberpihakan dan optimalisasi pengembangan pendidikan karakter (akhlak) bagi semua 'anak bangsa' dengan identitas berbeda dalam masyarakat pluralistik secara sistemik dan integral.

### **E. Multikulturalisme dan Peran 'Perekat' Agama**

Dari latar belakang terjadinya konflik sosial di tanah air, lebih berhubungan dengan ketidakpuasan terhadap perlakuan politik, ekonomi, budaya, dan agama. Karena itu, pendekatan pluralisme diharapkan dapat mereduksi berbagai konflik sosial dan potensinya yang akan mengancam disintegrasi sosial dan disintegrasi bangsa. Pluralisme atau multikulturalisme dapat dikatakan sebagai berkompetisi dengan kesempatan yang sama dalam berbagai bidang kehidupan, baik bidang politik, hukum, ekonomi, budaya, agama, maupun pendidikan (James A. Bank, 1989:3).

Menghargai pluralitas, termasuk bidang pendidikan (Amy L. Freedman, 2001: 411-440) akan memperkuat proses integrasi sosial (anak-anak dari etnis berbeda). Sama halnya dengan bidang agama, sebagai salah satu elemen primordialisme, memiliki peran "perekat" terhadap integrasi sosial. Islam, dalam hal ini sebagai kelompok mayoritas dianut penduduk (90%) Indonesia, memiliki peranan

strategis dalam membina generasi mudanya dan umat Islam dalam memperkuat integrasi sosial. Umat Islam memiliki tanggung jawab terdepan dalam membina dan memperjuangkan integrasi sosial. Secara konseptual-teoretis, ajaran Islam sangat menjunjung tinggi dan toleransi terhadap pluralitas. Sebagai wahyu yang diturunkan bagi manusia, Islam telah menjadikan doktrin menyejarah dalam pluralitas.

Pluralitas terwujud dengan hadirnya beragam aliran internal keagamaan dalam Islam serta beragam agama lain. Bertalian dengan beragam aliran keagamaan dalam Islam, firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an (22:34) mengungkapkan:

Untuk tiap-tiap umat Kami adakan cara peribadatan, supaya kamu menyebut nama Allah, atas binatang ternak yang telah diberikan Tuhan kepada mereka. Tuhan kamu ialah Tuhan Yang Maha Esa, sebab itu hendaklah kamu menyerahkan diri kepada-Nya, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang taat.

Dalam Islam, pluralitas aliran keagamaan diterima sebagai kenyataan sosiohistoris. Pluralitas seperti ini adalah gejala umum terjadi dalam kehidupan manusia, seperti pluralitas dalam berpikir, berperasaan, bertempat tinggal, dan berperilaku. Sumber dari Islam itu sendiri sesungguhnya bersifat tunggal, yakni bersumber dari dan bersandar pada Allah yang satu. Namun, ketika doktrin itu menyejarah dalam masyarakat dalam realitas kehidupan masyarakat, maka pemahaman, penafsiran, dan pelaksanaan sepenuhnya bersandar pada realitas tersebut. Manusia yang satu dengan manusia lain berbeda dalam pemikiran maupun kehidupan sosial-ekonomi, budaya, politik, dan geografis. Penerapan Islam di daerah pesisir, misalnya, berbeda penerapannya di daerah pedalaman, demikian pula halnya pada masyarakat Islam agraris maupun masyarakat industri. Di dalam Al-Qur'an (26:67) diungkapkan:

Untuk tiap-tiap umat Kami adakan cara peribadatan tertentu yang mereka lakukan, oleh sebab itu janganlah mereka berselisih dengan engkau itu, dan panggillah ke jalan Tuhan engkau, sesungguhnya engkau ada di atas pimpinan jalan lurus.

Dalam hubungannya dengan pluralitas agama, Islam menetapkan prinsip saling menghormati dan mengakui eksistensi masing-masing. Seperti ditegakan dalam Al-Qur'an (109:6) : "Untuk kamu agamamu

dan untuk aku agamaku." Islam juga menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama (Al-Qur'an: 2:256).

Tidak ada paksaan dalam agama, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dengan jalan yang salah, dan siapa yang tidak percaya kepada thoghut (berhala atau syaithan) dan percaya kepada Allah, sesungguhnya dia telah berpegang pada tali yang teguh dan tidak akan putus, dan Tuhan itu mendengar dan mengetahui.

Pandangan Islam tentang pluralitas di atas agaknya relevan dengan UUD 1945 Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu". Islam mengajak untuk mencari akar persamaan yang menjadi dasar ajaran masing-masing agama, yakni kepercayaan pada Tuhan itu sendiri sebagai pusat ajaran tiap agama. Jadi, bukan pada sebutan nama Tuhan dari masing-masing agama, sebagaimana terungkap di dalam Al-Qur'an:

Katakanlah hai orang-orang ahli kitab, marilah kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kamu, yaitu bahwa kita tidak menyembah selain Allah, dan kita tidak mempersekutukan Tuhan dengan sesuatu apa pun, dan satu yang tidak mengambil yang lain menjadi Tuhan, selain dari Allah, tetapi kalau mereka tidak menurut katakanlah, akulah olehmu, bahwa kami adalah Muslim.

Islam sebagai agama yang toleran terhadap penganut agama lain. Secara implisit Islam menyindir siapa pun yang terjebak dalam pemahaman keagamaan yang sempit, eksklusif, dan monolitik. Sebab, persepsi kebenaran tidak menjadi monopoli seseorang atau kelompok tertentu. Dalam hubungan antaragama, Frithjof Schuon (2003: 10-12) dan Abdullah Idi (2006:174-175) dikatakan bahwa dalam hal hakikat dan perwujudan antara agama-agama, yang dikatakan sebagai esoteris dan eksoteris. Esoteris (*esoteric*) merupakan hal-hal hanya boleh diketahui dan dilakukan beberapa orang saja dari suatu kelompok penganut suatu paham tertentu; sedangkan, eksoteris (*exoteric*) merupakan hal-hal boleh diketahui dan dilakukan semua kelompok penganut suatu paham tertentu. Setiap sesuatu mesti mempunyai persamaan sekaligus perbedaan dengan lain. Sama halnya dengan agama-agama, ada persamaan dan perbedaan sehingga dapat diperbandingkan. Schuon membuat suatu garis horizontal yang membagi batasan esoteris dan eksoteris. Garis pemisah itu dipandang sebagai suatu tesis bahwa semua

agama pada hakikatnya sama secara esoteris dan hanya berbeda dalam bentuknya secara eksoteris (Hindu, Buddha, Cina, Yahudi, Kristen, dan Islam).

Untuk menuju Indonesia Baru yang ditandai dengan semakin kompleksnya kehidupan berbangsa yang tidak jarang diikuti dengan konflik sosial, perlu pemahaman pluralitas dalam makna sebenarnya. Islam perlu dikembangkan sebagai agama *rahmatan lil'alam* (mendatangkan rahmat bagi alam semesta). Melalui kehadirannya sebagai *rahmatan lil'alam*, pluralitas agama dapat dikembangkan menjadi bagian dari proses pengayaan spiritual dan penguatan moralitas universal. Tanpa kesediaan umat Islam dan umat agama lain untuk menerima pluralitas keagamaan, konflik internal maupun eksternal sangat mudah muncul. Kondisi yang demikian dapat mengarah ke perilaku kekerasan yang bertentangan dengan prinsip kehadiran Islam *rahmatan lil'alam*. Di dalam Al-Qur'an (21:107) diungkapkan: "Dan Engkau tidaklah kami utus melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam".

Pluralitas dapat dikatakan sebagai tantangan bagi agama-agama, sehingga pencarian titik temu (konvergensi) di antara agama-agama perlu dijadikan perhatian. Hal ini dimaksudkan agar perasaan bahwa ajaran yang paling benar hanyalah agama yang diperlu hendaknya dapat diposisikan dengan proporsional (Harold Coward, *Kompas*, 17 Oktober 1997). Islam, sebagaimana diungkapkan dalam Surah 2 Ayat 256 dan Surah 109 Ayat 6 di atas, secara normatif mengakui hak dan keberadaan pengikut agama lain atau para ahli kitab. Pengakuan itu merupakan prinsip utama doktrin Islam terhadap pluralitas agama dan sosial budaya sebagai kehendak Sang Khalik *sunnatullah*.

Di tengah pandangan pluralitas agama, banyak pemeluk agama tertentu yang masih memiliki pandangan dan sikap eksklusif, yang justru memonopoli kebenaran agama (*truth claim*) dan paham keselamatan (*salvation claim*). Pandangan dan sikap seperti ini tidak jarang menimbulkan konflik sosial-politik dan membawa berbagai jenis perang antarumat beragama. Munawar Rachman (*Kompas*, 17 Oktober 1997), mengatakan, anggapan bahwa suatu agama secara intrinsik lebih baik dari agama lainnya dewasa ini dipandang oleh ahli-ahli agama sebagai sikap yang sepenuhnya benar. Dengan adanya pengayaan wawasan keilmuan yang luas dan paham keagamaan yang inklusif,

egaliter, dan demokratis, akan semakin disadari bahwa semua agama dalam hal tertentu cenderung *relatively absolute*—demikian diistilahkan oleh Seyyed Hosen Nasr—atau *absolutery relative*.

Pluralitas dalam Islam merupakan kehendak Sang Khalik (*summatullah*) maka sangat penting dilakukan konvergensi antaragama, yakni suatu usaha mencari titik temu antaragama. Dalam doktrin Islam, usaha itu memperoleh teologis melalui kitab suci Al-Qur'an. Maksudnya, secara teologis Al-Qur'an mengajak pengikut agama lain untuk mencari titik temu (*kalimatun sawa'*) agama-agama, sebagaimana firman Allah Swt.:

Katakanlah (Ya Muhammad) : "Hai Ahli Kitab, marilah kita semua kembali kepada keyakinan yang sama (*kalimatun sawa'*) antara kami dan kamu bahwa kita tidak menyembah siapa pun kecuali Allah dan kita tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun....".

Usaha mencari titik temu (*kalimatun sawa'*) agama-agama perlu dibingkai dalam format Tuhan Yang Maha Esa, bahwa semua itu berasal dari satu Tuhan. Pada level transendental, kata Frithjof Schoun, semua agama akan mencapai titik temu; atau meminjam terminologi Huston Smith dalam Abdullah Idi (2006: 117-118), bahwa landasan esoteris dinamakan kesatuan transenden agama-agama. Pada tingkat *the common vision*, kata Hustin Smith—atau pada tingkat *trancendent*, kata kaum Perennialis—semua agama memiliki kesatuan maupun kesamaan gagasan dasar. Dalam hal ini dinamakan "pesan dasar agama", yaitu sikap pasrah untuk senantiasa bertakwa, selalu menghayati kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks agama-agama, penerimaan adanya *the common vision* tersebut memiliki makna menghubungkan kembali *the many*—yang hal ini merupakan realitas eksoteris (*exoteric*) agama-agama—kepada asalnya, *The One-Tuhan*, yang oleh para pemeluknya diberi berbagai macam nama sejalan dengan perkembangan kebudayaan maupun kesadaran sosial dan spiritual manusia. Kesan empiris tentang adanya pluralisme agama ini tidak berhenti sebagai fenomena faktual saja, tetapi juga dilanjutkan pada bahwa ada satu realitas yang menjadi pengikat yang sama di antara agama-agama, yang dalam bahasa simbolis dapat dinamakan dengan 'agama'—*the religion*.

Tampak bahwa meskipun agama bersifat plural, tapi semuanya menuju pada satu kebenaran, yakni kebenaran Tuhan. Jadi, kebenaran juga bersifat plural. Bagi kalangan pluralis, semua agama mengandung kebenaran, sebab pada prinsipnya semua agama dan ilmu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam terminologi Islam, semua Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bersikap toleran dan tidak eksklusif terhadap agama lain. Jika dirunut jauh ke belakang, sikap eksklusif seperti ini persis dengan apa yang dilakukan suku Quraisy dalam menyikapi perjuangan Muhammad Saw. Oleh karena keyakinan tentang eksistensi Tuhan dari suku Quraisy telah diperoleh dari patung-patung bernama Latta, Uzza, dan Manna, maka kemudian ketika muncul keyakinan tentang 'tuhan-tuhan' lain di luar tradisi mereka menolak dan melarang masuknya keyakinan yang muncul kemudian itu. Dengan alasan yang sama, suku Quraisy bertindak sangat tidak simpatik terhadap Nabi Muhammad Saw. dan para pengikutnya.

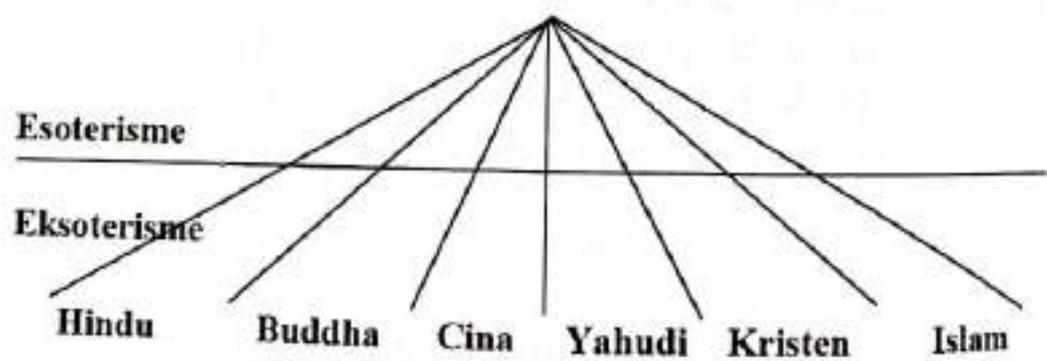
Dalam perspektif sosiologis, persoalan keagamaan terkadang memperlihatkan paradoks. Di satu sisi, persoalan keagamaan dapat sebagai 'perekat' dalam relasi antarmanusia, tetapi juga, dapat menimbulkan konflik (permusuhan) antarmanusia karena perbedaan pemahaman terhadap ajaran agamanya. Konflik bernuansa keagamaan dalam awal sejarah kemanusiaan hingga kini, seperti tragedi Perang Salib, konflik Islam-Hindu di India, konflik Sekte Sunni-Shi'ah di Pakistan, (pernah) konflik Ambon, Terorisme, dan sejenisnya. Problema keagamaan dan moralitas masyarakat tampak begitu kompleks, di mana penyebab atau akar-akar kekerasan perlu ditelusuri. Charles Kimbal<sup>96</sup> seorang pakar sejarah dan perbandingan agama (Yahudi-Kristen-Islam), berupaya menelusuri dan memetakan problema/konflik berbasis keagamaan tersebut. Dengan peta analisisnya, Kimball menjelaskan fenomena kekerasan religiusitas kontemporer. Sebagai solusinya, Kimball menganjurkan agar kembali ke agama autentik, yaitu modus keberagamaan yang tidak sekadar setia dengan doktrin spiritual yang statis, tetapi sebuah iman yang hidup dan menghidupi kemanusiaan universal.

---

<sup>96</sup>Charles Kimbal, *Kala Agama Jadi Bencana*, (Bandung: Penerbit Mizan, 2004), hlm. 20.

Dalam konteks relasi penganut agama-agama, agaknya menarik pula untuk menganalisis Frithjof Schuon mengenai hubungan antaragama. Menurutnya, dalam hal hakikat dan perwujudan antara agama-agama terdapat apa yang disebut sebagai *esoteris* dan *eksoteris*.<sup>97</sup> *Esoteris* (*esoteric*) merupakan hal-hal yang hanya boleh diketahui dan dilakukan beberapa orang saja dari suatu kelompok penganut paham tertentu, sedangkan *eksoteris* (*exoteric*) merupakan hal-hal yang boleh diketahui dan dilakukan oleh semua kelompok penganut suatu paham tertentu. Setiap sesuatu mesti mempunyai persamaan sekaligus perbedaan dengan yang lainnya. Sama halnya dengan agama-agama, ada persamaan dan perbedaan sehingga dapat diperbandingkan. Permasalahannya, bagaimana memberi isi kepada kebenaran agama yang sudah nyata itu. Di manakah ditarik garis antara kesatuan dan kemajemukan di antara keduanya? Dalam hal ini, Schuon membuat garis pemisah antara yang esoteris dan eksoteris. Perbedaan esensial bukan terletak antara agama yang berbeda. Garis pemisah juga tidak membagi perwujudan historis dari agama-agama secara vertikal; agama Hindu dari Buddha, dari Kristen, dari Islam dan seterusnya. Sebaliknya, garis pemisah tadi bersifat horizontal dan hanya ditarik satu kali membelah berbagai agama yang ditemui di sepanjang sejarah. Di atas garis itu ditemui paham *esoterisme*, dan di bawahnya terdapat paham *eksoterisme*.

Berikut dikemukakan analisis Frithjof Schuon<sup>98</sup> mengenai hubungan antaragama dalam kaitannya dengan aspek esoterisme dan eksoterisme agama.



Hal ini tampak bahwa Frithjof Schuon membuat garis horizontal yang membagi batasan-batasan esoteris dan eksoteris. Garis pemisah

<sup>97</sup>Frithjof Schuon, *Mencari Titik Temu Agama-Agama*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm.10-12.

<sup>98</sup>Frithjof Schuon, 'Mencari Titik Temu Agama-Agama...', *Ibid.*, hlm. 12.

itu juga dapat dipandang sebagai suatu garis yang bukan orisinal, dikarenakan adanya suatu tesis bahwa semua agama pada hakikatnya secara esoteris sama, dan hanya berbeda dalam bentuknya saja secara eksoteris.

Dilihat dari dimensi sosio-kultural, setiap agama dengan agama lainnya memiliki sejumlah persamaan. Hal ini dapat dipandang sebagai dimensi yang dapat mempererat hubungan antara suatu agama dengan agama lain. Antara suatu agama dengan agama-agama lainnya pada prinsipnya memiliki sejumlah persamaan, di samping sejumlah perbedaan. Dalam kehidupan bermasyarakat-keagamaan, seorang individu harus senantiasa beradaptasi dengan berbagai sistem yang ada di lingkungannya. Agama, melalui ajarannya, mengandung nilai-nilai sosio-kultural yang dapat memperkuat kohesi sosial dan integrasi sosial dari integrasi bangsa. Permasalahan etnisitas atau hubungan antaretnis dan agama pada suatu masyarakat dalam suatu negara memerlukan solusi, yang salah satunya dapat dilakukan dengan perlunya memahami lebih jauh tentang ajaran agama-agama berbeda.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup>Abdullah Idi, *Bangka: Sejarah Sosial Cina-Melayu*, Edisi Kedua, (Yogyakarta: Tiara Wacana Press, 2011), hlm. 161.

## LANDASAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) BERBASIS MULTIKULTURAL

Pada bagian ini memfokuskan kajian tentang beberapa landasan atau asas-asas pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) berbasis multikultural. Landasan atau asas kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis multikultural, meliputi landasan: filosofis-yuridis, sosiologis, psikologis, organisatoris, dan teologis. Untuk kepentingan analisis yang lebih komprehensif dan mendeskripsikan pendidikan multikulturalisme dalam konteks keindonesiaan yang berlandaskan falsafah Pancasila, analisis landasan kurikulum ini akan dikaitkan dengan analisis pendidikan Islam berbasis multikultural pula. Dengan demikian, membicarakan multikultural dan pendidikan multikultural di Indonesia sesungguhnya tidak bisa mengabaikan dimensi agama (Islam) yang termaktub dalam sila ke-1 dan sila-sila lainnya dari Pancasila. Inilah salah satu warisan berharga yang telah dirumuskan para pendiri bangsa (*founding fathers*).

Kerangka dasar dalam pengembangan kurikulum PAI berbasis multikultural yakni Tauhid. Dengan ketauhidan dapat diwujudkan tata dunia yang harmonis. Tauhid merupakan prinsip utama dalam seluruh dimensi kehidupan manusia baik dalam aspek hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan maupun aspek hubungan horizontal antara

manusia dengan sesamanya, dan dengan alam sekitarnya. Tauhid yang seperti inilah yang dapat menyusun pergaulan manusia secara harmonis dengan sesamanya, dalam rangka menyelamatkan manusia dan perikemanusiaan dalam rangka pencapaian kehidupan yang sejahtera dan bahagia dunia dan akhirat, termasuk di dalamnya pergaulan dalam proses pendidikan. Tauhid yang seperti inilah yang dijadikan kerangka dasar kurikulum pendidikan Islam.<sup>1</sup>

## A. Landasan Teologis

Asas atau landasan teologis merupakan sebuah pandangan tentang konsep berislam dengan berparadigma multikulturalisme ini perlu untuk dibumikan nilai-nilainya. Jika perlu paradigma dan nilai-nilainya perlu diwariskan kepada generasi masa datang. Pendidikan diharapkan mampu memberikan warisan nilai-nilai yang dibutuhkan oleh penerus bangsa dan umat. Mengingat pentingnya nilai-nilai multikulturalisme dalam kehidupan sekarang ini, dan secara teologis tidak menyimpang dari kaidah-kaidah agama atau bahkan konsep tersebut dianjurkan oleh agama Islam, maka pendidikan Islam multikultural sangat urgen untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan umat Islam.

Teologi Multikulturalis adalah solusi alternatif sikap eksklusif dalam beragama. Teologi multikulturalis melihat kemajemukan, membangun harmoni dan kerja sama; saling percaya dan berpikir positif adalah modal sosial membangun kesepahaman; membuang kekakuan dalam bertindak dan berpikir; membangun harmoni antarindividu dalam bingkai perbedaan; serta menebar rahmat untuk alam semesta.<sup>2</sup> Pada dasarnya Islam sebagai agama menganjurkan kepada pemeluknya untuk selalu memberikan kedamaian kepada seluruh alam karena prinsip tersebut sebagai bagian risalah profetik yang dibawa Nabi Muhammad.<sup>3</sup>

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* mempunyai dua sisi yang harus dipahami oleh umatnya. Sisi pertama menyatakan bahwa ajaran

<sup>1</sup>Ramayulis dalam kutipan: (Zulhammi, 'Strategi Pengembangan Pendidikan Islam Berbasis Multikultural', *International Conference*, Batusangkar, 15-16 Oktober 2016, hlm. 779.

<sup>2</sup>Zakiyuddin Baidhawiy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta: Erlangga, 2007) hlm. 38.

<sup>3</sup>Lihat: (surah al Anbiya' ayat 107 yang artinya: "dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan menjadi (rahmat) bagi alam semesta").

Islam berupa ajaran-ajaran konstan, tetap, dan tidak berubah. Ajaran-ajaran tersebut berdimensi ritus agama yang transenden semisal salat, puasa, dan haji. Sedangkan sisi yang kedua memberikan warna bahwa agama bersifat elastis atau lunak.<sup>4</sup> Boleh jadi sifat lunak dan elastis dalam agama ini berupa pemahaman keagamaan dan interpretasi ajaran agama. Islam bersifat elastis sebagai agama universal dan berlaku sepanjang zaman dengan kata lain *sholihun likulli zaman wa makan*. Dalam memandang perubahan, Islam sejatinya tidak kaku atau eksklusif. Oleh sebab perubahan adalah suatu keniscayaan dan merupakan *sunnatullah*. Selama perubahan itu tidak keluar dari titik orbitnya maka Islam memberikan ruang terhadap itu semua.

Dalam pada itu, perubahan sebagai konsekuensi kehidupan yang dinamis ini membawa kepada pola kehidupan yang berbeda antara masyarakat satu dengan lainnya. Lebih-lebih ketika berbicara perbedaan dalam konteks keagamaan sebagai sesuatu yang melekat bagi manusia. Secara umum penduduk bumi ini mayoritas beragama hanya sekian persen saja mereka yang tidak mengakui tentang adanya Tuhan dan berargumen bahwa alam dan isinya terbentuk secara kebetulan.<sup>5</sup> Dari aspek pemahaman tentang eksistensi Tuhan saja penduduk dunia ini bisa dipolakan dengan beragama dan ateis. Sedangkan ketika manusia berbicara tentang konsep eksistensi Tuhan maka lahirlah perbedaan yang cukup signifikan. Mereka yang percaya dengan konsep ketauhidan Tuhan maka disebut dengan Islam sedangkan yang meyakini konsep trinitas Tuhan adalah mereka yang masuk golongan Kristen. Pemahaman tentang Eksistensi Tuhan ini melahirkan bentuk aliran agama dan kepercayaan yang berbeda.

Perbedaan tersebut tidak lantas berhenti pada tataran tentang Tuhan saja bahkan bagaimana pemahaman perbedaan menyerap informasi yang diberikan oleh Tuhan (wahyu) dan ajaran-ajaran-Nya dalam satu agama pun itu akhirnya membentuk konsep dan manhaj yang berbeda. Dalam agama Kristen ternyata perbedaan pemahaman itu membentuk sekte-sekte seperti Lutherisme, Calvinisme, Anglicanisme, Quakerisme, dan Katholikisme. Meskipun dilihat dari doktrin fundamentalnya sekte-sekte itu tidak mempunyai perbedaan signifikan tetapi hal itu mengarah pada perpecahan

<sup>4</sup>Abu Yasid, *Islam Moderat*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 1.

<sup>5</sup>Imam Sukardi dkk, *Pilar Islam bagi Pluralisme Modern*, (Solo: Tiga Serangkai, 2003), hlm. 7.

yang serius dalam tubuh agama Kristen.<sup>6</sup> Sebagai reaksi terhadap pengaruh kebudayaan Yunani dalam kehidupan Yahudi dan juga sebagai akibat penaklukan Israel dulu oleh Asyur dan Babel, maka muncullah sejumlah sekte Yahudi. Tidak kurang dari tujuh sekte yang dikenal pada abad pertama dan mungkin saja seluruhnya sekitar dua belas sekte.<sup>7</sup> Di Agama Hindu ada kepercayaan yang berupa Saiwa-Sidhanta 18 bisa dipastikan bahwa realitas seperti ini juga tampak dalam agama-agama yang lain.

Persoalan ini menjadi sesuatu yang lumrah, mengingat bagaimana bisa manusia memahami dunia ide Tuhan yang bersifat immateri sedangkan manusia sebagai pembaca bersifat materi. Selain itu terkadang aspek penafsiran dan pemahaman terhadap agama juga dipengaruhi oleh alam pikiran, kultur, dan bahasa pihak pembacanya. Dengan demikian sangat logis ketika ruang perbedaan penafsiran dalam suatu agama akan tetap ada dan tampak nyata. Dilihat dari aspek pola pikir keagamaan, Islam menurut Muhaimin dibagi menjadi tiga model pemikiran keagamaan: 1) *monoisme*: aliran ini memahami bahwa isi (makna) dengan lafaz atau bentuk teks menjadi satu-kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Dalam arti tidak ada perbedaan pendapat dalam memahami teks keagamaan oleh sebab antara isi dan lafaz berwujud sesuatu yang manunggal; 2) *dualisme*: aliran yang menyatakan bahwa teks dengan isi merupakan unsur yang dapat berdiri sendiri, meskipun didapatkan hubungan antara keduanya. Akan tetapi hubungan keduanya tidaklah kompleks seperti pemahaman pluralisme; 3) *pluralisme*: aliran ini menggambarkan bahwa isi dan bentuk teks merupakan hubungan yang kompleks. Sebuah teks merupakan konstruk metafungsional yang terdiri atas makna ideasional, interpersonal, dan tekstual yang kompleks.

Berdasarkan uraian di atas, kehidupan di dunia ini sejatinya bagi setiap orang pasti akan menemukan dinamika di tengah kehidupannya. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling mengenal. Al-Qur'an menjadikan "kenal-mengenal" sebagai logika awal pluralitas manusia di bumi ini. Pluralitas ini bukan hanya sekadar pada fisik seperti warna kulit, ras, dan lainnya. Lebih dari itu Allah bahkan menjadikan manusia berbeda dari aspek batin seperti pendapat atau bahkan agama.

<sup>6</sup>Ahmad Suhelmi, *Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, (Jakarta: Gramedia, 2007), hlm. 162.

<sup>7</sup>WS Lasor dkk, *Pengantar Perjanjian Lama*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2007), hlm. 437.

## B. Landasan Filosofis-Yuridis

Dinamika kehidupan manusia dari masa ke masa selalu berkembang dan berubah. Perubahan manusia dari yang primitif hingga sekarang yang disebut dengan kehidupan modern tidak terlepas dari hasrat manusia untuk berkembang dan menjadikan kehidupannya lebih baik. Proses perkembangan manusia ke arah kesempurnaan ini tentunya melalui proses yang disebut dengan pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya adalah aktivitas yang tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Negara sebagai kumpulan masyarakat selalu memperhatikan bagaimana pendidikan tersebut dilaksanakan.

Hal ini tak lain karena pendidikan adalah elemen penting dalam memajukan peradaban. Suatu bangsa akan dapat berkembang dan mencapai kesuksesan dengan pendidikan. Dan dapat dipastikan bahwa negara yang maju dan mempunyai daya saing tinggi dalam kancah global, pendidikan yang dilaksanakannya berjalan dengan baik. Sehingga setiap negara pasti mengamanatkan kepada penyelenggaranya untuk memberikan pendidikan yang baik kepada rakyatnya. Selain sebagai hak asasi setiap manusia, pendidikan memberikan andil besar dalam menaikkan taraf kehidupan bangsa. Indonesia sebagai negara yang besar dalam Undang-Undang Dasarnya (UUD 1945) Pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan" minimal setiap warga negara mengikuti pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh negara, dan negara pun wajib membiayainya. Namun yang dijadikan perhatian adalah bagaimana pendidikan itu dapat terlaksana dengan baik dan sesuai tujuannya.

Pendidikan di Indonesia sebagaimana Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut dengan jelas mewajibkan kepada penyelenggara pendidikan untuk dapat mengimplementasikan dan mewujudkannya dalam proses aktivitas pendidikan di antaranya dengan mengarahkan tujuan kurikulum, materi dan pembelajaran sesuai dengan tujuan yang ditetapkan tersebut.

Dalam pada itu, proses penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan sebagaimana dinyatakan dalam UU Sisdiknas tahun 2003 harus berdasarkan prinsip bahwa pendidikan dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Prinsip pelaksanaan pendidikan tersebut didasarkan pada realitas bangsa Indonesia yang majemuk dan terdiri dari banyak kultur.

Idealnya pendidikan tidak mengenal batas dan latar belakang peserta didik. Hak untuk mendapatkan pendidikan adalah hak setiap manusia. Akan tetapi terkadang penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat masih terbawa pada etnosentris dan kebudayaannya masing-masing. Hal ini dapat dimaklumi mengingat setiap etnik atau ras maupun kelompok kebudayaan yang lain cenderung mempunyai semangat dan ideologi yang etnosentris.<sup>8</sup> Sikap seperti ini harus dikikis dan tidak boleh ada dalam proses pelaksanaan pendidikan. Mengingat sikap tersebut selain keluar dari prinsip penyelenggaraan pendidikan, juga memberikan dampak sikap eksklusif, superior, dan mendorong pada meningkatnya prasangka kepada orang lain maupun kebudayaannya.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara yang majemuk praktik pendidikan Indonesia seharusnya mengembangkan suatu budaya pendidikan yang menjunjung tinggi nilai keragaman dan menghormati perbedaan, memberikan kesempatan yang sama untuk belajar bagi semua individu dan kelompok masyarakat, mempromosikan identitas diri sekaligus mendorong kesatuan melalui keragaman. Pemahaman ini adalah bentuk dari nilai-nilai kesadaran multikultural. Dari nilai-nilai ini pula Indonesia sebagai negara plural diyakini mampu merajut harmoni dan kesatuan antaranak bangsa.

Pendidikan Islam merupakan subsistem dari sistem pendidikan nasional. Tidak dapat dibantah dan jamak diketahui kedudukannya dalam sistem politik nasional menjadi bagian penting dan tak terpisahkan. Khususnya politik pendidikan dan undang-undangnya Segala bentuk kebijakan nasional di sektor pendidikan, secara simultan melibatkan pendidikan Islam dan sama sekali tidak dapat mengabaikan

---

<sup>8</sup>Mahfudz dkk, *Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Multietnik*, (Yogyakarta: Depublish, 2015), hlm. 82.

pendidikan Islam. Dalam hal ini Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab VI Pasal 15 mempertegasnya dengan pernyataan bahwa jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.<sup>9</sup> Bahkan boleh dikata secara historis kedudukan pendidikan Islam dalam mencerdaskan bangsa melewati pendidikan nasional jauh sudah dilakukan sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia.

Dalam pada itu, politik pendidikan yang sarat dengan kebijakan, undang-undang, dan peraturan tentang pendidikan nasional juga memberikan ruang dan memberlakukan pendidikan Islam sebagaimana pendidikan umum yang ada. Sehubungan dengan itu, implementasi pendidikan Islam juga memerhatikan tentang apa yang ditetapkan oleh negara dalam pelaksanaannya. Baik tujuan, fungsi, dan prinsip penyelenggaraan pendidikan. Jika pendidikan secara umum berprinsip pendidikan dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Maka pendidikan Islam juga harus mengimplementasikan sesuatu yang dikehendaki oleh undang-undang.

Dengan kata lain pendidikan Islam juga mengembangkan nilai-nilai multikultural dalam proses pelaksanaannya di mana tujuannya adalah untuk memberikan dampak kehidupan yang harmonis dan rukun. Amanat yang disebutkan di atas juga dipertegas dalam Peraturan Pemerintah RI No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang menyatakan bahwa pendidikan agama mewujudkan keharmonisan, kerukunan, dan rasa hormat di antara sesama pemeluk agama yang dianut dan terhadap pemeluk agama lain. Peraturan pemerintah tersebut sangat jelas mengamanatkan pendidikan Islam untuk mengembangkan kesadaran multikultural dalam pelaksanaannya. Lebih-lebih tren akhir-akhir ini banyak fenomena kekerasan yang mengatasnamakan agama sebagai legitimasi bentuk kekerasan karena dasar perbedaan ideologi atau budaya. Adalah hal yang tepat jika pemerintah sebagai pelaku kebijakan pendidikan mewajibkan pendidikan nasional dan pendidikan Islam untuk segera

---

<sup>9</sup>Syafaruddin dkk, *Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Medan: Perdana Publishing, 2012), hlm. 103.

mengimplementasikan model pendidikan yang sadar terhadap nilai-nilai multikultural.

Landasan filosofis merupakan landasan berpikir radikal yang mengiringi pemikiran tentang pengembangan Pendidikan Islam Multikultural. Secara filosofis landasan dasar pemikiran paham multikulturalisme lahir dari kesadaran akan *equality* dalam hak, kewajiban, dan status serta mengembangkan nilai *mutual respect* di antara sesama warga masyarakat. Namun dalam mengembangkan kurikulum pendidikan Islam multikultural secara filosofis, kajian tentang itu diharapkan mampu menyesuaikan dengan spirit Islam dan memajukan peradaban.

Isu pendidikan agama, dalam konteks bangsa Indonesia yang plural, multikultur, multietnis, dan multireligius menjadi isu yang krusial. Diperlukan perhatian yang serius dari berbagai pihak agar tidak berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa yang akan merugikan bagi tumbuhnya proses demokratisasi dalam kehidupan berbangsa. Praktik kekerasan yang mengatasnamakan agama, dari fundamentalisme, radikalisme, hingga terorisme, akhir-akhir ini semakin marak di tanah air. Kesatuan dan persatuan bangsa saat ini sedang diuji eksistensinya. Berbagai indikator yang memperlihatkan adanya tanda-tanda perpecahan bangsa, dengan transparan mudah diketahui dan dipahami.<sup>10</sup>

Landasan filosofis pengembangan kurikulum pendidikan berbasis multikultural, dapat dijelaskan bahwa keragaman dan perbedaan dalam kehidupan manusia merupakan *sunnatullah*. Al-Qur'an sebagai representasi pesan-pesan Allah Swt. sebagai panduan umat manusia, telah memberikan beberapa isyarat penting, baik secara eksplisit maupun implisit tentang eksistensi keragaman dan perbedaan tersebut. Di antaranya dapat dilihat dalam QS. Al-Hujurat ayat 13.

Isu pendidikan agama, dalam konteks bangsa Indonesia yang plural, multikultur, multietnis, dan multireligius menjadi isu yang krusial. Diperlukan perhatian yang serius dari berbagai pihak agar tidak berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa yang akan merugikan bagi tumbuhnya proses demokratisasi dalam kehidupan

<sup>10</sup>Lasijan, Multikulturalisme dalam Pendidikan Islam, *Jurnal TAPIS* Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2014, hlm. 125-139.

berbangsa dan bernegara. Praktik kekerasan yang mengatasnamakan agama, dari fundamentalisme, radikalisme, hingga terorisme, akhir-akhir ini semakin marak di tanah air. Kesatuan dan persatuan bangsa saat ini sedang diuji eksistensinya. Berbagai indikator yang memperlihatkan adanya tanda-tanda perpecahan bangsa, dengan transparan mudah kita baca.<sup>11</sup>

Bila dicermati, agama seharusnya dapat menjadi pendorong bagi umat manusia untuk selalu menegakkan perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh umat di bumi ini. Namun, realitanya agama juga bisa menjadi 'pemicu' terjadinya kekerasan dan kehancuran umat manusia. Diperlukan upaya-upaya preventif agar masalah pertentangan agama tidak akan terulang lagi atau setidaknya terdeduksi di masa yang akan datang. Merujuk pada kasus di atas, salah satu solusi yang dapat ditawarkan adalah dengan mengembangkan kebijakan maupun konsep pendidikan agama yang dikelola dengan semangat multikultural, dan bukan dengan semangat doktrinal sepihak semata, atau penanaman kebencian terhadap pemeluk agama lain, atau dengan menumbuhkan rasa acuh tak acuh terhadap agama, atau dengan upaya pemindahan agama peserta didik. Karenanya memperbanyak referensi yang berkaitan dengan upaya menemukan konsep pendidikan agama berbasis multikultural perlu dilakukan. Ini dapat dimulai melalui perumusan teori dan konsep untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang ada di lingkungan masyarakat Muslim dan lembaga pendidikan nasional baik yang berada di bawah koordinasi Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Usaha dalam merumuskan PAI berbasis multikultural diperlukan asas atau landasan filosofis, karena filsafat dalam arti filosofis merupakan suatu cara pendekatan yang dipakai dalam memecahkan problematika pendidikan dan menyusun teori-teori pendidikan oleh para ahli. Filsafat juga berfungsi bagi teori pendidikan yang telah ada menurut aliran filsafat tertentu yang memiliki relevansi dengan kehidupan nyata.<sup>12</sup>

Landasan filosofis pengembangan kurikulum pendidikan berbasis multikultural, dapat dijelaskan bahwa keragaman dan perbedaan

<sup>11</sup>Lasijan, 'Multikulturalisme dalam Pendidikan Islam....', *Ibid.*, hlm. 125-139.

<sup>12</sup>Jalaluddin & Abdullah Idi, *Filsafat Pendidikan: Manusia, Filsafat, dan Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), hlm. 33.

dalam kehidupan manusia merupakan *sunnatullah*. Al-Qur'an sebagai representasi pesan-pesan Allah untuk menjadi panduan umat manusia, sesungguhnya telah memberikan beberapa isyarat penting, baik secara eksplisit maupun implisit tentang eksistensi keragaman dan perbedaan tersebut. Di antaranya dapat dilihat dalam QS. al-Hujurat (49): 13:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>13</sup>

Melalui ayat ini Allah Swt. menyatakan bahwa manusia diciptakan terdiri atas jenis laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, dan berbangsa-bangsa agar mereka dapat saling kenal dan mengenal atau saling *taffahum*, *ta'awun*, dan *tabayyun* sesama mereka. Manusia yang secara fitrah adalah makhluk sosial, maka hidup bermasyarakat merupakan suatu keniscayaan adanya. Melalui kehidupan yang bersifat kolektif sebagai sebuah masyarakat, tentu di dalamnya terdapat banyak keragaman atau perbedaan dalam berbagai hal.<sup>14</sup>

Kata *syu'ub* yang terdapat dalam ayat ini merupakan bentuk plural dari kata *sy'aba* yang berarti golongan atau cabang, sedangkan kata *qaba'il* merupakan bentuk jamak dari kata *qabilah* yang berarti sekumpulan orang yang bertemu yang satu sama lainnya bisa saling menerima. Kata *qaba'il* selalu menunjuk pada dua pihak atau lebih yang saling berpasangan atau berhadap-hadapan. Oleh karena itu, manusia sejak diciptakan walaupun dari rahim yang berbeda-beda tetapi hakikatnya ia adalah makhluk interdependensi (sosial) yang saling bergantung satu sama lainnya.<sup>15</sup>

<sup>13</sup>Lihat QS. al-Hujurat [49]: 13 dan lihat juga beberapa ayat lain yang termuat di dalamnya nilai-nilai tentang pengakuan terhadap adanya keragaman atau perbedaan, di antaranya: QS. al-Baqarah [2]: 285; Ali-Imran [3]: 3, 4, 84, 64-68; al-Maidah [5]: 48; al-Haji [22]: 67-69; al-Hadid [57]: 27.

<sup>14</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Permasalahan Umat*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 320.

<sup>15</sup>Waryono Abdul Gafur, *Tafsir Sosial: Mendialogkan Teks dengan Konteks*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005), hlm. 11-12.

Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 secara konteks turun sebagai respons atas pemikiran sempit sebagian sahabat terhadap fenomena perbedaan kulit serta kedudukan, dan menyebabkan mereka memiliki pandangan yang diskriminatif terhadap orang lain<sup>16</sup> merupakan salah satu persoalan yang masih terus terjadi hingga saat ini. Sikap memandang rendah orang lain, primordialisme (*ashabiyah*), tidak siap berbeda, dan memperlakukan orang lain dengan tidak adil, adalah di antara sikap-sikap yang mengindikasikan masih lemahnya semangat multikulturalisme dalam kehidupan masyarakat saat ini, baik secara konsep maupun praktik.

Sebagai sebuah konsep, kemunculan multikulturalisme tidak terlepas dari pengaruh filsafat *post-modernisme*, yang berangkat dari pemikiran tentang ketidakpercayaan terhadap segala bentuk narasi besar dan penolakan terhadap segala bentuk pemikiran yang mentotalisasi atau menggeneralisasi. Selain menolak pemikiran yang totaliter, *filsafat post-modernisme* juga menghaluskan sensitivitas manusia terhadap perbedaan dan memperkuat kemampuan toleransi terhadap realitas yang terukur. *Post-modernisme* menolak kebenaran tunggal atau yang bersifat absolut dan menghindari sikap klaim kebenaran (*truth claim*). Kebenaran diyakini bersifat jamak dan hakikat dari semua, termasuk kehidupan manusia itu dalam semua aspeknya adalah berbeda (*all is difference*).<sup>17</sup>

Filsafat *post-modernisme* yang muncul sebagai bentuk protes terhadap pemikiran filsafat *modernisme*,<sup>18</sup> melahirkan beberapa

---

<sup>16</sup>Dalam satu riwayat dikemukakan, ketika fathu Mekah Bilal naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Beberapa orang berkata "apakah pantas budak hitam ini azan di atas Ka'bah?", maka berkatalah yang lainnya "sekiranya Allah membenci orang ini, pasti Dia akan menggantinya." Kemudian ayat ini turun sebagai penegasan bahwa dalam Islam tidak ada diskriminasi dan yang paling mulia adalah yang bertakwa (diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hattim yang bersumber dari Ibnu Abi Mulaikah). Lihat lebih lengkap dalam K.H.Q. Shaleh H.A.A. Dahlan, dkk, *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2001), hlm. 518.

<sup>17</sup>Rizal Muntasyir, dkk, *Filsafat Ilmu*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 190.

<sup>18</sup>Walaupun *post-modernisme* berarti kelanjutan *modernisme*, namun kelanjutan yang dimaksud lebih bersifat kritis. Bahkan dalam banyak aspek, *post-modernisme* merupakan lawan dari *modernisme* yang lebih banyak dipengaruhi oleh filsafat *positivisme*. *Post-modernisme* menggugat keamanan *modernisme* yang lebih mengagungkan rasionalitas dan telah melahirkan dunia yang merendahkan martabat manusia, sehingga melahirkan budaya kekuatan

bentuk pemikiran yang mendasar, seperti realisme, relativisme, dan humanisme. Salah satu dampak positif yang menonjol dari pemikiran post-modernisme adalah lahirnya pengakuan terhadap pluralitas kehidupan. Bagi *post-modernisme*, kenyataan adanya masyarakat plural itu menjadi suatu fakta yang tidak bisa disangkal. Hal ini harus diperkuat dengan membangun prinsip kesadaran pluralisme<sup>19</sup> dan multikulturalisme, yakni paham yang mengakui adanya keragaman dalam kehidupan sekaligus memperlakukan orang lain secara sama secara proporsional.

Pengokohan multikulturalisme yang berangkat dari pemikiran filosofis di atas, perlu menjadi bahan pertimbangan untuk dikembangkan dalam pendidikan Islam. Landasan epistemologi yang telah dibangun dengan cukup jelas oleh aliran filsafat postmodernisme dalam usaha mengakomodasi fakta keragaman maupun perbedaan, sesungguhnya dapat menjadi tambahan referensi yang ilmiah untuk memformulasi pendidikan Islam multikultural secara lebih baik. Tentu dalam proses ini diperlukan sikap adaptif-kritis agar konsep-konsep tersebut tetap sejalan dengan spirit dan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Paradigma multikultural secara implisit juga menjadi salah satu fokus dari Pasal 4 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Bab III yang membahas prinsip penyelenggaraan pendidikan.<sup>20</sup> Melalui pasal ini dijelaskan bahwa pelaksanaan pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), nilai keagamaan, nilai kultural (budaya), dan kemajemukan bangsa, sesuai dengan nilai-nilai dasar negara, yakni Pancasila. Melalui dasar yuridis ini, maka pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia secara

---

bagi yang berkuasa dan praktik kejahatan moral yang kian menjadi-jadi. Filsafat post-modernisme berusaha membalikkan fakta ini dengan mengedepankan seni filsafat yang memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Lihat: (Bambang Sugiharto, *Postmodernisme Tantangan Bagi Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1996, hlm. 22-23).

<sup>19</sup>Jean-François Lyotard, *Kondisi Postmodern: Suatu Laporan Mengenai Pengetahuan*, terj. D. Dian Ellyati, Surabaya: Selasar Publishing, 2009, hlm. 80.

<sup>20</sup>Secara tegas berbunyi: "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa." Lihat: (*Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Bandung: Fokusmedia, 2005, hlm. 5).

legal formal perlu memperhatikan aspek-aspek demokratis, keadilan, HAM, nilai-nilai atau norma (*values*) serta pengakuan terhadap aspek keragaman. Pengakuan terhadap segala bentuk keragaman tentu saja tidak cukup, karena itu diperlukan upaya untuk menyikapi keragaman dengan perlakuan yang berlandaskan pada asas keadilan.

Pandangan filsafat dibutuhkan dalam pendidikan, terutama dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan. Filsafat akan menentukan arah ke mana peserta didik akan dibawa. Tujuan pendidikan memuat pernyataan-pernyataan mengenai berbagai kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki oleh peserta didik selaras dengan sistem nilai dan falsafah yang dianutnya. Dengan demikian, sistem nilai atau filsafat yang dianut oleh suatu komunitas akan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan rumusan tujuan pendidikan yang dihasilkannya. Falsafat pendidikan suatu negara tidak bisa dipungkiri akan memengaruhi tujuan pendidikan di negara tersebut. Filsafat juga membahas segala permasalahan yang dihadapi manusia termasuk dalam masalah pendidikan ini yang disebut filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan aplikasi dari pemikiran filosofis untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan.

Jamali<sup>21</sup> menulis bahwa ulama terdahulu telah berkontribusi dalam menggali pemahaman terhadap kandungan sumber ajaran Islam secara serius. Sama halnya sarjana Muslim lainnya turut berusaha berkontribusi dalam memberikan kemudahan dalam memahami nash-nash Al-Qur'an dan *as-Sunnah* berdasarkan latar belakang, konteks, dan disiplin ilmu yang relevan. Tidak mengherankan bila ada sebagian umat Islam memahami teks (*nash*) Al-Qur'an tanpa melihat konteks, akan melahirkan pemahaman yang keras yang mengesankan Islam garang, Islam intoleran, dan Islam bukan *rahmatan lil'alam*. Padahal dengan tegas Al-Qur'an menyatakan bahwa Islam dibawa Nabi Muhammad Saw. sebagai *rahmatan lil'alam*, "*inna arsalnaka illa rahmatan li al'alam*" (sungguh Kami mengutus engkau (Muhammad) sebagai rahmat bagi seluruh alam).

Ada empat fungsi filsafat dalam pengembangan kurikulum, yaitu:  
a) filsafat dapat menentukan arah dan tujuan pendidikan. Dengan filsafat sebagai pandangan hidup atau *value system*, dapat ditentukan mau

---

<sup>21</sup>Dikutip dari Kata Pengantar buku: (Jamali, *Integritas Moral Pembentuk Karakteristik Sosial*, Cetakan Pertama, Cirebon: Aksarasatu, 2021, hlm. v-xi).

dibawa ke mana anak didik itu; b) filsafat dapat menentukan isi atau materi pelajaran yang harus diberikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai; dan c) filsafat dapat menentukan strategi atau cara pencapaian tujuan. Melalui filsafat dapat ditentukan bagaimana menentukan tolak ukur keberhasilan proses pendidikan.<sup>22</sup>

Ada beberapa aliran filsafat pendidikan, seperti *perennialisme*, *essensialisme*, *eksistensialisme*, *progresivisme*, dan *rekonstruktivisme*. Dalam pengembangan kurikulum pun senantiasa berpijak pada aliran-aliran filsafat tertentu, sehingga akan mewarnai terhadap konsep dan implementasi kurikulum yang dikembangkan.

Ella Yulaelawati<sup>23</sup> menulis bahwa aliran filsafat dan kaitannya dengan pengembangan kurikulum yaitu: a) *perennialisme* lebih menekankan pada keabadian, keidealan, kebenaran, dan keindahan dari warisan budaya dan dampak sosial tertentu. Pengetahuan dianggap lebih penting dan kurang memperhatikan kegiatan sehari-hari. Pendidikan yang menganut paham ini menekankan pada kebenaran absolut, kebenaran universal yang tidak terikat pada tempat dan waktu. Aliran ini lebih berorientasi ke masa lalu; b) *essensialisme* menekankan pentingnya pewarisan budaya dan pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Matematika, sains, dan mata pelajaran lainnya dianggap sebagai dasar-dasar substansi kurikulum yang berharga untuk hidup di masyarakat. Sama halnya dengan *perennialisme*, *essensialisme* juga lebih berorientasi pada masa lalu; c) *eksistensialisme* menekankan pada individu sebagai sumber pengetahuan tentang hidup dan makna. Untuk memahami kehidupan seseorang mesti memahami dirinya sendiri; d) *progresivisme* menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individual, berpusat pada peserta didik, variasi pengalaman belajar dan proses. *Progresivisme* merupakan landasan bagi pengembangan belajar peserta didik aktif; dan e) *rekonstruktivisme* merupakan elaborasi lanjut dari aliran *progresivisme*. Pada *rekonstruktivisme*, peradaban manusia masa depan sangat ditekankan. Di samping menekankan tentang perbedaan individual seperti pada *progresivisme*, *rekonstruktivisme* lebih jauh menekankan

<sup>22</sup>Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran, Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 4-5.

<sup>23</sup>Ella Yulaelawati, *Kurikulum dan Pembelajaran, Filosofi, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Pakar Raya, 2004, hlm. 53.

tentang solusi masalah, berpikir kritis, dan sejenisnya. Aliran ini mempertanyakan untuk apa berpikir kritis, memecahkan masalah, dan melakukan sesuatu? Penganut aliran ini menekankan pada hasil belajar dan proses.

*Progresivisme* merupakan salah satu aliran filsafat yang sangat menekankan keaktifan dari peserta didik. *Progresivisme* adalah aliran filsafat yang menuntut pengalaman sebagai landasan pengembangan belajar. Begitu pula *rekonstruktivisme*, aliran ini sifatnya kritis, mempertanyakan segala sesuatu dan memiliki orientasi kepentingan masa depan. Sebagai catatan, penjabaran aliran-aliran filsafat tersebut dalam kurikulum yaitu, aliran *filsafat perenialisme*, *essensialisme*, *eksistensialisme* merupakan aliran filsafat yang mendasari terhadap pengembangan *Model Kurikulum Subjek-Akademis*. Sedangkan, filsafat *progresivisme* memberikan dasar bagi pengembangan *Model Kurikulum Pendidikan Pribadi*. Sementara, filsafat *rekonstruktivisme* banyak diterapkan dalam *Pengembangan Model Kurikulum Interaksional*.<sup>24</sup>

Masing-masing aliran filsafat tersebut terwujud dalam kemungkinan-kemungkinan sikap dan pendirian para pendidik, seperti: a) sikap *konservatif*, yakni mempertahankan nilai-nilai budaya manusia, sebagai perwujudan dari *essentialisme*; b) sikap *regresif*, yakni kembali kepada jiwa yang menguasai abad pertengahan, yaitu agama, sebagai perwujudan dari *perenialism*; c) sikap bebas dan modifikatif sebagai perwujudan dari *progresivism*; d) sikap radikal rekonstruktif sebagai perwujudan dari *reconstructionism*; dan e) sikap yang menekankan keterlibatan peserta didik dalam kehidupan empiris untuk mencari pilihan dan menemukan jati dirinya sebagai perwujudan dari *existensialism*.<sup>25</sup>

Mengacu pada landasan filosofis pengembangan kurikulum di atas, tampak bahwa pengembangan kurikulum itu pada hakikatnya adalah pengembangan komponen-komponen yang membentuk sistem kurikulum itu sendiri serta pengembangan komponen pembelajaran sebagai implementasi kurikulum. Landasan filosofis pengembangan kurikulum juga merupakan sistem nilai yang harus menjadi dasar

<sup>24</sup>Ella Yulaelawati, *Kurikulum dan Pembelajaran*,... hlm. 54. Lebih lanjut tentang Model Pengembangan Kurikulum baca: Nana Syaodih Sukmadinata (1997/2015), Muhaimin (2010), Wina Sanjaya (2008).

<sup>25</sup>Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*, Cet. 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 79.

dalam menentukan tujuan pendidikan. Sistem nilai bangsa Amerika misalnya, adalah bersifat liberalis demokratis, dengan demikian tujuan pendidikan di Amerika adalah membentuk manusia liberalis-demokratis. Begitu pula dengan sistem nilai di Tiongkok atau negara-negara Timur Tengah, dan lain sebagainya. Di Indonesia, sistem nilai yang berlaku adalah Pancasila. Oleh sebab itu membentuk manusia yang Pancasilais merupakan tujuan dan arah segala ikhtiar berbagai level dan jenis pendidikan. Dengan demikian, isi kurikulum yang disusun harus memuat dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila.<sup>26</sup> Falsafah Pancasila merupakan landasan pengembangan kurikulum secara tersendiri yang cukup 'unik' karena berbeda dengan aliran-aliran filsafat pada umumnya.

Tabel 2. *Overview of Educational Thought*

| <i>Educational Viewpoint</i> | <i>Philosophic Base</i>               | <i>Role of Teacher</i>                                             | <i>Purpose</i>                                         |
|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <i>Essentialism</i>          | <i>Idealism<br/>Realisme</i>          | <i>Teacher as an example of values and ideals</i>                  | <i>Absortion of ideas</i>                              |
| <i>Perennialism</i>          | <i>Neo-Thomism</i>                    | <i>Teacher as mental disciplinarian and moral/spiritual leader</i> | <i>Absortion and mastery of facts and information</i>  |
| <i>Progressivism</i>         | <i>Experimentalism<br/>Pragmatism</i> | <i>Teacher as challenger and inquiry leader</i>                    | <i>Problem solving and sosial experience</i>           |
| <i>Reconstructionism</i>     | <i>Experimentalism<br/>Pragmatism</i> | <i>Teacher as project director and research leader</i>             | <i>Problem solving and rebuilding and social order</i> |
| <i>Existensialism</i>        | <i>Existensialism</i>                 | <i>Teacher as noninterfering sounding board</i>                    | <i>Searching for self</i>                              |

Sumber: Arthur K. Ellis dalam Muhaimin.<sup>27</sup>

Dapat dijelaskan bahwa landasan filosofis pengembangan kurikulum tidak bisa dilakukan secara fanatis hanya pada satu aliran filsafat pendidikan, karena masing-masing aliran filsafat saling menguatkan bangunan kurikulum. Begitu pula isi kurikulum pendidikan harus memuat dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Di sini kita akan melihat bahwa bangunan filsafat Pancasila ternyata

<sup>26</sup>Wina Sanjaya, 'Kurikulum dan Pembelajaran....', Ibid., hlm. 4-5.

<sup>27</sup>Muhaimin, 'Pengembangan Kurikulum....', Op. Cit., hlm. 81.

sangat mendukung pengembangan kurikulum berbasis ke-Indonesiaan atau multikultural.

Pancasila sebagai sistem filsafat adalah pengungkapan dan penelaahan dunia fisik dan dunia riil secara sistemik (menyeluruh) dan sistematis (teratur, tersusun rapi), sehingga hidup manusia budaya ini memiliki makna untuk kelestarian tata hidup yang selaras, serasi, dan seimbang. Pancasila memberi ajaran tata hidup manusia budaya secara harmonis. Pancasila adalah filsafat keselarasan.<sup>28</sup> Esensi dari multikulturalisme adalah ajaran tentang keharmonisan hidup dalam masyarakat yang majemuk.

Idealitas Pancasila sebagai landasan filosofis pengembangan kurikulum pendidikan multikultural memiliki titik temu yang sangat signifikan, baik Pancasila sebagai falsafah negara, ideologis, maupun sistem nilai. Entitas manusia Indonesia dalam mengamalkan amanah Pancasila adalah melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, di antaranya:

- a) Nilai kemanusiaan; karena manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Nilai-nilai kemanusiaan memberi dasar untuk hidup bersama dengan saling menghargai harkat dan martabat manusia sesamanya.
- b) Nilai-nilai persatuan hidup bersama; persatuan antarindividu menjadi kelompok, kelompok menjadi masyarakat, masyarakat-masyarakat bersatu menjadi negara dan bangsa. Timbullah persatuan Indonesia yang meliputi tanah air dan sosio-budayanya.
- c) Nilai kerakyatan atau demokrasi; yakni nilai-nilai yang dilaksanakan dan dikembangkan oleh kelompok manusia dalam menghadapi masalah-masalah dan mengambil keputusan dengan cara-cara musyawarah dengan mufakat. Nilai-nilai kerakyatan juga menjadi dasar hidup bergotong royong, hidup bertenggang rasa, dan bekerja sama.
- d) Nilai-nilai keadilan; sebab dalam hidup bersama memasyarakat, membangun dan menegara, perlu adanya keadilan hak dan kewajiban sesuai dengan peran serta warga masyarakat dalam karyanya masing-masing.<sup>29</sup>

<sup>28</sup>Ki Fudyantanta, *Filsafat Pendidikan Barat dan Filsafat Pendidikan Pancasila, Wawasan Secara Sistematis*, (Yogyakarta: Amus, 2006), hlm. 170.

<sup>29</sup>Ki Fudyantanta, *Filsafat Pendidikan Barat dan Filsafat Pendidikan Pancasila, Wawasan Secara Sistematis*, (Yogyakarta: Amus, 2006), hlm. 185.

Nilai-nilai tersebut di atas adalah substansi dan esensi dari multikulturalisme. Nilai-nilai atau norma yang diakui sebagai pandangan hidup suatu bangsa, seperti Pancasila bagi Indonesia, bukan hanya harus menjiwai kurikulum, akan tetapi harus mewarnai filsafat dan tujuan lembaga sekolah serta merembes ke dalam praktik pendidikan oleh guru di kelas. Dalam melaksanakan serta pengambilan berbagai keputusan guru sedapat mungkin mencerminkan nilai-nilai itu. Itulah sebabnya, walaupun setiap guru dapat saja memiliki norma atau sistem nilai yang dianggap baik, misalnya berasal dari agama tertentu, akan tetapi nilai-nilai itu jangan sampai bertentangan dengan norma-norma masyarakat, yaitu Pancasila.<sup>30</sup>

Dalam kurikulum yang dikembangkan peranan guru bukan hanya berhubungan dengan mata pelajaran, melainkan diharapkan dapat menempatkan dirinya dalam suatu interaksinya dengan kebutuhan, kemampuan, dan kegiatan siswa. Sekolah sebagai lingkungan yang khusus hendaknya memberikan pengarahan sosial, dengan cara mendorong kegiatan-kegiatan yang bersifat instrinsik, dalam suatu arah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, melalui imitasi, persaingan sehat, kerja sama, dan memperkuat kontrol.<sup>31</sup>

Dalam sekolah progresif, merujuk pada pemikiran filsafat pendidikan John Dewey, kontrol sosial terletak pada sifat kegiatannya yang berisikan kerja sama sosial. Di dalam kerja sama sosial ini, setiap siswa memiliki kesempatan untuk memberikan sumbangan dan memikul tanggung jawab. Sekolah dan kelas diciptakan sebagai suatu organisasi sosial. Di dalam organisasi sosial itu setiap siswa memiliki kesempatan untuk memberikan sumbangan melakukan kegiatan-kegiatan, berpartisipasi, semua ini merupakan kontrol sosial.<sup>32</sup> Wujud kontrol sosial melalui organisasi sosial dalam filsafat progresivisme adalah bentuk-bentuk kerja sama multikultural setiap siswa di sekolah. Dengan demikian landasan filosofis pengembangan kurikulum berbasis multikultural adalah upaya memanfaatkan kemajemukan siswa (lintas keluarga, suku, agama, bahasa, dan lain-lain) sebagai satu cara untuk mencapai tujuan pendidikan.

<sup>30</sup>Wina, 'Kurikulum dan Pembelajaran....', *Op. Cit.*, hlm. 45.

<sup>31</sup>Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktik. Cet.2.* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 44.

<sup>32</sup>Nana Syaodih Sukmadinata, 'Pengembangan Kurikulum....', *Ibid.*, hlm. 44.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapat disebutkan landasan filosofis pengembangan kurikulum berbasis multikultural.

Tabel 3. Filosofi Kurikulum Berbasis Multikultural

| Filsafat Pendidikan | Landasan                       | Perspektif Multikultural                              | Peranan Guru                    | Tujuan                                                         | Keterangan   |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| Progressivism       | Experimentalism<br>Pragmatisme | Pengalaman multikultural                              | Guru sebagai fasilitator        | Membentuk organisasi sosial sekolah berbasis multikulturalisme | Implementasi |
| Reconstructionism   | Experimentalism<br>Pragmatisme | Kontekstualitas multikultural dan rekonstruksi sosial | Guru sebagai aktor dan peneliti | Sistem sosial dan kontrol sosial berbasis multikulturalisme    | Implementasi |
| Pancasila           | Pancasilais                    | Nilai-nilai multikultural                             | Guru sebagai sistem nilai       | Internalisasi nilai multikultural                              | Implementasi |

Sumber: Nana Syaodih Sukmadinata, 'Pengembangan Kurikulum...', *Ibid.*, hlm. 44.

Secara spesifik, dengan mempertimbangkan inspirasi yang didorong oleh Will Kymlicka, sebut Dede, maka kompetensi standar (dalam kurikulum) yang diharapkan adalah menjadi warga negara yang mampu hidup berdampingan bersama warga negara lainnya tanpa membedakan agama, ras, bahasa, dan budaya, dengan menghormati hak-hak mereka, memberi peluang kepada semua kelompok untuk mengembangkan budayanya, serta mampu mengembangkan kerja sama untuk mengembangkan bangsa menjadi bangsa besar yang dihormati dan disegani di dunia internasional.<sup>33</sup>

Dalam berbagai analisis mengenai *trend* kehidupan dalam Millenium Ketiga, termasuk pula *trend* di dalam pengembangan sistem pendidikan. Kehidupan umat manusia dalam millenium yang baru memiliki beragam dimensi tidak hanya dimensi domestik, regional, nasional, tetapi juga global. Kita hidup di dalam dunia yang demikian terbuka, dunia tanpa batas, karena itu kehidupan global bukan hanya merupakan tantangan tetapi juga membuka peluang-peluang baru di dalam usaha untuk

<sup>33</sup>Dede Rosyada, 'Pendidikan Multikultural...', *Op. Cit.*, hlm.11. baca pula: Will Kymlicka, *Multicultural Citizenship, A Liberal Theory of Minority Rights*, New York: Oxford University Press, 2000, hlm. 153.

meningkatkan taraf hidup masyarakat dan bangsa Indonesia. Sistem pendidikan nasional tidak terlepas dari tugas dan tanggung jawab untuk memberikan jawaban yang tepat terhadap tantangan dan peluang kehidupan global.<sup>34</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut, munculnya paradigma pendidikan multikultural sebagai upaya menjawab tantangan global dari sebuah sistem pendidikan patut diwujudkan secepat mungkin. Namun untuk sampai ke arah sana, khususnya dalam pendidikan Islam, dalam perspektif filosofis perlu adanya pemahaman baru terhadap wilayah keilmuan agama Islam. Dalam hal ini, M. Amin Abdullah<sup>35</sup> melakukan pemetaan tiga wilayah keilmuan agama Islam dimaksud, yakni:

- a) Wilayah praktik keyakinan dan pemahaman terhadap wahyu yang telah diinterpretasikan sedemikian rupa oleh para ulama, para ahli, dan masyarakat pada umumnya. Pada wilayah ini biasanya tanpa melalui klarifikasi dan penjernihan teoretik keilmuan, yang dipentingkan adalah pengamalan, sehingga perbedaan antara agama dan tradisi, agama dan budaya, antara *belief* dan *habits of mind* sulit dipisahkan.
- b) Wilayah teori-teori keilmuan yang dirancang dan disusun sistematis dan metodologinya oleh para ilmuwan dan para ulama sesuai bidang kajian masing-masing. Yang ada pada wilayah ini pada dasarnya adalah teori-teori keilmuan agama Islam yang diabstraksikan baik secara deduktif dari nash-nash atau teks-teks wahyu maupun secara induktif dari praktik keberagaman masyarakat Muslim.
- c) Wilayah telaah kritis (*meta discourse*) terhadap sejarah jatuh-bangunnya teori-teori yang disusun oleh kalangan ilmuwan dan para ulama pada lapis kedua, tidak terkecuali muncul dan tenggelamnya berbagai konsep dan teori-teori pendidikan Islam.

Level ketiga, wilayah telaah kritis (termasuk telaah kritis terhadap teori-teori pendidikan Islam para era klasik, era pertengahan, era modern, dan era pos modern), yang demikian kompleks dan *sophisticated*

<sup>34</sup>H.A.R Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan*, (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm. 15.

<sup>35</sup>M. Amin Abdullah, *Islamic Studies: Di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif-Interkonektif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 70-74.

menjadi bidang kajian filsafat ilmu-ilmu keislaman, seperti dikaji oleh Muhammed Arkoun, Muhammad Abid al-Jabiry, Muhammad Syahrur, Nasr Hamid Abu Zaid, Hasan Hanafi, dan Mulyadi Kartanegara. Dari hari ke hari semakin dirasakan wilayah telaah kritis perlu untuk dikembangkan lebih jauh dan mendalam karena beberapa faktor, yaitu: *Islamic Studies* bukanlah sebuah disiplin ilmu yang tertutup, agama Islam bukan satu-satunya agama yang hidup (*living religion*) pada saat sekarang, dan semakin dekatnya hubungan kontak individu maupun sosial akibat kemajuan teknologi, transformasi, komunikasi, dan informasi yang super canggih sehingga semakin memperpendek jarak dan tapal batas ruang waktu yang biasa diimajinasikan oleh umat beragama pada abad-abad sebelumnya.<sup>36</sup>

Untuk mendukung tercapainya wilayah telaah kritis, maka pola pemikiran keagamaan Islam, termasuk pendidikan Islam, yang perlu dikedepankan adalah bukan pola pikir yang bercorak *absolutely absolute* atau *absolutely relative*, tetapi pemikiran yang bercorak *relatively absolute*. Pola pikir, cara pandang, dan model berpikir yang terbungkus dalam selimut kepercayaan dan keimanan yang bersifat *absolutely absolute* atau dalam bahasa agama disebut *ta'abbudy* dalam era global seperti sekarang ini, baik secara internal dalam lingkup pemeluk agama Islam maupun eksternal dalam lingkup lintas agama, sudah tidak cocok untuk dipertahankan. Sebab pola pikir yang demikian hanya akan melahirkan *claim of salvation* dan *truth claim* yang demikian kaku dan rigid, sehingga objektivitas yang dianut adalah objektivitas semu dan sikap *right or wrong is my country*. Pandangan dan cara pikir ini akan sulit berkomunikasi dengan orang lain dan berujung pada terpupuknya jiwa curiga (*distrust of moral*), sehingga hidup beragama menjadi tidak tenang dan penuh kekhawatiran (*discalm and full anxiety*). Perilaku yang mengakibatkan terbunuhnya banyak jiwa, seperti bom di Bali, Jakarta, Medan, Sulawesi, Ambon, dan seterusnya menurut cara pandang *absolutely absolute*, boleh jadi, menjadi "halal".<sup>37</sup>

Pola pikir dan cara pandang kedua yakni *absolutely relative* atau dalam bahasa agama disebut *ta'aqquly* juga mengandung kecenderungan-kecenderungan ke arah terbentuknya sikap dan pandangan "nihilisme"

<sup>36</sup>M. Amin Abdullah, 'Islamic Studies...', *Op. Cit.*, hlm. 74-75.

<sup>37</sup>M. Amin Abdullah, 'Islamic Studies...', *Op. Cit.*, hlm. 86.

dan "sekularisme", yang mengarah pada perilaku *immoral* dan *inhuman* dalam bentuk yang beragam. Pola pikir ini juga tidak apresiatif terhadap hidup dan kehidupan umat manusia, karena kehidupan manusia selamanya membutuhkan pedoman hidup, aturan, dan sistem nilai sosial yang disepakati dan dianut bersama, baik sistem nilai yang bersumberkan pada ajaran agama, perundang-undangan, atau adat-istiadat yang dianut masyarakat setempat.

Dalam pandangan Amin Abdullah bahwa kedua model pola pikir *absolutely absolute* dan *absolutely relative*, bukanlah pilihan terbaik dalam menata kehidupan beragama umat manusia, baik internal seagama maupun eksternal antar lintas agama, pada era modern dan *postmodern* seperti sekarang ini. Menurutnya, dalam memasuki *millenium* baru, diperlukan sikap-cara pandang dan pola pikir keagamaan Islam yang baru dalam menghadapi realitas kehidupan yang demikian plural. Sikap dan cara pandang keagamaan Islam yang baru ini, sekaligus akan mempunyai dampak yang positif terhadap pola hubungan antara etnis, ras, suku, golongan, dan sebagainya di tanah air. Sikap dan cara pandangan keagamaan Islam dimaksud adalah cara pandang dan pola pikir *relatively absolute*.<sup>38</sup>

Cara pandang ketiga ini pada dasarnya merupakan kombinasi dari cara pandang pertama dan kedua dan melahirkan cara pandang ketiga yang dalam bahasa agama diistilahkan dengan *Ta'abbudy absolute* dan *ta'aqquly relative* yang menyatu dalam perilaku keberagamaan umat manusia. Pola pikir ini dipandang akan mampu memberikan angin segar yang dapat menghantarkan pada jenis pemahaman yang lebih bersifat inklusif (*hanif*) dan terbuka (*open ended*) terhadap realitas keberagamaan manusia yang sangat majemuk. Pandangan ini lebih bersifat *fundamental-kritis-inklusif* yang mampu mengkritisi dan membedah bercampur-aduknya doktrinal-teologis dengan kepentingan kultural-sosiologis dalam kehidupan umat beragama pada umumnya, sehingga tampilan dalam kehidupan sehari-hari lebih bersahabat, inklusif, humanis, dan pluralis.<sup>39</sup>

<sup>38</sup>M. Amin Abdullah, 'Islamic Studies...'. Op. Cit., hlm. 86-90.

<sup>39</sup>M. Amin Abdullah, "Rekonstruksi Metodologi Agama dalam Masyarakat Multikultural dan Multireligius," dalam Ahmad Baidowi dkk., (peny.), *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman*, Yogyakarta: Suka Press dan LPKM Instrospektif IAIN Suka, 2003, hlm. 23.

Sebelum membahas beberapa prinsip penting pendidikan agama berbasis multikultural, perlu dikemukakan beberapa asumsi filosofis pendidikan multikultural itu sendiri. *Pertama*, tidak lagi terbatas pada pandangan bahwa pendidikan (*education*) adalah persekolahan (*schooling*) atau memandang bahwa pendidikan multikultural sama dengan program-program sekolah formal. Pendidikan multikultural harus berpijak pada pandangan yang lebih luas mengenai pendidikan sebagai transmisi kebudayaan. Pandangan ini membebaskan pendidik dari anggapan selama ini bahwa tanggung jawab utama dalam mengembangkan kompetensi peserta didik semata-mata berada di tangan mereka. Dalam konteks pendidikan multikultural justru meniscayakan semakin banyak pihak yang bertanggung jawab terhadap pengembangan kompetensi peserta didik, karena program-program sekolah akan selalu terkait dengan hal-hal di luar sekolah.

*Kedua*, menghindari pandangan yang menyamakan kebudayaan dengan kelompok etnik. Artinya, tidak perlu lagi mengasosiasikan kebudayaan semata-mata dengan kelompok-kelompok etnik sebagaimana yang terjadi selama ini. Dalam konteks pendidikan multikultural, pendekatan ini diharapkan dapat mengilhami para penyusun program-program pendidikan multikultural untuk menghindari kecenderungan memandang peserta didik secara stereotipe menurut identitas etnik mereka dan akan meningkatkan eksplorasi pemahaman yang lebih besar mengenai kesamaan dan perbedaan di kalangan peserta didik dari berbagai kelompok etnik.

*Ketiga*, pengembangan kompetensi dalam suatu "kebudayaan baru" biasanya membutuhkan interaksi inisiatif dengan orang-orang yang sudah memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing, bahkan dapat dilihat dengan jelas bahwa upaya-upaya untuk mendukung sekolah-sekolah yang terpisah secara etnik adalah antitesis terhadap tujuan pendidikan multikultural. Mempertahankan dan memperluas solidaritas kelompok adalah menghambat sosialisasi ke dalam kebudayaan baru. Pendidikan bagi pluralisme budaya dan pendidikan multikultural tidak dapat disamakan secara logis.

*Keempat*, kemungkinan bahwa pendidikan (baik di dalam maupun di luar sekolah) meningkatkan kesadaran tentang kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kesadaran seperti ini kemudian akan menjauhkan peserta didik dari konsep dwi budaya atau dikotomi antara

pribumi dan nonpribumi. Dikotomi semacam ini bersifat membatasi individu untuk sepenuhnya mengekspresikan diversitas kebudayaan. Pendekatan ini meningkatkan kesadaran akan multikulturalisme sebagai pengalaman normal manusia yang mengandung makna bahwa pendidikan multikultural berpotensi untuk menghindari dikotomi dan mengembangkan apresiasi yang lebih baik melalui kompetensi kebudayaan yang ada pada diri peserta didik.<sup>40</sup>

Jika dikaitkan dengan PAI sebagai sebuah bidang studi, dikatakan Zakiyuddin Baidhawi<sup>41</sup> ada tujuh asumsi paradigmatis PAI berbasis multikultural, yakni mendidik peserta didik untuk:

a) Belajar Hidup dalam Perbedaan

Nilai-nilai budaya, tradisi, dan kepercayaan senantiasa mengiringi pemeliharaan dan pengasuhan seorang anak. Ketika anak mulai masuk sekolah nilai-nilai yang terbentuk dari dalam pengasuhan dalam keluarga ini terus dibawa. Setiap anak memiliki latar belakang dan nilai-nilai yang berbeda pula. Ini realitas yang harus dipertimbangkan dalam PAI berbasis multikultural. Perbedaan nilai-nilai ini meniscayakan PAI tidak hanya berpijak pada paradigma *learning to know, learning to do, learning to be*, tetapi juga *learning to live together*. Paradigma yang disebut terakhir ini dalam konteks PAI akan menjadikan PAI sebagai proses: (a) pengembangan sikap toleran, empati, dan simpati yang menjadi syarat utama suksesnya koeksistensi dalam keragaman agama; (b) klarifikasi nilai-nilai kehidupan bersama menurut perspektif agama-agama; (c) pendewasaan emosional; (d) kesetaraan dalam partisipasi; (e) kontrak sosial baru dan aturan main kehidupan bersama antar agama.

b) Membangun Saling Percaya

Penguatan kultural masyarakat memerlukan modal sosial yang dibangun dari rasa saling percaya. Modal sosial adalah seperangkat nilai atau norma informal yang dimiliki bersama suatu masyarakat

<sup>40</sup>Gwendolyn C. Baker, *Planing and Organizing for Multicultural Instruction* (California: Addison-Wesley Publishing Company, 1994), hlm. 25-26.

<sup>41</sup>Zakiyuddin Baidhawi, "Membangun Harmoni dan Perdamaian melalui Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural", *Lokakarya Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Pengembangan Kurikulum* (Jakarta: Australian Indonesia Partnership dan Kemenag RI, 10-13 April 2008), hlm. 75-78.

yang mendorong terjadinya kerja sama satu sama lain. Norma yang dapat menjadi modal sosial adalah norma yang menonjolkan kebaikan-kebaikan. Norma semacam inilah yang akan membangun rasa saling percaya antara satu anggota masyarakat dengan anggota yang lain. PAI berbasis multikultural harus mengusung norma-norma kebaikan yang merupakan modal sosial untuk tumbuhnya rasa saling percaya antar anggota masyarakat. PAI multikultural perlu menanamkan *mutual-trust* atau saling pengertian antar agama, budaya, dan etnik. Modal sosial diyakini sebagai salah satu komponen utama dalam menggerakkan kebersamaan, keharmonisan, mobilitas ide, saling kepercayaan, dan saling menguntungkan untuk mencapai kemajuan bersama.<sup>42</sup>

c) Memelihara Saling Pengertian

PAI berbasis multikultural juga harus mendorong peserta didik dengan berbagai etnik dan latar belakang untuk dapat memelihara rasa saling pengertian baik dengan teman sejawat maupun dengan anggota masyarakat lain yang berbeda latar belakang. Saling pengertian berarti kesadaran bahwa nilai-nilai mereka dan kita terdapat perbedaan mungkin saling melengkapi serta berkontribusi terhadap keharmonisan hubungan. Memahami PAI multikultural juga mendorong peserta didik siap menerima perbedaan di antara berbagai keragaman paham agama dan kultur masyarakat yang beragama.

d) Menjunjung Sikap Saling Menghargai (*Mutual Respect*)

PAI berbasis multikultural harus mengarahkan peserta didik agar memiliki sikap saling menghargai terhadap semua orang, apa pun latar belakangnya. Sikap ini muncul jika seseorang memandang orang lain secara setara. Pada kenyataannya ajaran agama yang terkandung dalam PAI memang mengajarkan seorang Muslim untuk menghormati dan menghargai sesama manusia. Inilah ajaran universal yang mestinya ditonjolkan. PAI multikultural diharapkan mampu mengembangkan kesadaran pada peserta didik bahwa kedamaian dan harmoni dalam kehidupan masyarakat hanya akan tumbuh jika sikap saling menghormati dan menghargai benar-benar

---

<sup>42</sup>Mukhibat, *Rekonstruksi Spirit Harmoni Berbasis Masjid*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kemenag RI, Jakarta, 2014, hlm. 34.

diamalkan dalam kehidupan, bukan sikap saling merendahkan. Sikap saling menghargai akan melahirkan sikap saling berbagi di antara semua individu maupun kelompok sosial.

e) Terbuka dalam Berpikir

Sikap keterbukaan dalam berpikir pada peserta didik merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh pendidikan secara umum. Demikian pula dalam PAI berwawasan multikultural yang mendorong peserta didik membuka diri terhadap kenyataan hidup yang beragam, khususnya dalam hal pemahaman agama. Peserta didik perlu disiapkan untuk berhadapan dengan model pemahaman agama yang berbeda dari apa yang diajarkan selama ini. Dengan sikap terbuka ini peserta didik diharapkan mau memahami makna eksistensi dirinya, identitasnya di tengah keragaman budaya dan agama yang ada.

f) Apresiasi dan Interdependensi

PAI multikultural juga perlu menghadirkan sikap apresiatif terhadap keragaman dan menyadarkan tentang adanya saling ketergantungan atau interdependensi antara satu manusia dengan yang lain.

g) Resolusi Konflik dan Rekonsiliasi Nirkekerasan

Konflik dengan latar belakang sebab yang beragam (baik karena agama, etnik, ekonomi, sosial, dan budaya) adalah fakta kehidupan yang sulit dibantah keberadaannya. PAI multikultural memberi kontribusi bagi upaya mengantisipasi munculnya konflik ini dengan cara menginternalisasikan kekuatan spiritual yang menjadi sarana integrasi dan kohesi sosial (*social cohesion*) dan menawarkan bentuk-bentuk resolusi konflik. Resolusi kemudian dilanjutkan dengan rekonsiliasi yang merupakan upaya perdamaian melalui pengampunan atau pemaafan. PAI perlu mengarahkan peserta didik agar menjadi manusia yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, meskipun sebetulnya pendekatan hukum juga dapat dilakukan. Akan tetapi memberi maaf jauh lebih luhur dan mulia.<sup>43</sup>

Dengan memahami asumsi-asumsi paradigmatis di atas, apa yang dimaksud PAI berbasis multikultural menurut Baidhawi dapat didefinisikan sebagai-berikut.

<sup>43</sup>Zakiyuddin Baidhawi, "Membangun Harmoni dan Perdamaian Melalui Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural", hlm. 79-85.

Gerakan pembaruan dan inovasi pendidikan agama dalam rangka menanamkan kesadaran akan pentingnya hidup bersama dalam keragaman dan perbedaan agama-agama, dengan spirit kesetaraan dan kesederajatan, saling percaya, saling memahami dan menghargai persamaan, perbedaan dan keunikan agama-agama, terjalin dalam suatu relasi dan independensi dalam situasi saling mendengar dan menerima perbedaan perspektif agama-agama dalam satu dan lain masalah dengan pikiran terbuka, untuk menemukan jalan terbaik mengatasi konflik antaragama dan menciptakan perdamaian melalui sarana pengampunan dan tindakan nirkekerasan.<sup>44</sup>

Dapat dijelaskan bahwa kemunculan multikulturalisme tidak terlepas dari pengaruh filsafat *Post-Modernisme*. Prinsip-prinsip paradigmatis yang menjadi dasar filosofis bagi pendidikan Pendidikan Agama Islam (PAI) berbasis multikultural: 1) mendidik peserta didik untuk berani belajar hidup dalam perbedaan; 2) mendorong peserta didik untuk memiliki kompetensi dalam membangun rasa saling percaya kepada semua orang dengan latar belakang berbeda; 3) mendorong peserta didik untuk mampu memelihara saling pengertian di antara sesama teman yang beragama; 4) menjadikan peserta didik dapat menjunjung sikap saling menghargai; 5) berorientasi untuk melahirkan peserta didik untuk terbuka dalam berpikir, mampu membuka diri bagi pandangan orang lain yang berbeda; 6) menghasilkan peserta didik yang dapat bersikap apresiatif dan memahami bahwa dalam hidup ada keharusan menjalin relasi yang menunjukkan interdependensi antara satu orang/kelompok dengan orang/kelompok lain; dan 7) mendorong peserta didik ke arah pemahaman pentingnya resolusi konflik dan rekonsiliasi tanpa kekerasan.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi multikultural terbesar di dunia. Kenyataan ini dapat dilihat dari dinamika kehidupan masyarakat yang beragam, baik dalam aspek keagamaan, suku bangsa, bahasa, maupun budaya. Keragaman yang ada, sesungguhnya dapat menjadi salah satu potensi besar bagi kemajuan bangsa. Di lain pihak, juga berpotensi menimbulkan berbagai macam permasalahan apabila tidak dikelola dan dibina dengan baik.<sup>45</sup> Umat

---

<sup>44</sup>Zakiyuddin Baidhawiy, "Membangun Harmoni dan Perdamaian...", *Ibid.*, hlm. 85.

<sup>45</sup>Kerusuhan Sampit, konflik horizontal di Maluku (Ambon), kerusuhan Poso di Sulawesi serta dinamika sosial seakan yang tiada henti di Papua, merupakan sebagian kecil dari konflik horizontal yang pernah terjadi di Indonesia.

Muslim sebagai pemeluk agama yang mayoritas, harus berperan aktif dan terdepan dalam mengelola dimensi keragaman bangsa ini. Pendidikan Islam sebagai salah satu instrumen penting peradaban umat, perlu dioptimalkan sebaik mungkin untuk menata dinamika keragaman agar dapat menjadi potensi kemajuan.

Sejatinya dalam beberapa dekade belakangan ini, gagasan yang berupaya mengakomodasi dan menata aspek keragaman melalui agenda pendidikan Islam cukup banyak dilakukan. Tidak sedikit pula ide-ide bermunculan terkait multikulturalisme yang teraktualisasi dalam wacana pendidikan Islam. Hanya saja jika dilihat dari proses pengembangan serta aspek implementasinya, masih belum berjalan sesuai harapan. Pelaksanaan pendidikan Islam multikultural masih dihadapkan pada berbagai macam persoalan. Sebagai wacana yang relatif baru, hal ini tentu saja bisa dimaklumi. Akan tetapi, apabila dikaitkan dengan fenomena yang terjadi dan berbagai persoalan yang ada di lapangan, kebutuhan akan implementasi yang tepat dan terarah, merupakan hal yang mendesak untuk dilakukan.

Persoalan-persoalan yang muncul setidaknya dapat dilihat dari dua aspek, yakni: *Pertama*, aspek kuantitatif, pendidikan Islam multikultural masih belum tersosialisasi dengan baik dan belum berpengaruh luas terhadap masyarakat, terutama di lingkungan pendidikan. Walaupun pada level perguruan tinggi (khususnya PTKI) wacana multikulturalisme sudah cukup mendapat tempat, namun di tingkat sekolah (menengah) khususnya yang berada di daerah sekolah umum, madrasah, maupun pesantren, spirit dan nilai-nilai multikulturalisme belum tersosialisasi secara luas. Sama halnya dengan pemahaman masyarakat terkait pentingnya multikulturalisme, secara umum dapat dikatakan masih terbatas.

*Kedua*, aspek kualitatif, baik dari sisi konsep maupun implementasinya masih banyak bagian yang perlu dibenahi. Secara konsep, pendidikan Islam multikultural kurang tersistematisasi dengan baik, terutama untuk dijadikan dasar dalam pelaksanaannya di lapangan. Hal ini dapat dilihat dari minimnya referensi hasil pemikiran yang secara rinci menjelaskan bentuk-bentuk implementasi pendidikan Islam multikultural, sehingga berdampak pada usaha-usaha praktis yang akan dilakukan. Begitu pula dalam proses pembelajaran terutama di tingkat sekolah menengah, multikulturalisme belum terintegrasi secara

jelas di dalam kurikulum, baik sebagai materi tersendiri, pokok bahasan atau materi sisipan. Kondisi ini ditambah pula dengan persoalan tenaga pendidik yang sebagian besar belum memahami dengan baik mengenai konsep multikulturalisme yang berimplikasi pada proses internalisasi dalam pembelajaran. Mencermati fenomena yang demikian, upaya pengembangan pendidikan Islam multikultural (PIM) sangat perlu dilakukan untuk lebih memperluas dan mengefektifkan pelaksanaan pendidikan Islam yang mengakomodasi segala bentuk dinamika keragaman dan perbedaan.

Hakikat Pendidikan Multikultural secara etimologis berasal dari dua istilah (*term*) yakni pendidikan dan multikultural. Pendidikan dapat diartikan sebagai proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan, dan cara-cara yang mendidik. Sedangkan istilah multikultural sebenarnya merupakan kata dasar yang mendapat awalan. Kata dasar itu adalah kultur yang berarti kebudayaan, kesopanan, atau pemeliharaan sedang awalnya adalah multi yang berarti banyak, ragam, aneka. Dengan demikian multikultural berarti keragaman budaya, aneka, kesopanan, atau banyak pemeliharaan. Namun dalam tulisan ini lebih diartikan sebagai keragaman budaya sebagai aplikasi dari keragaman latar belakang seseorang.<sup>46</sup>

Secara sederhana, multikultural dapat berarti keragaman budaya.<sup>47</sup> Istilah multikultural dibentuk dari kata multi yang berarti plural, banyak; atau beragam, dan kultur yang berarti budaya.<sup>48</sup> Kultur atau budaya merupakan ciri-ciri dari tingkah laku manusia yang dipelajari, tidak diturunkan secara genetis dan bersifat khusus, sehingga kultur pada masyarakat tertentu bisa berbeda dengan kultur masyarakat lainnya.<sup>49</sup> Dengan kata lain, kultur merupakan sifat yang khas bagi setiap individu (*person*) atau suatu kelompok (*comunitie*) yang sangat mungkin untuk berbeda antara satu dengan lainnya. Semakin banyak

<sup>46</sup>Imron Mashadi, *Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Multikulturalisme*, (Jakarta: Balai Litbang Agama, 2009).

<sup>47</sup>Scott Lash dan Mike Featherstone (ed.), *Recognition And Difference: Politics, Identity, Multiculture*, (London: Sage Publication, 2002), hlm. 2.

<sup>48</sup>Abdullah M. Amin, *Pendidikan Agama Era Multikultural Multireligius*, (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005), hlm. 13.

<sup>49</sup>M. Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural (Cross Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan)*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm. 9.

komunitas yang muncul, maka semakin beragam masing-masing kultur yang akan dibawa. Aspek keragaman yang menjadi esensi dari konsep multikultural dan kemudian berkembang menjadi gerakan yang disebut dengan multikulturalisme, merupakan gerakan yang bukan hanya menuntut pengakuan terhadap semua perbedaan yang ada tetapi juga bagaimana keragaman atau perbedaan yang ada dapat diperlakukan sama sebagaimana harusnya.

Pendidikan multikultural adalah sebuah tawaran model pendidikan yang mengusung ideologi yang memahami, menghormati, dan menghargai harkat dan martabat manusia di manapun dia berada dan dari manapun datangnya (secara ekonomi, sosial, budaya, etnis, bahasa, keyakinan, atau agama, dan negara). Sedangkan menurut para ahli, mengatakan:

- a. H.A.R Tilaar, pendidikan multikultural merupakan suatu wacana lintas batas yang mengupas permasalahan mengenai keadilan sosial, musyawarah, dan hak asasi manusia, isu-isu politik, moral, edukasional dan agama;
- b. Prudence Crandall, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang memperhatikan secara sungguh-sungguh terhadap latar belakang peserta didik baik dari aspek keragaman suku (etnis), ras, agama (aliran kepercayaan), dan budaya (kultur);
- c. Andersen dan Custer (1994), pendidikan multikultural adalah pendidikan mengenai keragaman budaya;
- d. Musa Asy'ari, pendidikan multikultural adalah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural; dan
- e. Azyumardi azra, mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk atau tentang keragaman kebudayaan dalam merespons perubahan demografi dan kultur lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan demi masyarakat secara keseluruhan.<sup>50</sup>

Melihat dan memperhatikan berbagai pengertian pendidikan multikultural, disimpulkan bahwa pendidikan multikultural adalah

<sup>50</sup>Abdullah Idi, *Bahan Kuliah Pendidikan Islam Multikultural*, Program Doktor (S-3), Pascasarjana IAIN Bengkulu, 2019.

sebuah proses pengembangan yang tidak mengenal sekat-sekat dalam interaksi manusia. Sebagai wahana pengembangan potensi, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai heterogenitas dan pluralitas, pendidikan yang menjunjung tinggi nilai kebudayaan, etnis, suku, dan agama.

Berdasarkan hal di atas, aspek pokok yang sangat ditekankan dalam gerakan multikulturalisme adalah kesediaan menerima dan memperlakukan kelompok lain secara sama dan seharusnya sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Harkat dan martabat manusia yang hidup dalam suatu komunitas dengan entitas budayanya masing-masing (yang bersifat dinamis dan khas), merupakan dimensi yang sangat penting diperhatikan dalam gerakan multikulturalisme.<sup>51</sup>

Berangkat dari konsep yang demikian, sudah seharusnya nilai-nilai multikulturalisme dapat terintegrasi secara jelas dalam agenda pendidikan Islam. Adapun pendidikan Islam, dalam pengertian yang bersifat normatif merupakan suatu proses spiritual, akhlak, intelektual, dan sosial untuk membimbing manusia sekaligus memberikan kepada mereka nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan teladan ideal dalam kehidupan, dengan tujuan untuk memperoleh kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.<sup>52</sup>

Semangat dan nilai-nilai multikulturalisme yang terintegrasi dalam sistem dan aktivitas pendidikan Islam, merupakan suatu upaya untuk mengakomodasi dan menata dinamika keragaman, perbedaan, dan kemanusiaan melalui aktivitas pendidikan. Dengan demikian,

---

<sup>51</sup>Ada tiga istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan masyarakat dengan karakter beragam, baik dalam aspek keagamaan, ras, bahasa, maupun budaya yang berbeda. Istilah tersebut yakni pluralitas (*plurality*), keragaman (*diversity*), dan multikultural (*multicultural*). Ketiga istilah ini tidak merepresentasikan hal yang sama, walaupun semuanya mengacu kepada adanya 'ketidaktunggalan'. Konsep pluralitas mengandaikan adanya 'hal-hal yang lebih dari satu' (*many*), sedangkan keragaman menunjukkan bahwa keberadaan yang 'lebih dari satu' itu berbeda-beda, heterogen, dan bahkan tak dapat disamakan. Apabila pluralitas sekadar menunjukkan adanya kemajemukan, multikulturalisme memberikan penegasan bahwa dengan segala perbedaannya itu mereka adalah sama di dalam ruang publik. Lihat Charles Taylor, "The Politics of Recognition" dalam Amy Gutman, *Multiculturalism, Examining the Politics of Recognition*, Princenton: Princenton University Press, 1994, hlm. 18.

<sup>52</sup>Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1993), hlm. 62.

pendidikan Islam multikultural pada hakikatnya adalah pendidikan yang menempatkan multikulturalisme sebagai salah satu visi pendidikan dengan karakter utama yang bersifat inklusif, egaliter, dan humanis, namun tetap kokoh pada nilai-nilai spiritual dan ketuhanan yang berdasarkan Al-Qur'an dan *as-Sunnah*.

Keragaman dan perbedaan dalam kehidupan manusia merupakan *sunnatullah*. Al-Qur'an sebagai representasi pesan-pesan Allah Swt. untuk menjadi panduan umat manusia, sesungguhnya telah memberikan beberapa isyarat penting, baik secara eksplisit maupun implisit tentang eksistensi keragaman dan perbedaan tersebut. Di antaranya dapat dilihat dalam QS. al-Hujurat (49): 13:

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".<sup>53</sup>

Dalam ayat ini Allah Swt. menyatakan bahwa manusia diciptakan terdiri atas jenis laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar mereka dapat saling kenal dan mengenal atau saling *taffahum*, *ta'awun*, dan *tabayyun* sesama mereka. Manusia yang secara fitrah adalah makhluk sosial, maka hidup bermasyarakat merupakan suatu keniscayaan adanya. Melalui kehidupan yang bersifat kolektif sebagai sebuah masyarakat, tentu di dalamnya terdapat banyak keragaman atau perbedaan dalam berbagai hal.<sup>54</sup> Kata *syu'ub* yang terdapat dalam ayat ini merupakan bentuk plural dari kata *sy'aba* yang berarti golongan atau cabang, sedangkan kata *qaba'il* merupakan bentuk jamak dari kata *qabilah* yang berarti sekumpulan orang yang bertemu yang satu sama lainnya bisa saling menerima. Kata *qaba'il* selalu menunjuk pada dua pihak atau lebih yang saling berpasangan atau berhadap-hadapan. Oleh

<sup>53</sup>Lihat QS. al-Hujurat [49]: 13 dan lihat juga beberapa ayat lain yang termuat di dalamnya nilai-nilai tentang pengakuan terhadap adanya keragaman atau perbedaan, di antaranya: QS. al-Baqarah [2]: 285; Ali-Imran [3]: 3, 4, 84, 64-68; al-Maidah [5]: 48; al-Hajj [22]: 67-69; al-Hadid [57]: 27.

<sup>54</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 320.

karena itu, manusia sejak diciptakan walaupun dari rahim yang berbeda-beda tetapi hakikatnya ia adalah makhluk interdependensi (sosial) yang saling bergantung satu sama lainnya.<sup>55</sup>

Al-Qur'an surah Al-Hujurat: 13 secara konteks turun sebagai respons atas pemikiran sempit sebagian sahabat terhadap fenomena perbedaan kulit serta kedudukan, dan menyebabkan mereka memiliki pandangan yang diskriminatif terhadap orang lain,<sup>56</sup> merupakan salah satu persoalan yang masih terus terjadi hingga kini. Sikap memandang rendah orang lain, primordialisme (*ashabiyah*), tidak siap berbeda, dan memperlakukan orang lain dengan tidak adil, adalah di antara sikap-sikap yang mengindikasikan masih lemahnya semangat multikulturalisme dalam kehidupan masyarakat saat ini, baik secara konsep maupun praktik. Sebagai sebuah konsep, kemunculan multikulturalisme tidak terlepas dari pengaruh filsafat postmodernisme, yang berangkat dari pemikiran tentang ketidakpercayaan terhadap segala bentuk narasi besar dan penolakan terhadap segala bentuk pemikiran yang mentotalisasi atau menggeneralisasi. Selain menolak pemikiran yang totaliter, filsafat post-modernisme juga menghaluskan sensitivitas manusia terhadap perbedaan dan memperkuat kemampuan toleransi terhadap realitas yang terukur. Postmodernisme menolak kebenaran tunggal atau yang bersifat absolut dan menghindari sikap klaim kebenaran (*truth claim*). Kebenaran diyakini bersifat jamak dan hakikat dari semua, termasuk kehidupan manusia itu dalam semua aspeknya adalah berbeda.

Filsafat postmodernisme yang muncul sebagai bentuk protes terhadap pemikiran filsafat modernisme, melahirkan beberapa bentuk pemikiran yang sangat mendasar, seperti realisme, relativisme, dan humanisme. Salah satu dampak positif yang dari pemikiran postmodernisme

<sup>55</sup>Waryono Abdul Gafur, *Tafsir Sosial: Mendialogkan Teks dengan Konteks*, (Yogyakarta: LSAQ Press, 2005), hlm. 11-12.

<sup>56</sup>Dalam satu riwayat dikemukakan, ketika fathu Mekah Bilal naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Beberapa orang berkata "apakah pantas budak hitam ini azan di atas Ka'bah?", maka berkatalah yang lainnya sekiranya Allah membenci orang ini, pasti Dia akan menggantinya." Kemudian ayat ini turun sebagai penegasan bahwa dalam Islam tidak ada diskriminasi dan yang paling mulia adalah yang bertakwa (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hattim yang bersumber dari Ibnu Abi Mulaikah). Lihat lebih lengkap dalam K.H.Q. Shaleh H.A.A. Dahlan, dkk, *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2001), hlm. 518.

adalah lahirnya pengakuan pluralitas kehidupan. Bagi postmodernisme, kenyataan adanya masyarakat plural itu menjadi suatu fakta yang tidak bisa disangkal. Hal ini harus diperkuat dengan membangun prinsip kesadaran pluralisme dan multikulturalisme, yakni paham yang mengakui adanya keragaman dalam kehidupan sekaligus memperlakukan orang lain secara sama secara proporsional. Pengokohan multikulturalisme yang berangkat dari pemikiran filosofis di atas, perlu menjadi bahan pertimbangan untuk dikembangkan dalam pendidikan Islam. Landasan epistemologi yang telah dibangun dengan cukup jelas oleh aliran filsafat postmodernisme dalam usaha mengakomodasi fakta keragaman maupun perbedaan, sesungguhnya dapat menjadi tambahan referensi yang ilmiah untuk memformulasi pendidikan Islam multikultural secara lebih baik. Tentu dalam proses ini diperlukan sikap adaptif kritis agar konsep-konsep tersebut tetap sejalan dengan spirit dan prinsip-prinsip ajaran Islam.<sup>57</sup>

Paradigma multikultural secara implisit juga menjadi salah satu fokus dari Pasal 4 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Bab III yang membahas prinsip penyelenggaraan pendidikan. Dalam undang-undang tersebut berbunyi: "*Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa*".<sup>58</sup> Melalui pasal ini dijelaskan bahwa pelaksanaan pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), nilai keagamaan, nilai kultural (budaya), dan kemajemukan bangsa, sesuai dengan nilai-nilai dasar negara, yakni Pancasila. Melalui dasar yuridis ini, pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia secara legal formal perlu memperhatikan aspek-aspek demokratis, keadilan, HAM, nilai-nilai atau norma (*values*) serta pengakuan terhadap aspek keragaman. Pengakuan terhadap segala bentuk keragaman tentu saja tidak cukup, karena itu diperlukan upaya untuk menyikapi keragaman dengan perlakuan yang berlandaskan pada asas keadilan.

<sup>57</sup>Abdullah Idi, *Bahan Kuliah Pendidikan Islam Multikultural*, Program Doktor (S-3), Pascasarjana IAIN Bengkulu, 2019.

<sup>58</sup>Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung: Fokusmedia, 2005), hlm. 516. lihat juga: H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 83.

Secara historis, gerakan multikulturalisme muncul pertama kali di Kanada dan Australia sekitar 1970-an, disusul kemudian di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan lainnya. Di antara faktor yang melatarbelakangi kemunculan multikulturalisme di negara-negara tersebut adalah menyangkut persoalan rasisme dan tindakan-tindakan diskriminasi terhadap kelompok minoritas,<sup>59</sup> terutama yang ditujukan kepada orang-orang yang berasal dari Afrika (Negro). Setelah beberapa dekade, diskursus multikulturalisme berkembang dengan sangat cepat. Tiga dekade sejak digulirkan, multikulturalisme sudah mengalami dua gelombang penting, yaitu sebagai berikut.

Pertama, multikulturalisme dalam konteks perjuangan pengakuan budaya yang berbeda. Prinsip kebutuhan terhadap pengakuan (*needs of recognition*) adalah ciri utama dari gelombang pertama ini; dan

Kedua, adalah gelombang multikulturalisme yang melegitimasi keragaman budaya<sup>60</sup> sehingga berimplikasi pada semakin kokohnya gerakan multikulturalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari proses sejarah dengan perkembangan yang cepat, menunjukkan bahwa multikulturalisme sebagai gerakan yang konsen pada aspek-aspek pluralitas dan nilai-nilai kemanusiaan merupakan gerakan yang dinilai tepat untuk diposisikan sebagai alternatif dalam menyikapi berbagai persoalan yang berhubungan dengan aspek keragaman. Respons positif tersebut sesungguhnya tidak terlepas dari unsur kebutuhan manusia terhadap adanya suatu konsep yang dapat menata dan menghargai pluralitas dalam kehidupan secara lebih baik dan lebih berarti.

Adapun kebutuhan manusia terhadap gerakan multikulturalisme sesungguhnya tidak terlepas dari posisi manusia sebagai makhluk pribadi (*individu*) maupun makhluk sosial. Secara individu (*pribadi*),

<sup>59</sup>H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 83.

<sup>60</sup>Gelombang ini mengalami beberapa tahapan, di antaranya: (1) kebutuhan atas pengakuan; (2) melibatkan berbagai disiplin akademik lain; (3) pembebasan melawan imperialisme dan kolonialisme; (4) gerakan pembebasan kelompok identitas dan masyarakat asli atau masyarakat adat (*indigenous people*); (5) post-kolonialisme; (6) globalisasi; (7) post-nasionalisme; (8) post-modernisme; serta (9) post-strukturalisme yang mendekonstruksi struktur kemapanan dalam masyarakat. Lihat: (Bikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*, Cambridge: Harvard University Press, 2000, hlm. 125).

manusia merupakan makhluk yang memiliki sifat atau karakter khas yang membedakannya dengan orang lain. Dalam perspektif psikologi, dikenal istilah kepribadian manusia, yakni sifat dan tingkah laku khas seseorang yang membedakannya dengan orang lain, integrasi karakteristik dari struktur-struktur, pola tingkah laku, minat, pendirian, kemampuan, dan potensi yang dimiliki oleh seseorang. Kepribadian yang khas, maka sifat atau karakter yang dimiliki manusia pasti akan berbeda antara satu dengan lainnya. Perbedaan yang ada bisa dalam banyak hal, seperti keinginan, perasaan, harapan, tujuan, dan lain sebagainya. Di saat tertentu, kadang manusia merasa ingin dihargai, diakui, dan diapresiasi, atau dalam hal-hal yang bersifat pribadi (*privacy*) selalu ingin dihormati. Di saat yang lain, kadang manusia juga ingin mendominasi, membenci, sakit hati, dan berkeinginan agar orang lain berpikir atau bersikap sama dengan dirinya. Sifat-sifat manusia yang kadang bertolak belakang ini sesungguhnya sangat manusiawi. Karena itu, ia perlu memahami, menghargai, serta menghormati orang lain dan begitupun sebaliknya. Secara sosial dan kultural, perkembangan kehidupan manusia yang saat ini berada pada fase peradaban global, sudah tentu tidak bisa terhindar dari unsur perbedaan atau keragaman (*diversitas*).<sup>61</sup>

Menurut Bikhu Parekh, perbedaan tersebut setidaknya bisa dikategorikan dalam tiga hal, yakni: *Pertama*, perbedaan subkultur (*subculture diversity*), yaitu individu atau sekelompok masyarakat yang hidup dengan cara pandang dan kebiasaan yang berbeda dengan komunitas besar dengan sistem nilai atau budaya pada umumnya yang berlaku. *Kedua*, perbedaan dalam perspektif (*perspectival diversity*), yaitu individu atau kelompok dengan perspektif kritis terhadap *mainstream* nilai atau budaya mapan yang dianut oleh mayoritas masyarakat di sekitarnya. *Ketiga*, perbedaan komunalitas (*communal diversity*), yakni individu atau kelompok yang hidup dengan gaya hidup yang *genuine* (sejati) sesuai dengan identitas komunal mereka (*indigeneous people way of life*). Kompleksnya keragaman atau perbedaan yang muncul dalam kehidupan manusia, baik secara sosial maupun kultural merupakan hal yang wajar (alamiah). Manusia sebagai makhluk sosial, tidak akan pernah lepas dari proses interaksi dengan berbagai komponen

<sup>61</sup>Bikhu Parekh, 'Rethinking Multiculturalism....', *Ibid.*, hlm. 125.

yang ada di sekitarnya, termasuk dengan sesamanya. Sama halnya manusia sebagai makhluk yang berbudaya, budaya-budaya yang lahir dari setiap individu maupun komunitas yang ada, selalu akan muncul dengan beragam bentuknya. Untuk itu, berbagai konflik atau benturan terhadap fakta keragaman dan perbedaan yang ada perlu dikelola dan diarahkan berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, sebagaimana yang terangkum dalam gerakan multikulturalisme. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, gerakan multikulturalisme yang tereduksi dalam pendidikan (Islam) menjadi sangat penting. Dengan jumlah ±13.000 pulau besar dan kecil serta jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa, 300-an suku serta 200-an bahasa<sup>62</sup> sangat memerlukan konsep penataan yang baik agar tidak terjadi saling benturan.

Begitupun dalam aspek keagamaan dan paham kepercayaan, di Indonesia juga menganut agama dan kepercayaan yang beragam, seperti Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, serta berbagai macam kepercayaan dan aliran keyakinan lainnya. Fakta keberagaman ini adalah aspek yang sangat sensitif apabila tidak dikelola dengan baik, terutama untuk kelompok masyarakat akar rumput (*grass root*), yang secara psikologis masih sangat mudah terpancing pada isu-isu yang bernuansa SARA. Konflik-konflik horizontal yang pernah terjadi di masa lalu, diupayakan semaksimal mungkin untuk tidak terulang kembali.

Pendidikan Multikultural dalam Islam menemukan pijakannya dalam Piagam Madinah. Piagam ini menjadi rujukan suku dan agama pada waktu itu dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Piagam ini juga menjadi rujukan orang-orang yang ingin menjelaskan sistem pemerintahan dan ketatanegaraan Islam. Pijakan multikultural juga bisa dilacak pada akhlak dan kepribadian Rasulullah Saw., di mana beliau seorang manusia multikultural. Nabi sangat menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi perbedaan, seperti diakui oleh beberapa Rohaniawan non-Muslim, seperti Uskup Sidon Paul of Antioch, Theodore Abu Qurrah, Kenneth Cragg, dan beberapa sarjana Barat, seperti William Muir, dan Montgomery Watt.<sup>63</sup>

<sup>62</sup>H.A.R. Tilaar, "Multikulturalisme ....", *Loc. Cit.*, hlm. 12.

<sup>63</sup>Abdullah Idi, 'Bahan Kuliah....', *Op. Cit.*, 2019.

Kenyataan bahwa Piagam Madinah dan pribadi Rasulullah menjadi pijakan multikultural, secara tidak langsung menjelaskan Al-Qur'an sebagai muara pijakan tersebut, dengan dua alasan. Pertama, Piagam Madinah diajukan oleh Rasulullah Saw. sebagai acuan hidup bermasyarakat karena dukungan ayat-ayat Madaniyah. Kedua, ada keterangan yang menyatakan bahwa akhlak Rasulullah Saw. adalah Al-Qur'an. Artinya, kedua alasan ini menegaskan bahwa pijakan pendidikan multikultural dalam Islam adalah Al-Qur'an.

Tampak bahwa orientasi dari Pendidikan Islam Multikultural ialah tertanamnya sikap simpati, respek, apresiasi (menghargai), dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda untuk meningkatkan kadar *taqwa* di sisi Allah. Karena Allah Swt. tidak melihat dari mana seorang umat berasal, seberapa tampan atau cantik, seberapa kaya, seberapa tinggi pangkat/jabatan, seberapa kuat badannya, tapi yang dilihat Allah Swt. seberapa besar tingkat *taqwa*-nya.

Untuk mewujudkan Pendidikan Islam Multikultural (PIM) diupayakan dapat menempuh berbagai cara, di antaranya sebagai berikut.

*Pertama*, pendidikan Islam multikultural mengakui budaya lokal dan menghormati budaya global. Artinya, pendidikan Islam multikultural mengakui adanya realitas budaya lokal sebagai sesuatu yang bisa mewarnai pendidikan Islam. Di sisi lain, pendidikan Islam multikultural juga tidak menafikan budaya global yang juga bisa menambah gairah pendidikan Islam. Ketika kedua budaya tersebut 'bersitegang', peran pendidikan Islam multikultural ini mencari jalan tengah untuk "mendamaikan" keduanya.

*Kedua*, pendidikan Islam multikultural mencoba menyiasati problem-problem pendidikan atau kemanusiaan lain yang sulit untuk diselesaikan. Ini terkait dengan maraknya benturan-benturan ideologi, keyakinan, dan cara pandang dan bagaimana pendidikan Islam multikultural menyiasati benturan-benturan tersebut. Contoh kasus pelaksanaan ujian nasional (UN). Ada ketegangan antara pemerintah, sebagai pembuat kebijakan UN dengan sebagian elemen masyarakat dalam melihat pelaksanaan UN. Pemerintah tetap mengharuskan UN sementara elemen masyarakat tersebut tetap menolak UN. Pendidikan Islam multikultural bisa menyiasati ketegangan ini dengan mengajukan rumusan pelaksanaan UN baru, yaitu UN tetap dilaksanakan tapi tidak menjadi salah satu penentu kelulusan.

*Ketiga*, pendidikan Islam multikultural menjadikan globalisasi bukan sebagai musuh tapi sebagai penyeimbang bagi budaya lokal. Ini sejalan dengan konsep pendidikan Islam multikultural sebagai jalan tengah. Artinya, posisi pendidikan Islam multikultural itu tidak mesti menjadi salah satu pendukung globalisasi atau budaya lokal, tapi mengambil peran sebagai fasilitator bagi globalisasi dan budaya lokal. Contohnya ketika globalisasi, di satu sisi, mendorong penggunaan teknologi dalam semua ranah kehidupan, dan di sisi lain, keyakinan akan bahaya teknologi bagi moralitas anak terus dipegang erat oleh masyarakat di perkampungan misalnya, maka pendidikan Islam multikultural menjadi penyeimbang dengan mempersilakan penggunaan teknologi di masyarakat perkampungan dan mendorong perbaikan metodologi pengajaran Al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama lain di perkampungan agar pemahaman terhadap agama semakin baik dan kesadaran tentang moralitas menjadi semakin tinggi.<sup>64</sup>

*Keempat*, pendidikan Islam multikultural mendorong pluralisme bukan semata-mata sebagai pengakuan terhadap perbedaan dan kemajemukan, namun dalam praktiknya menerima perbedaan tersebut secara legowo dan melakukan perubahan dalam cara bertindak. Artinya, pluralisme yang "proyeknya" belum final pada era modernisme itu, didorong untuk menuntaskan proyek tersebut sehingga menghasilkan perubahan yang jelas bagi masyarakat. Kalau pluralisme hanya sebatas gagasan, maka pendidikan Islam multikultural ini melakukan kerja nyata. Contoh apakah masyarakat Indonesia bisa menerima seorang presiden non-Muslim, namun bisa menyejahterakan rakyat? Tugas pendidikan Islam multikultural untuk melakukan perubahan terhadap cara pandang masyarakat tersebut, sehingga ukuran utama seorang presiden tersebut bukan didasarkan pada latar belakang agama, namun pada tingkat kemampuan memajukan masyarakat.

*Kelima*, pendidikan Islam multikultural "melawan" keinginan pemerintah, tokoh pendidikan, atau siapa pun yang mencoba melakukan penyeragaman dalam pendidikan. Ini bisa sejalan dengan konsep Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Kedua konsep ini mendorong keragaman proses pembelajaran di setiap sekolah. Rumusan kelima ini memerlukan

<sup>64</sup>Abdullah Idi, 'Bahan Kuliah....', *Ibid.*, 2019.

keberanian dan energi yang lebih untuk "melawan" kebijakan-kebijakan pendidikan yang tidak prorakyat.

Keenam, pendidikan Islam multikultural membuka perbedaan seluas-luasnya dan memberikan pemahaman bagaimana seharusnya menghadapi perbedaan tersebut. Rumusan terakhir menjelaskan bahwa perbedaan itu sebuah realitas kemanusiaan dan bagaimana masyarakat bisa memahami realitas tersebut dan mempraktikkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menuju pendidikan Islam multikultural diperlukan kesadaran tentang konsep dan arah multikultural dari semua elemen pendidikan; pemerintah, masyarakat, pimpinan sekolah, orang tua, guru, dan siswa. Kesadaran tersebut, menurut Aurobindo (seorang filosof Hindu Mutakhir) harus berawal dari tingkat kesadaran utama, yang berpuncak pada *supermind*, yaitu 1) keesaan Tuhan direalisasikan melalui keragaman; 2) setiap individu selaras dengan nilai-nilai universal; dan 3) kehendak individu direfleksikan lewat perubahan yang konkret historis. Konsep kesadaran ini relevan dengan konsep pendidikan pembebasan yang mendorong usaha penyadaran manusia tentang realitas dirinya. Paulo Freire menjelaskan bahwa karena pendidikan menggarap realitas manusia, maka secara metodologis, ia harus disandarkan pada prinsip aksi dan refleksi yang dinamakan sebagai praksis, yaitu aksi dalam pengertian mengubah realitas, dan di sisi lain-yang ia sebut sebagai refleksi-terus-menerus menumbuhkan kesadaran untuk mengubah realitas tersebut.<sup>65</sup>

Ada dua hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pendidikan Islam multikultural. Kedua hal ini bersifat konseptual dan metodologis, yang nanti bisa dikembangkan dan diturunkan menjadi langkah-langkah praktis.

Pertama, birokrat pendidikan, guru, dan siswa harus mampu mengakses informasi tentang isu-isu multikultural, baik dari media massa maupun lewat forum diskusi, sehingga mereka tumbuh menjadi seorang figur multikultural. Mereka harus aktif membaca buku dan mengikuti perkembangan informasi lewat media massa. Ketika birokrat pendidikan menjadi seorang figur multikultural, maka kebijakan pendidikan, termasuk produk hukum pun akan mendukung multikultural. Begitupun guru dan siswa. Ketika mereka tumbuh

<sup>65</sup>Abdullah Idi, 'Bahan Kuliah....', *Ibid.*, 2019.

menjadi figur multikultural, proses pengajaran dan pembelajaran pun akan memuat nilai-nilai multikultural.

Kedua, kegiatan multikultural adalah bagian dari nilai spiritual. Oleh karena itu, siswa harus diberikan penjelasan tentang nilai-nilai spiritual dari kegiatan yang mereka lakukan tersebut. Sehingga setiap saat mereka akan dihadapkan pada kesadaran spiritual. Sebagai contoh guru mengajak diskusi tentang pentingnya membersihkan lingkungan, menghormati orang yang berbeda agama. Guru mengajak siswa menonton film atau acara-acara televisi yang memuat wawasan dan nilai-nilai kemanusiaan. Ia menjelaskan bahwa ketiga hal tersebut merupakan bagian dari nilai-nilai multikultural dan refleksi dari ibadah kepada Tuhan.<sup>66</sup>

Dalam ajaran Islam, manusia diciptakan oleh Allah Swt. sebagai makhluk yang paling sempurna. Makhluk lain tidak ada yang memiliki kesempurnaan, baik ditinjau dari aspek fisik maupun aspek psikisnya, sebagaimana kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia. Anugerah paling agung yang diterima manusia, dan anugerah ini tidak diterima oleh makhluk lainnya, adalah intelektualitas. Dengan anugerah intelektualitas, manusia mampu menghasilkan cipta, karya, dan karsa yang beraneka ragam. Berbagai bentuk karya telah dihasilkan manusia; baik bahasa, budaya, etnisitas, bahkan dalam hal memilih keyakinan.

### C. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan suatu landasan atau fondasi dasar pemikiran realitas sosial sebagai pijakan dalam mengembangkan kurikulum pendidikan Islam multikultural. Secara historis praktik dan penyelenggaraan pendidikan yang berprinsip kepada nilai-nilai multikultural jauh sebelumnya telah dipraktikkan oleh umat Islam. Dan bahkan praktik multikulturalisme dalam pendidikan memberikan dampak yang baik bagi kehidupan umat Islam.

Nilai sosial-budaya masyarakat bersumber pada hasil karya akal budi komunitas multikultural maupun praktik pendidikan Islam multikultural. Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Kenyataan ini dapat dilihat dari sosiokultural dan

<sup>66</sup>Abdullah Idi, 'Bahan Kuliah....', *Ibid.*, 2019.

geografis yang begitu beragam dan luas. Di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdapat lebih dari 13.000 pulau besar dan kecil, dan jumlah penduduk sekurangnya 200 juta, terdiri dari 300 suku yang menggunakan hampir 200 bahasa, serta menganut agama dan kepercayaan berbeda, antara lain: Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan serta aliran keyakinan lainnya.

Sebagai pemeluk agama yang mayoritas penduduknya Muslim, lembaga pendidikan Islam cukup mendapat tempat di negeri ini. Permasalahannya adalah bagaimana orientasi pendidikan Islam dalam mengakomodir dan merespons beragam permasalahan yang muncul di tengah masyarakat. Mengingat dalam kondisi masyarakat yang multikultural, berpotensi terhadap disintegrasi sosial di tengah masyarakat—apabila orientasi dan pemahaman keagamaan masyarakat belum mampu menerima fakta sosial yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-harinya.

Sebagai upaya menjembatani harapan tersebut, konsep pendidikan Islam multikultural menjadi salah satu solusi dalam menghadapi beragam permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Mengingat isu pendidikan Islam multikultural masih relatif baru dalam kancah pendidikan di Indonesia, terutama dalam lingkup masyarakat Muslim itu sendiri. Hal ini dikarenakan multikulturalisme merupakan suatu perkembangan yang relatif baru dalam khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam perspektif ilmu sosial. Kenyataan memperlihatkan bahwa multikulturalisme terus berkembang seiring dengan perubahan sosial yang dihadapi umat manusia, terutama di era global yang ditandai berkembangnya aspirasi masyarakat di berbagai belahan dunia terhadap pentingnya iklim demokratisasi.

Asas sosiologi memiliki peranan penting dalam mengembangkan kurikulum pendidikan pada masyarakat dan suatu bangsa. Suatu kurikulum pada prinsipnya mencerminkan keinginan, cita-cita tertentu, dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, sudah sewajarnya kalau pendidikan memperhatikan aspirasi masyarakat, dan pendidikan mesti memberi jawaban atas tekanan-tekanan yang datang dari kekuatan sosio-politik-ekonomi yang dominan. Berbagai kesukaran akan muncul apabila kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat, seperti: militer, politik, agama, industri, pemerintah, swasta, ekonomi, dan lain-lain,

mengajukan keinginan bertentangan dengan kepentingan kelompok berbeda. Akhirnya sangat mungkin muncul tekanan dari sumber eksternal, dari negara lain (terutama negara-negara maju), organisasi internasional, dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya permasalahan pendidikan memiliki hubungan dengan aspek lain: ekonomi, politik, dan lain-lain.<sup>67</sup>

S. Nasution<sup>68</sup> mengemukakan dalam sistem pendidikan serta lembaga-lembaga pendidikan terdapat bahan (*subject matters*) yang memiliki beragam fungsi bagi kepentingan masyarakat, yakni: a) melakukan revisi dan perubahan sosial; b) mempertahankan kebebasan akademis dan kebebasan melaksanakan penelitian ilmiah; c) mendukung dan turut memberi kontribusi kepada pembangunan; d) menyampaikan kebudayaan dan nilai-nilai tradisional serta mempertahankan *status quo*; e) mengeksploitasi orang banyak demi kesejahteraan golongan *elite*; f) mewujudkan revolusi sosial untuk melenyapkan pengaruh-pengaruh pemerintah terdahulu; g) mendukung kelompok-kelompok tertentu, antara lain kelompok militer, industri, atau politik; h) menyebarluaskan falsafah, politik, dan kepercayaan tertentu; i) membimbing dan mendisiplinkan jalan pikiran generasi muda; j) mendorong dan mempercepat laju kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; k) mendidik generasi muda agar menjadi warga negara nasional dan warga dunia; l) mengajarkan keterampilan pokok, seperti membaca, menulis, dan berhitung; dan m) memberikan keterampilan pokok yang berkaitan dengan mata pencaharian.

Tentunya, banyak lagi aspek-aspek lain yang turut memberikan pengaruh mengenai apa yang harus dimasukkan ke dalam kurikulum, yakni yang menjadi kebutuhan masyarakat (*the need of society*). Antara lain: a) interaksi yang kompleks antara kekuatan-kekuatan sosial, politik, ekonomi, militer, industri, dan kultural dengan masyarakat; b) berbagai kekuatan dominan, sebagaimana diungkapkan di atas, di bagian dunia lainnya yang erat hubungannya dengan negara bersangkutan; c) pribadi pimpinan atau tokoh-tokoh yang memegang kekuasaan formal dan informal di berbagai lapisan masyarakat.<sup>69</sup> Bertalian dengan hal-hal

<sup>67</sup>Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik*, Cetakan ke-2, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 64.

<sup>68</sup>S. Nasution, *Kurikulum dan Pengajaran*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 23-24.

<sup>69</sup>Abdullah Idi, 'Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik...', *Op. Cit.*, hlm. 66.

di atas, para pengembang kurikulum (*curriculum developers*) memiliki tugas atau tanggung jawab untuk: a) mempelajari dan memahami kebutuhan masyarakat (*social needs*) sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, peraturan, atau keputusan pemerintah, dan lain-lain; b) menganalisis masyarakat di mana sekolah berada; c) menganalisis syarat dan tuntutan terhadap tenaga kerja; dan d) menginterpretasi kebutuhan individu dalam ruang lingkup kepentingan masyarakat.<sup>70</sup>

Dalam mengambil keputusan tentang kurikulum, para pengembang kurikulum (*curriculum developers*) mesti merujuk pada lingkungan atau dunia di mana mereka tinggal, merespons berbagai kebutuhan yang dilontarkan atau diusulkan oleh beragam golongan dalam masyarakat (sebagaimana dikemukakan di atas) dan memahami tuntutan pencantuman nilai-nilai falsafah pendidikan bangsa dan berkaitan dengan falsafah pendidikan yang berlaku. Kadang-kadang para pengembang kurikulum menghadapi berbagai macam kendala, antara lain: ketentuan pemerintah yang hingga pada taraf tertentu membatasi kebutuhan yang diambilnya. Barangkali tantangan yang dihadapi *curriculum developers* akan beragam menurut tingkat kesukaran dan jenjang pendidikan yang ada (SD/MI hingga PT/Universitas). Meskipun demikian, prinsip dasar dalam pengembangan kurikulum itu sendiri tetap diberlakukan sama. Misalnya, perlunya pemahaman filosofis bangsa, filosofis pendidikan, kebutuhan masyarakat, dan lain-lain. Kebutuhan masyarakat perlu ditampung untuk dianalisis, diseleksi, dan diambil suatu keputusan, karenanya dalam proses pengembangan kurikulum pun sangat kompleks.<sup>71</sup> Kompleksnya kehidupan masyarakat disebabkan: a) dalam masyarakat terdapat tata kehidupan yang beraneka ragam; b) kepentingan antarindividu berbeda; dan c) masyarakat selalu mengalami perubahan dan perkembangan.<sup>72</sup> Kurikulum sedapat mungkin dibangun dan dikembangkan dengan tetap merujuk pada asas kemasyarakatan sekaligus merujuk pada kebutuhan masyarakat.<sup>73</sup>

Dalam konteks sosiologis, secara konseptual, bentuk penerapan pendidikan Islam multikultural (PIM) diharapkan dapat menjadi

<sup>70</sup>Abdullah Idi, 'Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik....', *Ibid.*, hlm. 67.

<sup>71</sup>Abdullah Idi, 'Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik....', *Ibid.*, hlm. 67.

<sup>72</sup>Abu Ahmadi & Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 225.

<sup>73</sup>Abdullah Idi, 'Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik....', *Op. Cit.*, hlm. 67.

inspirasi dan solusi ideal dalam membangun tradisi demokrasi, di antaranya: *Pertama*, penerapan pendidikan demokrasi di keluarga. Adapun pelaksanaan pendidikan serta praktik budaya demokrasi untuk lingkup keluarga tentu saja perlu disesuaikan dengan kondisi, kebiasaan, dan juga kesepakatan dari sebuah keluarga tertentu, misalnya: semua anggota keluarga memiliki kewajiban untuk menerapkan suatu keadilan tanpa pilih kasih; semua anggota keluarga mempunyai hak untuk diberikan kesempatan untuk menyampaikan sebuah kritik dan juga saran dengan tujuan untuk ketenteraman dan kesejahteraan keluarga; setiap anggota keluarga memiliki kewajiban dalam menjalankan kewajiban mereka dengan apa yang menjadi tugas masing-masing dalam lingkup keluarga; setiap anggota dari keluarga memiliki kewajiban untuk saling menyayangi dan juga menghormati satu sama lain; perlunya mengadakan pertemuan keluarga apabila dibutuhkan; sadar dengan tiap tugas dan juga kewajiban masing-masing; bersedia memosisikan ayah sebagai seorang kepala keluarga; memosisikan masing-masing dari anggota keluarga sebagaimana kedudukan masing-masing; mengatasi dan menemukan solusi atas suatu permasalahan melalui jalan musyawarah dan mufakat; tiap anggota dari keluarga harus memiliki rasa toleransi atas perbedaan pendapat yang ada; dan mengutamakan urusan bersama keluarga dibandingkan dengan urusan pribadi.<sup>74</sup>

*Kedua*, penerapan pendidikan demokrasi di sekolah. Selain bisa diterapkan dalam lingkup keluarga, demokrasi juga tidak kalah penting untuk diterapkan di sekolah. Berikut ini adalah beberapa cara menerapkan demokrasi di lingkungan sekolah yaitu: Penentuan organisasi di sekolah atau di kelas melalui jalan musyawarah; melakukan pemerataan tugas piket dengan adil dan merata; mengadakan upacara dengan cara bergilir; mendatangi berbagai kegiatan yang diadakan oleh pihak sekolah; melakukan sosialisasi dan juga menjalin hubungan yang baik di antara guru dan juga murid di lingkungan sekolah; mengusulkan saran dan juga pendapat kepada pihak sekolah yang berwenang supaya semakin maju dan juga berkembang; mencatat pendapat atau opini di majalah dinding yang ada di sekolah; melunasi iuran tertentu atau SPP

<sup>74</sup>Abdullah, M. Amin, *Pendidikan Agama Era Multikultural Multireligius....* hlm. 67.

secara tepat waktu; datang ke sekolah tepat pada waktunya; menghargai pendapat atau opini dari orang lain.<sup>75</sup>

Ketiga, penerapan pendidikan demokrasi di masyarakat. Penerapan pendidikan demokrasi di lingkup masyarakat di antaranya sebagai berikut: saling melindungi, bahu membahu, dan juga menjaga kedamaian pada lingkungan masyarakat; saling bekerja sama di dalam menyampaikan suatu gagasan untuk kepentingan pengembangan masyarakat; memiliki sikap saling tenggang rasa antara satu dengan yang lain; mampu menghargai pendapat orang lain; mampu mengemukakan kritikan atau pendapat untuk kesejahteraan umum; mengelola dana bersama yang ada dengan baik dan bertanggung jawab; berupaya mencari solusi atas permasalahan tertentu dengan cara mufakat; dan berperan secara aktif pada iuran masyarakat.<sup>76</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem demokrasi merupakan alternatif sistem yang sesuai dengan kondisi sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, karena dalam sistem melibatkan seluruh komponen masyarakat tanpa membedakan suku, ras, budaya, dan agama. Maka sistem demokrasi menjadi jalan tengah bagi negara Indonesia yang mejemuk ini untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan dan integrasi bangsa. Selain itu, sistem demokrasi selain memiliki kelebihan bahwa semua individu yang ada memiliki hak yang sama, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak sehingga terjamin stabilitas dan terhindar dari monopoli kekuasaan karena rakyat terlibat aktif, namun demokrasi banyak memiliki kelemahan yaitu kekuasaan mudah digoyang dengan pembentukan opini oleh media yang memengaruhi pendapat dari masyarakat, suara satu orang dinilai sama padahal kapasitas dan kompetensi seseorang berbeda, dan pemerintahan hasil demokrasi akan kurang efektif bekerja karena akan sibuk mempersiapkan pemilihan umum selanjutnya.

Berikutnya, Pendidikan Islam Multikultural agaknya merupakan salah satu pendekatan terbaik bagi sebuah bangsa untuk meningkatkan kualitas demokrasinya. Pendidikan Islam multikultural yang mengajarkan penghormatan terhadap perbedaan kultur budaya, rasa, suku, dan agama akan menghasilkan suatu tatanan masyarakat yang

<sup>75</sup>Abdullah, M. Amin, 'Pendidikan Agama Era Multikultural....', *Ibid.*, hlm. 68.

<sup>76</sup>Abdullah, M. Amin, 'Pendidikan Agama....', *Ibid.*, hlm.69.

menghargai perbedaan pendapat, hal ini menjadi salah satu dasar penting dalam pembangunan demokrasi. Lebih jauh, Pendidikan Islam Multikultural merupakan salah satu metode pendekatan pembelajaran yang bertujuan menghasilkan peserta didik dengan kompetensi penghargaan terhadap perbedaan yang ada tanpa harus mengabaikan ajaran dan nilai-nilai agama Islam yang dianutnya, dengan menjadikan Al-Qur'an dan *al-Hadits* serta sejarah peradaban Islam sebagai sumber belajar siswa.

Implementasi pendidikan Islam Multikultural di tengah masyarakat multikultural-Indonesia diharapkan potensi dan beragam permasalahan yang dihadapi bangsa ini lambat laun dapat diminimalkan, karena generasi muda yang saat ini menjadi peserta didik akan terbentuk menjadi generasi multikultural dengan pola pikir yang menghargai perbedaan, selalu menegakkan nilai-nilai demokrasi yang akan mewujudkan keadilan dan kemakmuran serta menjaga demokrasi dan integrasi bangsa.

Globalisasi berdampak pada perkembangan masyarakat global yang semakin heterogen, hal ini memberikan keniscayaan terjadinya pola interaksi yang beragam, begitu pula pola hubungan sosial kemasyarakatan. Tanpa mengalihkan perhatian pada realitas yang ada, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam hubungan sosial antaretnis, antarkultur terjadi ketidakseimbangan yang kemudian melahirkan konflik. Seiring dengan perkembangannya pluralitas dalam berbagai segi kehidupan, dunia pendidikan mendapat perhatian secara serius dan konsisten. Paradigma pendidikan mesti diubah dan dikaji ulang, termasuk pengenalan pendidikan multikultural yang kelak diharapkan mampu menjadi penyelaras dalam pola sosiokultural, pergaulan, dan bermasyarakat.

Pendidikan Islam Multikultural sebagai salah satu upaya pengantar perjalanan hidup seseorang, agar bisa menghargai dan menerima keanekaragaman budaya serta dapat membangun kehidupan yang adil. Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai bagian dari ranah pendidikan di sekolah, juga perlu berbenah dengan menelusuri dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Selama ini proses pembelajaran pendidikan agama Islam khususnya di sekolah dianggap tidak memberikan hasil yang maksimal bagi pemahaman tentang keberagaman peserta didik. Proses belajar-mengajar yang hanya menekankan aspek kognisi siswa dianggap sebagai satu produk permasalahan.

Seperti diungkapkan Amin Abdullah dalam Muhaimin, pendidikan agama Islam di sekolah lebih banyak berkonsentrasi pada persoalan teoretis keagamaan yang bersifat kognitif semata serta amalan-amalan ibadah praktis, sehingga terkesan jauh dari kehidupan sosial-budaya peserta didik. Teori-teori keagamaan diterima oleh peserta didik sebagai sesuatu yang sulit untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran terkait dengan bagaimana (*how to*) membelajarkan siswa atau bagaimana membuat siswa dapat belajar dengan mudah dan terdorong kemauannya sendiri mempelajari apa (*what to*) yang teraktualisasikan dalam kurikulum sebagai kebutuhan (*needs*) peserta didik. Dalam suatu kelas di mana setiap peserta didik memiliki ataupun berangkat dari latar belakang yang berbeda, akan muncul problem yang menyangkut tentang efektivitas pembelajaran untuk menanamkan kesadaran akan perbedaan. Sebuah asumsi yang muncul dari Pendidikan Agama Islam berwawasan multikultural menyatakan pembelajaran merupakan suatu proses kultural yang terjadi dalam konteks sosial. Agar pembelajaran Pendidikan Agama Islam lebih cepat dan adil bagi para siswa yang kehidupan beragamanya sangat beragam, kebudayaan-kebudayaan beragama mereka perlu dipahami secara jelas. Pemahaman semacam ini dapat dicapai dengan menganalisis Pendidikan Agama Islam dari berbagai perspektif golongan agama sehingga dapat menghilangkan kebutaan terhadap Pendidikan Agama Islam yang didominasi oleh pengalaman keagamaan yang dominan.<sup>77</sup>

Pendidikan agama apa pun, pada masa lampau sebenarnya juga menyinggung masalah pentingnya kerukunan antarumat beragama, namun lebih bersifat permukaan. Istilah "kerukunan" yang diintrodusir lewat indoktrinasi sangat artifisial, karena tidak mencerminkan dialektika, dinamika, apalagi kerja sama. Selama masa Orde Baru, kerukunan merupakan suatu konfigurasi relasi menerima harmoni dalam pengertian pasif. Karena cara-cara dan skenario perjumpaannya agama-agama (*religious encounter*) berada dalam satu *framework* yang telah didesain sedemikian rupa oleh pemerintah, tanpa melibatkan partisipasi kekuatan sipil dari para pemeluk agama-agama.

Ekspektasi yang digantungkan pada pembelajaran pendidikan agama Islam berwawasan multikultural yakni dapat membentuk

---

<sup>77</sup>Abdullah Idi, "Bahan Kuliah....", *Op. Cit.*, 2019.

perspektif kultur Islam yang baru dan lebih matang, membina relasi antar kultur Islam yang harmonis, tanpa mengesampingkan dinamika, proses dialektika dan kerja sama timbal balik. Dengan perspektif multikulturalis semakin disadari adanya kebutuhan dari guru untuk memperhatikan identitas kultural siswa dan membuat mereka sadar akan bias baik yang datang dari dirinya sendiri maupun dunia luar. Upaya ini ditujukan untuk menolak semua prasangka atau klaim bahwa penampilan semua siswa itu serupa. Guru dan orang tua perlu mengakui fakta bahwa orang dewasa sebagaimana siswa tak terhindarkan dari pengaruh stereotipe dan pandangan tentang masyarakat yang sempit baik tersebar di sekolah maupun dari media.

Demi perubahan yang dimaksudkan, masyarakat dalam hal ini guru dan orang tua siswa dapat mengambil beberapa pendekatan untuk mengintegrasikan dan mengembangkan perspektif multikultural dari pendidikan agama Islam berwawasan multikultural. Mempromosikan konsep diri yang positif sangat penting bagi peserta didik sejauh itu difokuskan kepada aktivitas-aktivitas yang menyinari keserupaan dan perbedaan dari semua siswa yang ada. Siswa dapat diajak untuk bermain peran sebagai strategi utama untuk mengembangkan perspektif baru tentang budaya keberagaman dan kehidupan keberagaman. Perlakuan siswa sebagai sebuah individu yang unik, yang masing-masing dapat memberi kontribusi khusus. Adalah strategi yang jitu bila guru paham akan dunia siswa. Seorang guru harus menyadari latar belakang kultur keberagaman siswanya. Siswa juga dapat memperoleh manfaat dari pemahaman tentang latar belakang dan warisan kultur keberagaman gurunya.<sup>78</sup>

Pembentukan perspektif peserta didik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam berwawasan multikultural dapat pula dicapai melalui pengayaan literatur-literatur Islam yang bermuatan pengetahuan Islam yang plural ataupun multikultural. Melalui mana siswa dapat menemukan bahwa semua kelompok kultur atau agama sekecil apa pun, memiliki kontribusi signifikan terhadap peradaban suatu kaum, bangsa, atau *nation-state*. Program penyediaan literatur multikultural yang seimbang, diharapkan dapat mengakomodir sumber-sumber yang membuka peluang bagi semua keragaman aspirasi dari

<sup>78</sup>Abdullah Idi, "Bahan Kuliah...", *Ibid.*, 2019.

tingkat sosiometri yang beragam, dengan posisi yang berbeda dan dengan karakteristik manusia yang berbeda pula.

Inovasi dan reformasi pendidikan agama Islam dalam pendidikan multikultural tidak semata menyentuh proses pemindahan pengetahuan (*transfer of knowledge*), namun juga membagi pengalaman dan keterampilan (*sharing experience and skill*). Dalam kerangka ini pendidikan agama Islam berwawasan multikultural perlu mempertimbangkan berbagai hal yang relevan dengan keragaman kultural masyarakat dan siswa khususnya keragaman kultur keagamaan. Para guru harus merefleksikan dan menghubungkan dengan pengalaman dan perspektif kehidupan keagamaan siswa yang partikular dan beragam. Kebutuhan ini mencerminkan fakta bahwa proses pembelajaran dalam pendidikan agama Islam akan lebih efektif.

Secara teknis, pembelajaran pendidikan agama Islam berwawasan multikultural mengajarkan tentang kerukunan atau toleransi dan demokrasi. Kelas idealnya dibentuk dalam kelompok kecil. Hal ini dimaksudkan untuk menambah pengalaman peserta didik anggota dari kelompok tersebut untuk saling menghargai, baik di lingkungan pendidikan maupun masyarakat. Selain itu model pembelajaran ini akan membentuk siswa untuk terbiasa berada dalam perbedaan yang ada di antara mereka. Sebab di dalamnya keunikan individu akan dihargai, dan yang lebih penting adalah aspek kepemimpinan. Setiap anggota kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin, meskipun bukan sebagai pemimpin kelompok, setidaknya mereka adalah pemimpin bagi diri mereka sendiri.

Menurut Muhaimin<sup>79</sup> ada tiga kunci pokok yang dapat dipakai untuk mengembangkan pendidikan agama berwawasan multikultural, khususnya pendidikan agama Islam. *Pertama* pendidikan agama Islam diintegrasikan melalui pembelajaran dengan metode diskusi pada kelompok-kelompok kecil. Melalui diskusi siswa bisa bertukar pikiran dengan siswa lainnya demikian pula dengan guru. Bahan diskusi merupakan materi pendidikan agama itu sendiri. Guru mengondisikan diskusi dengan menyediakan sumber-sumber yang tak terbatas atau menugaskan siswanya untuk menemukan kasus yang aktual yang ada di lingkungan sekitar mereka. *Kedua* penumbuhan kepekaan dalam

<sup>79</sup>Abdullah Idi, 'Bahan Kuliah...', *Ibid.*, 2019.

diri siswa terhadap informasi, terutama yang berkaitan dengan isu-isu masalah yang berkaitan dengan masyarakat multikultural. Sebab di dalamnya terdapat perbedaan *ethnokultural* dan agama, demokrasi dan pluralitas, kemanusiaan universal dan subjek lain yang relevan. *Ketiga*, mengubah paradigma yang menafikan sikap saling menghormati, tulus, dan toleransi terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat, dengan memperkuat *basic spiritual* yang peka terhadap masalah-masalah sosial keagamaan.

Istilah pengembangan dalam konteks pendidikan Islam multikultural, setidaknya memiliki dua makna, yakni pengembangan secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, bagaimana menjadikan pendidikan Islam yang mengakomodasi semangat atau nilai-nilai multikulturalisme dapat menjadi lebih besar, merata, dan meluas pengaruhnya dalam konteks pendidikan secara umum, termasuk dalam kehidupan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Adapun secara kualitatif, bagaimana menjadikan pendidikan Islam multikultural agar menjadi lebih baik, berkualitas, dan lebih maju sejalan dengan nilai-nilai dasar ajaran Islam.

Sebagai sebuah perbandingan, pendidikan multikultural yang berkembang di negara-negara Barat, seperti di Amerika Serikat, merupakan proses pendidikan yang menekankan pada strategi pembelajaran dengan menjadikan latar belakang budaya siswa yang beraneka ragam sebagai dasar untuk meningkatkan pembelajaran siswa di kelas dan lingkungan sekolah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menunjang dan memperluas konsep-konsep budaya, perbedaan, kesamaan, dan demokrasi dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>80</sup> Pelaksanaan pendidikan multikultural yang berlangsung di Barat terutama di Amerika memposisikan aspek keragaman siswa sebagai faktor penting yang dapat mendukung pelaksanaan dan pengembangan pendidikan multikultural secara lebih luas.<sup>81</sup>

Adapun untuk konteks ke-Indonesiaan, beberapa kajian yang terangkum dalam landasan preskriptif dan empirik di atas merupakan modal dasar yang sangat penting bagi pengembangan pendidikan Islam

<sup>80</sup>Donna M. Gollnick dan Philip C. Chinn, *Multicultural Education in a Pluralistic Society*, (New Jersey: Prentice Hill, 1998), hlm. 3.

<sup>81</sup>Abdullah Idi, 'Bahan Kuliah....', *Ibid.*, 2019.

multikultural di Indonesia. Upaya pengembangan tersebut sudah barang tentu harus menjadikan prinsip-prinsip nilai yang terkandung dalam ajaran Islam sebagai landasan utama dalam proses pengembangannya.

Secara kuantitatif, strategi yang dapat dilakukan dalam upaya pengembangan Pendidikan Islam multikultural<sup>82</sup>, di antaranya adalah *pertama*, memperbanyak referensi atau bahan bacaan tentang pengembangan pendidikan Islam multikultural. Referensi atau bahan bacaan perlu disusun dengan memperhatikan sasaran pembaca. Bahan bacaan multikulturalisme yang ada saat ini lebih banyak ditujukan untuk kalangan akademis dengan bahasa atau kalimat yang akademis pula. Bagi pembaca di tingkat siswa atau masyarakat awam, bahan bacaan seperti ini tentu saja kurang bisa dimengerti, sehingga dapat menghambat proses sosialisasi atau internalisasi.

*Kedua*, memperbanyak kegiatan sosialisasi mengenai konsep dan urgensi pendidikan Islam multikultural, baik secara lisan maupun tertulis. Pelaksanaan sosialisasi hendaknya menjadi prioritas bagaimana sosialisasi program lain yang dianggap penting. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pemasangan spanduk, brosur, poster, baliho, atau yang sejenis dengan menggunakan bahasa yang simpatik, tidak provokatif, dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan yang terprogram, seminar, dan sebagainya. Sasarannya bisa lebih luas, tidak hanya di lingkungan pendidikan tetapi juga masyarakat secara umum.

*Ketiga*, membuat forum-forum atau kelompok-kelompok yang konsern terhadap gerakan multikulturalisme, terutama di lembaga pendidikan Islam. Karena melalui forum, kelompok, atau pusat kajian yang demikian, akan dapat lebih memperluas dan meningkatkan sosialisasi bahkan internalisasi semangat multikulturalisme dalam dunia pendidikan Islam.

*Keempat*, membangun kultur yang didasari semangat multikulturalisme, baik melalui lembaga pendidikan Islam maupun forum-forum pendidikan Islam di masyarakat. Secara institusional, hendaknya dapat membuat visi yang mengakomodir nilai-nilai multikulturalisme secara jelas dan kemudian dari visi tersebut dapat dibangun semacam *corporate culture* (budaya organisasi) yang

---

<sup>82</sup>Abdullah Idi, "Bahan Kuliah....", *Op. Cit.*, 2019.

menjadikan visi tersebut sebagai arah kegiatan bagi seluruh komponen yang terdapat dalam lembaga pendidikan. Adapun di masyarakat, membangun kultur dengan semangat multikulturalisme dapat dilakukan dengan memanfaatkan forum atau media pendidikan Islam yang ada di masyarakat itu sendiri, seperti melalui kegiatan ceramah agama, khotbah Jumat, majelis taklim, acara-acara kemasyarakatan, dan sebagainya.

Adapun secara kualitatif<sup>83</sup> strategi yang perlu dilakukan adalah, pertama, membangun landasan teori (*epistemologi*) pendidikan Islam multikultural yang lebih mapan. Untuk saat ini, teori-teori tentang pendidikan multikultural masih banyak didominasi oleh pemikir-pemikir Barat. Teori-teori yang telah ditawarkan tersebut pada satu sisi memang banyak membantu terutama dalam hal konsep maupun praktik. Namun di sisi lain, konsep pendidikan multikulturalisme Barat yang berangkat dari filsafat postmodernisme, tidak semua aspek dapat dikonsumsi sebagai referensi. Dengan kata lain, diperlukan sikap kritis dan usaha penguatan konsep yang berangkat dari sumber-sumber Islam itu sendiri, yakni melalui Al-Qur'an dan *as-Sunnah*.

Kedua, mempertajam nilai-nilai multikulturalisme dalam kurikulum, baik di tingkat sekolah atau perguruan tinggi. Kurikulum di tingkat sekolah yang ada saat ini, belum betul-betul mengakomodasi semangat multikulturalisme. Hal ini dapat dilihat dari ketidakjelasan dalam bentuk apa multikulturalisme akan diajarkan. Untuk itu diperlukan suatu perubahan pada wilayah kurikulum, yakni kurikulum yang mengakomodasi multikulturalisme secara lebih jelas. Materi multikulturalisme bisa saja diwujudkan dalam mata pelajaran tersendiri. Namun konsekuensinya, harus dapat secara rinci diuraikan dalam sebuah buku materi ajar. Kalaupun tidak melalui materi pelajaran tersendiri, paling tidak harus ditegaskan dalam topik pembahasan dalam suatu mata pelajaran, terutama dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI).

Ketiga, meningkatkan pemahaman dan kemampuan para pendidik terhadap materi-materi multikulturalisme. Karena harus diakui, di kalangan pendidik sendiri masih banyak yang belum memahami betul tentang konsep-konsep multikulturalisme. Tidak sedikit di antara para pendidik yang masih berpikiran sempit mengenai dinamika

<sup>83</sup>Abdullah Idi, "Bahan Kuliah...", *Ibid.*, 2019.

keragaman dan perbedaan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan kepada mereka, baik melalui pelatihan, bahan bacaan, serta ruang kreativitas untuk menulis tentang pendidikan multikultural, atau yang lainnya. Upaya ini harus terprogram dan diusahakan bersifat keharusan bagi mereka. Selain dalam proses pendidikan atau pengajaran, guru juga diharuskan untuk membuat program-program yang dapat mengarahkan siswa memahami dengan baik persoalan multikulturalisme. Mengadakan kunjungan ke tempat-tempat ibadah agama lain, tempat-tempat bersejarah, atau lainnya, yang hakikatnya terdapat nilai-nilai multikulturalisme di dalamnya.

Keempat, pengembangan budaya lokal yang sarat dengan nilai-nilai moral serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam perlu dilakukan. Secara konkret dapat dilakukan dengan memberdayakan siswa untuk mengadakan penelitian walaupun bersifat sederhana, *field note*, paper, karya tulis, dan sejenisnya yang kemudian harus dapat dipublikasikan. Selain itu, bisa juga dengan ikut berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan masyarakat atau acara-acara budaya lokal yang terdapat pada masyarakat tertentu. Khusus untuk kalangan mahasiswa, program penelitian dan pengabdian masyarakat yang sudah *include* dalam kurikulum pendidikan, perlu dibekali nilai-nilai yang terkait dengan multikulturalisme secara lebih jelas. Penelusuran tidak hanya terbatas pada budaya yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, termasuk budaya lokal yang masih belum jelas kedudukannya dalam Islam pun, justru perlu dikaji oleh mahasiswa.

Kelima, penguatan dari sisi kebijakan dan pembiayaan (anggaran), yang dalam hal ini berhubungan dengan pihak-pihak yang berwenang atau para pembuat kebijakan. Perlu alokasi yang jelas untuk mengembangkan pendidikan Islam multikultural. Bentuk-bentuk pengembangan yang telah diuraikan di atas, tentu saja memerlukan usaha yang keras untuk dapat direalisasikan. Kerja sama di antara masyarakat atau kelompok-kelompok yang konsern dengan pengembangan pendidikan Islam multikultural, kalangan akademis, atau pemikir-pemikir Muslim, lembaga pendidikan Islam, dan pemerintah sangat diperlukan, agar tujuan dari pengembangan pendidikan Islam multikultural dapat tercapai secara maksimal sesuai harapan.

Sebutan lain dari pendidikan multikultural muncul di Irlandia utara, pemerintah menetapkan *Education for mutual understanding*

yang didefinisikan sebagai pendidikan untuk menghargai diri dan menghargai orang lain dan memperbaiki relasi antara orang-orang dari tradisi yang berbeda. Kebijakan ini sebagai respons dan upaya untuk mengatasi konflik berkepanjangan antara komunitas Katolik (kelompok nasionalis) yang mengidentifikasi diri dengan tradisi dan kebudayaan Irlandia dengan komunitas Protestan (kelompok unionis) yang mengidentifikasi diri dengan tradisi Inggris. Konflik yang muncul pada dekade 60-an merangsang perdebatan di kalangan lembaga-lembaga swadaya masyarakat tentang pemisahan sekolah bagi dua komunitas ini, hal inilah yang melahirkan kebijakan *Education for mutual understanding* secara formal pada 1989.

Tujuan program ini tidak lain yakni membuat siswa mampu belajar menghargai dan menilai diri sendiri dan orang lain; mengapresiasi kesalingterkaitan orang-orang dalam masyarakat; mengetahui tentang dan memahami apa yang menjadi milik bersama dan apa yang berbeda dari tradisi-tradisi kultural mereka; mengapresiasi bagaimana konflik dapat ditangani dengan cara-cara nirkekerasan.<sup>84</sup> Argumen-argumen tentang pentingnya multikulturalisme dan pendidikan multikultural cukup untuk menggantungkan harapan bahwa pendidikan multikultural dapat membentuk sebuah perspektif kultural baru yang lebih matang, membina relasi antarkultural yang harmoni, tanpa mengesampingkan dinamika, proses dialektika, dan kerja sama timbal balik. Dalam konteks pendidikan agama, paradigma multikultural perlu menjadi landasan utama penyelenggaraan proses belajar-mengajar.

Pendidikan agama membutuhkan lebih dari sekadar transformasi kurikulum, namun juga perubahan perspektif keagamaan dari pandangan eksklusif menuju pandangan multikulturalis, atau setidaknya dapat mempertahankan pandangan dan sikap inklusif dan pluralis. Disadari atau tidak, kelompok-kelompok yang berbeda secara kultural dan etnik terlebih agama, sering menjadi korban rasis dan bias dari masyarakat yang lebih besar. Maka dari itu, pendidikan agama Islam sebagai disiplin ilmu yang termasuk dalam dunia pendidikan nasional memiliki tugas untuk menanamkan kesadaran akan perbedaan, mengingat Islam adalah agama mayoritas di Indonesia yang notabene adalah negara multireligius.

---

<sup>84</sup>Zakiyuddin Baidhawi, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta: Penerbit Erlangga: 2005), hlm. 77.

Menumbuhkan kesadaran akan keberagaman dalam beragama bukanlah hal mudah, mengingat pemahaman keberagaman umat tengah diuji dengan dunia informasi yang memberi kemudahan pengaksesan dan nyaris tanpa batas. Agama yang tidak dipahami secara menyeluruh hanya secara parsial atau setengah-setengah, pada akhirnya hanya menimbulkan perpecahan antar umat, bahkan yang lebih parah lagi bisa menimbulkan konflik antar umat baik seagama atau antar agama, terbentuknya agama baru, aliran sesat serta kekerasan atas nama agama. Untuk itu diperlukan format baru dalam pendidikan agama Islam yakni dengan pendidikan agama Islam berwawasan multikultural.<sup>85</sup>

Pendidikan Agama Islam berwawasan multikultural mengusung pendekatan dialogis untuk menanamkan kesadaran hidup bersama dalam keragaman dan perbedaan, pendidikan ini dibangun atas spirit relasi kesetaraan dan kesederajatan, saling percaya, saling memahami dan menghargai persamaan, perbedaan dan keunikan, serta interdependensi. Ini merupakan inovasi dan reformasi yang integral dan komprehensif dalam muatan pendidikan agama-agama yang bebas prasangka, rasisme, bias, dan stereotipe.

Pendidikan agama berwawasan multikultural memberi pengakuan akan pluralitas, sarana belajar untuk perjumpaan lintas batas, dan mentransformasi indoktrinasi menuju dialog. Seiring dengan perkembangannya pluralitas dalam berbagai segi kehidupan, dunia pendidikan mendapat perhatian secara serius dan konsisten. Paradigma pendidikan mesti diubah dan dikaji ulang, Termasuk pengenalan pendidikan multikultural yang kelak diharapkan mampu menjadi penyelaras dalam pola sosiokultural, pergaulan, dan bermasyarakat.

Pendidikan Multikultural sebagai salah satu upaya pengantar perjalanan hidup seseorang, agar bisa menghargai dan menerima keanekaragaman budaya serta dapat membangun kehidupan yang adil. Pendidikan agama Islam sebagai bagian dari ranah pendidikan di sekolah, juga perlu berbenah dengan menelusuri dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Selama ini proses pembelajaran Pendidikan agama Islam khususnya di sekolah dianggap tidak memberikan hasil yang maksimal bagi pemahaman tentang keberagaman peserta didik.

---

<sup>85</sup>Azyumardi Azra, *et. al.*, *Nilai-Nilai Pluralisme dalam Islam; Bingkai Gagasan yang Berserak*, (Bandung: Nuansa, 2005), Cet. Ke-1, hlm. 96.

Proses belajar-mengajar yang hanya menekankan aspek kognisi siswa dianggap sebagai satu produk permasalahan. Sebagaimana yang diutarakan oleh Amin Abdullah dalam Muhaimin, pendidikan agama Islam di sekolah lebih banyak berkonsentrasi pada persoalan teoretis keagamaan yang bersifat kognitif semata serta amalan-amalan ibadah praktis, sehingga terkesan jauh dari kehidupan sosial budaya peserta didik. Teori-teori keagamaan diterima oleh peserta didik sebagai sesuatu yang sulit untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana pembelajaran dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk menjadi manusia yang cerdas, beradab, mempunyai akhlak dan kekuatan spiritual serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya atau masyarakatnya.<sup>86</sup> Makna sadar dalam definisi tersebut adalah pemahaman tentang bagaimana pendidikan harus disadari sebagai suatu langkah nyata dalam memperbaiki kualitas sumber daya manusia andal. Sedangkan pengertian terencana memberikan gambaran bahwa proses pendidikan tidak akan mungkin dapat berjalan dan menghasilkan kualitas peserta didik yang mumpuni dan diharapkan jika tidak dilakukan dengan sistemik dan terencana.

Perencanaan yang dimaksud dalam proses pendidikan berakibat dari pemahaman bahwa hakikat dan tujuan pendidikan adalah mempersiapkan generasi masa mendatang. Oleh karena itu, perencanaan yang dilakukan untuk pendidikan bukan hanya untuk memahami kehidupan nyata pada saat ini, namun pendidikan juga memprediksi apa yang harus dimiliki dan kompetensi apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Jadi tidak mengherankan dalam realitas pendidikan suatu program perencanaan pendidikan dapat diperbarui dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan dan realitas yang terjadi pada masyarakat sebagai pelaku pendidikan. Namun, yang perlu dijadikan perhatian bahwa ketika membuat keputusan pendidikan dan merencanakan suatu perubahan dalam pendidikan, pelaku kebijakan melihat realitas dan memegang prinsip-prinsip dasar dalam merencanakan pembaruan dan merumuskan kembali proses pendidikan yang diinginkan. Semisal (a)

<sup>86</sup>Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. xvii.

lulusan sekolah (*out put*) yang diinginkan; (b) untuk mencapai itu, proses pendidikan yang seperti apa yang harus dilaksanakan; dan (c) setelah jelas lulusan yang diinginkan dan menghajatkan proses pendidikan tertentu, masukan yang bagaimana yang diterima program tersebut.<sup>87</sup>

#### D. Landasan Psikologis

Kontribusi psikologi terhadap studi kurikulum memiliki dua bentuk. Pertama, model konseptual dan informasi yang akan membangun perencanaan pendidikan. Kedua, berisikan beragam metodologi yang dapat diadaptasi untuk penelitian pendidikan. Pertanyaan tentang pengembangan mata pelajaran, model, dan metodologi itu beragam, dan informasinya sering tidak lengkap dan berkontradiksi. Tidak terdapat teori-teori psikologi tetapi hanya ada studi dan teori dalam hal perbedaan tingkat kecanggihan. Tidak kurang, beberapa bidang telah cukup dikembangkan untuk menawarkan petunjuk-petunjuk kepada pendidik dan perencana kurikulum (*curriculum planner*).<sup>88</sup>

Dalam memilih pengalaman belajar yang akurat, psikologi secara umum sangat membantu. Teori-teori belajar, teori-teori kognitif, pengembangan emosional, dinamika kelompok (*groups*), perbedaan kemampuan individu, kepribadian, model formasi sikap dan perubahan, dan mengetahui motivasi, semuanya sangat relevan dalam merencanakan pengalaman pendidikan (*educational experiences*).<sup>89</sup>

Di Indonesia, kesadaran tentang multikultural sebenarnya sudah muncul sejak Negara Republik Indonesia terbentuk. Tetapi konsep ini tidak terwujud pada masa Orde Baru. Kesadaran tersebut dipendam atas nama kesatuan, persatuan, dan stabilitas negara-negara sebagai pilar dalam tri pembangunan yakni pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan pemerataan kesejahteraan sebesar-besarnya untuk seluruh penduduk serta kebebasan beragama (*freedom of religion*). Namun, mengalami pembatasan secara politik dan melalui Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) agama-agama yang berhak hidup adalah yang

<sup>87</sup>Jusuf Amir Feisal, *Reorientasi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 69.

<sup>88</sup>Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik*, Editor: Safarina HD, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 67.

<sup>89</sup>Abdullah Idi, 'Pengembangan Kurikulum....', *Ibid.*, hlm. 68.

diakui secara resmi oleh pemerintah, seperti Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha.

Kemudian muncul paham monokulturalisme yang menjadi tekanan utama. Hasilnya, dapat dikatakan sampai saat ini, bahwa wawasan multikulturalisme bangsa Indonesia masih sangat rendah. Rendahnya wawasan multikulturalisme menyebabkan berbagai kekisruhan etnis yang merebak di banyak tempat di wilayah NKRI. Ini merupakan bagian dari krisis multidimensi yang dihadapi negara dan bangsa Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Konflik dan benturan antar kelompok yang memiliki perbedaan kepentingan, visi, keyakinan dan tradisi, seolah-olah telah menjadi sesuatu legal dan lumrah di era reformasi ini.

Pada era Reformasi masyarakat Indonesia berkeinginan mewujudkan perubahan dalam semua aspek kehidupan. H.A.R. Tilaar mengatakan bahwa masyarakat Indonesia pasca Orde Baru sedang berada dalam masa transformasi, era-reformasi telah lahir dan masyarakat Indonesia ingin mewujudkan perubahan dalam semua aspek kehidupannya.<sup>90</sup> Keragaman yang ada pada bangsa Indonesia di satu sisi merupakan suatu khazanah yang patut dipelihara dan memberikan dinamika bagi bangsa, namun di sisi lain dapat pula merupakan titik pangkal perselisihan dan konflik vertikal maupun horizontal yang tengah terjadi pada masyarakat Indonesia.<sup>91</sup> Dalam realitasnya, bangsa Indonesia memang ternyata belum cukup mampu *me-manage* kemajemukan dengan baik, sehingga konflik dan tindak kekerasan (*violence*) sering kali masih ditemukan dalam kehidupan sosial masyarakat bangsa Indonesia.

Abdul Rachman Assegaf mengatakan, bila problem multikulturalisme tidak dikelola secara positif, maka sangat dimungkinkan bangsa ini akan terus terjebak pada konflik horizontal berkepanjangan. Itu sebabnya perlu kiranya dicari strategi khusus untuk menemukan solusi atas persoalan multikulturalisme tersebut melalui berbagai bidang, seperti sosial, politik, budaya, hukum, ekonomi, dan pendidikan.<sup>92</sup> Musa Asyari

<sup>90</sup>H.A.R. Tilaar, *Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia, Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*, PT. Remaja Rosdakarya, Yayasan Adikarya IKAPI dan Ford Foundation, Bandung, 1999, hlm. 3.

<sup>91</sup>Zakiyuddin Baidhawiy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 21.

<sup>92</sup>Abd. Rachman Assegaf, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 310.

berpendapat indikator konflik ini terlihat pada upaya penyeragaman atau sering disebut politik monokulturalisme dalam berbagai aspek kehidupan yang dilakukan oleh pemerintah pada masa Orde Baru. Selama Orde Baru berkuasa, pemerintah mengabaikan terhadap perbedaan yang ada, baik dari segi suku, bahasa, agama, maupun budayanya.<sup>93</sup>

Amin Abdullah mengungkapkan bahwa multikulturalisme merupakan sebuah paham yang menekankan pada kesenjangan dan kesetaraan budaya-budaya lokal dengan tanpa kesenjangan dan kesetaraan budaya-budaya lokal dengan tanpa mengabaikan hak-hak dan eksistensi budaya yang ada. Dengan kata lain, penekanan utama multikulturalisme adalah pada kesetaraan budaya. Paradigma pembangunan pendidikan kita yang sentralistik telah melupakan keragaman yang sekaligus kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa ini. Perkelahian, kerusuhan, permusuhan, munculnya kelompok yang memiliki perasaan bahwa hanya budaya kelompoknya yang lebih baik dari budaya lain adalah buah dari pengabaian keragaman tersebut dalam dunia pendidikan.<sup>94</sup>

Beberapa dekade terakhir ini, pendidikan agama di Indonesia dihadapkan pada permasalahan yang serius. Seperti yang telah diketahui bersama, bahwa dengan adanya mata pelajaran pendidikan agama di segala jenjang pendidikan ternyata tidak menjamin terwujudnya perdamaian dan kerukunan antarumat beragama. Agama pun dianggap gagal dalam memainkan perannya sehingga sebagai juru damai (*problem solves*) bagi persoalan SARA, yang erat kaitannya dengan pengajaran agama yang eksklusif.<sup>95</sup> Selain itu, terhadap kesalahpahaman dalam penyikapan terhadap kemajemukan yang masih banyak menyisakan beragam persoalan. Tidak terlebih, jika kemudian justru para siswa banyak dan sering memperoleh dari pendidikan agama sebuah pengetahuan tentang agama yang berbasis eksklusivisme, seperti saling mengkafirkan, menyalahkan agama lain, saling memurtadkan, dan

<sup>93</sup>Musa Asy'arie, 'Pendidikan Multikultural dan Konflik Bangsa', dalam *Harian Kompas*, Edisi Jumat, 3 September 2004.

<sup>94</sup>Ngainun Naim dan Achmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hlm. 125.

<sup>95</sup>Ali Makmur, *Pluralisme dan Multikulturalisme*, (Malang: Aditya Media Publishing, 2011), hlm. 201.

berbagai hal lainnya. Karena itu kehadiran aliran bahkan apa lagi, agama lain dianggap sebagai ancaman. Akibatnya benih-benih konflik terus tertanam dalam pengalaman beragama dan kognisi agama yang diyakini siswa. Inilah yang pada gilirannya sering menjadi pemicu *Violence* atas nama agama ketika kesadaran beragama eksklusif muncul di tengah-tengah masyarakat.<sup>96</sup>

Indonesia memiliki tingkat keragaman yang sangat tinggi, mulai dari dimensi sosial, budaya, agama, aspirasi politik, dan kemampuan ekonomi. Keragaman tersebut sangat berpengaruh langsung terhadap kemampuan guru melaksanakan kurikulum. Guru harus menempatkan diri sebagai fasilitator harus mampu menjembatani dan menghubungkan suasana plural tersebut ke dalam satu wadah yang dapat mengakomodir setiap kepentingan peserta didik. Keberhasilan seorang guru dalam mengkover kondisi tersebut terletak pada keberhasilan pendidikan agama Islam, sebab sebuah kodrat Tuhan dan kenyataan kehidupan yang tidak terbantahkan bahwa pluralitas dan perbedaan dipandang sebagai *sunnâtullah*.

Undang-Undang No. 20/2003 secara tegas menyatakan bahwa pendidikan agama merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Setiap lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi wajib memasukkan pendidikan agama sebagai muatan kurikulum. Pasal 37 ayat (1) menjelaskan bahwa pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.<sup>97</sup>

Pendidikan agama Islam yang dimasukkan dalam kurikulum pendidikan umum mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, merupakan bagian dari pendidikan Islam yang sarat dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Pendidikan Islam mempunyai misi esensial untuk membangun karakter Muslim yang memahami ajaran agamanya serta mempunyai kesadaran imani yang diwujudkan ke dalam sikap dan perilaku sehari-hari sebagai bentuk pengamalan ajaran agama. Menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas, hasil yang ingin dicapai

<sup>96</sup>Edi Susanto, *Pendidikan Agama Berbasis Multikultural*, (Karsa: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman, XI, (No. 1. 2006), hlm. 784.

<sup>97</sup>Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

dari pendidikan Islam adalah menciptakan manusia beradab dalam pengertian yang menyeluruh meliputi kehidupan spiritual dan materiel. Begitu juga menurut al-Abrasyi, mencapai suatu akhlak yang sempurna (*fadhilah*) adalah tujuan utama pendidikan Islam.

Dalam kenyataannya, masih dirasakan bahwa Pendidikan Agama Islam (PAI), secara umum belum mampu berkontribusi positif terhadap peningkatan moralitas dan sikap toleransi khususnya di kalangan peserta didik. Hal ini sangat terkait dengan proses implementasinya di lapangan. Dalam praksisnya peserta didik selalu diarahkan pada penguasaan teks-teks yang terdapat dalam buku pengajaran, mereka selalu dihadapkan pada pertanyaan dan hafalan kulit luarnya saja (ranah kognitif), sedangkan substansinya berupa penanaman nilai-nilai agama hilang begitu saja seiring dengan bertumpuknya pengetahuan kognitif mata pelajaran yang ada di sekolah.<sup>98</sup>

Secara historis, pengakuan terhadap kenyataan keragaman ini, terutama keragaman agama, secara yuridis-formal telah ditunjukkan oleh para *founding fathers* dengan memasukkan nilai-nilai pluralisme keagamaan ke dalam rumusan Pancasila (sila pertama) dan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan landasan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Begitu juga nilai-nilai multikulturalisme yang dituangkan dalam semboyan "Bhinneka Tunggal Ika". Bahkan, secara sosio-kultural, Indonesia "pernah" menjadi prototipe sebuah kehidupan masyarakat pluralistik yang ideal.

Seperti diketahui bahwa terdapat sejumlah pendapat tentang pengertian pendidikan multikultural, di mana pada prinsipnya pengertian itu sama. Nieto menyebutkan bahwa pendidikan 'multibudaya' adalah pendidikan yang bersifat antirasis yang memperhatikan keterampilan-keterampilan dan pengetahuan dasar bagi warga dunia. Yang penting bagi semua murid, yang menembus seluruh aspek sistem pendidikan, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang memungkinkan murid bekerja bagi keadilan sosial. Keadilan di sini merupakan proses di mana pengajar dan murid bersamasama mempelajari pentingnya variabel budaya bagi keberhasilan akademik, dan menerapkan ilmu pendidikan yang kritis yang memberi

---

<sup>98</sup>Sutrisno, *Pembaharuan dan Pengembangan Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Fadilatama, 2011), hlm. 85.

perhatian pada bangun pengetahuan sosial dan membantu murid untuk mengembangkan keterampilan dalam membuat keputusan dan tindakan sosial. Musa Asy'ari juga menyatakan bahwa pendidikan multikultural adalah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural.<sup>99</sup>

Adapun fokus pendidikan multikultural tertuju pada beberapa hal, antara lain: *pertama*, mengajarkan moral kepada anak didik; *kedua*, pendidikan lebih dari satu budaya; *ketiga*, mengajarkan untuk menghargai perbedaan; dan *keempat*, mengutamakan toleransi. Sedangkan ciri-ciri pendidikan multikultural antara lain: *pertama*, menghargai berbagai perbedaan, siswa-siswi yang ada dalam pendidikan multikultural setiap harinya berada dalam lingkungan dengan individu-individu berbeda, sehingga rasa toleransi terhadap adanya perbedaan tersebut lebih besar daripada siswa pendidikan nonmultikultural; *kedua*, apresiasi dan interdependensi, pendidikan multikultural mengajarkan pada pelajar maupun mahasiswa untuk selalu mengapresiasi (menghargai) perbedaan budaya; *ketiga*, terbuka dalam berpikir, pelajar atau mahasiswa dalam pendidikan multikultural dididik untuk berpikir luas dan kritis. Terlebihnya terhadap sesuatu yang berbau kultur (budaya), agar setiap sikap yang mereka ambil tepat dan efisien dalam konteks lingkungan multikulturalnya; dan *keempat*, memahami dan mengerti terhadap kultur (budaya) orang lain, karena pada pendidikan multikultural peserta didik tidak hanya diperkenalkan satu budaya namun hampir seluruh budaya maka peserta didik akan lebih memahami kultur-kultur yang ada di lingkungannya.

Terdapat beberapa pendekatan dalam pendidikan multikultural, antara lain: a) *Teaching of the Exceptional and the Culturally Different* (pengajaran bagi perbedaan kultural dan eksepsional) adalah pendekatan dengan tujuan adalah untuk melengkapi murid dengan keterampilan kognitif, konsep, informasi, bahasa, dan nilai-nilai tradisional yang diperlukan oleh masyarakat (Amerika) dan pada hal untuk memperbolehkan mereka untuk menggenggam satu pekerjaan dan fungsi di antara dengan institusi kemasyarakatan dan budaya; b) *Inter human relationship*

<sup>99</sup>Musa Asy'arie, 2004. *Pendidikan Multikultural dan Konflik Bangsa*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0409/03/opini/1246546> (diakses 25 September 2019).

*of approach* (pendekatan antar manusia), tujuan dari pendekatan ini adalah untuk meningkatkan satu perasaan kesatuan, toleransi, dan penerimaan di antara murid. Pendekatan ini melahirkan perasaan positif di antara murid yang berbeda, meningkatkan identitas grup dan rasa bangga untuk murid dari warna kulitnya, mengurangi stereotipe, dan usaha meminimalisir *prejudice* dan bias; c) *Single-Group Studies Approach* (pendekatan belajar kelompok), pendekatan ini adalah suatu pembahasan mendalam dari grup minoritas dengan maksud anggota grup ini diberikan kuasa, mengembangkan pada mereka rasa kesadaran bangga pada grupnya, dan membantu anggota dari grup dominan memahami dari mana orang lain berada.

Terdapat pula beberapa paradigma pada pendidikan multikultural: a) pendidikan multikultural harus menawarkan beragam kurikulum yang merepresentasikan pandangan dan perspektif banyak orang; b) pendidikan multikultural harus didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada penafsiran tunggal terhadap kebenaran sejarah; c) kurikulum dicapai sesuai dengan penekanan analisis komparatif dengan sudut pandang kebudayaan yang berbeda-beda; dan d) pendidikan multikultural harus mendukung prinsip-prinsip pokok dalam memberantas pandangan klise tentang ras, budaya, dan agama.<sup>100</sup>

Pendidikan Agama Islam atau PAI adalah salah satu mata pelajaran yang penting dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Hal ini karena Indonesia merupakan negara yang paling banyak beragama Islam dan sudah menjadi faktor penting di kehidupan yang diharapkan dapat membangun kepribadian yang baik yang sesuai dengan norma agama Islam.

Di dalam buku *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, ada beberapa aspek psikologis dalam pembelajaran agama Islam sebagai berikut.<sup>101</sup>

*Pertama*, psikologi. Dalam setiap kegiatan pembelajaran banyak terdapat aspek psikologi yang harus dipahami oleh seorang pengajar agar tercapai tujuan pendidikan. Yang biasa disebut psikologi

<sup>100</sup>[http://Pendidikan%20Multikultural%20dalam%20Psikologi%20Pendidikan%20\\_%20Intelektual%20Corner.html](http://Pendidikan%20Multikultural%20dalam%20Psikologi%20Pendidikan%20_%20Intelektual%20Corner.html).

<sup>101</sup>Thohirin, *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Berbasis Integrasi dan Kompetensi)*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 76-88.

pembelajaran pendidikan agama Islam agar seorang guru khususnya dapat mengembangkan aspek-aspek yang ada pada peserta didik baik aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.

*Kedua*, perilaku mengajar. Dalam proses pembelajaran guru dituntut untuk mampu mewujudkan perilaku mengajar secara tepat agar terjadi perilaku belajar yang efektif pula dalam diri siswa. Di samping itu, guru diharapkan mampu menciptakan interaksi belajar-mengajar yang sedemikian rupa, sehingga siswa mewujudkan kualitas perilaku belajarnya secara efektif.

*Ketiga*, tugas guru. Tugas guru dalam mengajar, tidak hanya sebagai pengajar dalam arti penyampaian pengetahuan, tetapi lebih meningkat sebagai perancang, manajer pengajaran, pengevaluasi hasil belajar, dan sebagai direktur belajar.

*Keempat*, perancang pengajaran (*manager of intruction*). Seorang guru akan berperan mengelola seluruh proses pembelajaran dengan menciptakan kondisi-kondisi belajar sedemikian rupa sehingga setiap siswa dapat belajar secara efektif dan efisien.

*Kelima*, penilai hasil belajar siswa. Untuk berperan secara terus-menerus mengikuti hasil belajar yang dicapai oleh siswa dari waktu ke waktu dan sebagai pengarah belajar guru berperan untuk senantiasa menimbulkan, memelihara, dan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar.

*Keenam*, karakteristik pengajar PAI. Untuk mewujudkan perilaku mengajar secara tepat, karakteristik pengajar yang diharapkan antara lain memiliki minat yang besar terhadap pelajaran dan mata pelajaran yang diajarkan, memiliki kecakapan untuk memperhatikan kepribadian dan suasana hati secara tepat serta membuat kontak dengan kelompok secara tepat pula, memiliki kesabaran, keakraban, dan sensitivitas yang diperlukan untuk menumbuhkan semangat belajar. Pemikiran yang imajinatif dan praktis dalam usaha memberikan penjelasan kepada peserta didik, memiliki kualifikasi yang memadai dalam bidangnya baik ini maupun metode, memiliki sikap terbuka, luwes, dan eksperimental dalam metode dan teknik (guru) akan mampu mengajar secara baik apabila memiliki sikap dasar yang benar, memiliki sasaran yang benar, memiliki informasi faktual yang diperlukan, memahami berbagai macam metode dan teknik, dan mengetahui bagaimana memilihnya, membantu pelajar dalam merencanakan tindak lanjut.

*Ketujuh*, perilaku belajar. Perilaku belajar yang terjadi pada para peserta didik dapat dikenal baik dalam proses maupun hasilnya. Proses belajar dapat terjadi apabila individu merasakan adanya kebutuhan dalam dirinya yang tidak dapat dipenuhi dengan cara-cara yang refleksi atau kebiasaan. Hasil perilaku belajar ditunjukkan dengan adanya perubahan perilaku dalam keseluruhan pribadi pelajar. Perilaku hasil belajar mencakup aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Perlu diingat bahwa perilaku belajar bisa bersumber dari berbagai aspek perilaku lain baik yang bersifat internal maupun eksternal.<sup>102</sup> Para pelajar harus memahami aspek-aspek internal dan eksternal yang bisa memengaruhi perilaku siswa. Di antara aspek internal yang mesti dipahami oleh pengajar adalah: (1) potensi; (2) prestasi; (3) kebutuhan; (4) sikap; (5) pengalaman; (6) kebiasaan; (7) emosi; (8) motivasi; (9) kepribadian; (10) perkembangan; (11) keadaan fisik; (12) cita-cita; dan lain-lain.<sup>103</sup>

*Kedelapan*, aspek psikologi dalam pembelajaran PAI. Belajar untuk menjadi adalah kegiatan belajar yang dilakukan siswa sehingga pada gilirannya akan menghasilkan pribadi-pribadi yang mandiri, yaitu pribadi yang mengenal dirinya, mengarahkan dirinya, merencanakan, dan membuat keputusan bagi masa depannya untuk kemudian mewujudkan dirinya secara optimal. Belajar berlangsung sepanjang hayat. Islam mengenal prinsip ini melalui berbagai hadis Rasulullah. Seperti hadis yang menyatakan "Tuntutlah ilmu dari buaian hingga ke liang lahat". Islam mengajarkan agar umatnya terus belajar selagi masih ada kesempatan dan sebelum jasad bersatu dengan tanah. Belajar untuk belajar, maknanya adalah apa yang dicapai dari suatu peristiwa belajar hendaknya mendorong siswa untuk belajar lebih lanjut baik secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontal artinya upaya perluasan kegiatan belajar ke arah yang lebih luas terutama dalam kaitannya dengan bidang lain atau berbagai aspek kehidupan. Secara vertikal artinya upaya kegiatan belajar untuk mencapai hasil yang lebih tinggi. Siswa hendaknya mampu belajar untuk mendapatkan hasil yang akan dijadikan sebagai titik tolak bagi kegiatan belajar selanjutnya.<sup>104</sup>

<sup>102</sup>Thohirin, 'Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam....', *Ibid.*, hlm. 76-88.

<sup>103</sup>Thohirin, 'Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam....', *Ibid.*, hlm. 76-88.

<sup>104</sup>Thohirin, 'Psikologi Pembelajaran Pendidikan....', *Ibid.*, hlm. 76-88.

*Kesembilan*, belajar untuk bekerja (*learning to work*). Bekerja pada prinsipnya merupakan tugas setiap orang dalam memperoleh kelangsungan dan kebahagiaan hidupnya. Kegiatan belajar pada dasarnya merupakan proses memperoleh bekal untuk dapat melakukan pekerjaan secara produktif dan efektif. Seyogianya apa yang dipelajari hendaknya menjadi modal keefektifan dan produktivitas bekerja. Hasil belajar tidak hanya berupa tambahan ilmu pengetahuan saja, tetapi menghasilkan penguasaan keterampilan untuk siap memasuki lapangan kerja.<sup>105</sup>

*Kesepuluh*, interaksi pengajar-pelajar. Perwujudan perilaku guru sebagai pengajar dan siswa sebagai pelajar akan tampak dalam interaksi antara keduanya. Dalam interaksi ini, terjadi proses saling memengaruhi sehingga terjadi perubahan perilaku pada diri pelajar dalam bentuk tercapainya hasil belajar. Sekurang-kurangnya ada tiga hal dalam interaksi pelajaran-pelajaran ini, yaitu proses belajar, metode mengajar, dan pola-pola interaksi. Dalam proses belajar mengajar akan terjadi interaksi antara pengajar dengan pelajar. Pola-pola interaksi yang terjadi dalam proses mengajar-belajar, akan bervariasi tergantung pada situasi belajar mengajar. Sekurang-kurangnya ada empat pola interaksi yang terjadi yaitu: (1) interaksi individual; (2) interaksi individual kelompok; (3) interaksi kelompok-individu; (4) interaksi kelompok-kelompok.

Interaksi dalam proses pembelajaran bermakna interaksi edukatif. Interaksi edukatif adalah yang secara sadar mempunyai tujuan untuk mendidik, untuk mengantarkan anak didik ke arah "kedewasaan". Dengan demikian, dalam hal ini yang penting bukan bentuk interaksinya, tetapi yang pokok adalah maksud atau tujuan berlangsungnya interaksi itu sendiri.

Dengan pendidikan agama Islam yang diberikan dan juga dipadukan dengan berbagai pembelajaran yang lain, akan menghasilkan kehidupan yang utuh sebagaimana yang dicitakan oleh bangsa Indonesia. Maka dari itu, untuk menyempurnakan dalam pengajaran dan pembelajaran penting juga harus dipadukan dengan ilmu psikologi.<sup>106</sup>

<sup>105</sup>Thohirin, 'Psikologi Pembelajaran Pendidikan...', *Ibid.*, hlm. 88.

<sup>106</sup>[http://Aspek%20Psikologi%20Dalam%20Proses%20Pembelajaran%20PAI%20\(Pendidikan%20Agama%20Islam\)%20-%20DosenPsikologi.com.html](http://Aspek%20Psikologi%20Dalam%20Proses%20Pembelajaran%20PAI%20(Pendidikan%20Agama%20Islam)%20-%20DosenPsikologi.com.html) diakses 20 Desember 2018.

Relevan dengan penjelasan di atas, bahwa proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan formal di sekolah, di dalamnya terjadi interaksi antara berbagai komponen pengajaran. Komponen-komponen itu dapat dikelompokkan dalam tiga kategori utama, yaitu, *pertama*, guru; *kedua*, isi atau materi pelajaran; dan yang *ketiga*, siswa.<sup>107</sup> Dengan demikian bahwa interaksi ketiga komponen utama melibatkan sarana dan prasarana seperti metode, media, dan penataan lingkungan tempat belajar, sehingga tercipta situasi belajar mengajar (proses pembelajaran) yang memungkinkan tercapainya tujuan pembelajaran yang telah direncanakan.

Dari beberapa literatur, muatan dari aspek psikologi bisa dikelompokkan juga sebagai berikut. Aspek-aspek psikologis dalam pembelajaran. Sebagaimana dinyatakan di muka bahwa proses pembelajaran syarat dengan aspek-aspek psikologis yang harus diperhatikan oleh seorang pendidik atau pengajar, demi menunjang keberhasilan proses pembelajaran tersebut, antara lain:

a) Tingkat kecerdasan/inteligensi siswa

Inteligensi ialah kemampuan untuk menemukan, yang bergantung pada pengertian yang luas dan ditandai oleh adanya suatu tujuan tertentu dan adanya pertimbangan-pertimbangan yang bersifat korektif. Jelasnya, inteligensi itu meliputi pengertian penemuan sesuatu yang baru, adanya keyakinan atau ketetapan hati, dan adanya pengertian terhadap dirinya sendiri. Pendapat lain menyatakan bahwa inteligensi pada umumnya dapat diartikan sebagai kemampuan psiko-fisik untuk mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara yang tepat.<sup>108</sup>

Inteligensi sebenarnya bukan persoalan kualitas otak saja, melainkan juga kualitas organ-organ tubuh lainnya. Memang, peran otak dalam hubungannya dengan inteligensi manusia lebih menonjol daripada peran organ-organ tubuh lainnya, lantaran otak merupakan "menara pengontrol" hampir seluruh aktivitas manusia. Sudah menjadi sebuah keyakinan bersama dan dibuktikan secara empiris bahwa tingkat kecerdasan atau inteligensi seseorang

<sup>107</sup>Thohirin, *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam....*, Op. Cit. hlm. 88.

<sup>108</sup>Muhibbin Syah, *Psikologi Belajar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 55.

(siswa) sangat menentukan tingkat keberhasilan belajar. Ini bermakna, semakin tinggi tingkat kecerdasan seorang siswa maka semakin besar peluangnya meraih sukses dalam belajar. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kecerdasannya maka semakin kecil peluangnya untuk memperoleh sukses.

b) Sikap siswa

Sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespons (*response tendency*) dengan cara yang relatif terhadap objek orang, barang, dan sebagainya, baik secara positif maupun negatif. Yang sangat memegang peranan penting dalam sikap ialah faktor perasaan atau emosi, dan faktor kedua adalah reaksi/respons, atau kecenderungan untuk bereaksi. Dalam beberapa hal sikap merupakan penentu yang penting dalam tingkah laku manusia. Sebagai reaksi maka sikap selalu berhubungan dengan dua alternatif, yaitu senang (*like*) atau tidak senang (*dislike*), menurut dan melaksanakannya atau menjauhi/menghindari sesuatu. Dalam proses pembelajaran sikap termasuk salah satu yang memengaruhi proses pembelajaran. Respons positif yang diberikan siswa terhadap materi pelajaran yang diberikan merupakan pertanda baik dalam mengikuti proses belajarnya. Sebaliknya, respons negatif yang diberikan terhadap mata pelajaran atau guru bahkan diikuti dengan kebencian akan dapat menimbulkan kesulitan belajar siswa. Jika kesulitan belajar telah dialami siswa maka tingkat keberhasilan belajar tidak akan tercapai.

c) Bakat siswa

Bakat adalah kemampuan individu untuk melakukan tugas tertentu tanpa banyak bergantung pada upaya pendidikan dan latihan.<sup>109</sup> Seorang siswa yang memiliki bakat dalam bidang tata bahasa Arab, misalnya, akan jauh lebih mudah menyerap informasi, pengetahuan, dan keterampilan yang berhubungan dengan bidang tersebut dibanding dengan siswa lainnya. Berhubungan dengan hal di atas, bakat akan memengaruhi tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar bidang studi tertentu. Oleh karenanya, sangat tidak bijaksana apabila orang tua memaksa untuk menyekolahkan

<sup>109</sup>Muhibbin Syah, 'Psikologi Belajar...', *Ibid*, hlm. 135.

anaknyanya pada jurusan keahlian tertentu yang tidak sesuai dengan bakat yang dimiliki anak.

d) Minat siswa

Secara sederhana, minat (*interest*) berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat seperti yang dipahami dan dipakai orang selama ini dapat memengaruhi kualitas pencapaian hasil belajar siswa dalam bidang-bidang studi tertentu.<sup>110</sup> Menurut Slameto, minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh.<sup>111</sup> WS. Winkel, mengartikan minat sebagai kecenderungan yang agak menetap untuk merasa tertarik pada bidang-bidang studi tertentu. Menurut Crow n Crow bahwa minat berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong seseorang untuk menghadapi, atau berurusan dengan orang, benda, kegiatan, pengalaman, yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. Jadi minat dapat diekspresikan melalui pernyataan yang menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai sesuatu hal daripada hal yang lainnya. Dapat pula dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh kemudian.<sup>112</sup>

Belajar akan menjadi suatu siksaan dan tidak memberi manfaat jika tidak disertai sifat terbuka bagi bahan-bahan pelajaran. Guru yang berhasil membina siswanya bila guru tadi telah melakukan hal-hal yang paling penting yang dapat dilakukan demi kepentingan belajar siswa-siswanya. Sebab minat bukanlah sesuatu yang ada begitu saja, melainkan sesuatu yang dapat dipelajari.

Pada dasarnya minat ada yang muncul dengan sendirinya yang disebut minat spontan dan ada minat yang muncul dan dibangkitkan dengan sengaja. Pendapat lain mengatakan bahwa minat terbagi kepada dua bagian, yaitu minat pembawaan dan lingkungan. Minat muncul berdasarkan bakat yang ada, misalnya apabila seseorang memiliki bakat di bidang pendidikan (guru) atau pendidik maka yang bersangkutan akan masuk ke fakultas keguruan. Tetapi, minat seseorang bisa saja

<sup>110</sup>Muhibbin Syah, 'Psikologi Belajar...', *Ibid.*, hlm. 136.

<sup>111</sup>Hurlock, B. Elizabeth, *Perkembangan Anak*, (Jakarta: PT. Erlangga, t.t.), hlm. 114.

<sup>112</sup>Wasty Soemanto, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 90.

berubah karena adanya pengaruh seperti kebutuhan dan lingkungan.

e) **Motivasi Siswa**

Motif merupakan pendorong bagi suatu organisme untuk melakukan sesuatu. Pendapat lain mengatakan bahwa motif ialah keadaan internal organisme –baik manusia ataupun hewan–yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Motivasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah hal dan keadaan yang berasal dari dalam diri siswa sendiri yang dapat mendorongnya melakukan tindakan belajar. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah hal dan keadaan yang datang dari luar individu siswa yang juga mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar. Kekurangan atau ketiadaan motivasi, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal, akan menyebabkan kurang bersemangatnya siswa dalam melakukan proses pembelajaran materi-materi pelajaran baik di sekolah maupun di rumah. Ramayulis mengungkapkan bahwa ada beberapa aspek psikologi yang berhubungan dengan perkembangan beragama: yaitu *pertama*, motivasi beragama; *kedua*, inteligensi beragama; *ketiga*, sikap beragama; *keempat*, tingkah laku beragama; dan yang *kelima*, ketaatan beragama.<sup>113</sup>

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa dalam proses pembelajaran guru memiliki kewajiban untuk memperhatikan aspek-aspek psikologis siswa guna tercapainya proses pembelajaran. Kelima aspek psikologis di atas, yaitu tingkat kecerdasan, sikap, bakat, minat, dan motivasi siswa harus mendapat perhatian penuh dari seorang tenaga pengajar, dalam hal ini guru. Tanpa atensi terhadap kelima aspek tersebut tingkat keberhasilan belajar akan sulit tercapai seperti yang diharapkan.

## **E. Landasan Organisatoris**

Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) suatu kurikulum dalam sistem pendidikan nasional yang wajib diberikan pada semua jenjang pendidikan, mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Di dalam

<sup>113</sup>Ramayulis, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), hlm. 79-99.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 37 Ayat 1, dinyatakan bahwa 'pendidikan agama bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia'. Tujuan pendidikan agama seperti yang termuat dalam UU No. 20/2003 tersebut, tidak dapat dicapai hanya sebatas memberikan pengajaran agama dengan parameter keberhasilan diukur dari segi seberapa jauh peserta didik menguasai hal-hal yang bersifat kognitif atau pengetahuan tentang ajaran agama atau ritus-ritus keagamaan. Justru penekanan yang lebih penting adalah seberapa dalam tertanamnya nilai-nilai keagamaan dalam jiwa dan seberapa dalam pula nilai-nilai tersebut terwujud dalam tingkah laku dan budi pekerti peserta didik sehari-hari.

Nilai-nilai keagamaan yang harus ditanamkan kepada peserta didik didasarkan kepada sumber utama ajaran Islam (Al-Qur'an dan Hadis). Berdasarkan kedua sumber itulah disusun bangunan keilmuan pendidikan agama Islam yang dipelajari pada Madrasah, ataupun di lembaga pendidikan Islam lainnya, yang terdiri dari beberapa bidang studi yakni Qur'an-Hadis, Akidah Akhlak, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam.<sup>114</sup>

Menurut Said Agil, tujuan yang ingin dicapai dalam proses aktualisasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan, paling tidak meliputi tiga dimensi atau aspek kehidupan yang harus dibina dan dikembangkan dalam institusi pendidikan, yakni: 1) dimensi spiritual, yaitu iman, takwa, dan akhlak mulia; 2) dimensi budaya, yaitu kepribadian yang mantap dan mandiri, tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan; 3) dimensi kecerdasan yang membawa kepada kemajuan yaitu cerdas, kreatif, terampil, disiplin, etos kerja, profesional, inovatif, dan produktif. Dimensi ini mencakup tiga proses yaitu analisis, kreativitas, dan praktis.<sup>115</sup>

Pendapat Said Agil tentang proses aktualisasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan, yang menjadi perhatian dalam tulisan ini adalah aktualisasi nilai-nilai Islam dalam dimensi budaya. Salah satu nilai dalam dimensi budaya yang perlu dikembangkan dalam kurikulum pendidikan agama

<sup>114</sup>Sahai Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LkiS, 2007), hlm. 47.

<sup>115</sup>Said Agil Husin al-Munawar, *Aktualisasi Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm. 7-9.

Islam adalah nilai-nilai ajaran Islam dalam aspek kemasyarakatan, yakni bagaimana seharusnya seorang Muslim bersikap terhadap orang lain dalam satu komunitas yang tentu saja sangat beragam. Keragaman tersebut bisa dalam bentuk keragaman etnis, suku bangsa, bahasa, adat istiadat, budaya, dan keragaman keyakinan. Masing-masing aspek dalam keragaman itu memiliki nilai-nilai tersendiri yang mungkin saja berbeda satu sama lain yang bisa saja menimbulkan konflik, sehingga diperlukan satu acuan untuk menghindari agar konflik tidak terjadi.

Pada saat ini perubahan yang tampak dalam kehidupan masyarakat di antaranya arus globalisasi. Globalisasi memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat semisal kehidupan yang tanpa sekat dan dunia global. Kehidupan masyarakat yang tanpa jarak ini menjadikan perbedaan kebudayaan masyarakat satu dengan yang lainnya semakin tampak nyata. Jika perbedaan kebudayaan dan latar belakang ini tidak dikelola dengan baik, dikhawatirkan hal ini akan menyebabkan benturan kebudayaan. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus mampu masuk dalam ruang yang dibutuhkan agar kekhawatiran akan benturan tersebut tidak menjadi kenyataan.

Di antara ikhtiar untuk menuju kehidupan yang harmoni dan terhindar dari konflik-konflik yang diakibatkan oleh perubahan dunia sebagaimana disebut di atas adalah pendidikan yang sadar akan pengembangan nilai-nilai multikultural seperti toleransi, demokratis, moderat, dan penghargaan terhadap perbedaan. Dalam pada itu pendidikan Islam sebagai pendidikan yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai ajaran Islam diharapkan juga merespons nilai-nilai multikultural yang sejatinya juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai dalam aktivitas pendidikannya.

Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu *curir* yang artinya berlari dan *curere* yang berarti tempat berpacu.<sup>116</sup> Sedangkan dalam bahasa Prancis, kurikulum dikaitkan dengan kata *courier* yang artinya *to run*, berlari. Kemudian, istilah itu digunakan untuk sejumlah *courses* atau mata pelajaran yang harus ditempuh guna mencapai suatu gelar atau ijazah.<sup>117</sup>

<sup>116</sup>Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum : Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hlm.183.

<sup>117</sup>S. Nasution, *Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 9.

Adapun menurut Oemar Hamalik, kurikulum adalah program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan (sekolah) bagi peserta didik. Berdasarkan program pendidikan tersebut, peserta didik melakukan berbagai kegiatan belajar, sehingga mampu mendorong perkembangan dan pertumbuhan mereka sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kurikulum tidak terbatas pada sejumlah mata pelajaran, namun meliputi segala sesuatu yang dapat memengaruhi perkembangan peserta didik, seperti bangunan sekolah, alat pelajaran, perlengkapan sekolah, perpustakaan, karyawan tata usaha, gambar-gambar, halaman sekolah, dan lain-lain.

*Curriculum is interpreted to mean all of the organized courses activities, and experience which pupils have under the direction of school, whether in the classroom or not.*<sup>118</sup> Berdasarkan rumusan tersebut, kegiatan kurikuler tidak hanya terbatas di dalam ruangan kelas, tetapi juga mencakup kegiatan di luar kelas. Definisi kurikulum tersebut dapat dijadikan pijakan bagi para pendidik untuk melakukan kegiatan pembelajaran bukan hanya di dalam kelas tetapi juga di luar kelas, misalnya *out bound*, *outdoor class/outing class* dengan diselingi berbagai *games* atau *puzzles*, *study tour*, dan lain-lain.

Pendidikan secara etimologi adalah sistem cara mendidik atau memberikan pengajaran dan peranan yang baik dalam akhlak dan kecerdasan berpikir. Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>119</sup>

Untuk definisi pendidikan agama Islam sebagaimana dikemukakan oleh Muhaimin bahwa pendidikan agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan pelatihan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antara umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.<sup>120</sup>

<sup>118</sup>Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 10.

<sup>119</sup>UU RI. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

<sup>120</sup>Muhaimin dkk, *Strategi Belajar Mengajar dan Penerapannya dalam Pembelajaran PAI*, (Surabaya: CV. Citra Media, 1996), hlm. 1.

Syah Muhammad A. Naquib Al-Atas mengungkapkan bahwa pendidikan agama Islam adalah usaha yang dilakukan pendidik terhadap anak didik untuk pengenalan dan pengakuan tempat-tempat yang benar dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan akan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud dan kepribadian.<sup>121</sup>

Sedangkan Pendidikan Agama Islam menurut Zakiah Daradjat adalah pendidikan melalui ajaran agama Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikannya ia dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah diyakininya secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran agama Islam sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat kelak.<sup>122</sup>

Dari definisi di atas, Pendidikan Agama Islam adalah suatu bimbingan ke arah yang lebih baik terhadap peserta didik yang didasarkan atas nilai-nilai agama Islam sebagai pedoman agar nantinya setelah selesai pendidikannya, peserta didik bisa menerapkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan Pendidikan Agama Islam identik dengan tujuan agama Islam, karena tujuan agama adalah agar manusia memiliki keyakinan yang kuat dan dapat dijadikan sebagai pedoman hidupnya yaitu untuk menumbuhkan pola kepribadian yang bulat dan melalui berbagai proses usaha yang dilakukan. Dengan demikian, tujuan Pendidikan Agama Islam adalah suatu harapan yang diinginkan oleh pendidik Islam itu sendiri.

Zakiah Daradjat<sup>123</sup> dalam *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam* mendefinisikan tujuan Pendidikan Agama Islam sebagai berikut:

Tujuan Pendidikan Agama Islam yaitu membina manusia beragama berarti manusia yang mampu melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam dengan baik dan sempurna, sehingga tercermin pada sikap dan tindakan dalam seluruh kehidupannya, dalam rangka mencapai

<sup>121</sup>Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2005). cet. Ke-3, hlm. 10.

<sup>122</sup>Zakiah Daradjat, *et. al.*, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), cet. Ke-7, hlm. 28.

<sup>123</sup>Zakiah Daradjat, *et. al.*, *Ilmu Pendidikan Islam....*, cet. Ke-7, hlm. 34.

kebahagiaan dan kejayaan dunia dan akhirat. Yang dapat dibina melalui pengajaran agama yang intensif dan efektif.

Tampak bahwa tujuan Pendidikan Agama Islam adalah sebagai usaha untuk mengarahkan dan membimbing manusia dalam hal ini peserta didik agar mereka mampu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt., serta meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan mengenai Agama Islam, sehingga menjadi manusia Muslim, berakhlak mulia dalam kehidupan baik secara pribadi, bermasyarakat, dan berbangsa dan menjadi insan yang beriman hingga mati dalam keadaan Islam.

Pembelajaran terkait dengan bagaimana siswa atau bagaimana membuat siswa dapat belajar lebih mudah dan terdorong oleh kemampuannya sendiri untuk mempelajari apa yang teraktualisasikan dari kurikulum sebagai kebutuhan siswa. Pembelajaran agama Islam berupaya menjabarkan nilai-nilai yang terkandung dalam kurikulum dengan menganalisis tujuan pembelajaran dan karakteristik isi bidang studi PAI yang terkandung dalam kurikulum. Selanjutnya, kegiatan untuk memilih, menetapkan, dan mengembangkan strategi pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan sesuai dengan kondisi yang ada agar kurikulum dapat diaktualisasikan dalam proses pembelajaran sehingga hasil belajar terwujud dalam diri siswa.<sup>124</sup>

Selain hal tersebut, terdapat 3 faktor utama yang saling berpengaruh dalam proses pembelajaran PAI, yaitu kondisi pembelajaran PAI, metode pembelajaran PAI dan hasil pembelajaran PAI. Metode merupakan suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Dalam bahasa Arab metode disebut "*thariqat*". Metode merupakan suatu cara yang harus dilalui untuk menyajikan bahan pelajaran agar mencapai tujuan pembelajaran. Sangat pentingnya penggunaan metode dalam pembelajaran membuat pengajar haruslah pintar-pintar dalam menentukan metode manakah yang sesuai dengan kondisi kelas yang sedang dia ajar. Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain menyebutkan bahwa "kedudukan metode adalah sebagai alat motivasi ekstrinsik, sebagai strategi pengajaran dan juga sebagai alat untuk mencapai tujuan". Penggunaan metode dalam

---

<sup>124</sup>Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Rosdakarya 2008), hlm. 132.

suatu pembelajaran merupakan salah satu cara untuk mencapai sebuah keberhasilan dalam pembelajaran.<sup>125</sup>

Semakin pandai seorang pengajar menentukan metode yang akan digunakan dalam pembelajaran, keberhasilan yang diperoleh dalam mengajar semakin besar pula. Dari sini kita dapat mengetahui seberapa pentingnya suatu metode dalam proses belajar-mengajar dan dalam mencapai sebuah keberhasilan dari proses belajar-mengajar. Dalam perkataan lain, metode pembelajaran agama Islam sampai kini masih bercorak menghafal, mekanis, dan lebih mengutamakan pengkayaan materi. Dilihat dari aspek kemanfaatan, metode semacam ini kurang bisa memberikan manfaat yang besar. Sebab metode-metode tersebut tidak banyak memanfaatkan daya nalar siswa. Metode-metode tersebut terkesan menjelajahi dan memaksakan materi pelajaran dalam waktu singkat yang mungkin tidak sesuai dengan kondisi fisik dan psikis siswa, sehingga proses pembelajaran cenderung kaku, statis, monoton, tidak dialogis, dan bahkan membosankan.<sup>126</sup>

Metode pembelajaran yang demikian ini hanya sekadar mengantarkan anak didik mampu mengetahui dan memahami sebuah konsep, sementara upaya internalisasi nilai belum dapat dilakukan secara baik. Akibatnya, muncul kesenjangan antara pengetahuan dengan praktik kehidupan sehari-hari.<sup>127</sup> Untuk internalisasi nilai dan aktualisasi nilai-nilai tersebut, mengharuskan pola-pola keteladanan dari pihak guru dalam mengajarkan setiap nilai kepada anak didik. Artinya, seorang pendidik tidak hanya memberikan seperangkat konsep tentang suatu nilai atau ajaran, tetapi juga menjadi teladan atas penerapan nilai dan ajaran yang dimaksud.

Dengan demikian, metode pembelajaran agama Islam seharusnya diarahkan pada proses perubahan dari normatif ke praktis dan dari kognitif ke afektif dan psikomotorik. Perubahan arah tersebut dengan tujuan agar wawasan keislaman mampu ditransformasikan secara sistematis dan komprehensif bukan saja dalam kehidupan konsep melainkan juga dalam kehidupan nyata di tengah-tengah masyarakat.

<sup>125</sup>Ahmad Munjin Nasid & Lilik Nur Kholidah, *Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 11.

<sup>126</sup>Ahmad Munjin Nasid & Lilik Nur Kholidah, *(Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam...)* hlm. 31.

<sup>127</sup>Ahmad Munjin Nasid & Lilik Nur Kholidah, *(Metode dan Teknik Pembelajaran....)*, hlm. 34.

Terdapat dua istilah yang sering digunakan dalam dunia pendidikan yaitu "pedagogi" dan "pedagogik". Pedagogi berarti pendidikan, sedang pedagogik berarti ilmu pendidikan. Secara sederhana, pendidikan adalah usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi bawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Selain itu, pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia muda. Pengangkatan manusia ke taraf insani itulah yang disebut mendidik. Hal yang mengandung pengertian bahwa melalui pendidikan manusia akan menyadari siapa dirinya dan hubungannya dengan makhluk lain yang berada di sekitarnya. Dalam pengertian yang luas pendidikan sama dengan hidup, dalam arti segala situasi dalam hidup yang memengaruhi pertumbuhan seseorang.<sup>128</sup>

Pendidikan juga dapat diartikan sebagai keseluruhan pengalaman belajar setiap orang sepanjang hidup. Sehingga pendidikan tidak berlangsung dalam batas usia tertentu tetapi sepanjang hidup manusia. Sedang pendidikan multikultural secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan kultural. Pendidikan secara sederhana dan umum, bermakna sebagai usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi bawaan, baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Multikultural diartikan sebagai keragaman kebudayaan, aneka kesopanan.

Secara terminologi, pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan. Secara sederhana pendidikan multikultural dapat didefinisikan sebagai pendidikan tentang keragaman kebudayaan dalam merespons perubahan demografis dan kultur lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan (global). Pendidikan multikultural dapat juga diartikan proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran (agama). Pengertian seperti ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam pendidikan, karena pendidikan dipahami sebagai proses tanpa akhir atau proses sepanjang hayat. Pendidikan juga dipahami sebagai proses memanusiakan manusia.<sup>129</sup>

<sup>128</sup>Abdullah Idi, 'Bahan Kuliah...', *Op. Cit.*, 2019.

<sup>129</sup>Abdullah Idi, 'Bahan Kuliah...', *Ibid.*, 2019.

Dengan demikian, pendidikan multikultural menghendaki penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap harkat dan martabat manusia. Pendidikan multikultural dapat dirumuskan sebagai wujud kesadaran tentang keanekaragaman kultural, hak-hak asasi manusia, serta pengurangan atau penghapusan berbagai jenis prasangka atau *prejudice* untuk membangun suatu kehidupan masyarakat yang adil dan maju. Menurut Soni Nieto, pendidikan multikultural adalah proses pendidikan yang komprehensif dan mendasar bagi semua peserta didik. Jenis pendidikan ini menentang bentuk rasisme dan segala bentuk diskriminasi di sekolah, masyarakat dengan menerima serta mengafirmasi pluralis (etnik, ras, bahasa, agama, ekonomi, gender, dan lain sebagainya) yang terefleksi di antara peserta didik, komunitas mereka, dan guru-guru. Pendidikan multikultural ini haruslah melekat dalam kurikulum dan strategi pengajaran, termasuk juga dalam setiap interaksi yang dilakukan di antara para guru, murid, dan keluarga serta keseluruhan suasana belajar-mengajar. Karena jenis pendidikan ini merupakan pedagogis kritis, refleksi, dan menjadi basis aksi perubahan dalam masyarakat, pendidikan multikultural mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi dalam keadilan sosial.<sup>130</sup>

Jika kita lihat dalam pelaksanaannya dalam pendidikan multikultural ini terdapat lima dimensi: *Pertama*, adanya integrasi pendidikan dalam kurikulum (*content integration*) yang di dalamnya melibatkan keragaman dalam satu kultur pendidikan yang tujuan utamanya adalah menghapus prasangka. *Kedua*, konstruksi ilmu pengetahuan (*knowledge construction*) yang mewujudkan dengan mengetahui dan memahami secara komprehensif keragaman yang ada. *Ketiga*, pengurangan prasangka (*prejudice reduction*) yang lahir dari interaksi antarkeragaman dalam kultur pendidikan. *Keempat*, pedagogik kesetaraan manusia (*equity pedagogy*) yang memberikan ruang dan kesempatan yang sama kepada setiap elemen yang sama. *Kelima*, pemberdayaan kebudayaan sekolah (*empowering school culture*). Hal yang lima ini adalah tujuan dari pendidikan multikultural yaitu agar sekolah menjadi elemen pengentas sosial (transformasi sosial dari struktur masyarakat yang timpang kepada struktur yang berkeadilan).

<sup>130</sup>Abdullah Idi, 'Bahan Kuliah....', *Ibid.*, 2019.

Selain itu, terdapat alasan lain yang melatarbelakangi adanya pendidikan multikultural adalah keberadaan masyarakat dengan individu-individu yang berlatar belakang bahasa dan kebangsaan (*nationality*), suku (*race or ethnicity*), agama (*religion*), gender, dan kelas sosial (*social class*). Keragaman latar belakang individu dalam masyarakat berimplikasi pada keragaman latar belakang peserta didik dalam lembaga pendidikan.<sup>131</sup>

Secara etimologi istilah pendidikan multikultural terdiri dari dua term, yaitu pendidikan dan multikultural. Pendidikan berarti proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan melalui pengajaran, pelatihan, proses, dan cara mendidik. Dan multikultural diartikan sebagai keragaman kebudayaan, aneka kesopanan. Sedangkan secara terminologi, pendidikan multikultural berarti proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran (agama). Pengertian seperti ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam pendidikan, karena pendidikan dipahami sebagai proses tanpa akhir atau proses sepanjang hayat.

Dengan demikian, pendidikan multikultural menghendaki penghormatan sikap, dan cara pandang multikultur dapat dicapai, pendidikanlah salah satu wadahnya. Pendidikan dengan wawasan multikultural adalah konsep, ide, atau falsafah sebagai suatu rangkaian kepercayaan (*set of believe*) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis di dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan-kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara.<sup>132</sup> Jenis pendidikan ini menentang bentuk rasisme dan segala bentuk diskriminasi di sekolah, masyarakat dengan menerima serta memahami pluralitas (etnik, ras, bahasa, agama, ekonomi, gender, dan lain sebagainya) yang terefleksikan di antara peserta didik, komunitas mereka, dan guru-guru. Pendidikan multikultural ini harus melekat dalam kurikulum dan strategi pengajaran, termasuk juga dalam setiap interaksi yang dilakukan di antara para guru, murid, dan keluarga serta keseluruhan suasana belajar mengajar.<sup>133</sup>

<sup>131</sup>Abdullah Idi, 'Bahan Kuliah....', *Ibid.*, 2019.

<sup>132</sup>James A. Bank. *Handbook of Research on Multikultural Education* (<http://www.educationworld.com>, diakses tanggal 7 Juni 2015). Kasinyo, 29.

<sup>133</sup>Azyumardi Azra, "Identitas dan Krisis Budaya, Membangun Multikulturalisme Indonesia" 2007. (<http://www.kongresbud.budpar.go.id/58%20azyumardi%20azra>).

Pendidikan multikultural dapat dimaknai sebagai usaha-usaha edukatif yang diarahkan untuk dapat menanamkan nilai-nilai kebersamaan kepada peserta didik dalam lingkungan yang berbeda baik ras, etnik, agama, budaya, nilai-nilai, dan ideologi sehingga memiliki kemampuan untuk dapat hidup bersama dalam perbedaan dan memiliki kesadaran untuk hidup berdampingan secara damai. Pendidikan multikultural merupakan sebuah proses pemerolehan pengetahuan untuk dapat mengontrol orang lain demi sebuah kehidupan (*survival*). Pendidikan multikultural sebenarnya merupakan sikap peduli dan mau mengerti (*difference*) atau *politics of recognition*, politik pengakuan terhadap orang-orang kelompok minoritas. Secara operasional, pendidikan multikultural pada dasarnya adalah program pendidikan yang menyediakan sumber belajar yang jamak bagi pemelajar (*multiple learning environments*) dan yang sesuai dengan kebutuhan akademik maupun sosial anak didik. Anderson dan Cusher mengatakan bahwa multikultural adalah pendidikan keragaman kebudayaan. Definisi ini mengandung unsur yang lebih luas, meskipun demikian posisi kebudayaan masih sama yakni mencakup keragaman kebudayaan menjadi sesuatu yang dipelajari sebagai objek studi. Dengan kata lain, keragaman kebudayaan menjadi materi pelajaran yang harus diperhatikan, khususnya bagi rencana pengembangan kurikulum.<sup>134</sup>

Pendapat Kamanto Sunarto, "Pendidikan multikultural biasa diartikan sebagai pendidikan keragaman budaya dalam masyarakat, dan terkadang juga diartikan sebagai pendidikan yang menawarkan ragam model untuk keragaman budaya dalam masyarakat, dan terkadang juga diartikan sebagai pendidikan untuk membina sikap siswa agar menghargai keragaman budaya masyarakat".<sup>135</sup>

Calarry Sada dengan mengutip tulisan Sleeter dan Grant, menjelaskan bahwa pendidikan multikultural memiliki empat makna (model), yakni, (1) pengajaran tentang keragaman budaya sebuah pendekatan asimilasi kultural; (2) pengajaran tentang berbagai pendekatan dalam tata hubungan sosial; (3) pengajaran untuk memajukan pluralisme tanpa membedakan strata sosial dalam

<sup>134</sup>Abdullah Idi, 'Bahan Kuliah...', *Op. Cit.*, 2019.

<sup>135</sup>Kamanto Sunarto, *Multicultural Education in Schools, Challenges in its Implementation*, dalam *Jurnal Multicultural Education in Indonesia and South East Asia*, edisi I, tahun 2004, 47.

masyarakat; dan (4) pengajaran tentang refleksi keragaman untuk meningkatkan pluralisme dan kesamaan.<sup>136</sup>

Indonesia memiliki falsafah berbeda suku, etnik, bahasa, agama, dan budaya, tapi memiliki satu tujuan, yakni terwujudnya bangsa Indonesia yang kuat, kokoh, memiliki identitas yang kuat, dihargai oleh bangsa lain, sehingga tercapai cita-cita ideal dari pendiri bangsa sebagai bangsa yang maju, adil, makmur, dan sejahtera. Untuk itu, seluruh komponen bangsa tanpa membedakan etnik, ras, agama, dan budaya, seluruhnya harus bersatu pada, membangun kekuatan di seluruh sektor, sehingga tercapai kemakmuran bersama, memiliki harga diri bangsa yang tinggi, dan dihargai oleh bangsa-bangsa lain di dunia.

Dalam konteks ini pendidikan multikultural melihat masyarakat secara lebih luas. Berdasarkan pandangan dasar bahwa sikap "indifference" dan "non-recognition" tidak hanya berakar dari ketimpangan struktur sosial tetapi paradigma pendidikan multikultural mencakup subjek-subjek mengenai ketidakadilan, kemiskinan, penindasan, keterbelakangan kelompok-kelompok minoritas dalam berbagai bidang sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Paradigma seperti ini akan mendorong tumbuhnya kajian-kajian tentang 'ethnic studies' untuk kemudian menemukan tempatnya dalam kurikulum pendidikan sejak dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Dengan demikian, pendidikan multikultural dalam konteks ini akan diartikan sebagai sebuah proses pendidikan yang memberi peluang sama pada seluruh anak bangsa tanpa membedakan perlakuan karena perbedaan etnik, budaya, dan agama, yang memberikan penghargaan terhadap keragaman, dan yang memberikan hak-hak sama bagi etnik minoritas, dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan, identitas nasional dan citra bangsa di mata dunia internasional. Inilah berbagai materi yang senantiasa diperhatikan dalam pembinaan bangsa agar tetap kuat dan terus berkembang, bahkan seluruh budaya diberi kesempatan untuk membina dan mengembangkannya.<sup>137</sup>

Jika kita analisis bahwasanya wacana pendidikan multikultural dibahas sebagai satu dinamika pendidikan, sebagian orang mempunyai

<sup>136</sup>Clarry Sada, *Multicultural Education in Kalimantan Barat; an Overview*, dalam *Jurnal Multicultural Education in Indonesia and South East Asia*, Edisi I, Tahun 2004, *Ibid.*, hlm. 85.

<sup>137</sup>Clarry Sada, 'Multicultural Education in Kalimantan Barat....', *Ibid.*, hlm. 85.

harapan dan beranggapan bahwa pendidikan multikultural mampu menjadi jawaban dari kemelut dan ruwetnya budaya ciptaan dunia globalisasi, tapi ada pula yang beranggapan bahwa pendidikan ini justru akan memecah belah keragaman, bahkan memandang remeh serta tidak penting karena menganggap sumber daya pendidikan multikultural tidak cukup tersedia. Semua anggapan-anggapan tersebut muncul karena pemaknaan pendidikan multikultural yang sempit. Pendidikan multikultural salah dipahami sebagai pendidikan yang hanya memasukkan isu-isu etnik atau rasial. Padahal yang harus benar-benar dipahami adalah pendidikan multikultural yang mengedepankan isu-isu lainnya seperti gender, keragaman sosial-ekonomi, perbedaan agama, latar belakang, dan lain sebagainya. Setiap murid di sekolah datang dengan latar belakang yang berbeda, memiliki kesempatan yang sama dalam sekolah, pluralisme kultural, alternatif gaya hidup, dan penghargaan atas perbedaan serta dukungan terhadap keadilan kekuasaan di antara semua kelompok.<sup>138</sup>

Menumbuhkan kesadaran akan keberagaman dalam beragama bukanlah hal mudah, mengingat pemahaman keberagaman umat tengah diuji dengan dunia informasi yang memberi kemudahan pengaksesan dan nyaris tanpa batas. Agama yang tidak dipahami secara menyeluruh hanya secara parsial atau setengah-setengah, pada akhirnya hanya menimbulkan perpecahan antar umat, bahkan yang lebih parah lagi dapat menimbulkan konflik antar umat baik seagama atau antar agama, terbentuknya agama-agama baru, aliran sesat, serta kekerasan atas nama agama.<sup>139</sup>

Berbagai pengertian kurikulum yang dikemukakan oleh para pakar, antara pakar yang satu dengan yang lain memiliki karakteristik tersendiri dalam menerjemahkan kurikulum. Dari perbedaan pemikiran dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan itu terdapat pada bagaimana memandang kurikulum secara sempit atau secara luas. Secara sempit kurikulum diartikan sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik mulai dari masuk sekolah sampai selesai, untuk mendapatkan ijazah. Diartikan secara luas, kurikulum

<sup>138</sup>Zakiyuddin Baidhawi, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005), hlm. 75.

<sup>139</sup>Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 214.

tidak hanya sebatas mata pelajaran yang harus diikuti oleh siswa selama mengikuti pendidikan, tetapi meliputi segala usaha sekolah yang dapat memengaruhi belajar siswa.

Berbagai tafsiran tentang kurikulum dapat kita tinjau dari segi lain, sehingga kita peroleh sebagai berikut: a) kurikulum dapat dilihat sebagai produk, yakni sebagai hasil karya para pengembang kurikulum, biasanya dalam suatu panitia. Hasilnya dituangkan dalam bentuk buku pedoman kurikulum, yang misalnya berisi sejumlah mata pelajaran yang harus diajarkan; b) kurikulum dapat pula dipandang sebagai program, yakni alat yang dilakukan oleh sekolah untuk mencapai tujuannya. Ini dapat berupa mengajarkan berbagai mata pelajaran tetapi dapat juga meliputi segala kegiatan yang dianggap dapat memengaruhi perkembangan siswa misalnya perkumpulan sekolah, pertandingan, pramuka, warung sekolah, dan lain-lain; c) kurikulum dapat pula dipandang sebagai hal-hal yang diharapkan akan dipelajari siswa, yakni pengetahuan, sikap, keterampilan tertentu. Apa yang diharapkan akan dipelajari tidak selalu sama dengan apa yang benar-benar dipelajari; dan d) kurikulum sebagai pengalaman siswa. Ketiga pandangan di atas berkenaan dengan perencanaan kurikulum sedangkan pandangan ini mengenai apa yang secara aktual menjadi kenyataan pada setiap siswa.

Kurikulum berbasis multikultural juga perlu memasukan materi dan bahan ajar yang berorientasi pada penghargaan kepada orang lain dan kelompok lain. Demi terwujudnya tujuan kurikulum tersebut, ada empat hal yang harus diperhatikan oleh guru, yaitu: (1) posisi anak didik sebagai subjek dalam belajar; (2) cara belajar anak didik yang ditentukan oleh latar belakang budayanya; (3) lingkungan budaya mayoritas masyarakat dan pribadi anak didik adalah *entry behavior* kultur anak didik; (4) lingkungan budaya anak didik adalah sumber belajar. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang memberikan penekanan terhadap proses penanaman cara hidup yang saling menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat dengan tingkat pluralitas yang tinggi. Dengan pendidikan multikultural diharapkan lahir kesadaran dan pemahaman secara luas yang diwujudkan dalam sikap yang toleran. Para ahli kurikulum, seperti Hilda Taba, menyadari bahwa kebudayaan adalah salah satu landasan dalam pengembangan kurikulum.<sup>140</sup>

---

<sup>140</sup>Abdullah Idi, 'Bahan Kuliah....', *Op. Cit.*, 2019.

Pengembangan kurikulum yang menggunakan pendekatan multikultural haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: a) keragaman budaya menjadi dasar dalam menentukan filsafat, teori model, dan hubungan sekolah dengan lingkungan sosial-budaya; b) keragaman budaya menjadi dasar dalam mengembangkan berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, konten, proses, dan evaluasi; c) budaya di lingkungan unit pendidikan adalah sumber belajar dan objek studi yang harus dijadikan bagian dari kegiatan belajar anak didik; dan d) kurikulum berperan sebagai media dalam mengembangkan kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional.<sup>141</sup>

Teori kurikulum tentang konten (*curriculum content*) haruslah berubah dari yang mengartikan konten sebagai aspek substantif yang berisikan fakta, teori, dan generalisasi kepada pengertian yang mencakup pula nilai, moral, prosedur, proses, dan keterampilan yang harus dimiliki anak didik. Teori yang digunakan dalam kurikulum masa depan yang memperhatikan keragaman sosial, budaya, ekonomi, dan politik tidak lagi hanya mendasarkan diri pada teori psikologi belajar yang bersifat individualistik dan menempatkan anak didik dalam suatu kondisi *value free*, tetapi harus pula didasarkan pada teori belajar yang menempatkan anak didik sebagai makhluk sosial, budaya, politik, dan hidup sebagai anggota aktif masyarakat, bangsa, dan dunia.

Proses belajar yang dikembangkan untuk anak didik juga harus berdasarkan proses yang dimiliki tingkat *isomorphism* yang tinggi dengan kenyataan sosial. Artinya, proses belajar yang mengandalkan anak didik belajar secara individualistis dan bersaing secara kompetitif-individualistis harus ditinggalkan dan diganti dengan cara belajar berkelompok dan bersaing secara kelompok dalam suatu situasi positif. Perbedaan antar individu dapat dikembangkan sebagai suatu kekuatan kelompok dan anak didik terbiasa hidup dengan berbagai keragaman budaya, sosial, intelektualitas, ekonomi, dan aspirasi politik.

Evaluasi yang digunakan diperlukan meliputi keseluruhan aspek kemampuan dan kepribadian peserta didik, sesuai dengan tujuan, dan konten yang dikembangkan. Alat evaluasi yang digunakan haruslah beragam, sesuai dengan sifat tujuan dan informasi yang ingin dikumpulkan, dengan menerapkan Penilaian Berbasis Kelas (PKB)

<sup>141</sup>Abdullah Idi, 'Bahan Kuliah....', *Ibid.*, 2019.

dengan berbagai ragamnya seperti portofolio, catatan, observasi, wawancara, *performance tes*, proyek, dan produk.

Dalam kaitannya dengan penyusunan kurikulum pendidikan multikultural, ada beberapa hal yang harus diperhatikan: *Pertama*, penyusunan kurikulum harus didasarkan kepada keimanan pada Tuhan Yang Maha Esa, norma-norma, atau nilai-nilai absolut yang diambil dari agama-agama besar di dunia dan hubungan integral antara Tuhan, manusia, dan alam. *Kedua*, karena ilmu pengetahuan dari Tuhan, manusia tidak dapat disebut sebagai pembuat ilmu pengetahuan. Namun, karena manusia dapat dengan mudahnya menemukan aspek-aspek yang terkandung di dunia ini, maka nilai-nilai kemanusiaan dapat dijadikan sebagai inspirasi untuk menyeleksi, menginvestigasi, dan menikmati adanya sebuah kebenaran. *Ketiga*, peserta didik diharuskan mengetahui hierarki antara ilmu pengetahuan dan sumber nilai. Ilmu pengetahuan diperoleh melalui sebuah pengalaman yang harus tunduk terhadap pengetahuan rasional, dan pengetahuan rasional harus tunduk terhadap norma-norma agama yang datang dari Tuhan. *Keempat*, keimanan dan nilai-nilai harus diakui sebagai dasar kebudayaan manusia. Oleh sebab itu, keduanya tidak boleh dipisahkan dalam proses belajar mengajar. Ilmu pengetahuan tidak harus ditunjukkan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan pandangan agama. Dengan demikian, dalam pendidikan hal itu harus digunakan untuk mendorong nilai-nilai yang baik. *Kelima*, manusia tidak dapat mengetahui kebenaran *absolute*, tetapi suatu kebenaran dapat direalisasikan pada level yang berbeda-beda melalui perasaan, pemikiran, intuisi, dan intelektual. Keempat bentuk ini harus bekerja secara harmoni dan terintegrasikan ke dalam sebuah sistem pendidikan yang komprehensif. *Keenam*, peserta didik harus didorong untuk mengetahui prinsip-prinsip *unity and diversity* dan menyadari adanya dasar-dasar keamanan yang menembus dunia biologis dan psikis. Ini sebuah refleksi terhadap kesatuan prinsip-prinsip pencapaian dunia. Dunia adalah sebuah sistem yang mempersatukan dan terdapat suatu hubungan integral di antara bagian-bagian yang berbeda-beda.<sup>142</sup>

Keberadaan kurikulum sebagai sesuatu yang penting dalam proses pendidikan mengarahkan kita untuk bagaimana dapat membentuk

<sup>142</sup>Abdullah Idi, 'Bahan Kuliah...', *Ibid.*, 2019.

kurikulum yang kokoh, stabil, dan tepat bagi masyarakat pendidikan. Yang dibutuhkan bagi kurikulum yang kokoh dan stabil tersebut adalah dasar atau fondasi yang kokoh juga. Semakin kokoh fondasi dan dasar itu, semakin kuat dan stabil pula apa yang dibangunnya. Kekuatan pada dasar dan fondasi kurikulum yang diinginkan oleh elemen pendidikan mengarahkan kita untuk memahami akan asas-asas kurikulum yang harus dibangun dalam membentuk kurikulum.

Landasan kurikulum adalah dasar pemikiran yang dijadikan sebagai fondasi di mana kurikulum dibangun dan dibentuk di atasnya. Urgensi untuk membentuk Pendidikan Islam Multikultural (PIM) dalam dunia global yang mempersempit jarak dan waktu sehingga bentuk kebudayaan masing-masing kelompok dan negara semakin nyata, maka tidak ada kata yang pas selain membumikan pendidikan Islam multikultural untuk peradaban dunia yang harmoni dan damai. Secara konseptual, membangun asas kurikulum pendidikan Islam multikultural atau mata pelajaran PAI berbasis multikultural merupakan keniscayaan.

Landasan-landasan yang diungkapkan di atas sebagai *guidence* atau penunjuk arah terhadap pengembangan kurikulum Pendidikan Islam Multikultural. Tugas praktisi pendidikan Islam adalah perlunya mengokohkan asas atau landasan tersebut sehingga desain kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) berbasis multikultural diharapkan dapat berdiri tegak dan tidak mudah terombang-ambing dikarenakan fondasi, landasan, atau asas-asas kurikulum PIM atau mata pelajaran PAI berbasis multikultural dibangun secara kokoh. Jadi, landasan atau asas kurikulum merupakan dasar pemikiran yang dijadikan sebagai fondasi di mana kurikulum dibangun dan dibentuk di atasnya. Urgensi untuk membentuk pendidikan Islam multikultural dalam dunia global yang mempersempit jarak dan waktu sehingga bentuk kebudayaan masing-masing kelompok dan negara semakin nyata, maka tidak ada kata yang pas selain membumikan pendidikan Islam multikultural untuk peradaban dunia yang harmoni dan damai.

Baidhaw<sup>143</sup> mengatakan bahwa strategi pengembangan kurikulum PAI berbasis multikultural berorientasi pada materi, siswa, dan sosial. *Pertama*, berbasis materi, di mana strategi yang berbasis pada

<sup>143</sup>Zulhammi, 'Strategi Pengembangan Pendidikan Islam Berbasis Multikultural....', *Ibid.*, hlm. 779.

materi akan memperkaya kurikulum yang sudah berjalan. Pengayaan tersebut dapat dilihat pada bagaimana pendidikan multikultural dapat dikembangkan melalui sejumlah pendekatan, antara lain: *pendekatan kontribusi*, *pendekatan aditif*, *pendekatan transformatif*, dan *pendekatan aksi sosial*. Pendekatan *kontributif* dilakukan dengan cara menyeleksi buku-buku teks wajib atau anjuran. Dalam konteks pendidikan agama, tujuan utama pendekatan kontribusi terhadap muatan kurikulum yakni dengan memasukkan materi-materi tentang keragaman kelompok-kelompok keagamaan, termasuk kelompok kultural dan etnik dalam pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang keragaman kelompok tersebut. Pendekatan ini menambahkan muatan multikultural pada kurikulum standar. Pendekatan *aditif*, di mana pendekatan agama Islam memanfaatkan muatan-muatan khas multikultural dalam memperkaya bahan ajar, konsep-konsep tentang harmoni dan kehidupan bersama antarumat beragama. Muatan-muatan yang telah baku, dan seterusnya.<sup>144</sup>

---

<sup>144</sup>Zulhammi, 'Strategi Pengembangan Pendidikan Islam....', *Ibid.*, hlm. 779.

## PENUTUP

### Pendidikan Islam Berbasis Multikultural dan Penguatan Moderasi Beragama

Secara singkat, berdasarkan pembahasan bab terdahulu, pada bagian penutup ini diungkapkan sebagai-berikut.

*Pertama*, eksistensi pendidikan multikultural diharapkan dapat merespons beragam fenomena kemungkinan adanya potensi konflik sosial, baik bertalian dengan etnis, sosial budaya, dan agama yang kerap muncul di tengah masyarakat multikultural, seperti Indonesia. Konflik yang muncul dapat berkembang menjadi skala besar apabila tidak mendapat perhatian saksama dari berbagai elemen bangsa. Saat ini sudah selayaknya pendidikan memberikan kesadaran (*consciousness*) kepada masyarakat bahwa konflik bukan sesuatu yang baik dibudayakan. Pendidikan idealnya menjadi *solution* terhadap beragam masalah berbangsa dengan perbedaan adanya budaya, agama, etnis, dan lainnya. Agama selalu diasosiasikan dengan ajaran yang penuh dengan nilai kedamaian dan keselamatan serta sakral. Agama juga bisa menjadi pemicu munculnya suatu konflik sosial. Sepanjang sejarah, agama memiliki implikasi terhadap munculnya *violence* dan *war*. Agama karenanya juga dapat dan menjadi pemicu terjadinya tindakan kekerasan.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Judy Carter dan Gordon S. Smith, *Religious Peacebuilding: From Potential to Action*, within Harold Coward and Gordon S. Smith (Eds), *Religion and Peace Building*, Albany: State University of New York Press, 2004, page 279.

Suatu hal penting adanya suatu penyesuaian antara pendidikan di sekolah-sekolah, keluarga, dan masyarakat yang akan terus berupaya melahirkan nilai-nilai ideal dalam menjalani kehidupan.<sup>2</sup> Hal itu relevan dengan konsep pendidikan Islam, yang menyesuaikan pendidikan dalam semua aspek, termasuk dalam memandang masyarakat multikultural. Jika munculnya beberapa kasus konflik dalam masyarakat, hal ini menunjukkan tentang perlunya pendidikan multikultural bagi para generasi penerus agar terciptanya suasana nyaman, damai, saling menghargai, sehingga pendidikan Islam dapat berperan sebagai media transformasi sosial, budaya, dan multikulturalisme.<sup>3</sup> Islam sebagai agama *rahmatan lil'alam* idealnya mampu memberikan solusi terhadap kemungkinan adanya beragam perbedaan.

Pendidikan Islam berbasis multikultural memiliki nilai-nilai yang komprehensif. Antara lain, adanya nilai *al-Musyawah* (musyawarah); *al-Musawah* (persamaan); dan *al-'Adl* (keadilan); *Hablum min an-Nas* (hubungan sesama manusia); *al-Ta'aruf* (saling mengenal); *al-Ta'awun* (saling tolong menolong); *al-Salam* (perdamaian); *Al-Ta'addudiyat* (kemajemukan); *al-Tanawwu'* (keragaman); *al-Tasamuh* (toleransi); *al-Rahmah* (kasih sayang); *al-'Afw* (memafkan); dan *al-Ihsan* (berbuat kebaikan dan keindahan).

Pendidikan Islam berbasis multikultural merupakan upaya kesediaan dan kesadaran untuk mengakui, menerima, dan menghargai keragaman baik dalam bentuk ide, sikap, dan perilaku yang memiliki perhatian kuat terhadap pengembangan sikap-sikap sosial yang positif dan menghindari sikap sosial yang cenderung rasial, stereotipe (mengejek objek tertentu) dan berprasangka buruk kepada orang atau kelompok lain berbeda etnis, ras, bahasa, budaya, dan agama. Pendidikan Islam berbasis multikultural pada hakikatnya menempatkan multikulturalisme sebagai salah satu visi pendidikan dengan karakter utama yang bersifat inklusif, egaliter, dan humanis dengan kokoh pada nilai-nilai spiritual dan ketuhanan.

*Kedua*, karakteristik pendidikan Islam berbasis multikultural. Dalam memahami definisi pendidikan Islam, disampaikan beberapa pendapat

<sup>2</sup>Abdullah Idi, *Sosiologi Pendidikan; Individu, Masyarakat dan Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 59.

<sup>3</sup>Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 5.

ahli, di mana dikatakan Hasan Langgulung<sup>4</sup>, mencakup beberapa pengertian, yaitu *at-Tarbiyah ad-Diniyyah* (pendidikan keagamaan), *Ta'lim ad-Din* (pengajaran agama), *at-Ta'lim ad-Din* (pengajaran keagamaan), *at-ta'lim al-Islami* (pengajaran keislaman), *Tarbiyah al-Muslimin* (pendidikan orang-orang Muslim), *at-Tarbiyah fi al-Islam* (pendidikan dalam Islam), *at-Tarbiyah 'inda al-Muslimin* (pendidikan di kalangan orang-orang Islam), dan *at-Tarbiyah al-Islamiyyah* (pendidikan islami).

Ketiga, landasan konseptual Pendidikan Islam berbasis multikultural dapat dilihat dari beberapa ayat Al-Qur'an dan al-Hadis tentang multikultural. Dalam Al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 13, misalnya, Allah Swt. menjelaskan tentang manusia diciptakan dalam kondisi berbeda jenis kelamin, berbeda suku bangsa, seperti tercantum dalam firman-Nya berikut.

Artinya: Hai manusia! Kami ciptakan kamu dari satu pasang laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu beberapa bangsa dan suku bangsa, supaya kamu saling mengenal bukan supaya saling membenci, bermusuhan. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu dalam pandangan Allah ialah yang paling bertakwa. Allah Maha Tahu, Maha Mengetahui (QS Al-Hujurat/49:13).<sup>5</sup>

Ayat tersebut dimulai dengan kata "*Ya Ayyuha an-Nas*" (Hai Manusia), kata *An-Nas* berarti manusia sebagai makhluk sosial, sehingga kata manusia menunjukkan panggilan secara universal, yang diciptakan dalam kondisi multisuku, bangsa, budaya, adat istiadat, dan agama. Keragaman itu merupakan sarana untuk kemajuan peradaban. Kalau seseorang hanya lahir di suku tertentu, tidak pernah mengenal budaya orang lain, tidak pernah bergaul dengan berbagai macam anak bangsa, dan hanya tahunya orang di sekitarnya, sikap dan perilakunya tidak berkembang.

Keragaman tidak dimaksudkan untuk saling menyorot, memaksa, atau membunuh. Al-Qur'an mengenalkan konsep yang luar biasa, di mana keragaman dimaksudkan untuk saling mengenal satu sama

<sup>4</sup>Hasan Langgulung, "Pendidikan Islam, Demokrasi, dan Masa Depan Bangsa", *Jurnal Kajian Islam Ma'rifah*, Volume 3/Tahun 1997. Lihat pula dalam kutipan: (Muhaimin, et. Al-Qur'an, *Paradigama Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cetakan ke- 4, 2008, hlm. 36).

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, 2017, hlm. 517.

lain. Dengan saling kenal-mengenal perbedaan, seseorang bisa belajar membangun peradaban. Dengan saling memahami adanya perbedaan antara manusia, melahirkan sikap lebih toleransi dan seseorang mendapat kesempatan belajar satu sama lain. Dalam suatu penelitian di Australia menyebutkan bahwa mereka yang anti terhadap Muslim ternyata mereka tidak pernah bergaul akrab dengan orang Islam. Mereka yang mengenal orang Islam di lingkungan tinggalnya, di sekolah atau di tempat kerja cenderung lebih toleran terhadap perbedaan.<sup>6</sup>

Sayyid Quthb<sup>7</sup> dalam tafsir *fi Zhilalil Qur'an* menjelaskan: "Hai manusia! Hai orang-orang yang berbeda ras dan warna kulitnya, yang berbeda-beda suku dan kabilahnya, sesungguhnya kalian berasal dari pokok yang satu. Maka, janganlah berikhtilaf, jangan lagi bercerai-berai, janganlah bermusuhan dan janganlah centang-perentang". Tujuannya bukan untuk saling menjegal dan bermusuhan, tetapi supaya harmonis dan saling mengenal. Perbedaan bahasa dan warna kulit, perbedaan watak dan akhlak, serta perbedaan bakat dan potensi merupakan keragaman yang tidak perlu menimbulkan pertentangan dan perselisihan. Namun justru untuk menimbulkan kerja sama supaya bangkit dalam memikul segala tugas dan memenuhi segala kebutuhan. Warna kulit, ras, bahasa, negara, dan lainnya tidak ada dalam pertimbangan Allah. Di sana hanya ada satu timbangan untuk menguji seluruh nilai dan mengetahui keutamaan manusia.

Ayat lain menjelaskan tentang perbedaan bahasa dan warna kulit, sebagaimana dijelaskan dalam Surah Ar-Rum Ayat 22.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui".

Ayat di atas menjelaskan bahwa perbedaan merupakan keniscayaan, dan akan memberikan makna yang tinggi bagi mereka yang mengetahui atau berilmu. Al-Qur'an demikian menghargai bahasa

---

<sup>6</sup>Nadirsyah Hosen, (Rais Syuriyah PCI Nahdlatul Ulama Australia - New Zealand dan Dosen Senior Monash Law School), "Tafsir al-Hujurat Ayat 13: Tak Kenal Maka Tak Sayang". Lihat <http://www.nu.or.id/post/read/74936/tafsir-al-hujurat-ayat-13-tak-kenal-maka-tak-sayang>.

<sup>7</sup>Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 421.

dan keragamannya, bahkan mengakui penggunaan bahasa lisan yang beragam. Perlu ditandaskan bahwa dalam konteks pembicaraan tentang paham kebangsaan, Al-Qur'an sangat menghargai bahasa. Bahasa pikiran dan bahasa perasaan jauh lebih penting ketimbang bahasa lisan, sekalipun bukan berarti mengabaikan bahasa lisan, karena ditekankan bahwa bahasa lisan adalah jembatan perasaan. Atas dasar semua itu, tampak bahwa bahasa saat dijadikan sebagai 'perekat' dan 'kesatuan umat', dapat diakui oleh Al-Qur'an, bahkan inklusif dalam ajarannya. Bahasanya dan keragamannya merupakan salah satu bukti keesaan dan kebesaran Allah Swt.<sup>8</sup> Sama halnya perbedaan bahasa yang diucapkan dengan mulut yang terdiri atas unsur yang sama: bibir, gigi, dan lidah; dan perbedaan warna kulit meski manusia berasal dari sumber yang satu. Sungguh, hal demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda eksistensi dan keesaan-Nya bagi orang-orang yang mengetahui atau berilmu.

Ayat lain yang menunjukkan tentang sikap toleransi atau mengakui keberadaan agama lain, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Kafirun ayat 1-6 berikut.

Artinya: Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah, untukmu agamamu, dan untukku agamaku".

Ayat ini secara tegas menjelaskan tentang adanya agama lain selain dianut oleh umat Islam, yang harus saling menghargai dan bertoleransi, tidak perlu dicampur aduk antara agama satu dengan lainnya, bahkan di akhir ayat umat Islam bersikap mengakui dan menghargai agama yang berbeda dengan kalimat "untukmu agamamu, dan untukku agamaku". Kalimat ini memberikan gambaran perbedaan agama merupakan keniscayaan, atau dengan kata lain, orang yang beragama Islam akan melaksanakan ajaran agama Islam secara baik, dan memberikan hak kepada agama lain untuk melaksanakan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinannya itu, serta tidak perlu saling mengganggu, mencela, dan

---

<sup>8</sup>Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan dan Keresusian Al-Qur'an*, hlm. 342.

saling menzalimi satu sama lainnya. Hal ini juga dikuatkan dengan QS. Surah al-Kahfi ayat 29 berikut.

Artinya: Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir. Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka".

Ayat tersebut memberikan gambaran tentang pemberian hak bagi manusia untuk memiliki agama yang berbeda satu sama lainnya, yang tentu saja tujuan akhirnya hendaknya disikapi secara arif dan tetap berbuat baik kepada mereka berbeda agama, sehingga setiap manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah Swt.

Ketiga, landasan/asas-asas pengembangan kurikulum pendidikan Islam berbasis multikultural, meliputi:

- a) *Landasan Filosofis-Yuridis*. Isu pendidikan agama, dalam konteks bangsa Indonesia yang plural, multikultur, multietnis, dan multireligius menjadi isu yang krusial. Diperlukan perhatian yang serius dari berbagai pihak agar tidak berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa yang akan merugikan bagi tumbuhnya proses demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Praktik kekerasan yang mengatasnamakan agama, dari fundamentalisme, radikalisme, hingga terorisme, akhir-akhir ini semakin marak di tanah air. Kesatuan dan persatuan bangsa saat ini sedang diuji eksistensinya. Berbagai indikator yang memperlihatkan adanya tanda-tanda perpecahan bangsa, dengan transparan mudah diketahui dan dipahami.<sup>9</sup>

Landasan filosofis pengembangan kurikulum pendidikan Islam berbasis multikultural, dapat dijelaskan bahwa keragaman dan perbedaan dalam kehidupan manusia merupakan *sunnatullah*. Al-Qur'an sebagai representasi pesan-pesan Allah Swt. sebagai panduan umat manusia, telah memberikan beberapa isyarat penting, baik secara eksplisit maupun implisit tentang eksistensi keragaman dan perbedaan tersebut, seperti tercantum dalam QS. al-Hujurat ayat 13 berikut.

---

<sup>9</sup>Lasijan, *Multikulturalisme dalam Pendidikan Islam*, Jurnal TAPIS Vol.10 No.2 Juli-Desember 2014, hlm. 125-139.

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal-mengenal. Landasan yuridis dapat dilihat, bahwa dinamika kehidupan manusia dari masa ke masa selalu berkembang dan berubah. Perubahan manusia dari yang primitif hingga sekarang yang dikenal kehidupan modern tidak terlepas dari hasrat manusia untuk berkembang dan menjadikan kehidupannya lebih baik. Proses perkembangan manusia ke arah kesempurnaan ini tentunya melalui proses yang disebut dengan pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya adalah aktivitas yang tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Negara sebagai kumpulan masyarakat selalu memperhatikan bagaimana pendidikan dilaksanakan.

Karena pendidikan adalah elemen penting dalam memajukan peradaban. Suatu bangsa akan dapat berkembang dan mencapai kesuksesan dengan pendidikan. Dapat dipastikan bahwa negara yang maju dan memiliki daya saing tinggi dalam kancah global, pendidikan yang dilaksanakannya berjalan dengan baik. Setiap negara pasti mengamanatkan kepada penyelenggaranya untuk memberikan pendidikan yang baik kepada rakyatnya. Selain sebagai hak asasi setiap manusia, pendidikan memberikan andil besar dalam menaikkan taraf kehidupan bangsa. Indonesia dalam Undang-Undang Dasar (UUD 1945) Pasal 31 Ayat 1 dinyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan" minimal setiap warga negara mengikuti pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh negara, dan negarapun wajib membiayainya. Karenanya, pendidikan itu diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai tujuannya.

Pendidikan di Indonesia sebagaimana Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut mewajibkan kepada penyelenggara pendidikan untuk dapat mengimplementasikan dan mewujudkannya dalam proses aktivitas pendidikan di antaranya dengan mengarahkan tujuan kurikulum, materi, dan pembelajaran sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Proses penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan sebagaimana dinyatakan dalam UU Sisdiknas Tahun 2003 harus berdasarkan prinsip bahwa pendidikan dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Prinsip pelaksanaan pendidikan tersebut didasarkan pada realitas bangsa Indonesia yang multikultural.

Idealnya pendidikan tidak mengenal batas dan latar belakang peserta didik. Hak untuk mendapatkan pendidikan merupakan hak setiap manusia. Akan tetapi terkadang penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat masih terbawa pada etnosentris dan kebudayaannya berbeda. Hal ini dapat dimaklumi mengingat setiap etnis atau ras maupun kelompok kebudayaan yang lain cenderung memiliki semangat dan ideologi yang etnosentris.<sup>10</sup> Sikap seperti ini perlu direduksi salah satunya melalui proses pelaksanaan pendidikan Islam berbasis multikultural. Selain keluar dari prinsip penyelenggaraan pendidikan, sikap tersebut juga memberikan dampak sikap eksklusif, superior, dan mendorong adanya *prejudice* kepada orang lain maupun kebudayaannya.

- b) **Landasan Sosiologis.** Dalam asas atau landasan sosiologis, ada kebutuhan masyarakat dan perkembangannya yang berpengaruh dalam perencanaan dan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum juga harus ditekankan pada pengembangan individu yang mencakup keterkaitannya dengan lingkungan sosial setempat. Dalam hal ini, nilai sosial-budaya masyarakat bersumber pada hasil karya akal budi komunitas multikultural maupun praktik pendidikan Islam berbasis multikultural. Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia yang dapat dilihat dari sosiokultural dan geografis yang beragam dan luas. Di NKRI terdapat lebih dari 13.000 pulau besar dan kecil, dan jumlah penduduk sekurangnya 200 juta, terdiri dari 300 suku yang menggunakan hampir 200 bahasa, serta menganut agama dan kepercayaan berbeda, antara lain: Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan dan aliran keyakinan lainnya.<sup>11</sup>

<sup>10</sup>Mahfudz dkk, *Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Multi-etnik*, (Yogyakarta: Depublish, 2015), hlm. 82.

<sup>11</sup>Abdullah Idi, 'Bahan Kuliah....', *Op. Cit.*, 2019.

Sebagai pemeluk agama yang mayoritas Muslim, lembaga pendidikan Islam cukup mendapat tempat di Indonesia. Permasalahannya adalah bagaimana orientasi pendidikan Islam dalam mengakomodir dan merespons beragam permasalahan yang muncul di tengah masyarakat. Mengingat dalam kondisi masyarakat yang multikultural, berpotensi terhadap disintegrasi sosial di tengah masyarakat--apabila orientasi dan pemahaman keagamaan masyarakat belum mampu menerima fakta sosial yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-harinya.

Sebagai upaya menjembatani harapan tersebut, konsep pendidikan Islam berbasis multikultural menjadi salah satu solusi (*solution*) dalam menghadapi kemungkinan beragam permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Mengingat isu pendidikan Islam berbasis multikultural masih relatif baru dalam kancah pendidikan di Indonesia, terutama dalam lingkup masyarakat Muslim itu sendiri. Hal ini dikarenakan multikulturalisme merupakan suatu perkembangan yang relatif baru dalam khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam perspektif ilmu sosial. Kenyataan memperlihatkan bahwa multikulturalisme terus berkembang seiring dengan perubahan sosial yang dihadapi umat manusia, terutama di era global yang ditandai berkembangnya aspirasi masyarakat di berbagai belahan dunia terhadap pentingnya iklim demokratisasi.<sup>12</sup>

Landasan sosiologis berperan penting dalam mengembangkan kurikulum pendidikan Islam berbasis multikultural, karena kurikulum mencerminkan keinginan, cita-cita, dan kebutuhan masyarakat (*social needs*). Dalam mengambil suatu keputusan mengenai kurikulum pendidikan Islam berbasis multikultural, perlu merujuk pada lingkungan, merespons berbagai kebutuhan masyarakat, dan memahami tuntutan pencantuman nilai-nilai falsafah pendidikan bangsa.

- c) **Landasan Psikologis.** Kontribusi psikologi terhadap studi kurikulum memiliki dua bentuk. *Pertama*, model konseptual dan informasi yang akan membangun perencanaan pendidikan. *Kedua*, berisikan beragam metodologi yang dapat diadaptasi untuk penelitian pendidikan. Pertanyaan tentang pengembangan mata pelajaran,

<sup>12</sup>Abdullah Idi, 'Bahan Kuliah....', *Ibid.*, 2019.

model, dan metodologi itu beragam, dan informasinya sering tidak lengkap dan berkontradiksi. Tidak terdapat teori-teori psikologi tetapi hanya ada studi dan teori dalam hal perbedaan tingkat kecanggihan. Tidak kurang, beberapa bidang telah cukup dikembangkan untuk menawarkan petunjuk-petunjuk kepada pendidik dan perencana kurikulum (*curriculum planner*).<sup>13</sup>

Dalam memilih pengalaman belajar yang akurat, psikologi secara umum sangat membantu. Teori-teori belajar, teori-teori kognitif, pengembangan emosional, dinamika kelompok (*groups*), perbedaan kemampuan individu, kepribadian, model formasi sikap dan perubahan, dan mengetahui motivasi, semuanya sangat relevan dalam merencanakan pengalaman pendidikan (*educational experiences*).<sup>14</sup> Secara konseptual, landasan psikologis diharapkan memberi kontribusi berarti bagi *curriculum planners* dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam berbasis multikultural. Psikologi sangat membantu dalam memilih pengalaman belajar yang akurat. Teori belajar, teori kognitif, pengembangan emosional, perbedaan kemampuan individu, kepribadian, motivasi, dan lainnya, semuanya relevan untuk merencanakan pengalaman pendidikan.

- d) **Landasan Organisatoris.** Organisasi bahan dalam kurikulum juga penting menjadi perhatian. Setidaknya, tiga hal utama yang perlu diperhatikan pada asas atau landasan organisatoris ini, yakni Tujuan bahan pelajaran; sasaran bahan pelajaran; dan pengorganisasian bahan pelajaran. Pemahaman para pengembang kurikulum sangat penting dalam menghasilkan kurikulum yang diharapkan. Dalam konteks ini, Adiwikarta<sup>15</sup> mengatakan para pengembang dan pelaksana kurikulum perlu memperhatikan tiga kecenderungan yakni kekinian dan kedisinian; kemasadepanan; dan kepentingan satuan pendidikan.

Keadaan masyarakat senantiasa berubah dan mengalami kemajuan pesat, sehingga tentu akan memberi beban baru bagi *curriculum developers*, yang berperan sebagai *decision makers* dan memilih terhadap apa yang

<sup>13</sup>Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik*, Editor: Safarina HD, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 67.

<sup>14</sup>Abdullah Idi, 'Pengembangan Kurikulum...', *Ibid.*, hlm. 68.

<sup>15</sup>Abdullah Idi, 'Bahan Kuliah...', *Op. Cit.*, 2019.

harus diajarkan kepada siapa. Dalam konteks ini, S. Nasution mengatakan bahwa ada dua masalah pokok yang harus dipertimbangkan: *Pertama*, pengetahuan apa yang paling berharga untuk diberikan bagi anak didik dalam suatu bidang studi. *Kedua*, bagaimana mengorganisasikan bahan itu agar anak didik dapat menguasainya dengan sebaik-baiknya.<sup>16</sup>

Asas atau landasan ini bertalian dengan tentang bagaimana bahan pelajaran akan disajikan. Apakah dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah, atautkah diusahakan adanya hubungan antara pelajaran yang diberikan, misalnya dalam bentuk *broad-field* atau bidang studi seperti IPA, IPS, Bahasa, dan lain sebagainya.

Landasan atau asas-asas kurikulum di atas dijadikan sebagai *guidence* atau penunjuk arah terhadap pengembangan kurikulum pendidikan Islam berbasis multikultural. Tugas praktisi pendidikan Islam adalah berusaha untuk mengokohkan asas-asas atau landasan-landasan tersebut sehingga rancang bangun atau *design* kurikulum pendidikan Islam berbasis multikultural dapat berdiri tegak dikarenakan landasan pengembangan kurikulum pendidikan Islam berbasis multikultural dibangun secara kokoh.

Bagi bangsa Indonesia yang pluralistik atau multikultural, implementasi pendidikan Islam berbasis multikultural diharapkan sebagai suatu elemen penting dalam mempersiapkan *the next generations* yang andal untuk hidup di zamannya, dan pada akhirnya dapat memperkokoh integrasi sosial dan integrasi bangsa dalam masyarakat multikultural-majemuk. Pada sebuah negara bangsa yang majemuk demokrasi merupakan sebuah sistem nilai dan sistem politik yang telah teruji dan diakui sebagai yang paling realistik dan rasional untuk mewujudkan tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang adil, legaliter,

---

<sup>16</sup>Kalau diperhatikan secara saksama, yang paling berwenang memecahkan masalah adalah para spesialis dalam disiplin ilmu bersangkutan, dengan persyaratan para spesialis itu selalu mengikuti perkembangan ilmunya, dan tentunya harus memahami asas filosofis, sosiologis, dan psikologis dalam mengambil keputusan. Sementara itu, para pengembang kurikulum (*curriculum developers*) memiliki tugas untuk membantu mereka (para spesialis) agar memahami sepenuhnya akan tugas mereka dalam menentukan pengetahuan paling berharga tersebut. Pendekatan yang paling baik kemungkinan adalah dengan membentuk tim yang diketuai ahli pengembang kurikulum yang juga memiliki pengetahuan yang memadai mengenai bidang studi tersebut. Lihat: (Abdullah Idris, 'Pengembangan Kurikulum...', *Ibid.*, hlm. 78).

dan manusiawi. Pada 1863, negarawan Amerika, Abraham Lincoln, merumuskan suatu definisi demokrasi yang sangat populer yakni *government of the people, for the people, and by the people* atau pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat.<sup>17</sup>

Dari perspektif epistemologis, multikulturalisme memiliki arti *multi* yang berarti banyak dan *kultur* yang berarti budaya serta *isme* yang berarti paham. Secara hakiki, dalam kata itu terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya berbeda yang unik. Jika dibahas lebih lanjut pendidikan multikulturalisme merupakan pendidikan yang memberikan pengetahuan secara praktis tentang berbagai budaya suatu bangsa yang dijadikan pedoman dalam melakukan komunikasi dengan sesama manusia lain dalam konteks apa pun. Di sini pendidik hanya berperan sebagai mediator, bukan sebagai fasilitator. Dalam praktiknya anak didik diajarkan untuk saling menghargai budaya orang lain.

Kontrasnya, dalam perkembangan pembahasan tentang prinsip Islam, demokrasi, dan multikultural terjadi perbedaan pendapat yang tajam di kalangan pakar, yang setidaknya memiliki tiga pandangan. *Pertama*, kelompok *Apologetik*, yaitu kelompok yang menegaskan bahwa prinsip-prinsip multikultural dan demokrasi sudah *inheren* dengan ajaran Islam. *Kedua*, kelompok *Rejeksionis*, yaitu kelompok yang menolak prinsip-prinsip multikultural dan demokrasi karena dianggap berasal dari Barat bukan dari ajaran Islam, sehingga dengan penerapan multikulturalisme dikhawatirkan akan merusak akidah dan pemahaman Islam yang diyakini. *Ketiga*, kelompok *Rekonstruksionis*, yaitu kelompok yang membaca secara kritis dan mendialogkan prinsip-prinsip Islam dengan prinsip-prinsip multikultural dan demokrasi sebagai upaya menemukan dan membangun paradigma baru pemahaman tentang multikultural yang lebih progresif.<sup>18</sup>

Demokrasi berasal dari kata *demokratia* yang merupakan salah satu kata dari bahasa Yunani. Demokrasi memiliki arti suatu kekuasaan rakyat. Adapun secara umum, demokrasi terbagi menjadi dua kata, yakni *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Demokrasi itu mencakup suatu keadaan ekonomi, sosial, dan

<sup>17</sup>Ali Maksu, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM, Civil Society, dan Multikulturalisme*, (Malang: PuSAPoM, 2007), hlm. 12.

<sup>18</sup>Sudhartono Abdul Hakim, *Islam dan Multikulturalisme*, (Yogyakarta: Pharama Press, 2015), hlm. 31.

budaya yang di dalamnya berlangsung suatu praktik kebebasan dalam bidang politik baik secara bebas atau secara setara.<sup>19</sup> Secara umum, pengertian dari demokrasi sendiri adalah sebuah format pemerintahan di mana tiap-tiap warga negara memiliki hak yang setara dan seimbang mengenai penentuan serta pemilihan suatu keputusan yang kemudian akan berdampak terhadap kehidupan rakyat atau warga negara.<sup>20</sup> Di sinilah, urgensi pengembangan pendidikan Islam berbasis multikultural sebagai upaya mendorong proses demokratisasi dalam masyarakat multikultural-majemuk seperti Indonesia.

Pengertian dari demokrasi juga bisa diartikan sebagai sebuah bentuk kekuasaan tertinggi yang terdapat di tangan rakyat. Tentang demokrasi ini, warga negara dapat ikut di dalam mengambil bagian, baik secara langsung maupun bentuk perwakilan dalam hal pelaksanaan perumusan, pengembangan, dan juga proses menyusun hukum. Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan yang dibentuk dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Charles Costello mengatakan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem sosial dan juga politik pemerintahan di mana di dalamnya kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum dan juga budaya yang melindungi segenap hak perorangan dari warga negara itu sendiri. Adapun pelaksana kekuasaan negara sendiri adalah wakil dari rakyat yang sudah dipilih oleh rakyat sesudah adanya suatu keyakinan bahwa kebutuhannya akan memperoleh perhatian di dalam aturan yang telah atau akan ditetapkan oleh wakil rakyat tersebut bertalian dengan penerapan dari kekuasaan negara.<sup>21</sup>

Adapun pendidikan Islam berbasis multikultural memiliki asumsi sebagai berikut. *Pertama*, menurut ajaran Islam multikulturalitas merupakan *sunnatullah* yang tidak bisa diingkari. Justru dalam pluralitas dan multikulturalitas terkandung nilai-nilai penting bagi pembangunan keimanan, seperti tertera dalam Al-Qur'an:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. (QS. *al-Rûm*: 22).

<sup>19</sup>Ali Maksum, 'Pendidikan....', *Op. Cit.*, hlm. 14.

<sup>20</sup>Ali Maksum, 'Pendidikan....', *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>21</sup>Ali Maksum, 'Pendidikan....', *Ibid.*, hlm. 55-57

*Kedua*, Nabi Muhammad sebagai pembawa pesan (risalah) dan ajaran Allah berusaha meluruskan dan membenahi akidah masyarakat Arab pada waktu itu dengan tetap menjalin hubungan baik dengan mereka. Walaupun dalam perjalanan menyampaikan dakwahnya sering terjadi perbenturan dengan masyarakat Jahiliah, sebenarnya benturan dan perang itu hanya ditempuh sebagai alternatif terakhir setelah segala jalan damai yang ditempuh gagal. Sebenarnya Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk memusuhi agama lain. Sebaliknya, Islam menyuruh manusia untuk menjalin kerja sama dan hubungan yang baik dengan siapa pun untuk membangun peradaban manusia yang lebih baik.

*Ketiga*, Islam pada esensinya memandang manusia dan kemanusiaan secara sangat positif dan optimistik. Menurut Islam, seluruh manusia berasal dari satu asal yang sama, yakni Adam dan Hawa. Meskipun nenek moyangnya sama, dalam perkembangannya kemudian terpecah menjadi bersuku-suku, berkaum-kaum, atau berbangsa-bangsa, lengkap dengan segala kebudayaan dan peradaban khas masing-masing. Semua perbedaan yang ada selanjutnya mendorong mereka untuk saling mengenal dan menumbuhkan apresiasi satu sama lain. Inilah yang kemudian oleh Islam dijadikan dasar perspektif 'kesatuan umat manusia' (*universal humanity*), yang pada gilirannya akan mendorong solidaritas antarmanusia.

*Keempat*, menurut Islam, manusia dilahirkan dalam keadaan suci (*fitrah*). Dengan fitrahnya, setiap manusia dianugerahi kemampuan dan kecenderungan bawaan untuk mencari, mempertimbangkan, dan memahami kebenaran, yang pada gilirannya akan mampu mengakui Tuhan sebagai sumber kebenaran. Kemampuan dan kecenderungan inilah yang disebut sebagai sikap hanif. Atas dasar prinsip ini, Islam menegaskan prinsipnya bahwa setiap manusia adalah homo religius.

*Kelima*, Al-Qur'an sebagai representasi pesan-pesan Allah untuk menjadi panduan umat manusia, sesungguhnya telah memberikan beberapa isyarat penting, baik secara eksplisit maupun implisit tentang eksistensi keragaman dan perbedaan tersebut. Di antaranya dapat dilihat dalam Al-Qur'an:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah

ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui. (QS. al-Hujurat: 13).

Hubungan antara demokrasi dan pendidikan Islam multikultural di Indonesia memiliki kedudukan yang penting dan strategis, pada tatanan masyarakat demokrasi dituntut untuk memiliki rasa toleransi tinggi, dan dalam pendidikan Islam multikultural manusia diajarkan untuk menjadi manusia yang mampu menghargai manusia lain atau untuk lebih luasnya manusia dituntut untuk memahami budaya dan kultur orang lain.

Sementara itu, negara demokrasi merupakan negara yang terdiri dari berbagai ragam budaya, dan dalam memilih pemimpin harus dengan cara pemilihan yang di dalam pemilihan itu pasti terdapat bermacam pilihan, jadi sikap bijak dalam memilih sangat diutamakan termasuk sikap bijak dalam perbedaan pilihan. Selain itu juga saling menerima kekalahan dalam suatu pemilihan sangat diperlukan, sebagai contoh Indonesia yang merupakan negara yang kaya akan budaya, suku, ras, dan bahasa, suatu negara pluralis yang sangat dikagumi karena kekayaan sumber daya alam dan masyarakat yang terkenal ramah dan masyarakat yang terkenal rukun, suka gotong royong, masyarakat yang mampu bersatu tanpa membedakan warna kulit, suku, ras, budaya, hingga agama. Masyarakat yang lengkap akan perbedaan namun mampu menerima perbedaan itu dan masyarakat yang masih menjaga warisan nenek moyang tanpa terpengaruh budaya globalisasi itulah Indonesia dengan segala keragamannya.<sup>22</sup>

Keberagaman seperti ini dapat menyebabkan berbagai persoalan seperti potensi konflik dan perpecahan, perseteruan etnis dan politik, kemiskinan, kekerasan, separatisme, perusakan lingkungan, dan hilangnya rasa kemanusiaan untuk selalu menghormati hak-hak orang lain, adalah bentuk nyata sebagai dampak dari multikulturalnya bangsa ini. Perlu dikaji strategi khusus dalam memecahkan persoalan itu melalui bidang sosial, politik, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Pendidikan Islam Multikultural merupakan suatu reformasi pendidikan Islam yang diharapkan dapat menawarkan suatu alternatif solusinya, melalui penerapan strategi dan konsep pendidikan yang berbasis pada

<sup>22</sup>Abdullah M. Amin, *Pendidikan Agama Era Multikultural Multireligius*, (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005), hlm. 32.

pemanfaatan keragaman yang ada di masyarakat, khususnya yang ada pada peserta didik seperti agama, status sosial, gender, kemampuan, umur, dan ras dengan menggunakan pendekatan nilai-nilai Islam yang mulia, yang mengajarkan penghargaan terhadap perbedaan dan keragaman sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an dan yang dicontohkan baginda Rasulullah Saw.

Yang terpenting strategi pendidikan ini tidak hanya bertujuan agar anak didik mudah memahami pelajaran yang diberikan oleh pendidik, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran mereka agar selalu berperilaku humanis, pluralis, dan demokratis. Penekanan terhadap pentingnya kualitas pembelajaran dengan difasilitasi tenaga pendidik yang profesional dan infrastruktur yang berkualitas diharapkan implementasi Pendidikan Islam Multikultural diharapkan berdampak positif terhadap kualitas lulusan (*out-put*) dan *outcome* yang mumpuni dan berkontribusi positif terhadap berbagai sektor pembangunan dalam masyarakat multikultural. Pada akhirnya diharapkan bahwa permasalahan yang dihadapi bangsa ini lambat laun dapat diminimalkan, karena generasi muda di masa yang akan datang adalah generasi multikultural yang berkualitas (menguasai sains-teknologi dan berakhlak mulia) yang menghargai perbedaan, selalu menegakkan nilai-nilai demokrasi yang akan mewujudkan keadilan dan kemakmuran.

Dalam konteks pendidikan agama (Islam) berbasis multikultural dan moderasi agama, bahwa moderasi beragama kini menjadi simbol perekat segala bentuk keragaman agama di Indonesia. Suprianto Abdi<sup>23</sup> mengatakan cara pandang yang melahirkan sikap beragama yang seimbang yaitu antara pengalaman agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik agama yang berbeda keyakinan (inklusif). Pentingnya menghadirkan sosok guru agama yang moderat sebelum mengimplementasikan nilai-nilai moderasi ke peserta didik bertujuan agar tersampainya nilai-nilai kebangsaan sebagai warga negara yang baik menurut Pancasila. Kehadiran pendidikan agama merupakan penguat suatu bangsa. Sosok guru moderat bertalian dengan komitmen kebangsaan, toleransi aktif, anti kekerasan, serta akomodatif terhadap budaya lokasi.

<sup>23</sup>Suprianto Abdi, 'Realisasi Moderasi Beragama di Ranah Pendidikan', <https://www.uii.ac.id>, diakses, 29 April 2021.

Perubahan ekspresi keberagaman di tengah masyarakat seakan memperlihatkan perubahan wajah beragama di Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir ini, ada fermentasi otoritas keagamaan diakibatkan perubahan lanskap sosial politik. Fermentasi otoritas keagamaan selanjutnya semakin diperuntukkan dalam kontekstasi tafsir agama yang semakin tajam di ruang maya (media sosial). Hal itu telah menyadarkan kita bahwa moderasi beragama merupakan suatu jalan dan arah yang memang mesti dilalui. Dalam konteks perguruan tinggi agama, diajarkan atau diajak untuk bertemu dengan agama-agama yang lain secara intelektual, secara akademik, belajar pengetahuan dasar tentang agama-agama, agar muncul sikap-sikap yang apresiatif terhadap perbedaan literatur keagamaan, kekayaan tafsir keagamaan.<sup>24</sup>

Tabita Kartika<sup>25</sup> mengungkapkan hasil penelitiannya tentang dinamika Pendidikan agama, terdiri dari tiga unsur yakni dogma, etika, dan identitas. Etika adalah hasil yang paling kuat, isu-isu keagamaan masa kini merupakan hal yang paling banyak dibahas di dalam pendidikan agama. Sedikit sekali unsur dogma yang diberikan pada lingkungan yang sangat homogen. Bagi sekolah yang berafiliasi, agama lebih menekankan etika bagaimana kehidupan bersama di tengah masyarakat. Pendidikan agama yang inklusif dan moderat itu mesti mencakup empat hal yakni menonjolkan pendidikan multikultural, teologi agama-agama, pendidikan agama masing-masing, peserta didik dari generasi Z. Empat hal itu dapat diupayakan dan dipertimbangkan dan didialogkan bersama agar memperoleh pendidikan agama yang inklusif dan moderat.

Moderasi beragama bagi bangsa Indonesia mutlak diperlukan karena Indonesia merupakan bangsa yang majemuk atau pluralistik. Keberagaman bangsa Indonesia bukan hasil karya manusia tetapi merupakan takdir dianugerahkan Sang Khalik kepada bangsa Indonesia. Seorang menjadi moderat bukan berarti meninggalkan agama masing-masing, menjadi moderat bukan berarti lemah dalam beragama, menjadi moderat bukan berarti cenderung terbuka dan mengarah kepada kebebasan, tetapi menjadi moderat menjadi jalan tengah, *'middle way'*, dalam keberagaman di tengah masyarakat pluralistik Indonesia.

<sup>24</sup>Suprianto Abdi, *'Realisasi Moderasi Beragama'*, *Ibid.*

<sup>25</sup>Tabita Kartika, *'Realisasi Moderasi Beragama di Ranah Pendidikan'*, <https://www.uji.ac.id>, diakses, 29 April 2021.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. 2003. *Rekonstruksi Metodologi Agama dalam Masyarakat Multikultural dan Multireligius,*” dalam Ahmad Baidowi dkk., (peny.), *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman*, Yogyakarta: Suka Press dan LPKM Introspektif IAIN Suka.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Pendidikan Agama Era Multikultural Multireligius*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Islamic Studies: di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif- Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adawy, Syaikh Musthafa al-. 2009. *Fikih Pendidikan Anak*. Cetakan ke-3. Jakarta: Qisthi Press.
- Agil, Said Munawar Husin al-Munawar. 2006. *Fiqih Kehidupan antar Agama Menata Masyarakat Berbasis Multikultural, dalam Masa Depan Bangsa dan Radikalisme Agama*. Bandung: GunungDjati.
- Ahmadi, Abu & Nur Uhbiyati. 1991. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Alavi, Hamed Reza. 2007. 'Islamic Vlues: a distinctive framework for moral education'. *Journal of Moral Education*. Vol. 36, No. 3, September 2007. Hlm. 283-296.

- Albone, Abd Azis. 2009. *Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Multikulturalisme*, Jakarta: Saadah Cipta Mandiri.
- al-Munawar, Said Agil Husin. 2005. *Aktualisasi Islam*. Jakarta: Ciputat Press.
- Al-Syaibani, Omar Muhammad Al-Thoumy. 1979. *Falsafah Pendidikan*, terj. Hasan Langgulung. Jakarta: Bulan Bintang.
- \_\_\_\_\_. 1979. *Falsafah Pendidikan*. terj. Hasan Langgulung. Jakarta: Bulan Bintang.
- Aminullah, et. al. 2015. 'Model Komunikasi Antarbudaya Etnik Madura dan Etnik Melayu'. *Jurnal Komunikasi ASPIKOM*, Volume 2 Nomor 4, Januari 2015, hlm. 272-281.
- Amirurrasyid, Harun. 1966. *Kajian Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu*. Singapura: Pustaka Melayu.
- Anugerah, dan Winny Kresnowiati. 2007. *Komunikasi Antarbudaya: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Jala Permata.
- Anugerah, Danang dan Winny Kresnowiati. 2007. *Komunikasi Antarbudaya: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Jala Permata.
- Aqil, Husin Said & Quraish Shihab. 2004. *Ikhtiar Membangun Masyarakat Madani*. Jakarta: Penerbit Penamadani.
- Aqil, Said dan Quraisy Shihab. 2004. *Ikhtiar Membangun Masyarakat Madani*. Jakarta: Penamadani.
- Asbabun Nuzul. 2001. *Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*. Bandung: CV. Diponegoro.
- Assegaf, Abd. Rachman. 2011. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: RajagrafindoPersada.
- Asy'arie, Musa. 2004. "Pendidikan Multikultural dan Konflik Bangsa". *Kompas*, 3 September 2004.
- Azra, Azyumardi, et. al. 2005. *Nilai-Nilai Pluralisme dalam Islam; Bingkai Gagasan yang Berserak*. Bandung: Nuansa.
- Azra, Azyumardi. 2000. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- \_\_\_\_\_. 2019. 'Ancaman Radikalisme terhadap Pancasila itu Riil', *Muslimoderat.net.*, diakses: 7 Oktober 2019.

- Badaruddin, Kemas. 2007. *Filsafat Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baidhawy, Zakiyuddin. 2003. *Agama dan Pluralitas Budaya Lokal*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*. Jakarta: Erlangga.
- \_\_\_\_\_. 2008. 'Membangun Harmony dan Perdamaian Melalui Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural'. *Lokakarya Implementasi Pendidikan, Australian Indonesia Partnership dan Kemenag RI*, 10-13 April 2008.
- \_\_\_\_\_. 2008. 'Membangun Harmony dan Perdamaian Melalui Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural', *Lokakarya Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Pengembangan Kurikulum, Australian Indonesia Partnership dan Kemenag RI*, 10-13 April 2008. Hlm. 75.
- Baidowi, Ahmad, et. al. (Eds). 2003. *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman*. Yogyakarta: Suka Press dan LPKM Instrospektif IAIN Suka.
- Baker, Gwendolyn C. 1994. *Planing and Organizing for Multicultural Instruction*. California: Addison-Wesley Publishing Company.
- \_\_\_\_\_. 1994. *Planning and Organizing for Multicultural Instruction*. California: Addison-Wesley Publishing Company.
- Bank, James A. dan Cherry A. McGee (Ed). 2001. *Handbook of Research on Multicultural Education*. San Francisco: Jessey-Bass.
- Barth, Freedrick. 1988. *Kelompok Etnik dan Batasannya*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Basri, Hasan. 2009. *Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia Press.
- Bertens, K. 2002. *Sejarah Filsafat Yunani*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Beuken, Wim & Karl-Josef Kuschel, et. al. *Agama sebagai Sumber Kekerasan*. Penerjemah: Imam Baehaqie. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Beuken, Wim & Karl-Josef Kuschel, et. al. *Agama sebagai Sumber Kekerasan*, Penerjemah: Imam Baehaqie. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiyantanta, Ki. 2006. *Filsafat Pendidikan Barat dan Filsafat Pendidikan Pancasila, Wawasan Secara Sistematis*. Yogyakarta: Amus.
- Carter, Judy & Gordon S. Smith. 2004. *Religious Peacebuilding: From Potential to Action*, within Harold Coward and Gordon S. Smith (Eds), *Religion and Peace Building*. Albany: State University on New York Press.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Religious Peacebuilding: From Potential to Action*, within Harold Coward and Gordon S. Smith (Eds). *Religion and Peace Building*. Albany: State University on New York Press.
- Dahlan, K.H.Q. Shaleh H.A.A. dkk. 2001. *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*. Bandung: CV. Diponegoro.
- Daradjat, Zakiah, et. al. 2008. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Daradjat, Zakiah. 1996. *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*. Jakarta: YPI Ruhama.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. 2004. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Agama RI. 2017. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta.
- Dewey, John. 1964. *Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education*. New York: MacMillan.
- Dhofier, Zamakhsyari. 1994. *Tradisi Pesantren: Studi Kasus tentang Kehidupan Kiai*. Jakarta: LP3ES.
- Echols, J.M. & Shadily, H. 1997. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Elizabeth, Hurlock. B. t.t. *Perkembangan Anak*. Jakarta: PT. Erlangga.
- Erman, Suherman, et. al. 2003. *Strategi Pembelajaran Kontemporer*. Bandung: UPI.
- Esposito, John L. 2010. *Masa Depan Islam: Antara Tantangan Kemajemukan dan Benturan dengan Barat*. Pengantar: Karel Armstrong. Bandung: Mizan.

- Fajar, Abdul Malik. 1998. *Madrasah dan Tantangan Modernitas*. Bandung: Mizan.
- \_\_\_\_\_. 1998. *Visi Pembaruan Pendidikan Islam*. Jakarta: LP3NI.
- Fajar, Marhaeni. 2009. *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Farekh, Bikhu. 2001. *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. London: Macmillan.
- Feisal, Jusuf Amir. 1995. *Reorientasi Pendidikan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Fudyantanta, Ki. 2006. *Filsafat Pendidikan Barat dan Filsafat Pendidikan Pancasila, Wawasan Secara Sistematis*. Yogyakarta: Amus.
- Furnivall, J.S. 1980. 'Plural Societies'. *Sociology of Southeast Asia: Readings on Social Change and Development*. Edited by Hans-Dieter Evers. New York: Oxford University.
- Gafur, Waryono Abdul. 2005. *Tafsir Sosial: Mendialogkan Teks dengan Konteks*. Yogyakarta: eLSAQPress.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir Sosial: Mendialogkan Teks dengan Konteks*. Yogyakarta: eLSAQ Press.
- Gamble, Andrew. 1988. *An Introduction to Modern Social and Political Thought*. Hongkong: Macmillan Education Ltd.
- Geert, Clifford. 1983. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Penerjemah: Aswab Mahasin. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Gollnick, Donna M. & Philip C. Chinn. 2005. *Tafsir Sosial: Mendialogkan Teks dengan Konteks*. Yogyakarta: eLSAQ Press.
- Gollnick, Donna M. dan Philip C. Chinn. 1998. *Multicultural Education in a Pluralistic Society*. New Jersey: Prentice Hill.
- Hakim, Sudhartono Abdul. 2015. *Islam dan Multikulturalisme*. Yogyakarta: Pharama Press.
- Halstead, J. Mark. 2007. 'Islamic Values: a distinctive framework for moral education'. *Journal of Moral Education*. Vol. 36, No. 3, September 2007. Hlm. 285.

- Halstead, J. Mark. 2007. Islamic Values: a distinctive framework for moral education'. *Journal of Moral Education*, Vol. 36, No. 3, September 2007, page 285.
- Hamalik, Oemar. 2008. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Rosdakarya.
- Handoko, Hani. 1995. *Manajemen*. Edisi 2. Yogyakarta: BPFE.
- Hardiman, F. Budi. 2004. *Filsafat Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hardiman, F. Budi. 2004. *Filsafat Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hartono, Yudi & Dardi Hasyim. 2003. *Pendidikan Multikultural di Sekolah*. Surakarta: UPT Penerbitan dan Percetakan UNS.
- Haryatmoko. 2010. *Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama dan Jakarta: Kompas Gramedia.
- Haryatmoko. 2011. *Etika Publik, untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Heffner, Robert W. 1998. *Democratic Civility: On the History and Cross-Cultural Possibility Modern*. Transaction Publishers: New Brunwich (USA) and London (UK).
- Heffner, Robert W. 1998. *Democratic Civility: On the History and Cross-Cultural Possibility Moder*. Transaction Publishers: New Brunwich (USA) and London (UK).
- Ibrahim, Rustam. 2013. 'Pendidikan Multikultural: Pengertian, Prinsip, dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam', *Jurnal Addin*, Vol. 7, No. 1, Februari 2013. Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta.
- Ibrahim, Rustam. *Pendidikan Multikultural: Pengertian, Prinsip, dan Relevansinya Dengan Tujuan Pendidikan Islam*, *Jurnal Addin*, Vol. 7, No. 1, Februari 2013 di Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta.
- Idi, Abdullah & Safarina HD. 2016. *Etika Pendidikan: Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat*. Cetakan ke-2. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Idi, Abdullah & Toto Suharto. 2006. *Revitalisasi Pendidikan Islam*. Pengantar: J. Suyuthi Pulungan. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Idi, Abdullah dan Jamali Sahrodi. 2017. 'Mobilitas Sosial dan Peranan Pendidikan Agama', *Jurnal Intizar*, 23 (1). Hlm. 1-16.

- Idi, Abdullah. (Contributor). 2001. Kerajaan Sriwijaya, Nilai-Nilai Integrasi dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Otonomi Daerah, Penyunting: Zulkifli & Abdul Karim Nasution. Sumatra Selatan: Universitas Sriwijaya Press.
- Idi, Abdullah. (Contributor). 2007. Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik. Yogyakarta: Ar-Ruzz.
- \_\_\_\_\_. 2010. 'Islam dan Pluralisme: Analisis Sosiologis-Keagamaan terhadap Peran Umat Islam Indonesia Integrasi Sosial'. Wajah Islam Indonesia: Perspektif Sosial, Kultural, Hukum, dan Pendidikan. Yogyakarta: Idea Press dan Corpus.
- \_\_\_\_\_. 2011. Bangka, Sejarah Sosial Cina-Melayu. Edisi ke-2. Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana.
- \_\_\_\_\_. 2012. "Harmoni Sosial: Interaksi Sosial Natural Asimilatif" antara Etnis Cina dan Melayu Bangka". *Thaqafiyat: Jurnal Kajian Budaya Islam*. Volume 13, No. 2, Desember 2012. Hlm. 361-383.
- \_\_\_\_\_. 2015. 'Orang Melayu: Istilah, Jati Diri, dan Globalisasi', *Dinamika Sosiologis Indonesia, Agama dan Pendidikan dalam Perubahan Sosial*. Yogyakarta: LKiS Press.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Dinamika Sosiologis Indonesia: Agama dan Pendidikan dalam Perubahan Sosial*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2016. 'Istilah Cina, Tionghoa, dan Politik'. *Sriwijaya Post*. 2 April 2016.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Sosiologi Pendidikan: Individu, Masyarakat, dan Pendidikan*. Editor: Safarina HD. Cetakan ke-5. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2018. 'Kebijakan Etnisitas Kolonial Belanda, Masa Kemerdekaan dan Implikasinya terhadap Pengelolaan Keberagaman Etnis dalam Memperkokoh Integrasi Bangsa', *Laporan Hasil Penelitian*, LP2M Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- \_\_\_\_\_. 2018. *Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara: Kasus Indonesia, Myanmar, Filipina, Thailand, dan Malaysia: Kasus Indonesia, Myanmar, Filipina, Thailand, dan Malaysia*. Yogyakarta: Penerbit LKiS.
- \_\_\_\_\_. 2018. *Materi Kuliah Studi Interdisipliner Pendidikan Agama Islam Multikultural*. Program Doktor (S-3) Pascasarjana IAIN Bengkulu.

- \_\_\_\_\_. 2018. *Materi Kuliah Studi Interdisipliner Pendidikan Agama Islam Multikultural*. Program Doktor (S-3) Pascasarjana IAIN Bengkulu.
- \_\_\_\_\_. 2018. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2019. 'Dialog Papua: Mencegah Konflik Berkepanjangan', *Opini, Sriwijaya Post*, 18 September 2019.
- \_\_\_\_\_. 2019. *Bahan Kuliah Pendidikan Islam Multikultural*. Program Doktor (S-3), Pascasarjana IAIN Bengkulu.
- \_\_\_\_\_. 2019. *Bahan Kuliah Sosiologi Pendidikan*. Program Doktor (S-3). Pascasarjana IAIN Bengkulu.
- \_\_\_\_\_. 2019. *Sosiologi Pendidikan; Individu, Masyarakat, dan Pendidikan*. Cetakan ke-6. Jakarta: Rajawali Press.
- Imam, et. al. 2011. *Guru PAI Islam Rahmatan lil'alamin*. Jakarta: Kemenag RI.
- Ishiyama, Jhon T. & Marijke Breuning. 2013. *Ilmu Politik dalam Paradigma Abad ke-21*. Jakarta: Kencana PM Group.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Ilmu Politik dalam Paradigma Abad ke-21*. Jakarta: Kencana PM. Group.
- Jalaluddin & Abdullah Idi. 2009. *Filsafat Pendidikan: Manusia, Filsafat, dan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Jalaluddin. 2012. *Psikologi Agama*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Psikologi Agama*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Mempersiapkan Anak Sholeh*, Edisi Revisi. Palembang: Penerbit Noerfikri.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Mempersiapkan Anak Sholeh*, Edisi Revisi. Palembang: Penerbit Noerfikri.
- Jamali. 2021. *Integritas Moral Pembentuk Karakteristik Sosial*. Cetakan Pertama. Cirebon: Aksarasatu.
- Jamil, T.M. & Maimun. 2017. 'Pembangunan Karakter Kebangsaan pada Masyarakat Multikultur'. *Prosiding Seminar Nasional*. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Medan. Tahun 2017 Vol.1, No. 1, 2017. Hlm. 411-415.
- Jamil, T.M. dan Maimun. 2017. 'Pembangunan Karakter Kebangsaan pada Masyarakat Multikultur'. *Prosiding Seminar Nasional*, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Vol.1, Tahun 2017.

- Jary, David & Julia Jary. 1991. *The Harper Collins Dictionary of Sociology*. New York: HarperCollins Publishers, Ltd.
- Kahmad, Dadang. 2011. *Sosiologi Agama: Potret Agama dalam Dinamika Konflik, Pluralisme, dan Modernitas*. Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Sosiologi Agama: Potret Agama dalam Dinamika Konflik, Pluralisme, dan Modernitas*. Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia.
- Kartono, Kartini. 2002. *Antologi Sosial*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Antologi Sosial*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo.
- Kimaki, Timo. 2005. *Violent Internal Conflicts in Asia Pasific: Histories, Political Economies, and Policies*, Editors: Dewi Fortuna Anwar, helene Bouvie, Gland Smith, Roger Tol. Yayasan Obor Indonesia (YOI)-LIPI-LASEMA-CNRS-KITLV. Jakarta.
- Kimbal, Charles. 2004. *Kala Agama Jadi Bencana*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Kimbal, Charles. 2004. *Kala Agama Jadi Bencana*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Kusmaryanto, C.B. 2016. *Bioetika: Mendiskusikan Pertanyaan Dasar tentang Hidup Manusia yang Menyangkut Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Kymlicka, Will. 2000. *Multicultural Citizenship, A Liberal Theory of Minority Rights*. New York: Oxford University Press.
- Langgulong, Hasan. 1993. *Asas-asas Pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka al-Husna.
- \_\_\_\_\_. 1997. 'Pendidikan Islam, Demokrasi, dan Masa Depan Bangsa'. *Jurnal Kajian Islam Ma'rifah*. Volume 3/Tahun 1997.
- \_\_\_\_\_. 1997. "Pendidikan Islam, Demokrasi, dan Masa Depan Bangsa", *Jurnal Kajian Islam Ma'rifah*, Volume 3/Tahun 1997.
- Lash, Scott dan Mike Featherstone (ed.). 2002. *Recognition And Difference: Politics, Identity, Multiculture*. London: Sage Publication.
- Lasijan. 2014. 'Multikulturalisme dalam Pendidikan Islam'. *Jurnal TAPIS* Vol.10 No. 2 Juli-Desember 2014.
- Lasor, WS, dkk. 2007. *Pengantar Perjanjian Lama*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Levine, Daniel U. & Robert J. Havighurst. 1989. *Society and Education*. Seventh Edition. United States: Allyn and Bacon.

- Levine, Daniel U. and Robert J. Havighurst. 1989. *Society and Education*, Seventh Edition. United States: Allyn and Bacon.
- Lufri, et. al. 2007. *Strategi Pembelajaran Biologi*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Strategi Pembelajaran Biologi*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Lyotard, Jean Farncois. 2009. *Kondisi Postmodern: Suatu Laporan Mengenal Pengetahuan*. Terjemahan D. Dian Ellyati. Surabaya: Selasar Publishing.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Kondisi Postmodern: Suatu Laporan Mengenal Pengetahuan*. Penerjemah. D. Dian Ellyati. Surabaya: Selasar Publishing.
- Ma'arif, Syaifuddin. 2007. *Pendidikan Wawasan Multikultur di Madrasah*. Jakarta: Pustaka Karya.
- Mahfud, Choirul. 2006. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Press.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Pendidikan Multikultural*. Bandung: Penerbit Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahfudh, Sahal. 2007. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LkiS.
- Mahfudz, dkk. 2015. *Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Multietnik*. Yogyakarta: Depublish.
- Mahmud, Ali Abdul Halim. 2004. *Akhlaq Mulia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Majalah Stannia*. 1998. Hlm. 26-27.
- Maksum, Ali. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM, Civil Society, dan Multikulturalisme*. Malang: PuSAPoM.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Pluralisme dan Multikulturalisme*. Malang: Aditya Media Publishing.
- Mansoben, J.R. 2004. 'Orientasi Budaya dalam Membangun Manusia Papua yang Majemuk: Tinjauan Antropologi'. *Masyarakat Indonesia: Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*. Jilid XXX, No. 1, 2004. Hlm. 106-107.

- \_\_\_\_\_. 2004. 'Orientasi Budaya dalam Membangun Manusia Papua yang Majemuk: Tinjauan Antropologi'. *Masyarakat Indonesia: Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*. Jilid XXX, No. 1, 2004. Hlm. 106-107.
- Marimba, Ahmad D. 1962. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Al-Ma'arif.
- \_\_\_\_\_. 1962. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Al-Ma'arif.
- \_\_\_\_\_. 1962. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Martono, Nanang. 2015. *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*. Pengantar: William L. Neuman. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mas'ud, Abdurrahman. 2002. *Sejarah dan Budaya Pesantren, dalam Dinamika Pesantren dan Madrasa*. Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mashadi, Imron. 2009. "Reformasi Pendidikan Agama Islam di Era Multikultural". Jakarta: Balai Litbang Agama.
- \_\_\_\_\_. 2009. "Reformasi Pendidikan Agama Islam di Era Multikultural". Jakarta: Balai Litbang Agama Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Multikulturalisme*. Jakarta: Balai Litbang Agama.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Reformasi Pendidikan Agama Islam di Era Multikultural*. Jakarta: Balai Litbang Agama.
- Mashadi. 2009. *Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Multikulturalisme*. Jakarta: Balai Litbang Agama.
- Maslikhah. 2007. *Quo Vadis Pendidikan Multikultur*. Salatiga: STAIN Salatiga Press.
- Mastuhu. 1994. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS.
- \_\_\_\_\_. 1994. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS.
- Mastur, Khairul A., Putaijin, dan Martin Cooper. 2000. 'Malay Culture and Personality'. *Journal of American Scienties*, Volume 44 No. 1 September 2000. Page 96.
- Mueller, D.J. 1986. *Mengukur dan Praktisi*. Penerjemah: Eddy Suwardi Kartawidjaya. Jakarta: Bumi Aksara.

- \_\_\_\_\_. 1986. *Mengukur Sikap Sosial Pegangan untuk Peneliti dan Praktisi*. Penerjemah: Eddy Suwardi Kartawidjaya. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mufid, Muhammad. 2009. *Etika dan Filsafat Komunikasi*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Muhaimin. 2008. *Al-Qur'an, Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, Cet. ke 4. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Al-Qur'an, Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Bandung: Remaja Rasdakarya.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*. Edisi ke- 4. Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mukhibat. 2014. *Rekonstruksi Spirit Harmoni Berbasis Masjid*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kemenag RI.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Rekonstruksi Spirit Harmoni Berbasis Masjid*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kemenag RI.
- Muntasyir, Rizal, dkk. 2004. *Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muslih, Muhammad. 2010. 'Wacana Masyarakat Madani: Dialektika Islam dengan Problem Kebangsaan, No. 1, Jurnal Tsaqafah, Volume April 2010. Hlm. 133.
- Naim, Ngainun dan Achmad Sauqi. 2008. *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nasid, Ahmad Munjin & Lilik Nur Kholidah. 2009. *Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Refika Aditama.
- Nasikun, J.S. 1995. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nasution, S. 1989. *Kurikulum dan Pengajaran*. Jakarta: Bina Aksara.
- Natsir, M. 1955. *Capita Selecta*. Cetakan ke- 1. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.

STISIPOL Candradimuka Palembang (2008-2011); dan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN RF Palembang (2020-2024).

Wakil Ketua Ikatan Sarjana Sosiologi Indonesia (ISI) Sumatra-Selatan (2013-2017) dan Penasihat ISI Sumatra Selatan (2018-2023); Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) RF Palembang (2012-2016); Konsultan PNPM bidang Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, pada Masyarakat Suku Dayak, Palangkaraya, Kalimantan Tengah (2012-2013); Ketua Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Sumatra Selatan (2013-2017 dan 2017-2023).

Peserta *Short-Course on Social Welfare, McGill University, Montreal-Canada* (2007); *Supervisor: Research Fellowships Program bagi Dosen PTAI se-Indonesia, Program Academic Recharging for Islamic Studies (ARFI), The University of Melbourne, Victoria, Australia* (2010); dan *Visiting Professor, Gottingen Universitat, Germany, Program ARFI, Kementerian Agama RI, 2012; Kolokium Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang & Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Johor, Malaysia* (2015); dan *Visiting Professor, Newcastle University (UoN), Australia, 2017.*

#### **Publikasi Ilmiah:**

*Filsafat Pendidikan*, (bersama: Prof. Dr. Jalaludin), Edisi Revisi (ke-8), PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2019.

*Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik*, Edisi Revisi (ke-6), PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2018.

*The Conditions for Learning at University: A Comparison Between Indonesia and Tasmania, Australia: A Cross Socio-Cultural Studies (Tesis S-2)*, Edisi ke-1, Unsri Press, Universitas Sriwijaya, 2001.

*Islam: Dalam Sejarah dan Budaya Sumatra Selatan*, Unsri Press, Universitas Sriwijaya, 2001, (Co-Author/Contributor).

*Sejarah Perkembangan Islam di Eropa (A History of Islamic Spain)*, Montegomerry Watt, Edinburgh University (1992) , Edisi ke-1, 2003, Pustaka Raja, Yogyakarta (Translator).

*Rekonstruksi dan Modernisasi Lembaga Pendidikan Islam, et. al.*, Edisi ke-1, Global Pustaka, Yogyakarta, 2005, (Co-Author/Contributor).

*Revitalisasi Pendidikan Islam*, (bersama: Dr. Toto Suharto), Edisi ke-1, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2006.

*Sejarah Sosial Cina dan Melayu Bangka*, Edisi ke-2, Penerbit Tiara Wacana, Yogyakarta, 2011.

*Asimilasi Melayu dan Cina di Bangka*, Edis ke-1, Penerbit Tiara Wacana Yogyakarta, 2009.

*Wajah Islam Indonesia: Perspektif Sosial, Kultural, Hukum, dan Pendidikan*, Penerbit Idea Press Yogyakarta dan Corpus Yogyakarta, 2010 (Co-Author/Contributor).

*Sosiologi Pendidikan: Individu, Masyarakat, dan Pendidikan*, Editor: Safarina HD, Edisi ke-6, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2018.

*Etika Pendidikan: Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat*, Edisi-2, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2016.

*Dinamika Sosiologis Indonesia: Agama dan Pendidikan dalam Perubahan Sosial*, Edisi-1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2015.

*Innovation and Usefulness: Mengembangkan UIN Raden Fatah Palembang sebagai pusat pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang unggul dan terdepan di bidang sains-keislaman, sains-sosial, humaniora, dan sains-teknologi yang memiliki kemanfaatan/kemaslahatan bagi Sumatra Selatan, Umat Islam (Indonesia), Nasional, dan Melayu-Nusantara*, Noer Fikri Press, Palembang, 2016.

*Konflik Etno-Religius di Asia Tenggara: Kasus Indonesia, Myanmar, Filipina, Thailand, dan Malaysia*, Editor: Toto Suharto, Safarina HD, dan Mustakim, Cetakan ke-1, LKiS, Yogyakarta, 2018.

*Politik Etnisitas Hindia Belanda: Dilema dalam Pengelolaan Keberagaman Etnis di Indonesia*, Editor: Safarina HD, Edisi ke-1, Prenadamedia, Depok (Jakarta), 2019.

*Short-Course on Social Welfare*, McGill University, Montreal-Canada (2007); Supervisor: *Research Fellowships Program* bagi Dosen PTAI se-Indonesia, Program Academic Recharging for Islamic Studies (ARFI), The University of Melbourne, Victoria, Australia (2010); dan *Visiting Professor*, Gottingen Universitat, Germany, Program ARFI, Kementerian Agama RI, 2012; melaksanakan *Kolokium* antara Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang dengan Universiti Teknologi Malaysia, Johor, Malaysia (2015); dan *Visiting Professor*, Newcastle University (UoN), Australia, 2017.

TJ, 2 Mei 2021.

## BIOGRAFI EDITOR



**Safarina HD. Abdullah** lahir di Palembang pada tanggal 14 Juni 1971. Bekerja sebagai guru (PNS) pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Palembang. Menamatkan S-1 FKIP Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sriwijaya (1996); S-2 Program Pendidikan Bahasa dan Seni Pascasarjana Universitas Sriwijaya (2003); dan S-2 Program Administrasi Publik STISIPOL Candradimuka Palembang (2010).

Adapun karya-karya penulis, yakni penulis artikel sastra di jurnal dan media massa, novel dan puluhan cerpen dipublikasikan, seperti *Antalogi Puisi "Parkit"*, Yogyakarta: Adiwacana, 2011 (novel); *Cinta Yang Terpaut*, Yogyakarta: Kata Hati, 2011 (novel); *Biarkan Parkit itu Pergi*, Surakarta: DEO, 2014 (novel); *Ibu*, Surakarta: DEO, 2014 (Antologi Cerpen); *Etika Pendidikan: Keluarga, Sekolah dan Masyarakat*, Co-Author, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016; *Belajar Bahasa Indonesia dengan Praktis*, Palembang: NoerFikri Press, 2017; *Pembelajaran Menulis di Madrasah Aliyah*, Palembang: Rafah Press, 2020; dan Editor beberapa buku. Penulis juga pernah memperoleh penghargaan sebagai Guru Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatra Selatan (2006).